



BUKU 1
LAPORAN AKHIR



MASTER PLAN
PENGEMBANGAN PETERNAKAN
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 2006-2010



Konsultan :



LPSDM-BJU Building Komplek Bogor Baru Blok C-III No.31
Tegal Lega Bogor 16153 INDONESIA
Telp : +62 251 315168, 345861, Fax : +62 251 315168
E-mail : bermuda_bju@telkom.net

KATA PENGANTAR

Pembangunan agribisnis peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan produk ternak untuk Nanggroe Aceh Darussalam, memanfaatkan kesempatan ekspor ke negara tetangga dan membuka kesempatan usaha baru di Nanggroe Aceh Darussalam. Dari ternak yang ada, yang potensial untuk dikembangkan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah sapi potong, kerbau, kambing-domba untuk ternak ruminansia dan ayam kampung, itik serta ayam ras pada kelompok ternak non ruminansia. Pengembangan berbagai ternak tersebut harus berlangsung efisien dan memberikan nilai tambah baik bagi peternak maupun dunia usaha yang bergerak di hulu dan hilir. Untuk itu para peternak dan dunia usaha harus dapat melakukan kegiatannya masing-masing secara efisien serta melakukan sinergisme hingga mengarah pada terbentuknya sistem agribisnis peternakan yang utuh.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bagian akhir dari tahap-tahap kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja antara satuan Kerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh Nias dengan Konsultan Pelaksana yaitu PT. Bermuda Jasa Utama, tentang pelaksanaan pekerjaan "Master Plan Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010".

Laporan Akhir ini memuat seluruh informasi yang berkaitan dengan kerangka pelaksanaan dan hasil pekerjaan "Master Plan Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010", yang antara lain meliputi; maksud dan tujuan serta keluaran pelaksanaan kegiatan, kerangka pemikiran konsultan terhadap materi dan pelaksanaan Master Plan Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010, beserta metodologi yang diterapkan, dan uraian mengenai hasil survey yang telah dilaksanakan.

Master Plan pengembangan peternakan yang disusun didasarkan pada pertimbangan pewilayahan komoditas peternakan (wilayah basis) dan kemampuan daya tampung penambahan populasinya. Selain itu, master plan yang disusun juga dipertimbangkan pada kekuatan-kelemahan-peluang dan ancaman, sehingga diperoleh strategi dan rancangan program serta model implementasinya. Berbagai program agribisnis peternakan yang akan diuraikan merupakan upaya yang diarahkan untuk berkembangnya usaha peternakan dan terbentuknya sistem agribisnis peternakan.

Laporan Akhir Master Plan Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010, disusun dalam 2 (dua) buku terpisah yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Buku I memuat informasi pokok tentang pelaksanaan kegiatan penyusunan Master Plan, hasil survey dan pembahasannya serta uraian dan arahan pokok dari substansi master plan tersebut. Sedangkan Buku II memuat rangkuman atau ringkasan pokok Master Plan Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010.

Laporan Akhir ini merupakan hasil Penyempurnaan yang didasarkan pada masukan-masukan dan saran-saran serta keharusan dari pihak pengguna jasa konsultasi pada agenda pemaparan dan diskusi Laporan Antara. Semoga Laporan Akhir ini dapat diterima dan digunakan.

Bogor, Mei 2006

PT. Bermuda Jasa Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Tujuan	1-3
1.3. Manfaat	1-3
1.4. Keluaran	1-3
1.5. Sistematika Penulisan	1-3
 BAB 2 KONDISI UMUM LOKASI KAJIAN	 2-1
2.1. Gambaran Umum Wilayah NAD.....	2-1
2.2. Kondisi Perekonomian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	2-5
2.3. Profil Peternakan Propinsi NAD.....	2-7
2.4. Dampak Tsunami Terhadap Sub Sektor Peternakan.....	2-12
 BAB 3 METODOLOGI.....	 3-1
3.1. Kerangka Pemikiran.....	3-1
3.2. Pendekatan dan Langkah-Langkah Penyusunan Master Plan.....	3-3
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	3-5
3.4. Analisis Data.....	3-7
 BAB 4 HASIL SURVEY DAN PEMBAHASAN.....	 4-1
4.1. Analisis KPPT dan LQ (Pewilayahan Komoditi Peternakan).....	4-1
4.2. Analisis SWOT (Strategi Dan Kebijakan Pengembangan Peternakan)	4-9
 BAB 5 RUMUSAN POKOK MASTER PLAN	 5-1
5.1. Visi, Misi Dan Strategy.....	5-1
5.2. Rancangan Pokok Program.....	5-5
5.3. Model Implementasi Program.....	5-14
5.4. Tahapan Operasional Master Plan.....	5-36
 BAB 6 PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA.....	 6-1
6.1. Pengukuran Kinerja Kebijakan	6-1
6.2. Indikator dan Standar Kinerja.....	6-2
6.3. Evaluasi Kinerja	6-3
 BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	 7-1
7.1. Kesimpulan.....	7-1
7.2. Rekomendasi.....	7-5
 BAB 8 PUSTAKA	 8-1
 LAMPIRAN	 L-1

DAFTAR TABEL

BAB 2

Tabel 2.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Menurut Kabupaten / Kota Tahun 1997 - 1999 (%).....	2-6
Tabel 2.2.	Pendapatan Regional Per Kapita Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Menurut Kabupaten / Kota Tahun 1997 - 1999 (Ribuan Rupiah).....	2-7
Tabel 2.3.	Perkembangan Populasi Ternak Ruminansia Tahun 2003 (Ekor).....	2-9
Tabel 2.4.	Perkembangan Populasi Ternak Non-Ruminansia Tahun 2003 (Ekor).....	2-10
Tabel 2.5.	Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak di Propinsi NAD Tahun 2005 (Kg).....	2-11
Tabel 2.6.	Konsumsi Komoditas Peternakan di Propinsi NAD Tahun 2003 (Kg).....	2-12
Tabel 2.7.	Jumlah Kabupaten/Kota yang terkena dampak tsunami.....	2-13
Tabel 2.8.	Aparatur/Pegawai Dinas peternakan yang terkena musibah Tsunami tahun 2004.....	2-13
Tabel 2.9.	Sarana/Fasilitas Aparatur/Pegawai Dinas peternakan yang terkena musibah Tsunami tahun 2004.....	2-14
Tabel 2.10.	Prasasarana dan sarana kantor Dinas Pertenakan Provinsi NAD yang rusak/ hancur	2-14
Tabel 2.11.	Asset Petani Peternak yang mati akibat Tsunami tahun 2004	2-15
Tabel 2.12.	Fasilitas/Infrastruktur peternakan yang rusak akibat tsunami.....	2-15

BAB 3

Tabel 3.1.	Jumlah Masing-Masing Stakeholders Sebagai Responden	3-7
Tabel 3.2.	Angka Konversi Luas Lahan Penghasil Hijauan.....	3-7
Tabel 3.3.	Angka Konversi Jerami Yang Tersedia Untuk Ternak.....	3-7
Tabel 3.4.	Matriks SWOT	3-9

BAB 4

Tabel 4.1.	Kapasitas Penambahan populasi Ternak Ruminansia per Kabupaten (ST).....	4-2
Tabel 4.2.	Wilayah Basis Komoditas Ternak Ruminansia.....	4-3
Tabel 4.3.	Wilayah Basis Komoditas Ternak Non Ruminansia /Unggas.....	4-3
Tabel 4.4.	Nilai KPPTTR Positif dan Wilayah Basis.....	4-4
Tabel 4.5.	Nilai KPPTTR Negatif pada Wilayah Basis.....	4-4
Tabel 4.6.	Nilai KPPTTR Positif pada Wilayah Non-Basis.....	4-4
Tabel 4.7.	Nilai KPPTTR Negatif pada Wilayah Non-Basis.....	4-4

BAB 5

Tabel 5.1.	Kebijakan, Strategy dan Master Plan Swasembada Bibit.....	5-3
Tabel 5.2.	Kebijakan, Strategy dan Master Plan Swasebada Pakan.....	5-3
Tabel 5.3.	Kebijakan, Strategy dan Master Plan Optimalisasi Pelayanan Publik.....	5-3
Tabel 5.4.	Kebijakan, Strategy dan Master Plan Pengembangan Ternak sebagai Cabang Usaha atau Usaha Pokok.....	5-4
Tabel 5.5.	Kebijakan, Strategy dan Master Plan Pengelolaan Plasma Nutfah Berkelanjutan.....	5-4
Tabel 5.6.	Kebijakan, Strategy dan Master Plan Profesionalisme Kelembagaan.....	5-4
Tabel 5.7.	Kebijakan, Strategy dan Master Plan Iklim Investasi Kondusif.....	5-5
Tabel 5.7.	Kebijakan, Strategy dan Master Plan Standarisasi Mutu Terpadu.....	5-5
Tabel 5.9.	Matriks Program Subsistem Agribisnis Hulu.....	5-10
Tabel 5.10.	Matriks Program Subsistem Agribisnis Budidaya.....	5-11
Tabel 5.11.	Matriks Program Subsistem Agribisnis Hilir.....	5-12
Tabel 5.12.	Matriks Program Subsistem Agribisnis Penunjang.....	5-13
Tabel 5.13.	Tahapan Operasional Master Plan.....	5-37

BAB 6

Tabel 6.1.	Strategi Pembangunan dan Indikator Kinerja.....	6-1
------------	---	-----

DAFTAR GAMBAR

BAB 2

Gambar 2.2.	Peta Administrasi dan Pembagian Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	2-2
-------------	--	-----

BAB 3

Gambar 3.1.	Alur Pemikiran Penyusunan Master Plan Pembangunan Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	3-3
Gambar 3.2.	Bagan alir penyusunan masterplan peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	3-4

BAB 5

Gambar 5.1.	Model Dasar Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	5-14
Gambar 5.2.	Model Pengembangan Kawasan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	5-15
Gambar 5.3.	Model Integrasi Pengembangan Kawasan Agribisnis Peternakan.....	5-17
Gambar 5.4.	Daya Dukung Lingkungan dan Keterkaitan antar Aspek Pengembangan Usaha Peternakan.....	5-18
Gambar 5.5.	Tahapan Implementasi Model Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan.....	5-24
Gambar 5.6.	Mekanisme Pengembangan Ternak.....	5-25
Gambar 5.7.	Struktur Kelembagaan Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan.....	5-26
Gambar 5.8.	Filosofi Dasar Kemitraan Usaha Peternakan.....	5-29
Gambar 5.9.	Pola Kerjasama Langsung antara petani peternak dalam koperasi yang tergabung dengan Perusahaan Inti.....	5-31
Gambar 5.10.	Pola Kerjasama Langsung antara petani peternak dalam koperasi yang tergabung dengan Perusahaan Inti.....	5-32
Gambar 5.11.	Mekanisme Pola Kemitraan yang ideal dengan keterlibatan antara komponen petani, perbankan, perusahaan mitra yang jelas.....	5-33
Gambar 5.11.	Rumusan Model Kemitraan Usaha Ternak Unggas.....	5-35
Gambar 5.12.	Rumusan Model Kemitraan Usaha Ternak Ruminansia.....	5-36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Rumusan Master Plan Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010.....	L-1
Lampiran 2.	Pewilayahan Kapasitas Tampung Penambahan Populasi Ternak Ruminansia.....	L-2
Lampiran 3.	Pewilayahan Wilayah Basis dan Kapasitas Tampung Penambahan Populasi Ternak Ruminansia.....	L-3
Lampiran 3.	Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Sapi Perah.....	L-4
Lampiran 4.	Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Sapi Potong.....	L-5
Lampiran 5.	Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Kerbau.....	L-6
Lampiran 6.	Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Kambing.....	L-7
Lampiran 7.	Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Domba.....	L-8
Lampiran 8.	Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Ayam Buras.....	L-9
Lampiran 9.	Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Ayam Pedaging.....	L-10
Lampiran 10.	Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Ayam Ras Petelur.....	L-11
Lampiran 11.	Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Itik.....	L-12
Lampiran 12.	Matriks Analisis SWOT.....	L-13

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah membawa perubahan secara sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan semakin menempatkan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu propinsi dengan kondisi otonomi khusus. Namun demikian, musibah bencana alam tsunami yang terjadi setahun yang lalu menyisakan beberapa pekerjaan rumah terkait dengan pembangunan di segala bidang. Seperti diketahui bahwa Terdapat 9 kabupaten/kota yang terkena tsunami di NAD. Daerah yang mengalami kerusakan lahan pertanian cukup berat terjadi di Kab. Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, dan Aceh Jaya. Ribuan hektar tercemar lumpur yang terbawa gelombang tsunami. Kondisi di lapangan pasca tsunami terlihat pada kondisi rumput yang mati total. Masyarakat khawatir sawah mereka tidak dapat ditanami untuk waktu yang lama karena kadar garam yang terlalu tinggi. Selain areal sawah, ratusan ribu sumur penduduk pun ikut tercemar. Kondisi ini menyebabkan pembangunan sektor pertanian terhenti dan memerlukan penanganan serius untuk perbaikan.

Gempa bumi, masuknya air laut (salinitas) dan tebalnya endapan lumpur (sedimen) membuat kerusakan lahan pertanian yang serius. Secara umum kerusakan di pantai barat lebih berat dibanding pantai timur. Di pantai barat, tinggi timbunan lumpur yang menutup lahan umumnya di atas 20 cm, dibanding di pantai timur yang umumnya di bawah 20 cm. Lumpur tebal (>10 cm) umumnya dijumpai pada jarak 3 – 4 km dari pantai, makin dekat ke pantai ketebalan lumpur makin tipis. Hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh Tim Puslitbangtanak, Badan Litbang Pertanian, terhadap contoh lumpur dan tanah yang diambil di beberapa lokasi menunjukkan tingginya daya hantar listrik (DHL), >10 dS/m untuk lumpur dan 2 – 12 dS/m untuk tanah permukaan. Umumnya tanaman semusim seperti jagung, kacang tanah, dan padi mulai terganggu pertumbuhannya pada DHL 4 dS/m. Kandungan garam pada contoh lumpur dan tanah juga cukup tinggi yaitu 2.000-26.900 ppm untuk lumpur dan 140 – 6.000 ppm untuk tanah. Tingkat kerusakan lahan yang terjadi a.l. lahan sawah (termasuk subsektor hortikultura) seluas 20.101 ha, ladang tegalan (tanaman palawija dan horti) 31.345 ha, dan perkebunan diperkirakan 56.500 – 102.461 ha (data FAO – Deptan) yang terdiri atas lahan perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh, pala, pinang, coklat, nilam, dan jahe. Adapun jumlah ternak yang mati ataupun hilang adalah 78.450 ekor sapi, 62.561 ekor kerbau, domba 16.133 ekor, kambing 73.100 ekor, dan unggas 1.624.431 ekor.

Infrastruktur usahatani, seperti jaringan irigasi, bangunan irigasi, jaringan saluran tingkat usahatani, jalan usahatani, pematang, terasering (lahan kering) serta bangunan petakan lahan usahatani pun tak luput dari kerusakan. Disamping itu juga berbagai peralatan, seperti hand tractor, pompa air, traktor besar, alat pengolah nilam, karet, minyak kelapa, dan pengolah dendeng ikut rusak.

FAO memperkirakan kehilangan produksi bidang pertanian termasuk didalamnya peternakan, mencapai US\$ 78,8 juta, dan prakiraan kerusakan infrastruktur pertanian sebesar US\$ 33,4 juta. Upaya rehabilitasi di wilayah pantai barat diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima tahun. Sedangkan pantai timur yang kerusakannya relatif lebih ringan dapat direhabilitasi dalam kurun waktu satu hingga dua tahun.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi dampak dan memberikan dukungan terhadap korban dan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam secara umum, maka perlu diberdayakan perekonomiannya. Hal ini perlu dilakukan perubahan-perubahan mendasar dalam strategi dan kebijakan operasional lainnya terkait pembangunan pertanian termasuk peternakan. Dalam jangka pendek perubahan yang terjadi tersebut sangat positif namun demikian untuk menjaga stabilitas jangka panjang diperlukan antisipasi dan kehati-hatian mengingat karakteristik spesifik perekonomian wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak terlepas dari kerawanan tertentu.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah di satu sisi dan tantangan global di sisi yang lain, maka untuk menjaga stabilisasi sosial-ekonomi wilayah Nanggroe Aceh Darussalam secara utuh dalam jangka panjang diperlukan strategi menciptakan keseimbangan dan keserentakan pertumbuhan antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi, kendala, dan peluang masing-masing. Sektor-sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi dalam stabilisasi dan keberlanjutan pertumbuhan wilayah harus dikelola secara sungguh-sungguh dan memadai.

Untuk menunjang pertumbuhan wilayah, sektor peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dalam mendukung stabilitas pertumbuhan wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, karena:

Pertama. Sumberdaya peternakan merupakan sumberdaya yang dapat diperbarui kembali (*renewable*) sehingga dapat dijamin dari sisi suistainabilitasnya.

Kedua. Ternak dalam berbagai pengalaman telah terbukti sangat berperan sebagai instrumen dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat kecil serta mengurangi kesenjangan pendapatan.

Ketiga. Bisnis komoditas ternak cukup prospektif dan menjanjikan. Hal ini dapat mendorong investasi baik bagi pengusaha besar maupun peternak rakyat. Pengembangan usaha peternakan daerah akan mengurangi ketergantungan dari wilayah lain termasuk impor.

Keempat. Potensi lahan yang cukup tinggi memungkinkan pengembangan ternak di Nanggroe Aceh Darussalam secara besar-besaran.

Kelima. Elastisitas permintaan komoditas ternak terhadap pendapatan umumnya tinggi sehingga permintaan komoditas ternak akan sangat sensitif di masa yang akan datang dengan semakin tingginya pendapatan masyarakat.

Menyadari adanya potensi dan tantangan yang harus di hadapi, maka Dinas Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah menetapkan visi pembangunannya, untuk menjadikan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan dalam lingkup masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin di Asia Tenggara Tahun 2020. Peran strategis bidang peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam yang diharapkan dalam pembangunan wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi peran dalam penyediaan kebutuhan produk hasil ternak sehingga menjamin keseimbangan supply-demand, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peran multi dimensi tersebut akan dapat dicapai melalui berbagai pendekatan secara komprehensif, meliputi pendekatan komoditas atau sumberdaya (*resourcesbase*), pendekatan wilayah, dan pendekatan sistem perencanaan.

Pembangunan wilayah peternakan dimaksudkan untuk dua hal pokok yakni : (i) memperbesar kapasitas ekonomi daerah dalam meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan masyarakat yang bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui, dan (ii) meningkatkan *share* yang dinikmati masyarakat dalam proses pembangunan peternakan di daerah bersangkutan. Sehingga pada gilirannya nanti akan menunjang pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pendekatan komoditas diarahkan pada identifikasi ternak unggulan dengan kriteria: (i) unggul dalam menjamin keamanan pasokan permintaan dalam negeri; (ii) unggul dari sisi kesesuaian agroklimat; (iii) unggul dalam ketersediaan bahan baku dan teknologi; (iv) unggul dari sisi peluang pasar; (v) unggul dari sisi nilai tambah; (vi) unggul dari sisi dukungan sosial-budaya masyarakat; dan (vii) unggul dari sisi daya saing. Dalam pendekatan wilayah, rencana strategis akan diarahkan pada penentuan wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan masing-masing jenis ternak unggulan. Wilayah prioritas pengembangan ditentukan dengan mengacu pada kebijakan pewilayahan atau kajian kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, kesesuaian iklim, ketersediaan lahan, dukungan infrastruktur dan fasilitas.

Letak geografis yang strategis yang dimiliki Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan menjadikan keunggulan komparatif daerah ini, khususnya untuk sektor produksi dan pemasaran hasil. Namun demikian pengalaman membuktikan bahwa keunggulan komparatif berupa peluang dan kesempatan yang dimiliki Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak akan dapat memberikan manfaat yang maksimum untuk pembangunan daerah jika tidak dimanfaatkan baik dan bijak

sehingga menjadi keunggulan kompetitif (daya saing) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Untuk pengembangan peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam secara lebih efektif diperlukan perumusan secara yang lebih tegas dalam hal visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strateginya. Oleh karena peran dan partisipasi setiap daerah masih merupakan hal sangat perlu diperhatikan dalam awal era otonomi daerah, maka strategi pengembangan peternakan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek kebersamaan, keadilan, dan transparansi antar wilayah kabupaten/kota.

1.2. Tujuan

Secara umum tujuan kegiatan adalah menyusun masterplan pembangunan peternakan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Mengkaji kecenderungan pewilayahan komoditi ternak (basis Komoditas) dan kemampuan daya tampung penambahan populasinya;
- (2) Merumuskan visi, misi, strategi dan kebijakan serta faktor-faktor keberhasilan pembangunan peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (3) Menyusun rumusan program-program pengembangan peternakan dan model-model implementasinya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

1.3. Manfaat

Masterplan pembangunan peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dirangkum dalam suatu dokumen yang dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan peternakan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk jangka panjang.
- 2) Sebagai bahan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam menciptakan program dan proyek-proyek prioritas terkait dengan Pembangunan Peternakan.
- 3) Membantu proses pengambil keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pembangunan Peternakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 4) Memberi masukan untuk penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peternakan sesuai dengan visi misi pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

1.4. Keluaran

Keluaran atau output yang akan dihasilkan dari penyusunan masterplan pembangunan peternakan adalah suatu laporan Masterplan Pembangunan Peternakan yang memuat kecenderungan pewilayahan komoditi dan kapasitas daya tampung penambahan populasinya; visi, misi, strategi dan kebijakan serta program-program dan model implementasinya dalam kerangka pengembangan peternakan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Masterplan yang disusun ini merupakan arahan dalam penyusunan rencana-rencana lebih detail baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Akhir Master Plan Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010, disusun dalam 2 (dua) buku terpisah yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Buku I memuat informasi pokok tentang pelaksanaan kegiatan penyusunan Master Plan, hasil suvey dan pembahasannya serta uraian dan arahan pokok dari substansi master plan tersebut. Sedangkan Buku II memuat rangkuman atau ringkasan pokok Master Plan Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010.

Secara terinci, sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut :

BUKU I

- Bab I** PENDAHULUAN, memuat dan menyajikan informasi dan rancangan awal kegiatan penyusunan master plan, dengan menguraikan latar belakang, tujuan, manfaat dan keluaran.
- Bab II** KONDISI UMUM LOKASI KAJIAN, memuat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan kondisi umum wilayah kajian, antara lain menguraikan gambaran umum wilayah NAD, Kondisi umum perekonomian propinsi NAD, profil umum peternakan propinsi NAD dan dampak tsunami terhadap pembangunan peternakan di propinsi NAD.
- Bab III** METODOLOGI, memuat dan menyajikan informasi yang terkait dengan metodologi pelaksanaan pengkajian dan penyusunan Master Plan Pengembangan Peternakan Propinsi NAD, antara lain menguraikan kerangka pemikiran, pendekatan dan langkah-langkah penyusunan master plan, metode pengumpulan dan serta analisis data.
- Bab IV** HASIL SURVEY DAN PEMBAHASAN, memuat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan temuan-temuan lapangan hasil pelaksanaan survey dan analisis data. Hal ini terutama sekali berkaitan dengan hal-hal pokok yang menjadi substansi survey, yaitu pewilayahan komoditi peternakan dan kapasitasampungnya, hasil analisis kekuatan-kelemahan-pesang-ancaman yang dituangkan dalam strategy dan kebijakan pengembangan peternakan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Bab V** RUMUSAN POKOK MASTER PLAN, memuat dan menyajikan informasi utama hasil pengkajian dan perumusan hasil kajian. Pada bagian ini diuraikan Visi, Misi, Strategi, Rancangan Pokok Program, Model Implementasi Program dan Koefisien teknis dari model-model implementasi tersebut, serta tahapan operasionalisasinya.
- Bab VI** PENGUKURAN KINERJA, memuat dan menyajikan informasi tentang teknik dan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja sebagai fungsi kontrol terhadap keberhasilan implementasi Master Plan.
- Bab VII** KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, memuat dan menyajikan informasi dan hasil interpretasi dan kesimpulan pokok tim penyusun terhadap Rumusan Master Plan Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010 serta beberapa hal yang direkomendasikan.
- Bab VIII** PUSTAKA, memuat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber pustaka yang digunakan dan dijadikan referensi pokok terkait dengan informasi dan data yang digunakan dalam penyusunan laporan terkait.

BUKU II

Buku II merupakan ringkasan dari buku I yang disajikan dengan tata urutan sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Pewilayahan Komoditi Peternakan
- III. Faktor Penentu Keberhasilan Pengembangan Peternakan
- IV. Visi, Misi, Strategi Dan Kebijakan
- V. Rancangan Program Pengembangan Peternakan
- VI. Model Implementasi Program
- VII. Tahapan Operasional Master Plan
- VIII. Penutup

BAB 2. KONDISI UMUM LOKASI KAJIAN

2.1. Kondisi Umum Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam

Aceh atau secara resmi, Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa yang terletak di Pulau Sumatra. Aceh terletak di barat laut Sumatra dengan kawasan seluas 57,365.57 km per segi atau merangkumi 12.26% pulau Sumatra. Aceh memiliki 119 buah pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah danau. Aceh dikelilingi Selat Melaka di sebelah utara, Provinsi Sumatera Utara di timur dan Lautan Hindi di selatan dan barat. Ibukota Aceh adalah Banda Aceh yang dulunya dikenali sebagai 'Kutaradja'.

Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat provinsi yang terletak di Pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan. Ibukota dan bandar terbesar di Aceh ialah Banda Aceh. Bandar besar lain ialah seperti Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa.

Nama Daerah	: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Status	: Otonomi Khusus
Letak	: 2 ° - 6° Lintang Utara
Luas Daerah	: 57.365,57 Km ²
Tinggi Rata-rata	: 125 M diatas permukaan Laut

Batas-batas Daerah

Sebelah Utara	: Selat Malaka
Sebelah Selatan	: Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Timur	: Selat Malaka
Sebelah Barat	: Samudra Indonesia
Daerah Melingkupi	: 119 Pulau, 35 Gunung, 73 Sungai
Wlayah adminisratif	: 21 Kabupaten/Kota, 228 Kecamatan; 642 Mukim, 111 Kelurahan dan 5947 Desa

Aceh merupakan kawasan yang paling teruk dilanda gempa bumi 26 Disember 2004. Beberapa tempat di persisiran pantai dilaporkan musnah sama sekali. Malah Banda Aceh turut hampir musnah dilanda tsunami. Penduduk Aceh merupakan keturunan berbagai suku kaum dan bangsa. Bentuk fizikal mereka menunjukkan ciri-ciri orang Nusantara, Cina, Eropah dan India. Leluhur orang Aceh dikatakan telah datang dari Semenanjung Malaysia, Cham, Cochin China dan Kemboja. Kumpulan-kumpulan etnik yang terdapat di Aceh adalah orang Aceh yang terdapat di merata Aceh, orang Gayo di Aceh Tengah, sebahagian Aceh Timur, Bener Meriah dan Gayo Lues, orang Alas di Aceh Tenggara, orang Tamiang di Aceh Tamiang, Aneuk Jamee di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, orang Kluet di Aceh Selatan dan orang Simeulue di Pulau Simeulue. Aceh juga mempunyai bilangan keturunan Arab yang tinggi. Sebuah suku bangsa berketurunan Eropah juga terdapat di Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Mereka beragama Islam dan dipercayai adalah dari keturunan askar-askar Portugis yang telah memeluk agama Islam. Pada amnya, mereka mengamalkan budaya Aceh dan hanya boleh bertutur dalam bahasa Aceh dan bahasa Indonesia.

Sejak tahun 1999, Nanggroe Aceh Darussalam telah mengalami beberapa pemekaran wilayah hingga sekarang mencapai 4 pemerintahan kota dan 21 kabupaten sebagai berikut:



Gambar 2.2. Peta Administrasi dan Pembagian Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias mengeluarkan laporan tahunan kemajuan usaha pemulihan pasca tsunami di Aceh. Laporan ini dipersiapkan bersama World Bank, United Nations (UN) Development Bank, Asian Development Bank dan International Red Cross/Red Crescent.

Melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh 120 LSM Internasional, 430 LSM lokal, belasan lembaga donor bilateral dan Multilateral dan badan pemerintahan pusat dan daerah, serta masyarakat Aceh dan Nias, pemulihan pasca tsunami di Aceh telah mencapai kemajuan. Berikut laporan lengkapnya :

1. Dampak Tsunami di Aceh

- 130.000 orang tewas
- 37.000 orang hilang
- 192.000 orang menjadi pengungsi
- 120.000 rumah rusak atau hancur
- 600 kilometer jalan utama rusak atau hancur
- 119 jembatan rusak atau musnah
- 693 fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Pos Imunisasi, dan klinik) rusak atau hancur

- 2.224 sekolah rusak atau hancur
- 64.000 Ha sawah rusak
- 15.000 Ha tambak garam rusak
- 20.000 Ha tambak rusak
- 4.717 perahu hilang dan hancur

2. Dampak Gempa bumi di Nias

- Lebih dari 900 orang tewas
- 70.000 orang menjadi pengungsi
- 90% populasi kehilangan mata pencaharian
- Lebih dari 20.000 rumah rusak berat
- 400 jembatan tak berfungsi
- 90% sekolah-sekolah rusak total
- Dua RS yang ada di Nias rusak

3. Populasi Aceh dan Nias (Pasca-Tsunami) Aceh: 4.031.589 orang

4. Keuangan

- Perkiraan kerugian: US\$ 4,5 miliar
- Perkiraan biaya perbaikan kerusakan: UD\$ 5,8 miliar

5. Tempat Tinggal

- Saat terjadi bencana, jumlah perkiraan awal yang kehilangan tempat tinggal adalah sekitar 500.000 orang. Terdapat sekitar 192.000 orang menganggap dirinya berstatus pengungsi, lainnya tidak beranggapan demikian.
- Sekitar 65.000 orang masih tinggal di tenda-tenda, 50.000 tinggal dibarak. Lebih dari 70.000 orang masih menumpang di rumah family.
- Perkiraan kebutuhan rumah di Aceh dan Nias sejumlah 120.000 unit. Sebanyak 75.000 rumah harus direhabilitasi.
- Lembaga donor berkomitmen membangun 103.000 unit rumah (termasuk 20.000 unit tempat tinggal sementara)
- Sebanyak 16.200 rumah telah selesai dibangun
- Lebih dari 16.000 rumah sedang dikerjakan
- Keuangan
- Sejumlah US\$ 4,4 milyar telah dialokasikan untuk beberapa proyek
- Jumlah bantuan yang dijanjikan mencapai US\$ 7,5 milyar
- US\$ 2 milyar dari donor multilateral, US\$ 1,6 milyar dari donor bilateral, US\$ 1,8 milyar dari LSM, US\$ 2,1 milyar dari pemerintah Indonesia.

6. Infrastruktur

- Sepanjang 235 kilometer jalan utama telah diperbaiki
- 35 jembatan telah diperbaiki.
- Pelabuhan-pelabuhan laut sedang diperbaiki, di Aceh Barat, Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Bireuen, Calang, Sinabang (Simeulu) dan Gunung Sitoli (Nias).

7. Sektor Kesehatan di Aceh dan Nias

- 9 RS telah masuk rencana pembangunan dan 6 RS diantaranya sudah selesai

- 30 Puskesmas telah masuk rencana pembangunan dan 6 Puskesmas diantaranya sudah selesai
- 80 klinik kesehatan telah masuk rencana pembangunan dan 30 klinik diantaranya sudah selesai
- 166 klinik bersalin telah masuk rencana pembangunan dan 75 diantaranya sudah selesai
- Jumlah totalnya, 285 fasilitas pelayanan kesehatan telah masuk rencana dibangun dan 132 diantaranya sudah selesai.

8. Proyek-proyek Infrastruktur Utama

- Pembangunan pelabuhan Ulee-Lhee mulai 28 Juli 2005 yang didanai oleh pemerintah Australia.
- Pembangunan Banda Aceh – Meulaboh (247 km) mulai dibangun 25 Agustus 2005 dan akan selesai pada tahun 2007. Proyek ini dikelola oleh USAID, JICA dan BRR.
- Pelabuhan Malahayati, didanai oleh pemerintah Belanda, kini sedang dalam proses tender memilih kontraktor. BRR menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 22 Agustus 2005.
- Pembangunan pelabuhan Meulaboh, jalan masuk utama untuk pasokan penting bagi penduduk Meulaboh, didanai oleh pemerintah Singapura. Proyek ini akan selesai pada bulan Februari 2006.
- Bekerjasama dengan BRR, Pemerintah RI mengawasi pembangunan pelabuhan Sabang untuk menjadi lokasi distribusi utama bagi pasokan logistik, perdagangan, dan transportasi dari Aceh ke berbagai belahan dunia lainnya.

9. Sektor Pendidikan. BRR sedang mengembangkan standar bangunan sekolah yang aman bagi murid-murid, termasuk yang tahan gempa.

- 55 bangunan TK telah masuk rencana pembangunan, 12 diantaranya sudah selesai.
- 221 bangunan SD telah masuk rencana pembangunan dan 74 diantaranya sudah selesai.
- 56 bangunan SMP telah masuk rencana pembangunan dan 21 diantaranya sudah selesai.
- 34 bangunan SMU telah masuk rencana pembangunan, 34 diantaranya sudah selesai.
- Totalnya, 366 bangunan sekolah telah masuk rencana pembangunan dan 119 sudah selesai.

10. Membangun kembali mata pencaharian di Aceh. Program pengembangan mata pencaharian turut mendukung jalannya rekonstruksi Aceh dan Nias, melalui pengembangan kapasitas perekonomian lokal yang berkelanjutan. Bekerjasama dengan berbagai LSM asing dan lokal serta badan-badan dunia dan donor, BRR berusaha mencapai perbaikan semaksimal mungkin dengan memperkuat mekanisme koordinasi menjadi lebih efisien dan lebih terbuka dalam prosesnya. Hasilnya:

- 30.926 hektar sawah/pertanian kembali berjalan
- 4.951 bantuan keuangan mikro telah disalurkan
- 7.000 pekerja telah mendapatkan pelatihan keahlian di tahun 2005
- Target sebanyak 24.000 pekerja turut serta dalam program Cash for Work (kerja harian mendapat upah) di rehabilitasi lahan-lahan pertanian meliputi 12 kabupaten
- Cash for Work untuk 600 hektar rehabilitasi tambak telah direncanakan hingga akhir tahun 2005

11. Membangun kembali Industri Perikanan di Aceh. Banyak infrastruktur industri perikanan di Aceh dan Nias yang menjadi unsur utama perekonomian lokal telah rusak oleh tsunami.

- 3.122 perahu telah dibuat
- 129 pasar ikan telah dibangun lagi dari 156 yang direncanakan.

- 5.000 Ha tambak telah diperbaiki

12. Fasilitas Keagamaan yang menjadi prioritas BRR

- 121 musholla telah masuk rencana pembangunan dan 33 diantaranya telah selesai
- 141 mesjid telah masuk perencanaan pembangunan dan 43 diantaranya telah selesai
- 319 madrasah telah masuk rencana pembangunan dan 65 diantaranya telah selesai
- Totalnya, 581 fasilitas keagamaan telah masuk rencana pembangunan dan 141 diantaranya telah selesai.

2.2. Kondisi Perekonomian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dapat diukur dengan meningkatkan pendapatan per-kapita dan pemenuhan kebutuhan dasar (*kebutuhan primer*) penduduknya seperti kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan telah terpenuhinya kebutuhan dasar secara alami masyarakat akan mencari lagi kebutuhan sekunder yaitu pangan, kekayaan dan kepuasan pribadi. Perkembangan ekonomi masyarakat berkembang dari ekonomi yang bertumpu pada industri primer (*ekstraktif*), berkembang ke industri sekunder (industri pengolahan) dan kemudian ke industri tersier (*jasa*). Semakin maju suatu perekonomian masyarakat akan ditandai oleh makin besarnya share sektor industri dan jasa dalam ekonomi.

Di bidang pertanian, kemajuan ditandai oleh penggunaan alat-alat mekanisasi, hasil industri kimia seperti pupuk dan obat-obatan serta bioteknologi seperti bibit hibrida. Semakin maju suatu perekonomian akan ditandai oleh semakin kecilnya jumlah penduduk yang berada di sektor pertanian dan makin besarnya industri pengolahan dan jasa-jasa penunjang pertanian. Dengan demikian dalam pembangunan terjadi perubahan struktur ekonomi dari struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian menjadi struktur ekonomi dengan dominasi sektor industri dan jasa.

Dengan majunya sektor perekonomian, juga ditandai oleh berkembangnya kota-kota industri. Kota industri ini merupakan sumber permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pedesaan. Berdasarkan sifatnya, produk-produk pertanian yang tidak tahan lama seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta susu akan diproduksi di sekitar kota dan produk-produk yang dapat bertahan lama seperti karet, kelapa sawit, coklat dan lain-lain diproduksi di tempat yang lebih jauh dari kota. Namun demikian dengan makin berkembangnya transportasi, teknologi pengolahan dan teknologi penyimpanan maka produk-produk pertanian bisa diproduksi di lokasi-lokasi yang makin jauh dari konsumen. Dengan demikian maka persaingan produk pertanian bukan saja terjadi antar daerah dalam satu wilayah atau negara tetapi juga antar negara. Dalam persaingan antar daerah produsen makin meningkat dengan makin majunya perdagangan dunia dan high teknologi, dimana rektrisi (batasan) perdagangan makin kecil sehingga batas antar negara menjadi makin tipis. Ini yang disebut perdagangan global di era perdagangan bebas yang telah menggejala di seluruh dunia.

Dengan berbagi perspektif pembangunan seperti hal tersebut diatas, kita akan melihat pembangunan ekonomi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Propinsi ini pada konstelasi regional di kawasan Asia Tenggara:

- Berada pada poros regional yang menghubungkan wilayah Asia Tenggara dengan negara-negara lainnya.
- Sebagai daerah penyangga Kota Batam dan negara-negara jiran yang merupakan pasar potensial bagi berbagai produk agribisnis.
- Sebagai pintu kawasan perdagangan bebas dan daerah pengembangan produk peternakan yang potensial.

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Menurut Kabupaten / Kota Tahun 1997 - 1999 (%)

No	KABUPATEN / KOTA	1997	1998 *)	1999 **)
1.	Aceh Selatan	5,04	-4,49	1,65
2.	Aceh Singkil	5,69	-3,75	1,86
3.	Aceh Tenggara	4,05	3,67	2,08
4.	Aceh Timur			
	- Migas	-1,04	-9,46	-2,21
	- Non Migas	5,49	-8,48	-2,48
5.	Aceh Tengah	4,15	0,27	0,34
6.	Aceh Barat	5,61	-2,27	-0,32
7.	Simelue	-	-	-
8.	Aceh Besar	4,19	-2,48	-0,41
9.	Pidie	5,39	-5,37	-1,29
10.	Aceh Utara			
	- Migas	-2,83	-12,83	-7,61
	- Non Migas	6,89	-9,87	-4,80
11.	Bireun	3,14	-7,03	-0,58
12.	Banda Aceh	5,15	-5,57	0,96
13.	Sabang	5,44	-1,54	1,98
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam				
	(Migas)	0,16	-9,28	-4,19
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam				
	(Non Migas)	5,28	-5,78	-1,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Catatan: *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah belakang dari kota-kota negara industri baru di Asia, seperti Singapura, Malaysia, Taiwan dan lainnya. Akses transportasi bagi hasil produksi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan produksi dari luar yang dibutuhkan penduduk dilakukan melalui jalan darat, laut dan udara. Ekonomi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditandai oleh industri besar seperti industri minyak, pengolahan kayu, elektronika, industri setor perkebunan dan pertanian tanaman pangan.

Bila dilihat dari cukup tingginya kontribusi pertanian, yang masih didominasi oleh sub sektor perkebunan, sementara sub sektor peternakan masih memiliki potensi dan prospek yang sangat besar, hal ini menunjukkan bahwa sektor industri peternakan sangat potensial untuk dikembangkan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah yang berarti bagi penunjang pembangunan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Demikian juga kalau ditinjau dari sektor tenaga kerja yang bekerja di masing-masing sektor menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja di sub sektor perkebunan. Disektor pertanian sendiri, pendapatan daerah masih didominasi sub sektor perkebunan.

Tabel 2.2. Pendapatan Regional Per Kapita Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Menurut Kabupaten / Kota Tahun 1997 - 1999 (Ribuan Rupiah)

No	KABUPATEN / KOTA	1997	1998 *)	1999 **)
1.	Aceh Selatan	1.739,12	2.126,00	2.922,44
2.	Aceh Singkil	1.433,83	1.677,18	2.345,67
3.	Aceh Tenggara	1.696,94	2.071,73	2.285,78
4.	Aceh Timur			
	- Migas	2.542,11	3.084,80	3.692,58
	- Non Migas	2.079,48	2.483,03	3.020,53
5.	Aceh Tengah	2.532,69	3.075,82	3.784,57
6.	Aceh Barat	1.517,04	1.854,28	2.161,46
7.	Simelue	-	-	-
8.	Aceh Besar	2.068,91	2.664,19	3.283,57
9.	Pidie	1.572,08	2.049,60	2.765,13
10.	Aceh Utara			
	- Migas	15.023,31	24.486,00	24.024,06
	- Non Migas	3.007,11	3.309,46	4.031,00
11.	Bireun	2.165,00	2.768,38	3.433,35
12.	Banda Aceh	2.002,88	2.028,16	2.382,69
13.	Sabang	2.286,17	2.579,59	2.845,12
PDRB Per Kapita Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam				
	(Migas)	3.913,73	5.725,40	6.091,97
PDRB Per Kapita Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam				
	(Non Migas)	2.033,03	2.421,51	2.972,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Catatan: *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

2.3. Profil Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai saat ini masih relatif rendah tingkat kemampuan pasokan produksi ternak dibandingkan dengan pertumbuhan permintaan hasil ternak yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi salah satu pasar hasil ternak yang sangat terbuka bagi wilayah lain.

Pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani peternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat, serta pengembangan ekspor. Usaha peternakan merupakan andalan untuk menyediakan pangan bergizi berupa protein hewani. Pangan bergizi ini merupakan komoditas yang bisa menyehatkan dan mencerdaskan anak bangsa, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kebutuhan konsumsi penduduk akan protein hewani yang berasal dari daging, susu, dan telur terus meningkat dan tidak mampu sepenuhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Kesenjangan antara permintaan dan penawaran merupakan tantangan yang cukup besar sekaligus peluang yang cukup menggiurkan pada sub sector peternakan sehingga mampu memenuhi konsumsi dalam negeri.

Sebagian besar wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara topografinya bergunung-gunung, dan berbukit-bukit terutama kawasan Lembah Seulawah, Seulimun, Indrapuri, kondisi lahan yang kurang subur, curah hujan yang tidak merata dan sedikit, yang sebagian besar berupa padang rumput, dimana kawasan tersebut sangat cocok dititikberatkan pada usaha pertanian lahan kering dan pengembangan usaha peternakan.

Peranan subsektor peternakan dalam perekonomian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menempati posisi kedua terbesar setelah subsektor tanaman pangan dan hortikultura, peran

subsektor ini terhadap RAPBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2002 sebesar 9,80 persen dari 29,56 persen. Besarnya subsektor ini sangat didukung oleh komoditi ternak sapi dan kambing, dimana pada tahun 2002 jumlah populasi sapi sebanyak 108.869 ekor dan jumlah populasi kambing sebanyak 62.888 ekor.

Pengembangan usaha peternakan ini disamping dapat meningkatkan pendapatan petani itu sendiri juga dapat memperluas kesempatan kerja serta mampu menyediakan pemenuhan akan kebutuhan daging, telur dan susu bagi masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sangat berpeluang untuk diekspor.

Intensifikasi pemeliharaan ternak merupakan upaya untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal dan terus berkesinambungan sehingga jumlah populasi ternak dapat dipertahankan, ketersediaan akan kebutuhan daging sebagai protein hewani mencukupi serta cukupnya bibit ternak untuk terus dikembangkan.

Disamping itu sub sektor Peternakan ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani peternak, mendorong diversifikasi pangan, perbaikan mutu gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas untuk bersaing di pasaran ekspor. Perhatian khusus perlu diberikan pada pengembangan peternakan rakyat dengan meningkatkan kelompok tani ternak dan mengikuti sertakan pihak swasta, koperasi dan masyarakat. Sehingga saat ini baru tercatat kelompok tani peternakan yang ada sebanyak 10 kelompok dengan jumlah anggota 222 orang, tidak seluruh kecamatan memiliki kelompok ternak ini diantaranya kecamatan yang sudah membentuk kelompok ternak ini diantaranya Kecamatan Baitussalam, Ingin Jaya memiliki 2 kelompok dan Kecamatan Montasik, Sukamakmur memiliki 3 kelompok, dimana jumlah anggotanya sebanyak 222 orang.

Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 masih kita dapati padang penggembalaan yang belum diusahakan secara intensif, dimana jenis rumput yang berupa rumput alam yang tidak perlu pemeliharaan maupun perawatan. Luas padang penggembalaan sekitar 42.328 hektar atau sekitar 16,27 persen dari luas Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Padang penggembalaan ini sangat luas terdapat di Kecamatan Seulimeun yaitu mencapai 36,32 persen dari total luas penggembalaan yang ada kemudian disusul masing-masing Kecamatan Kuta Boro 7.250 hektar dan kecamatan Lembah Seulawah seluas 6329 hektar. Sedangkan kebun rumput yang diusahakan untuk penyediaan makanan ternak tahun 2002 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam hanya seluas 365 hektar dengan jenis rumput yang ditanam yaitu *rumpun gajah* dan *rumpun raja* yang tersebar di kecamatan yang memelihara ternak sapi secara intensif dan semi intensif

Jika kita lihat dari jenis pemeliharaan ternak yang ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2002 dapat dibagi menjadi 3 jenis pemeliharaan yaitu; Intensif, Semi Intensif dan Non Intensif. Populasi ternak sapi yang pemeliharaannya secara intensif berjumlah 3.707 ekor, pemeliharaannya terutama tersebar disepanjang bantaran Krueng Aceh mulai dari kecamatan Darussalam, Krueng Barona Jaya, Kuta Baro, Ingin Jaya, Montasik, Suka makmur dan Indra Puri.

Salah satu sasaran pengembangan sub sektor peternakan adalah meningkatkan populasi ternak basar sebagai sumber produksi daging dalam upaya perbaikan mutu gizi masyarakat serta mendorong penyediaan ternak yang berkualitas untuk kebutuhan konsumsi daerah maupun peningkatan ekspor, sehingga dapat memenuhi kebutuhan protein hewani.

Produksi hasil peternakan dapat dibagi menjadi produksi daging, telur, susu dan kulit. Untuk produksi daging sapi yaitu 1.278.650,30 kg, kerbau sebanyak 189.889,79 kg, kambing dengan produksi 355.328 kg dan domba 47.099 kg. Produksi daging ternak unggas seperti ayam buras tercatat 196.730,21 kg, ayam ras petelur sebanyak 18.899,79 kg, ayam ras pedaging 180.575,80 kg dan itik sebanyak 15.322,90 kg. Untuk produksi telur ayam buras tercatat 709.698 kg, ayam ras petelur sebanyak 412.635 kg dan itik yaitu sebanyak 1.502.682 kg. Produksi susu sapi hanya ada di kecamatan Lembah Seulawah yang memproduksi sebanyak 5.223 liter. Jika kita lihat pula produksi kulit sapi ada 7.890 lembar, kerbau 849 lembar, kambing merupakan produksi terbanyak yaitu 20.928 lembar dan domba hanya memproduksi 3.264 lembar. Bibit peternakan untuk ternak unggas hanya ada bibit ayam buras yang mampu menghasilkan 13.514 ekor bibit.

Banyaknya konsumsi daging/tahun/kapita di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2002 sebesar 871.746 kg, dimana jumlah produksi daging baik daging sapi, kerbau, kambing dan domba pada tahun yang sama sebanyak 1.870.967,09 kg. Ini mengindikasikan bahwa pemenuhan konsumsi daging di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ternyata lebih dari cukup sehingga terjadi surplus daging sebesar 999.221,09 kg yang dapat diekspor ke kota Banda Aceh dan merupakan daerah marginal dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Salah satu kendala bagi petani ternak dalam menjalankan usahanya yaitu adanya berbagai macam penyakit atau virus yang sewaktu-waktu dapat menyerang ternak baik secara mendadak maupun berkala. Untuk menghindari dari berbagai serangan penyakit, ternak perlu divaksin diantaranya vaksinasi ternak besar (SE), vaksinasi rabies dan vaksinasi ternak unggas (ND). Jika kita lihat persentase vaksinasi ternak berbanding populasi untuk ternak sapi hanya 40,57 % ternak sapi yang divaksin, kerbau sebesar 32,14% dan ayam buras hanya 38,28 %.

Penyebaran penyakit ternak selama tahun 2002 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dijumpai merata diseluruh kecamatan dengan berbagai jenis penyakit antara lain: internal/eksternal parasit (IE), New Castle Disease (ND) dan jenis Scabies (SC). Sementara untuk jenis penyakit Brucellosis hanya ada ditemui di Kecamatan Seulimeu, Indrapuri, Masjid Raya dan Ingin Jaya. Dan untuk penyakit Thaleria (TH), Dhipteri (DR) dan Pullorum (PM) hanya ditemui disebagian kecamatan saja.

Tabel 2.3. Perkembangan Populasi Ternak Ruminansia Tahun 2003 (Ekor)

No	Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1.	Aceh Besar	100.625	47.960	69.510	18.865
2.	Pidie	101.000	66.946	70.858	4.849
3.	Bireun	115.206	14.706	69.852	17.023
4.	Aceh Tengah	3.694	26.770	4.472	777
5.	Aceh Utara	112.716	10.145	86.084	16.896
6.	Aceh Timur	112.484	45.014	50.724	4.455
7.	Aceh Tamiang	36.958	2.154	12.340	2.863
8.	Aceh Jaya	9.212	8.720	15.225	75
9.	Aceh Barat	16.376	30.098	29.130	5.205
10.	Aceh Barat Daya	1.010	13.578	31.410	6.646
11.	Simeuleu	504	27.595	4.328	0
12.	Aceh Selatan	520	14.927	41.678	6.216
13.	Aceh Tenggara	31.135	2.764	24.028	7.057
14.	Aceh Singkil	4.374	1.766	12.465	5.913
15.	Nagan Raya	8.528	23.513	545.548	7.745
16.	Gayo Lues	20.756	58.898	45.344	15.579
17.	Banda Aceh	4.419	397	6.296	2.073
18.	Sabang	1.773	67	3.793	20
19.	Kota Lhokseumawe	9.800	332	4.684	337
20.	Kota Langsa	11.248	1.120	7.289	7.289
21.	Bener Meriah	-	-	-	-
Total		701.713	397.470	644.058	129.883

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi NAD Tahun 2005

Tabel 2.4. Perkembangan Populasi Ternak Non-Ruminansia Tahun 2003 (Ekor)

No	Kabupaten/Kota	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Ayama Ras Pedaging	Itik
1.	Aceh Besar	711.957	33.972	128.485	388.340
2.	Pidie	573.413	21.166	29.660	625.579
3.	Bireun	631.877	8.465	111.695	216.715
4.	Aceh Tengah	430.434	0	1.638	27.452
5.	Aceh Utara	2.537.267	4.700	257.467	564.816
6.	Aceh Timur	1.961.299	0	184.519	628.017
7.	Aceh Tamiang	670.554	0	0	5.192
8.	Aceh Jaya	660.063	0	0	42.764
9.	Aceh Barat	1.086.040	940	1.260	61.335
10.	Aceh Barat Daya	1.405.185	0	19.238	107.459
11.	Simeuleu	117.757	0	0	8.500
12.	Aceh Selatan	1.902.219	940	0	140.050
13.	Aceh Tenggara	908.780	0	12.391	177.576
14.	Aceh Singkil	802.736	0	14.063	28.040
15.	Nagan Raya	810.043	4.216	95	109.957
16.	Gayo Lues	573.928	0	14.545	126.156
17.	Banda Aceh	939.800	2.445	100.573	24.980
18.	Sabang	85.010	0	3.255	1.900
19.	Kota Lhokseumawe	368.575	0	56.516	77.905
20.	Kota Langsa	747.210	0	71.755	18.632
21.	Bener Meriah	0	0	0	0
Total		17.934.147	76.844	993.222	3.381.365

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi NAD Tahun 2005

Pemenuhan kebutuhan daging khususnya untuk ternak besar banyak dipenuhi dari luar daerah lain antara lain Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Selain itu juga dilakukan import berupa daging beku dari New Zealand, Australia, dan USA. Pada tahun 2001, volume pemasukan daging untuk memenuhi total kebutuhan sebesar 44.983,13 ton harus mendatangkan sebanyak 7.965,95 ton dari berbagai wilayah tersebut.

Volume perdagangan ternak dan hasil ternak internal di Nanggroe Aceh Darussalam dapat dicerminkan dari aktivitas pemotongan dan produksi. Pasokan atau produksi hasil ternak tersebut juga merepresentasikan tingkat konsumsi penduduk di Nanggroe Aceh Darussalam oleh karena aktivitas pengeluaran hasil ternak dari Nanggroe Aceh Darussalam ke luar wilayah dapat dikatakan tidak ada.

Konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator sejauh mana tingkat kesejahteraan suatu masyarakat penduduk. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mengindikasikan bahwa tingkat konsumsi kalori dan protein untuk penduduk Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2002 masing-masing 2037 gram dan 55,65 gram per kapita per tahun.

Tabel 2.5. Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak di Propinsi NAD Tahun 2005 (Kg)

No	Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1.	Simeulue	8.723	86.599	12.296	0
2.	Aceh Singkil	23.937	81.744	4.125	1.011
3.	Aceh Selatan	15.468	175.751	40.559	2.003
4.	Aceh Tenggara	98.971	155.525	28.184	15.275
5.	Aceh Timur	1.348.150	625.635	197.692	10.526
6.	Aceh Tengah	64.445	267.29	31.931	3.341
7.	Aceh Barat	5.71	204.567	844	1.199
8.	Aceh Besar	1.298.376	193.621	222.971	25.334
9.	Pi d i e	1.210.916	942.38	374.924	15.635
10.	Bireuen	629.881	35.739	53.519	5.66
11.	Aceh Utara	552.597	159.54	237.918	30.88
12.	Aceh Barat Daya	12.444	55.18	32.496	2.753
13.	Gayo Lues	287.269	125.1	68.055	73.189
14.	Aceh Tamiang	56.596	1.178	3.943	2.694
15.	Nagan Raya	6.672	50.669	2.425	0
16.	Aceh Jaya	25.237	26.117	19.367	0
17.	Bener Meriah	0	0	0	0
18.	Banda Aceh	398.307	317.523	20.41	6.964
19.	Sabang	68.966	982	5.135	21
20.	Langsa	329.567	17.282	53.307	4.266
21.	Lhokseumawe	410.231	45.955	83.615	8.059
Total		6.852.462	3.568.378	1.493.713	208.792

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi NAD Tahun 2005

Tingkat konsumsi tersebut telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 1999 dengan tingkat konsumsi kalori dan protein masing-masing 2013,94 gram dan 50,64 gram per kapita per tahun. Namun demikian dibandingkan dengan standar Widia Pangan dan Gizi, tingkat konsumsi kalori masih lebih rendah sementara konsumsi protein telah mencukupi. Standar konsumsi berdasarkan Widya Pangan dan Gizi masing-masing untuk kalori dan protein sebesar 2500 kalori dan 55 gram per kapita per tahun.

Berdasarkan perubahan dari tahun 1996 sampai 2002 mengindikasikan adanya perubahan pola konsumsi pada masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Konsumsi padi-padian cenderung stabil tetapi konsumsi protein hewani sedikit mengalami pergeseran, dimana konsumsi rata-rata untuk komoditas ikan mengalami penurunan, sementara konsumsi rata-rata untuk komoditas daging, telur, dan susu mengalami peningkatan.

Tabel 2.6. Konsumsi Komoditas Peternakan di Propinsi NAD Tahun 2003 (Kg)

No.	Kabupaten/kota	Komoditas		
		Daging	Telur	Susu
1	Simeulue	127,355	116,021	0
2	Aceh Singkil	182,668	630,676	0
3	Aceh Selatan	386,127	1,895,296	0
4	Aceh Tenggara	681,269	1,495,357	0
5	Aceh Timur	6,231,674	4,538,753	64,638
6	Aceh Tengah	460,671	404,703	0
7	Aceh Barat	1,384,545	985,057	0
8	Aceh Besar	2,653,041	2,739,200	23,940
9	Pidie	6,160,683	5,779,158	0
10	Bireuen	604,599	1,597,238	0
11	Aceh Utara	4,298,874	3,903,971	0
12	Aceh Barat Daya	509,388	1,495,290	0
13	Gayo Lues	703,161	1,019,440	0
14	Aceh Tamiang	106,309	429,145	0
15	Nagan Raya	569,398	1,102,798	0
16	Aceh Jaya	137,478	624,177	0
17	Bener Meriah	0	0	0
18	Banda Aceh	1,752,635	713,037	0
19	Sabang	87,191	61,059	0
20	Langsa	557,410	553,020	0
21	Lhokseumawe	1,108,411	638,007	0
	NAD	28,702,887	30,721,403	88,578

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi NAD Tahun 2005

2.4. Dampak Tsunami terhadap Sub Sektor Peternakan

Dampak gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, berpengaruh cukup besar terhadap sub sektor peternakan terkait dengan sumber daya manusia, sumber daya ternak dan lahan, gedung perkantoran, laboratorium, perpustakaan dinas, perumahan dinas, dokumen, peralatan dan fasilitas lainnya. Kerusakan di bidang peternakan cukup luas antara lain meliputi ternak yang hilang dan mati, kerusakan kandang, lahan dan kebun rumput, tegalan dan bantaran sungai serta hilangnya sumber mata pencaharian peternak.

Untuk memulihkan kegiatan di sub sektor peternakan perlu dilakukan upaya-upaya khusus penanggulangan segera mungkin, guna menghindari dampak yang lebih luas terganggunya pembangunan regional dan nasional. Upaya yang perlu dilakukan setelah tahap tanggap darurat, pemulihan kondisi dalam kondisi jangka pendek (1-2 tahun) adalah melalui tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi (3-5 tahun), dan jangka panjang (5-10 tahun). Kegiatan pada masing-masing tahapan pemulihan yang meliputi tahap tanggap darurat pembentukan posko bantuan pangan dan alat-alat, bantuan pakaian, santunan bagi korban yang meninggal dan hilang pegawai Dinas Peternakan dan Dinas Lingkup Departemen Pertanian, sudah dilalui, sedangkan tahap rehabilitasi yang meliputi pemulihan kondisi pelayanan public, pemulihan yang berkaitan barang privat, rumah bagi pengungsi, penembatan bagi pegawai yang terkena musibah, injeksi bantuan uang, kebutuhan rumah tangga, bantuan bibit dan sarana produksi untuk mendukung bergeraknya ekonomi masyarakat dan peternak, serta tahap rekonstruksi yang meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana asset peternakan yang hancur, bantuan modal usaha, persediaan bibit-bibit ternak dan sarana produksi lainnya, sumber dana diharapkan dari APBD, APBN, Bantuan PBB, FAO dan lain-lainnya.

Jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terkena dampak tsunami, mempengaruhi langsung terhadap pembangunan peternakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Jumlah Kabupaten/Kota yang terkena dampak tsunami

No	Kabupaten/Kota	Terkena dampak Tsunami
1	Aceh Besar	Aceh Besar
2	Pidie	Pidie
3	Bireun (Aceh Jeumpa)	Bireun (Aceh Jeumpa)
4	Aceh Tengah	Aceh Utara
5	Aceh Utara	Aceh Timur
6	Aceh Timur	Aceh Barat
7	Aceh Tamiang	Aceh Barat Daya
8	Aceh Jaya	Nagan Raya
9	Aceh Barat	Aceh Jaya
10	Aceh Barat Daya	Banda Aceh
11	Simelue	Sabang
12	Aceh Selatan	Kota Lhokseumawe
13	Aceh Tenggara	Aceh Singkil
14	Aceh Singkil	Simelue
15	Nagan Raya	-
16	Gayo Lues	-
17	Banda Aceh	-
18	Sabang	-
19	Kota Lhokseumawe	-
20	Kota Langsa	-
21	Bener Meriah	-

Sumber : Data Primer diolah, 2006

Jumlah seluruh pegawai yang berstatus PNS dan honorer pada dinas peternakan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam sebelum terjadinya gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 seluruhnya berjumlah 172 orang (data 2004). Setelah terjadinya gempa tsunami, jumlah pegawai/aparatur dinas Peternakan provinsi NAD yang meninggal/hilang adalah 31 orang, anggota keluarga yang meninggal /hilang yaitu suami 4 orang, istri 23 orang dan anak 30 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Aparatur/Pegawai Dinas peternakan yang terkena musibah Tsunami tahun 2004

No	Rincian	PNS	Suami	Istri	Anak
1	Disnak Prov NAD	31*	4	23	30
2	Aceh Besar	14	4	8	15
3	Pidie	1	-	-	-
4	Bireun (Aceh Jeumpa)	-	-	-	-
5	Aceh Utara	-	-	-	-
6	Aceh Timur	-	-	-	-
7	Aceh Barat	-	-	-	-
8	Aceh Barat Daya	4	-	4	6
9	Nagan Raya	1	-	1	3
10	Aceh Jaya	4	-	4	8
11	Banda Aceh	7	2	4	18
12	Sabang	-	-	-	-
13	Kota Lhokseumawe	-	-	-	-
14	Aceh Singkil	-	-	-	-
15	Simelue	-	-	-	-
	Jumlah	72	10	44	80

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi NAD, 2005

Sedangkan jumlah pegawai atau aparatur yang terkena musibah gempa dan tsunami pada seluruh kabupaten/kota yang meninggal dunia sebanyak 31 orang, jumlah istri/suami meninggal/hilang 29

orang, anak yang meninggal/hilang 50 orang, sehingga jumlah PNS Dinas Peternakan Provinsi NAD dan Kabupaten/ Kota sebanyak 72 orang, suami/istri yang meninggal/hilang 54 orang dan anak yang meninggal/hilang sebanyak 80 orang. Rumah pegawai Dinas Peternakan Provinsi NAD yang rusak berat sebanyak 14 unit, hancur 45 unit dan rusak ringan 32 unit, hancur 11 unit dan rusak ringan 28 unit, sehingga jumlah keseluruhannya 37 unit rusak berat, 56 unit hancur dan 60 unit rusak ringan, Gempa dan gelombang tsunami telah memporak porandakan asset peternakan seperti sarana gedung,perlengkapan kantor,kendaraan dan dokumen penting serta asset-asset lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9. Sarana/Fasilitas Aparatur/Pegawai Dinas peternakan yang terkena musibah Tsunami tahun 2004

No	Kabupaten/Kota	Keadaan Rumah (unit)		
		Hancur	Rusak Berat	Rusak Ringan
1	Disnak Prov NAD	45	14	32
2	Aceh Besar	1	4	6
3	Pidie	-	2	1
4	Bireun (Aceh Jeumpa)	-	1	2
5	Aceh Utara	-	-	-
6	Aceh Timur	-	-	-
7	Aceh Barat	-	4	3
8	Aceh Barat Daya	-	-	-
9	Nagan Raya	-	1	2
10	Aceh Jaya	6	2	4
11	Banda Aceh	3	1	2
12	Sabang	-	3	1
13	Kota Lhokseumawe	-	-	2
14	Aceh Singkil	-	2	4
15	Simelue	1	3	1
	Jumlah	56	37	60

Tabel 2.10. Prasarana dan sarana kantor Dinas Peternakan Provinsi NAD yang rusak/ hancur

No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan (M ²)	Kerugian (Rp)
1	Gedung Utama	771	485.000.000
2	Gedung Personalia	154	83.000.000
3	Gedung Pimpro	144	150.000.000
4	Gedung Garasi	81	60.000.000
5	Gedung Depo Obat	80	60.000.000
6	Gedung Arsip	300	150.000.000
7	Gedung Gudang Perlengkapan	203	100.000.000
8	Gedung Koperasi/Klinik Terpadu	200	50.000.000
9	Gedung Mushola	104	60.000.000
10	UPTD Laboratorium	329	175.000.000
11	Gedung Produksi	375	300.000.000
12	Mess Karyawan	60	54.000.000
13	Mess UPTD Inkubator Saree	90	65.000.000
14	Rumah Kepala Dinas	48	100.000.000
15	Pagar Keliling	1264	500.000.000
16	Halaman Kantor	5200	50.000.000
17	Balai Pembibitan Unggas Ulele	1 Unit	500.000.000
18	Ex Farm Fakultas Peternakan kerjasama Dinas	1 Unit	2.000.000.000
	Jumlah kerugian (Rp)		4.942.000.000

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi NAD, 2005

Gempa dan gelombang tsunami juga telah memporak porandakan asset petani peternakan di Kabupaten/Kota seperti hancurnya lahan pengembalaan ternak, kandang dan kematian ternak besar, kecil dan unggas dapat dilihat pada table berikut ini;

Tabel 2.11. Asset Petani Peternak yang mati akibat Tsunami tahun 2004

No	Kabupaten/Kota	Jenis Ternak (ekor)					
		Sapi (ekor)	Kerbau (ekor)	Kambing (ekor)	Domba (ekor)	Ayam (ekor)	Itik (ekor)
1	Aceh Besar	24.959	24.331	13.910	3.729	228.816	135.421
2	Pidie	539	23	5.943	374	73.224	32.494
3	Bireun	878	23	5.414	1.293	127.350	54.931
4	Aceh Utara	1.340	285	543	231	74.552	3.550
5	Aceh Timur	18	4	283	-	44.781	23.610
6	Aceh Barat	2.210	2.570	5.240	70	125.750	16.400
7	Aceh Barat Daya	5.575	4.195	10.729	1.325	291.905	15.350
8	Simeulu	-	-	-	-	-	-
9	Aceh Singkil	2	455	66	-	9.542	2.229
10	Nagan Raya	203	74	86	10	12.000	393
11	Banda Aceh	1.760	7.125	12.720	635	115.525	80.745
12	Banda Aceh	961	112	2.789	285	77.582	25.965
13	Sabang	30	0	74	22	5.095	765
14	Lhokseumawe	1.230	125	420	137	83.550	55.588
	Jumlah	39.705	39.322	58.217	8.111	1.347.253	447.441

Sumber : Data Sekunder, Diolah. 2006

Tabel 2.12. Fasilitas/Infrastruktur peternakan yang rusak akibat tsunami

No	Kabupaten/Kota	Kandang (unit)	Padang Pengembalaan (Ha)	RPH (Unit)	RPU (UNIT)	PSD	Pos IB	POS KESWAN (Unit)
1	Aceh Besar	21.875	80.0	1	-	1	1	1
2	Pidie	310	20.0	-	-	-	-	1
3	Aceh Jaya	430	90.0	1	1	-	-	-
4	Aceh Barat	512	80.0	-	1	-	-	-
5	Nagan Raya	121	30.0	-	-	-	-	-
6	Bireun	2.412	9.4	1	-	-	-	-
7	L.Seumawe	131	1.0	-	-	-	-	-
8	Aceh Utara	4.044	1.099	-	-	-	-	1
9	Aceh Timur	2.043	15.0	-	-	-	-	-
10	Sabang	4	5,0	-	-	-	-	-
11	Banda Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-
12	Aceh Singkil	1.194	9.5	-	1	-	-	-
13	Simeulu	-	-	1	-	-	-	1
14	Banda Aceh	-	-	1	1	1	1	-
	Jumlah	33.076	331.500	5	4	2	1	4

Sumber : Data Sekunder, Diolah. 2006

BAB 3. METODOLOGI

3.1. Kerangka Pemikiran

Peran strategis bidang peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam yang diharapkan dalam pembangunan wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi peran dalam penyediaan kebutuhan produk hasil ternak sehingga menjamin keseimbangan suply-demand, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peran multi dimensi tersebut akan dapat dicapai melalui berbagai pendekatan secara komprehensif, meliputi pendekatan komoditas atau sumberdaya (*resourcesbase*), pendekatan wilayah, dan pendekatan sistem perencanaan.

Pendekatan komoditas diarahkan pada identifikasi ternak unggulan dengan kriteria: (1) unggul dalam menjamin keamanan pasokan permintaan dalam negeri; (2) unggul dari sisi kesesuaian agroklimat; (3) unggul dalam ketersediaan bahan baku dan teknologi; (4) unggul dari sisi peluang pasar; (5) unggul dari sisi nilai tambah; (6) unggul dari sisi dukungan sosial-budaya masyarakat; dan (7) unggul dari sisi daya saing.

Dalam pendekatan wilayah, rencana strategis akan diarahkan pada penentuan wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan masing-masing jenis ternak unggulan. Wilayah prioritas pengembangan ditentukan dengan mengacu pada kebijakan pewilayahan atau kajian kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, kesesuaian iklim, ketersediaan lahan, dukungan infrastruktur dan fasilitas.

Pembangunan wilayah peternakan dimaksudkan untuk dua hal pokok yakni : (1) memperbesar kapasitas ekonomi daerah dalam meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan masyarakat yang bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui, dan (2) meningkatkan *share* yang dinikmati masyarakat dalam proses pembangunan peternakan di daerah bersangkutan. Sehingga pada gilirannya nanti akan menunjang pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Secara konsepsi perencanaan, perumusan strategi pengembangan peternakan yang tepat akan ditentukan sejauhmana akurat dalam mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis unsur-unsur utama dalam penyusunan rencana, yang meliputi: (1) potensi; (2) target pencapaian; dan (3) kendala dan tantangan.

Pengelompokan potensi peternakan secara umum terdiri dari: (1) sumberdaya; (2) kelembagaan/budaya lokal, (3) posisi wilayah dari segi akses pasar atau interaksi dengan wilayah lain, dan (4) kesesuaian potensi wilayah untuk mengakomodasi kebijaksanaan pemerintah daerah atau Provinsi yang ditujukan untuk wilayah tersebut. Keempat hal pokok tersebut harus selalu dipandang sebagai kondisi yang dapat dimanfaatkan atau diarahkan untuk mendukung pengembangan peternakan.

Sumberdaya peternakan daerah secara umum dapat dikelompokkan menjadi: (1) sumberdaya alam (*natural resources*), seperti sumberdaya keragaman hayati (*biodiversity*), lahan dan air, agroklimat, dan yang terkait dengannya; (2) sumberdaya manusia (*human resources*) baik waktu, tenaga, pikiran dan keahlian; (3) sumberdaya/modal sosial (*socio capital*) atau sering *quasi knowledge* seperti kelembagaan lokal, nilai-nilai sosial, *etno-technologies/indigenous technologies*, kearifan lokal (*local wisdom*) dan lain-lain, serta (4) sumberdaya yang dihasilkan dari interaksi ketiga sumberdaya tersebut (*man-made resources*) seperti barang-barang modal, inovasi-teknologi, management, dan organisasi.

Penentuan target dalam pengembangan peternakan selain didasarkan pada potensi (*suply side*) juga dilakukan melalui pendekatan trend permintaan (*demand side*). Pendekatan suply side digunakan dalam memprediksi potensi produksi didasarkan pada koefisien teknis produksi,

sedangkan trend permintaan ditentukan berdasarkan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan elastisitas permintaan.

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh peningkatan pendapatan diperkirakan akan memacu peningkatan konsumsi produk ternak per kapita, sementara pertumbuhan penduduk akan meningkatkan permintaan secara agregat. Faktor lain yang kemungkinan juga berpengaruh adalah perbaikan selera terhadap produk ternak karena berkembangnya teknologi pengolahan hasil ternak.

Kajian kendala dan tantangan diarahkan pada fenomena klasik serta permasalahan spesifik daerah-daerah terkait dengan otonomi daerah. Fokus perhatian dalam kajian kendala dan tantangan menyangkut aspek-aspek:

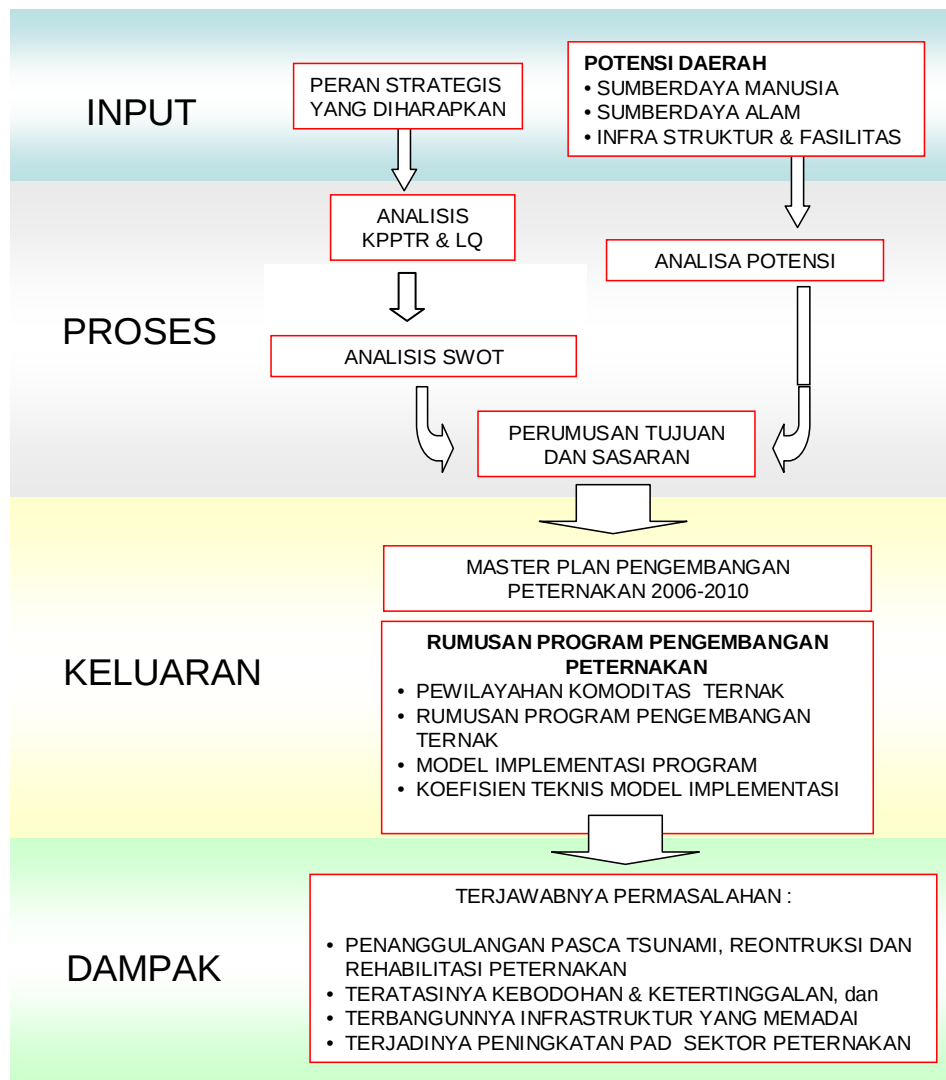
- (1) Efisiensi alokasi sumberdaya;
- (2) Keterjaminan bibit berkualitas secara kontinyu;
- (3) Manajemen resiko;
- (4) Penyediaan dan pengembangan teknologi dan SDM yang handal;
- (5) Mewujudkan wilayah-wilayah komoditas unggulan;
- (6) Penguatan akses petani dalam informasi (permodalan, pasar, dan harga);
- (7) Mobilitas sumberdaya permodalan yang dapat mendukung usaha peternakan rakyat;
- (8) Jaminan kualitas produk.

Selain itu juga menyangkut permasalahan yang terkait dengan kelembagaan pusat daerah yang memerlukan penanganan tersendiri.

Perumusan strategi pengembangan peternakan melalui kajian prospek, yang paling tidak diarahkan untuk: (1) memungkinkannya terintegrasinya sistem agribisnis peternakan secara utuh berdasarkan mekanisme pasar dan (2) memberikan insentif bagi tumbuhnya pelaku-pelaku agribisnis untuk setiap fungsi yang ada dalam sistem agribisnis peternakan.

Sistem agribisnis diimplementasikan dengan integrasi vertical, mencakup 4 (empat) sub-sistem yakni **Pertama**, sub-sistem agribisnis hulu/industri hulu pertanian (*un-stream agribusiness*) yakni usaha-usaha yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian seperti usaha pembibitan, usaha agro-kimia (obat/vaksin hewan), usaha agro-otomotif (alat dan mesin); **Kedua**, sub-sistem usahatani-ternak (*on-farm agribusiness*) yakni usaha-usaha yang mengkombinasikan barang-barang modal sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam proses produksi biologis ternak untuk menghasilkan komoditas peternakan primer; **Ketiga**, sub-sistem agribisnis hilir/industri hilir (*down-stream agribusiness*) yakni usaha-usaha yang mengolah komoditas peternakan primer menjadi produk olahan sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini mencakup usaha pengolahan makanan dan minuman, serta usaha pengolahan pakan ternak dan **Keempat**, sub-sistem penyedia jasa bagi agribisnis (*services for agribusiness*) yakni usaha-usaha yang menyediakan jasa bagi ketiga sub-sistem agribisnis diatas. Hal ini mencakup usaha perkreditan (perbankan), usaha asuransi, usaha transportasi, litbang, pendidikan dan kebijakan ekonomi (*mikro, makro, internasional trade*).

Pelaku-pelaku agribisnis peternakan paling tidak dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu pelaku kegiatan agribisnis hulu (penyedia sarana, pakan, obat, dan bibit), pelaku kegiatan on-farm (peternak dan perusahaan), pelaku kegiatan agribisnis hilir (industri rumah tangga, perusahaan pengolahan, pedagang hasil peternakan, dll) dan pelaku kegiatan pendukung (penelitian, lembaga keuangan/pembiayaan, transportasi dan komunikasi, penyuluhan, pelatihan SDM dan penentu kebijaksanaan/pemerintah). Para pelaku ini harus dapat melakukan kerjasama secara kondusif pada pengembangan peternakan sesuai dengan fungsi yang diharapkan dari masing-masing.

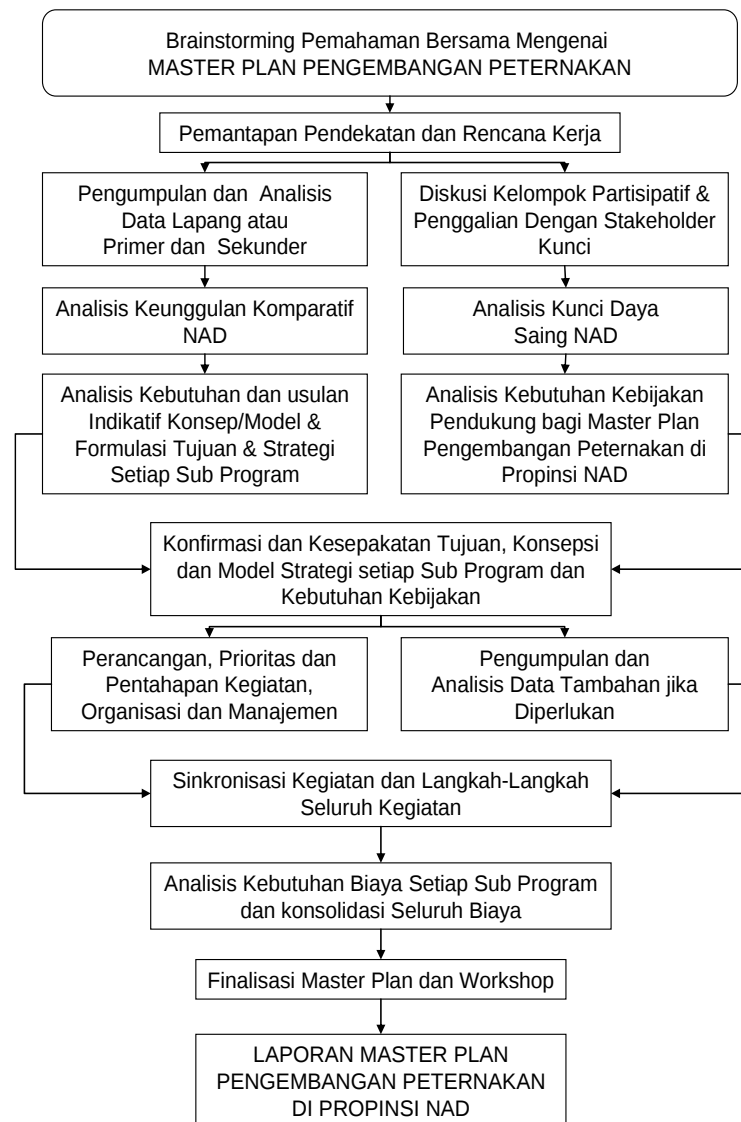


Gambar 3.1. Alur Pemikiran Penyusunan Master Plan Pembangunan Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3.2. Pendekatan dan Langkah-Langkah Penyusunan Masterplan

Pendekatan yang diusulkan dalam penyusunan Masterplan Pembangunan Peternakan adalah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Masterplan disusun **berdasarkan analisis komparatif wilayah dan analisi kunci daya saing Nanggroe Aceh Darussalam**, Baik berdasakan data yang dikumpulkan langsung dilapangan, dan data sekunder serta hasil diskusi kelompok dari stakeholder kunci (tokoh masyarakat, pengusaha, pakar terkain dan instansi lingkup peternakan Provinsi dan kabupaten) dan **analisis kebutuhan**;
- Penyusunan Masterplan mengikuti tahap-tahap yang sistematis dimana disetiap tahapan dihasilkan output antara yang selalu mendapatkan komfirmasi dan kesepakatan dari stakeholder kunci (instansi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);
- Dalam penyusunan Masterplan, counterpart Dinas Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Seluruh Kabupaten/kota akan berperan serta dan terlibat langsung sehingga penyusunan Masterplan dijiwai oleh pendekatan partisipatif dan mendapatkan komitmen oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk selanjutnya dilaksanakan.



Gambar 3.2. Bagan alir penyusunan masterplan peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu tindakan dalam menentukan kegiatan diwaktu yang akan datang sebagai usaha untuk mencapai tujuan atau memecahkan persoalan. Berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, maka perencanaan dapat didekati dengan berbagai landasan atau dasar yang digunakan, diantaranya;

- Berdasarkan jangka waktu, yaitu perencanaan yang mengikuti sekuen periode waktu. Dalam hal ini dikenal perencanaan perspektif jangka panjang (lebih dari 25 tahun), perencanaan jangka menengah (antara 5 – 25 tahun), dan perencanaan jangka pendek (kurang atau sampai 5 tahun).
- Berdasarkan sifat, dikenal adanya perencanaan dengan komando dan perencanaan dengan rangsangan. Perencanaan dengan komando, yaitu perencanaan yang dilakukan atas perintah yang dituangkan sebagai suatu kebijakan eksekutif dalam melakukan suatu tindakan. Sedangkan perencanaan dengan rangsangan, yaitu perencanaan yang dilakukan melalui fasilitasi, seperti; cara memanipulasi pasar ataupun yang diberlakukan kepada masyarakat melalui kebijakan fiskal, moneter, kelembagaan dan lainnya.
- Berdasarkan alokasi sumberdaya, dalam kaitan ini dikenal perencanaan sumberdaya keuangan, yang dapat dilakukan melalui; (i) pengurangan atau penghapusan ketidak

seimbangan antara penawaran dan permintaan, (ii) perhitungan hasil dan biaya kegiatan, dan (iii) penumbuhan lembaga keuangan masyarakat.

- Berdasarkan tingkat keluwesan, dikenal perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang dilakukan dengan indikasi terhadap usaha tertentu, seperti; prinsip desentralisasi, keterlibatan swasta, sektor dasar, maupun tindakan pokok (penelitian dan pengembangan, penurunan biaya dan rasionalisasi, spesialisasi, organisasi pasarproduk, rekonsiliasi perusahaan dan penyegaran sumberdaya manusia) dan lainnya. Sedangkan perencanaan imperatif, yaitu suatu perencanaan yang mau dan tidak mau harus dilakukan dalam kondisi apapun juga.
- Berdasarkan cara pelaksanaan, hal ini dilakukan perencanaan secara sentralistik maupun perencanaan desentralisasi. Berkaitan dengan berlakunya UU No. 25 Th 1999, maka perencanaan desentralistik merupakan suatu perencanaan yang tepat di dalam pengembangan ekonomi daerah.

Untuk dapat melakukan suatu perencanaan yang tepat dengan tidak yang akan dilakukan, maka adanya data dan informasi menjadi suatu yang penting, tanpa adanya data dan informasi, maka tidak dapat diharapkan adanya suatu perencanaan yang tepat. Oleh karena itu dalam pengembangan pembangunan peternakan multak diperlukan adanya data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar suatu perencanaan.

Perencanaan yang menyangkut masa depan, sangat tergantung kepada data hasil ramalan yang mengandung unsur ketidakpastian, adanya unsur ketidakpastian menyebabkan pelaksanaan atau realisasi tidak sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu data dan informasi merupakan alat kontrol dalam pelaksanaan dalam suatu perencanaan. Mengontrol dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu antisipasi jika dijumpai adanya penyimpangan atau kesalahan didalam pelaksanaan suatu perencanaan untuk dapat segera diatasi atau dikoreksi. Pada akhirnya jika batas waktu telah berakhir data dan informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar untuk evaluasi.

3.3. Metode Pengumpulan Data

3.3.1. Data dan Sumber Data

Kebutuhan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan dalam bentuk persepsi stakeholders (pejabat pemerintah, investor, pakar, tokoh masyarakat, masyarakat luas, dsb) terhadap tingkat keunggulan masing-masing jenis ternak di lokasi tertentu, prospek pengembangan masing-masing jenis ternak potensial, harapan dalam pengembangan peternakan, dan lain-lain.

Data sekunder yang diperlukan merupakan data yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap potensi sumberdaya, perkembangan, kesesuaian lingkungan, peluang, kebijakan pemerintah, yang secara detail dapat diinventarisir sebagai berikut:

- Perkembangan Populasi Ternak Per Kabupaten Selama 5 Tahun Terakhir;
- Perkembangan Produksi Ternak Dan Hasil Ternak;
- Perkembangan Supply Demand Hasil Ternak (Daging, Susu, Dan Telor);
- Perkembangan Jumlah Kelompok Dan Peternak Per Kabupaten Selama 5 Tahun Terakhir;
- Pengeluaran Dan Pemasukan Ternak Ke Dan Dari Masing-Masing Wilayah Selama 5 Tahun Terakhir;
- Ketersediaan, Lokasi, Kapasitas, Dan Luas (Lahan Dan Bangunan) Fasilitas Pelayanan Fisik Peternakan (Karantina, Holding Ground, Poskeswan, Pos IB, Padang Penggembalaan, Pusat Pembibitan, Pabrik Pakan, RPH, RPA, Pasar Hewan, Laboratorium Diagnostik, UPT, Pos Lalu Lintas Ternak, dll);
- Ketersediaan, Penempatan, Dan Wilayah Pelayanan SDM Peternakan (Dokter Hewan, Mantri Hewan, Vaksinator, Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan, Satgas, PPS, PPL, KTNA, dll);
- Lembaga-Lembaga Pembinaan SDM Peternakan (PT, Sekolah, Diklat, dll);

-
- Jumlah, Lokasi, Dan Kapasitas Terpasang Perusahaan Pembibitan, Pembesaran, Penggemukan, Ternak Petelur, Ternak Perah, Pengolahan Hasil Ternak, Pengolahan Limbah Ternak;
 - Program-Program Pengembangan Peternakan Masing-Masing Lokasi Selama 5 Tahun Terakhir;
 - Pencegahan Penyakit Ternak Dan Perlindungan Ternak
 - Sasaran Konsumsi, Populasi, Pemasukan Bibit Ternak, Parameter Produktivitas Hasil Ternak, Pemotongan, Produksi, Eksport Komoditas Unggulan, Investasi Bidang Peternakan, Kontribusi Peternakan Untuk PAD Dan PDRB;
 - Data Iklim, Suhu, Bulan Basah Dan Kering, Dan Kelembaban;
 - Potensi Sumber Air (Sungai, Danau, Kedalaman Air Tanah);
 - Distribusi Curah Hujan;
 - Peta-Peta (Administrasi, Tataguna Lahan, Topografi, Dll);
 - Data Sosial-Ekonomi (Infrastruktur Dan Fasilitas, Sdm Dan Ketenagakerjaan; Mata Pencaharian Penduduk; Harga-Harga Ternak, Saproak, Dan Pertanian);
 - Penggunaan Lahan (Sawah, Ladang, Perkebunan, Pekarangan, Dll);
 - Luas Tanam Dan Panen Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Kebun Rumpuk;
 - Penyakit Dan Kendala Pengembangan Peternakan;
 - Laporan Riset Dan Pengembangan Peternakan
 - RTRW, Renstra Pertanian/Peternakan.
 - Angka Kelahiran Dan Kematian Ternak
 - Angka Pemotongan Ternak
 - Investasi Di Bidang Peternakan
 - Perkembangan Koperasi Di Bidang Peternakan
 - Perkembangan Agribisnis Peternakan
 - Perkembangan Konsumsi Hasil Ternak
 - Perkembangan Perdagangan Ternak dan Hasil Ternak
 - PDB / PDRB
 - Perkembangan Ternak UPT
 - Laporan Realisasi Pemasukan Bibit Ternak ke Pulau atau Provinsi
 - Laporan Realisasi Pemasukan DOC, GPS / PS
 - Laporan Realisasi Produksi dan Pengeluaran DOC PS
 - Laporan Realisasi Produksi dan Pengeluaran DOC FS
 - Jumlah RTP Petani dan Peternak

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan stakeholders yang kompeten dalam bidang peternakan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Jumlah responden yang akan diwawancarai sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jumlah Masing-Masing Stakeholders Sebagai Responden

No	Kelompok Responden	Jumlah (orang)
1	Pejabat Pemerintah (legislatif/eksekutif)	5
2	Pelaku Usaha peternakan (Hulu-onfarm-Hilir)	5
3	Kelompok Tani Peternak	5
4	Lembaga Swadaya Masyarakat	5
5	Lembaga Keuangan/Perbankan	5
6	Tokoh Masyarakat	5
7	Lembaga Pendidikan	5
	Jumlah	35

Data sekunder akan diperoleh melalui dokumen database, laporan tahunan, kebijakan pemerintah, laporan studi, makalah-makalah seminar/workshop/kegiatan ilmiah lainnya. Dokumen-dokumen tersebut dapat diperoleh dari instansi terkait seperti kantor statistik, kantor pemerintah daerah, dinas terkait, Perguruan Tinggi, dan lembaga-lembaga lain yang relevan.

3.4. Analisis Data

Analisis data diarahkan dalam mengkaji potensi, memprediksi kondisi yang akan datang, dan prospek pengembangan masa yang akan datang.

3.4.1. Analisis Potensi

Analisis potensi yang relevan menyangkut daya dukung lahan dalam pengembangan populasi ternak. Tetapi oleh karena kebutuhan lahan dalam pengembangan ternak tidak selalu bersifat absolut dengan persyaratan jenis tanah yang tegas, maka perhitungan daya dukung dilakukan melalui pendekatan daya tampung ternak ruminansia secara alami atau dengan formula nilai Kapasitas Penambahan Populasi Ternak Ruminansia (KPPTR), yang didasarkan pada ketersediaan pakan hijauan di lokasi. Pendekatan KPPTR bertitik tolak dari pemikiran bahwa: (1) para peternak di pedesaan, umumnya memenuhi kebutuhan pakan hijauan dari berbagai sumber (rerumputan, limbah pertanian) agro ekosistem di pedesaan, dan (2) penambahan populasi ternak ruminansia tidak merusak keseimbangan agro ekosistem yang sedang berlangsung dalam arti melampaui kapasitas tampung (*carrying capacity*) ekosistem yang ada.

Tabel 3.2. Angka Konversi Luas Lahan Penghasil Hijauan

No	Luas Riil Lahan	Luas Lahan Tersedia
1.	Luas padang rumput alam	Luas padang rumput alam
2.	Luas sawah bera	20 % dari luas total sawah X 10 %
3.	Luas galangan sawah	2,5 % dari luas total sawah
4.	Luas perkebunan	5 % dari luas total perkebunan
5.	Luas hutan sejenis/negara	5 % dari luas total hutan sejenis
6.	Luas hutan sekunder/rakyat	3 % dari luas total hutan sekunder
7.	Luas tepi jalan	0,5 hektar X total panjang jalan
8.	Luas tegalan/ladang	1 % dari luas total tegalan/ladang

Sumber: Nell dan Rollinson,

Tabel 3.3. Angka Konversi Jerami Yang Tersedia Untuk Ternak

No	Luas Riil Lahan	Luas Lahan Tersedia
1.	Jerami padi	Luas panen (Ha) X 0,23 Ton Bhn kering/Ha/Thn
2.	Jerami Jagung	Luas panen (Ha) X 10,90 Ton Bhn kering/Ha/Thn
3.	Jerami ubikayu	Luas panen (Ha) X 5,05 Ton Bhn kering/Ha/Thn
4.	Jerami ubijalar	Luas panen (Ha) X 1,20 Ton Bhn kering/Ha/Thn
5.	Jerami kedelai	Luas panen (Ha) X 1,07 Ton Bhn kering/Ha/Thn
6.	Jerami kacang tanah	Luas panen (Ha) X 1,44 Ton Bhn kering/Ha/Thn

Sumber: Nell dan Rollinson, 1974

Potensi Hijauan dan kapasitas tampung diprediksi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Potensi Hijauan Total} &= \text{Produksi Hijauan} + \text{Produksi (Total) Jerami} \\ \text{Kapasitas Tampung} &= (\text{Potensi Hijauan Total, Ton BK/Tahun}) / (2,296 \text{ Ton/ST/Tahun}) \\ \text{KPPTTR} &= \text{Kapasitas Tampung} - \text{Populasi Riil}\end{aligned}$$

Potensi ketersediaan hijauan didasarkan pada beberapa sumber yakni: padang rumput, sawah bera, galangan sawah, perkebunan, hutan sejenis, hutan sekunder, tepi jalan dan tegalan. Total areal seluruh komponen tersebut dianggap mampu menyediakan Bahan Kering sebanyak 3,75 Ton/Hektar/tahun. Untuk sampai kepada angka-angka yang diperlukan untuk perhitungan KPPTTR sesuai dengan langkah-langkah di atas, diperlukan pula beberapa angka pengkonversi yang lain yakni pengkonversi luas lahan yang mampu menyediakan pakan ternak, serta angka pengkonversi jerami yang tersedia atau bisa dipergunakan untuk ternak. **Tabel 3.2** memperlihatkan angka konversi luas lahan dan **Tabel 3.3** menunjukkan angka pengkonversi jerami.

Dengan demikian, total produksi hijauan (ton BK/tahun) untuk setiap kabupaen dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{TPH} = 3,75 \sum \text{LE}_i + \sum \text{PJ}_j$$

di mana;

TPH = Total produksi hijauan suatu kecamatan dalam satu tahun (ton BK/tahun).

LE_i = Luas hijauan efektif (Ha) ke i ; dimana i = No. 1 sampai No. 8 pada Tabel 3.

PJ_j = Produksi jerami (ton BK/tahun) dari sumber J , dimana J = No. 9 sampai No. 14 pada Tabel 4.

Setiap satu satuan ternak (ST) ruminansia memerlukan hijuan 2.3 ton BK/tahun. Dengan demikian Kapasitas Tampung Ruminansia (KTR) suatu kecamatan dihitung sebagai berikut:

$$\text{KTR (ST)} = \frac{\text{TPH (ton BK/tahun)}}{2,3 \text{ (ton BK/ST/tahun)}}$$

Untuk menghitung KPPTTR dilakukan dengan mengurangi KTR dengan populasi riil. Populasi riil (dalam ST) dihitung dari populasi yang ada saat ini dengan asumsi tertentu dalam struktur populasi yang terbagi menjadi sapi dewasa, sapi muda, dan anak. Setiap jenis ternak dan wilayah struktur populasi kemungkinan akan berbeda.

3.4.2. Analisis Location Quation /LQ.

Analisis ini akan digunakan untuk mengetahui apakah suatu lokasi/wilayah merupakan wilayah basis atau non basis dari ternak. Model LQ dirumuskan sebagai berikut ;

$$\text{LQ} = \text{Si} / \text{Ni}$$

Si = rasio antara populasi ternak dalam satuan ternak dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama

Ni = rasio antara populasi ternak di kabupaten sampel dengan jumlah penduduk di kabupaten yang sama

LQ lebih dari 1 merupakan daerah basis peternakan

LQ kurang dari 1 merupakan daerah non basis peternakan.

3.4.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT yang akan dilakukan merupakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, melalui identifikasi faktor-faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*). Dari hasil identifikasi faktor-faktor tersebut selanjutnya disusun strategi melalui bantuan matriks SWOT (Tabel 3.4.)

Tabel 3.4. Matriks SWOT

Internal Eksternal	S (Strength)	W (Weakness)
	SO	WO
O (Opportunity)	Menyusun strategi dengan menggunakan kekuatan internal untuk memperoleh profit dari peluang yang ada	Menyusun strategi untuk memperoleh keuntungan dari peluang yang ada dalam mengatasi kelemahan
T (Threats)	ST	WT
	Menyusun strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menghindari ancaman	Menyusun strategi dengan cara meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

BAB 4. HASIL SURVEY DAN PEMBAHASAN

4.1. Pewilayahan Komoditi Peternakan (Analisis KPPTR dan LQ)

Aspek penting dalam perencanaan pembangunan peternakan adalah pewilayahan peternakan berdasarkan potensi dan daya dukung lahan yang memadai untuk usahaternak. Potensi sumberdaya peternakan berupa potensi ternak dan keragaman jenis ternak, potensi sumberdaya manusia (peternak) dan potensi wilayah ternak (daya dukung lahan dan kesesuaian lahan) harus menjadi rujukan awal untuk membuat perencanaan pembangunan kedepan. Dengan memperhatikan beberapa elemen yang terkait dengan perencanaan pewilayahan tersebut, maka dapat dicapai sasaran yang diinginkan oleh Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun pemerintah kabupaten/kota dalam membuat strategi yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Landasan utama penyusunan pewilayahan pembangunan peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengacu kepada kebijakan pewilayahan pembangunan peternakan yang tertuang dalam Pewilayahan Pembangunan Pertanian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh Kantor Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2000. Selain itu penyusunan pewilayahan peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menggunakan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap wilayah basis, analisis SWOT, serta mengacu kepada potensi wilayah dan daya dukung lahan (berdasarkan nilai KPPTR).

Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun propinsi antara lain memuat arahan sentra-sentra produksi komoditas ternak di wilayah Kabupaten yang memiliki prospek pengembangan peternakan pada tahun 2010. Arahan sentra produksi ditetapkan untuk memperjelas penggunaan tata ruang antara sub sektor peternakan dengan sektor dalam pertanian, maupun tata ruang antara sub sektor peternakan dengan sektor lain diluar pertanian (kehutanan, perkebunan, pertambangan dan industri).

Berdasarkan hasil pengolahan data populasi ternak dengan analisis KPPTR diperoleh nilai-nilai yang menunjukkan kecenderungan yang berbeda bagi setiap wilayah. Nilai KPPTR positif menunjukkan kecenderungan bahwa wilayah kabupaten terkait masih memungkinkan penambahan populasi ternak ruminansia sejumlah satuan ternak yang ada, sedangkan nilai KPPTR negative menunjukkan kecenderungan bahwa wilayah yang bersangkutan perlu diarahkan untuk pengembangan areal lahan yang menjadi daya dukung pokok usaha peternakan, seperti padang rumput, areal pertanian, dll.

Secara keseluruhan, dalam skala propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kapasitas tampung ternak Ruminansia menunjukkan angka yang positif sebesar 567.250,01 ST. Hal ini berarti bahwa dalam kacamata propinsi masih dimungkinkan penambahan populasi ternak ruminansia sebesar itu yang antara lain dapat disebarkan di beberapa wilayah kabupaten dengan KPPTR bernilai positif (Simeuleu, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Langsa). Sementara daerah-daerah lainnya selain yang disebutkan tersebut adalah daerah dengan nilai KPPTR negative, yang berarti bahwa daerah-daerah dengan nilai KPPTR tersebut tidak disarankan untuk dijadikan lokasi penambahan populasi ternak ruminansia, tetapi lebih tepat apabila di atahkan untuk optimalisasi dan perluasan kembali daya dukung lahannya.

Peta sebaran KPPTR dan wilayah basis ternak dapat dilihat pada lampiran 2. Secara lebih detail mengenai nilai KPPTR (dalam satuan ternak) di setiap kabupaten disajikan dalam Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1. Kapasitas Penambahan populasi Ternak Ruminansia per Kabupaten (ST)

KABUPATEN	POPULASI TERNAK (ST)	DAYA TAMPUNG	KPPTR
Simeulue	23,408.8	39,099.40	15,690.59
Aceh Singkil	5,161.1	3,900.97	(1,260.10)
Aceh Selatan	24,237.7	30,158.87	5,921.19
Aceh Tenggara	51,515.3	156,208.06	104,692.75
Aceh Timur	118,241.5	117,035.46	(1,206.08)
Aceh Tengah	46,356.4	148,714.00	102,357.58
Aceh Barat	56,427.1	89,995.51	33,568.38
Aceh Besar	103,855.6	130,316.51	26,460.86
Pidie	124,706.8	117,801.60	(6,905.24)
Bireuen	99,503.0	43,699.55	(55,803.49)
Aceh Utara	99,947.0	83,728.46	(16,218.58)
Aceh Barat Daya	9,830.9	26,765.46	16,934.59
Gayo Lues	25,300.8	142,484.82	117,183.98
Aceh Tamiang	6,713.8	51,601.53	44,887.68
Nagan Raya	11,022.0	154,676.72	143,654.71
Aceh Jaya	10,867.7	49,843.87	38,976.17
Bener Meriah	-	-	-
Banda Aceh	3,210.5	1,343.67	(1,866.85)
Sabang	1,271.7	1,260.63	(11.07)
Langsa	2,532.6	2,929.46	396.89
Lhokseumawe	1,350.9	1,146.94	(203.93)
Propinsi NAD	825,461.5	1,392,711.51	567,250.01

Sumber : Data Diolah, 2006

Penjabaran lebih lanjut dari Kapasitas Tampung atau KPPTR adalah wilayah Basis untuk komoditas peternakan, terutama ternak ruminansia. Indikasi suatu wilayah dikategorikan sebagai basis komoditas ternak adalah berdasarkan analisis Location Quotion, dimana apabila nilai LQ lebih besar dari 1 maka wilayah tersebut merupakan wilayah basis.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penyebaran basis-basis wilayah untuk ternak ruminansia hamper merata di setiap kabupaten. Untuk komoditas sapi perah, wilayah basis terdapat di 2 kabupaten, yaitu kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Utara, dengan nilai LQ masing-masing sebesar 3,65 dan 6,10. wilayah basis untuk ternak sapi potong terdapat hamper merata di wilayah aceh bagian utara dan selatan dengan wilayah basis tertinggi pada daerah Bireun. Wilayah basis untuk ternak kerbau terdapat di 3 daerah utama, yaitu daerah Simeuleu, Aceh Barat dan daerah Gayo lues, meski di daerah lain pun terdapat ternak kerbau, tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantaranya. Wilayah basis untuk ternak kambing hampir merata terdapat di beberapa daerah, namun demikian daerah dengan nilai basis tertinggi terdapat di daerah Aceh Barat. Wilayah basis ternak domba terdapat di wilayah Aceh Tenggara dengan nilai LQ 2,78, meski keberadaan ternak domba juga terdapat di daerah-daerah lainnya yang juga dapat dikatakan sebagai basis.

Berdasarkan nilai LQ, komoditas-komoditas ternak yang menjadi basis di wilayah-wilayah tertentu dapat dijadikan sebagai ternak unggulan. Hal ini dikaitkan dengan jumlah populasi dan kecenderungan kebiasaan masyarakat dalam memelihara jenis ternak yang menjadi basis tersebut. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, Master Plan yang disusun sebaiknya mempertimbangkan orientasi kawasan ternak, yang tersebar dan bervariasi di setiap wilayah dengan pertimbangan kondisi Kapasitas Tampung Populasi Ternak Ruminansia (KPPTR)-nya. Hal ini dapat dilakukan, dengan asumsi bahwa pada wilayah basis KPPTR akan mendukung kebijakan penambahan populasi dan sesuai dengan daya tampungnya.

Secara detail mengenai wilayah-wilayah basis untuk komoditas ternak ruminansia disajikan pada Tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2. Wilayah Basis Komoditas Ternak Ruminansia

KABUPATEN	SAPI PERAH	SAPI POTONG	KERBAU	KAMBING	DOMBA
Simeulue		0.58	4.06	0.39	-
Aceh Singkil		0.11	0.13	0.56	1.34
Aceh Selatan		0.14	1.20	1.96	1.64
Aceh Tenggara		1.01	1.86	1.72	2.78
Aceh Timur		1.99	1.58	1.24	0.61
Aceh Tengah		1.00	0.99	0.10	0.09
Aceh Barat		0.91	2.86	2.31	1.69
Aceh Besar	3.65	1.84	1.39	1.40	1.92
Pidie		1.29	1.51	0.95	0.34
Bireuen		1.98	0.45	1.27	1.57
Aceh Utara	6.10	1.43	0.22	1.17	1.15
Aceh Barat Daya		0.22	0.79	1.16	1.39
Gayo Lues		0.29	4.97	2.37	4.07
Aceh Tamiang		0.18	0.05	0.19	0.22
Nagan Raya		0.13	1.00	1.51	1.18
Aceh Jaya		1.00	0.52	0.54	0.01
Bener Meriah		-	-	-	-
Banda Aceh		0.07	0.02	0.15	0.28
Sabang		0.23	0.02	0.85	0.01
Langsa		0.09	0.05	0.19	0.69
Lhokseumawe		0.05	0.01	0.11	0.03

Sumber : Data Diolah, 2006

Wilayah-wilayah basis untuk komoditas ternak non ruminansia/unggas terdapat hampir merata di setiap kabupaten/kota, terutama sekali untuk komoditas ternak ayam buras dan ayam pedaging. Untuk itu, penentuan wilayah basis dan pengembangan untuk komoditi ternak unggas cenderung relative dapat dilakukan di setiap kabupaten.

Tabel 4.3. Wilayah Basis Komoditas Ternak Non Ruminansia /Unggas

KABUPATEN	AYAM BURAS	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	ITIK
Simeulue	0.37	-	0.18	0.13
Aceh Singkil	1.34	-	0.29	0.25
Aceh Selatan	2.52	0.27	1.15	1.00
Aceh Tenggara	1.33	-	1.60	1.35
Aceh Timur	1.51	-	3.06	2.60
Aceh Tengah	0.37	-	0.15	0.13
Aceh Barat	1.18	0.31	0.58	0.42
Aceh Besar	0.38	5.97	1.96	1.31
Pidie	0.26	2.39	0.10	1.70
Bireuen	0.35	1.29	0.49	0.69
Aceh Utara	1.24	0.51	1.76	1.53
Aceh Barat Daya	3.11	-	1.47	1.28
Gayo Lues	2.07	-	2.81	2.45
Aceh Tamiang	0.72	-	0.03	0.03
Nagan Raya	1.53	2.02	1.51	0.67
Aceh Jaya	1.63	-	0.82	0.53
Bener Meriah	-	-	-	-
Banda Aceh	0.88	0.54	0.16	0.04
Sabang	0.68	-	0.10	0.06
Langsa	1.38	-	0.21	0.18
Lhokseumawe	0.49	-	0.85	0.39

Sumber : Data Diolah, 2006

Penentuan wilayah utama pengembangan dan sentra yang masih dapat diorientasikan untuk penambahan populasi ternak ruminansia (seperti diuraikan pada table 4.4) adalah daerah-daerah basis dengan kapasitas tampung yang relative besar. Namun demikian bukan berarti daerah-daerah yang tidak masuk dalam ketogori ini tidak dapat dijadikan sentra/basis pengembangan, tetapi dapat diarahkan sebagai wilayah buffer/penyangga.

Tabel 4.4. Nilai KPPTTR Positif dan Wilayah Basis

KABUPATEN	KPPTTR	BASIS
Simeulue	15,690.59	4.91
Aceh Selatan	5,921.19	1.96
Aceh Tenggara	104,692.75	4.60
Aceh Tengah	102,357.58	2.44
Aceh Barat	33,568.38	5.28
Aceh Besar	26,460.86	5.17
Aceh Barat Daya	16,934.59	1.33
Gayo Lues	117,183.98	5.56
Nagan Raya	143,654.71	1.50
Aceh Jaya	38,976.17	2.06

Sumber : Data Diolah, 2006

Sementara itu, untuk wilayah-wilayah basis dengan nilai KPPTTR negative (seperti diuraikan pada Tabel 4.5.), yang berarti bahwa wilayah yang bersangkutan sudah mengalami kekurangan daya dukung wilayah. Maka orientasi pengembangan peternakan diarahkan pada penyediaan dan perluasan areal daya dukung lahan untuk usaha peternakan.

Tabel 4.5. Nilai KPPTTR Negatif pada Wilayah Basis

KABUPATEN	KPPTTR	BASIS
Aceh Timur	(1,206.08)	5.69
Pidie	(6,905.24)	3.98
Bireuen	(55,803.49)	4.29
Aceh Utara	(16,218.58)	3.08

Sumber : Data Diolah, 2006

Untuk daerah-daerah dengan KPPTTR positif namun bukan merupakan wilayah basis dan KPPTTR negative dan juga bukan merupakan wilayah basis (seperti diuraikan pada Tabel 4.6. dan 4.7.) dapat diarahkan sebagai wilayah penyangga bagi penyediaan komoditi ternak dan daya dukung lahan, misalnya kegiatan perdagangan, pembibitan dan atau bahkan penyediaan pakan.

Tabel 4.6. Nilai KPPTTR Positif pada Wilayah Non-Basis

KABUPATEN	KPPTTR	BASIS
Aceh Tamiang	44,887.68	0.44
Langsa	396.89	0.28

Sumber : Data Diolah, 2006

Tabel 4.7. Nilai KPPTTR Negatif pada Wilayah Non-Basis

KABUPATEN	KPPTTR	BASIS
Aceh Singkil	(1,260.10)	0.54
Banda Aceh	(1,866.85)	0.20
Sabang	(11.07)	0.67
Lhokseumawe	(203.93)	0.15

Sumber : Data Diolah, 2006

Rumusan dasar mengenai pewilayah komoditi ternak disajikan pada Lampiran 2 sampai dengan Lampiran 11 pada bagian akhir laporan ini.

Berdasarkan temuan-temuan lapangan seperti diuraikan di atas, untuk dapat membangun peternakan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kawasan dan pola kemitraan. Hal ini dapat dilakukan karena adanya pertimbangan wilayah dan kawasan untuk komoditi unggulan, juga didasarkan pada pertimbangan teknis bahwa pada usaha ternak dengan berasumsi peternak penerima harga (*price taker*) baik harga input maupun output, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha adalah kegiatan untuk meningkatkan produksi semaksimal mungkin dengan biaya yang optimal. Untuk itu perlu diperhatikan tiga aspek penting agar produksi usaha ternak dapat berhasil dengan baik, yaitu : bibit ternak yang digunakan; jumlah dan teknik pemberian pakan; dan manajemen usaha ternak itu sendiri.

1. **Aspek Bibit.** Pada usaha ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, kambing dan domba) bibit merupakan komponen biaya yang relatif besar (Ilham dan Saktyanu, 1995). Disamping itu, sebagai unit industri biologis yang mampu merubah material relatif kurang bernilai (pakan) menjadi material yang sangat bernilai bagi kehidupan manusia (daging, telur, dan susu), kualitas bibit sangat menentukan tingkat produksi. Bibit ternak yang berkualitas baik dapat dilihat dari tingkat produktivitasnya, antara lain berupa pertambahan berat badan per hari pada ternak potong, produksi susu per ekor per laktasi, dan produksi telur per siklus usaha. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi diperlukan kondisi lingkungan yang sesuai dengan kemampuan genetik ternak tersebut, dalam hal ini antara lain jumlah dan kualitas pakan serta lokasi usaha yang sesuai dengan adaptasi hidup ternak. Hasil studi Hadi dan Ilham (2000) pada usaha sapi potong di Wonosobo dan Grobogan menunjukkan bahwa usaha penggemukan dan pembibitan dengan menggunakan bibit bangsa turunan sapi FH dan Simental memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan menggunakan bangsa sapi turunan PO dan Simental. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan kemampuan sapi tersebut mengkonversi pakan menjadi daging yang diturunkan secara genetik dan didukung oleh manajemen pemeliharaan yang baik sehingga mampu menghasilkan performa produksi yang baik pula. Pada ternak ayam ras potensi genetik bibit ini telah dimanfaatkan dengan baik, namun pada ternak lainnya masih potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan subsektor peternakan.
2. **Aspek Pakan.** Pakan merupakan aspek penting dalam usaha ternak selain bibit. Pada peternakan ayam ras pedaging biaya pakan merupakan 55,6 – 66,6 persen dari total biaya produksi (Saptana dan Rusastra, 2001). Kondisi ini tidak jauh berbeda pada ayam ras petelur, karena pemanfaatan teknologi pakan sudah sedemikian maju pada usaha ayam ras. Sebaliknya untuk ternak ruminansia, sebagian besar peternak masih menggunakan pakan sesuai dengan potensi yang ada yang pada umumnya berasal dari rumput alam yang dicari atau bahkan dengan melepas ternak pada padang penggembalaan umum yang kualitasnya rendah. Dengan demikian perbaikan pemberian pakan baik dari segi jumlah, mutu, dan teknik penyajiannya diharapkan masih mampu meningkatkan efisiensi usaha ternak. Menurut pihak *feedlotter*, dengan menggunakan kombinasi pakan tertentu, usaha penggemukan sapi potong eks impor yang dilakukannya dan plasmanya mampu menghasilkan pertambahan berat badan per hari yang relatif tinggi, yaitu antara 1,25 hingga 1,50 kg/ekor/hari. Pada usaha penggemukan rakyat yang menggunakan sapi persilangan Simental pertambahan beratnya berkisar 1,18 – 1,32 kg/ekor/ hari (Subiharta *et al.*, 2000). Sementara itu pada kondisi peternakan tradisional pertambahan berat badan hanya berkisar 0,50 kg/ ekor/hari (Ilham dan Saktyanu, 1995). Penelitian Budiarsana dan Haryanto (1997) menunjukkan bahwa walaupun sudah ada upaya perbaikan pakan terhadap Sapi PO, manfaatnya tidak berbeda pada kondisi control. Selain perbaikan mutu pakan, menurut Siregar (1992), frekuensi pemberian pakan lebih dari dua kali sehari dapat meningkatkan konsumsi pakan maupun zat-zat makanan, serta meningkatkan daya cerna terhadap pakan yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi susu. Padahal saat ini pemberian pakan tersebut sebagian besar masih dilakukan dua kali sehari, khususnya pada peternak sapi perah di Jawa Timur (Ilham, 2000). Artinya perbaikan manajemen pakan berpotensi untuk meningkatkan efisiensi usaha.
3. **Aspek Manajemen.** Aspek manajemen antara lain meliputi pola kelembagaan usaha peternakan, skala pengusahaan, dan lokasi usaha. Aspek ini tidak berkaitan langsung dengan teknik produksi ternak, namun berpengaruh terhadap efisiensi usaha ternak yang dilakukan.

Keragaman aspek manajemen yang tinggi pada usaha peternakan rakyat merupakan potensi untuk meningkatkan efisiensi usaha peternakan di Indonesia. Pola usaha juga menentukan tingkat manajemen usaha. Peternak yang mengikuti pola kemitraan manajemen usahanya akan lebih baik, karena peternak tidak terlalu memikirkan bagaimana harus mengadakan sarana produksi peternakan dan memasarkan hasil produksi dan juga lebih akses terhadap teknologi yang diterima melalui mitranya. Sebaliknya pada pola mandiri, peternak harus memperhatikan semua aspek agribisnis usahanya, sehingga peluang risiko yang diterima semakin tinggi. Pada usaha ternak ayam ras pola kemitraan ini banyak diaplikasikan dan sudah berkembang. Adanya krisis ekonomi pertengahan 1997 menyebabkan terganggunya usaha ternak ayam ras akibat banyaknya komponen impor yang digunakan pada usaha ini. Namun demikian menurut Saptana dan Rusastra (2000), usaha ternak ayam ras dengan pola kemitraan masih layak untuk dikembangkan walaupun dengan tingkat profitabilitas yang menurun akibat dari krisis tersebut. Pola mandiri sudah tidak layak untuk dikembangkan kecuali pada usaha ayam ras petelur. Kasus pada usaha sapi perah, banyak studi menyatakan bahwa rata-rata skala pengusahaan sapi perah induk di berbagai sentra produksi susu segar berkisar 2 – 3 ekor tiap peternak. Padahal tingkat efisiensi tertinggi dicapai pada skala pengusahaan 5 – 7 ekor (Swastika *et al.*, 2000). Untuk meningkatkan efisiensi tersebut diperlukan tambahan sapi induk yang dipelihara. Selain disebabkan keterbatasan modal, kendala peningkatan skala usaha adalah terbatasnya pemilikan lahan untuk kandang dan kebun rumput. Untuk mengatasi kendala ini pada beberapa daerah dikembangkan konsep Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) dimana di dalam kawasan tersebut terdapat kandang, kebun rumput dan fasilitas lain yang memadai.

4. **Keunggulan Komparatif.** Daya saing atau efisiensi ekonomi relatif suatu sistem komoditas dapat dinilai dari koefisien rasio biaya sumberdaya domestik (*Domestic Resource Cost Ratio* = DRCR). Jika nilai DRCR lebih kecil dari satu, maka aktivitas ekonomi komoditas yang dianalisis efisien dalam penggunaan sumberdaya domestik. Atau dalam perkataan lain komoditas tersebut mempunyai keunggulan komparatif. Pemenuhan permintaan terhadap suatu komoditas akan lebih menguntungkan diproduksi di dalam negeri dari pada harus mengimpor. Untuk menghitung koefisien DRCR digunakan analisis matriks kebijaksanaan (*Policy Analysis Matrix/PAM*) menurut Monke dan Pearson (1989). Semakin kecil nilai DRCR, semakin efisien komoditas tersebut diproduksi di dalam negeri. Sebaliknya, jika nilai DRCR lebih besar dari satu, maka pemenuhan permintaan dalam negeri akan lebih efisien dilakukan dengan cara mengimpor. Berbeda dengan analisis usahatani atau kelayakan finansial, ruang lingkup analisis hanya pada masing-masing subsistem secara terpisah. Pada analisis keunggulan komparatif yang merupakan analisis sistem komoditas, ruang lingkup analisis mencakup keseluruhan dari sistem agribisnis dari hulu sampai ke hilir dan berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan internasional. Oleh karena itu selain dipengaruhi oleh sistem agribisnisnya juga dipengaruhi pasar internasional dimana variabel nilai tukar rupiah sangat menentukan kestabilan daya saing komoditas yang dianalisis. Beberapa hasil studi tentang keunggulan komparatif komoditas peternakan menunjukkan bahwa untuk memenuhi permintaan produk ternak dalam negeri akan lebih efisien diproduksi di dalam negeri dari pada harus mengimpor. Ilham dan Swastika (2001) memperoleh nilai DRCR produk susu segar pada tingkat Industri Pengolahan Susu (IPS) sebesar 0,5735 – 0,6713, berturut-turut untuk dataran rendah (Pasuruan dan Sumedang) dan dataran tinggi (Bandung dan Malang). Adnyana *et al.* (1997) memperoleh nilai DRCR produk daging sapi pada berbagai pola usaha berkisar 0,5466 – 0,9825; Saptana dan Rusastra (2001) memperoleh nilai DRCR produk daging ayam ras berkisar 0,855 – 0,921; sedangkan Hutabarat dan Winarso (1994) memperoleh nilai DRCR untuk pengusahaan babi anak 0,16; usaha babi tanggung 0,90; usaha babi potong 0,72; dan untuk petani ternak babi potong sebesar 0,70. Seperti diutarakan sebelumnya, nilai DRCR ini sangat dipengaruhi oleh efisiensi subsistem yang ada dan sistem agribisnis secara keseluruhan. Untuk itu selain keharusan adanya efisiensi usaha di tingkat subsistem, sistem agribisnis tersebut hendaknya dikelola secara terintegrasi. Jika kita lihat nilai DRCR, usaha menghasilkan daging sapi dan daging ayam akan lebih efisien pada pola usaha kemitraan dimana derajat integrasi sistem agribisnisnya lebih tinggi dibandingkan usaha pola mandiri. Makin tinggi derajat integrasi sistem agribisnis produk ternak berarti margin gandanya akan semakin kecil dan sistem agribisnisnya akan semakin efisien. Hanya masalahnya sistem agribisnis yang terintegrasi tersebut sulit dilakukan oleh peternak yang mempunyai modal terbatas dengan skala usaha yang kecil. Usaha produksi susu segar dalam negeri yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) derajat integrasi tersebut sudah

baik. Aktivitas subsistem pengadaan sarana produksi seperti : pengadaan bibit, pakan, dan obat-obatan dilakukan oleh koperasi. Demikian pula halnya aktivitas pada subsistem hilir yaitu pengolahan pemasaran juga telah ditangani koperasi, namun untuk pengolahan volumenya masih terbatas (Swastika *et al.*, 2000). Menurut Yusdja dan Iqbal (1999) manfaat yang diterima dari aktivitas di hulu dan hilir tersebut belum banyak bermanfaat bagi peternak, karena hanya merupakan lahan garapan beberapa pengelola koperasi. Dengan mekanisme kerja yang baik dan memberdayakan peran anggota diharapkan masalah tersebut dapat dihilangkan. Upaya peningkatan efisiensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Beberapa sumberdaya yang perlu dioptimalkan penggunaannya pada usaha ternak adalah sumberdaya alam seperti bahan baku pakan lokal dan bibit ternak lokal; sumberdaya kapital berupa kredit program; sumberdaya teknologi peternakan; dan sumberdaya manusia dalam hal ini peternak sebagai manajer dan pekerja. Hal tersebut dapat dilakukan pada masing-masing subsistem atau dalam sistem secara keseluruhan. Upaya peningkatan efisiensi dari sisi produksi (subsistem) dapat dilakukan dengan cara memperkecil kesenjangan teknologi hasil penelitian dengan penerapan aktualnya di masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor biaya-manfaat dari aktivitas tersebut. Di samping itu pada tingkat teknologi yang penerapannya sudah maksimal seperti penggunaan berbagai *breed* untuk menghasilkan *final stock* dengan penggunaan pakan konsentrat yang sudah maju saat ini, perlu diupayakan penemuan *breed* baru dengan kondisi pakan tertentu sehingga mampu menghasilkan ternak dengan pertambahan berat badan per harinya yang tinggi dengan biaya pakan yang relatif murah. Sementara itu dalam sistem agribisnis perlu konsolidasi antar subsistem antara lain melalui koordinasi integrasi vertikal dalam kesatuan keputusan manajemen dan menghilangkan sekat-sekat yang ada antar subsistem sehingga mampu menghilangkan margin ganda dan memperkecil terjadinya asimetri informasi yang terjadi selama ini.

5. **Pengadaan Sarana Produksi.** Sarana produksi utama dalam kegiatan usaha ternak adalah bibit dan pakan. Pada usaha ternak unggas kedua faktor produksi tersebut sudah cukup optimal dimanfaatkan, sebaliknya terjadi pada usaha ternak sapi perah, sapi potong dan ternak kecil. Pada saat ini rata-rata induk sapi perah yang dipelihara pada usaha peternakan rakyat produktivitasnya masih rendah yaitu berkisar 3.127 – 4.848 liter/ekor/laktasi (Swastika *et al.*, 2000). Menurut Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Baturaden (2000) kisaran produksi tersebut masih masuk dalam katagori sertifikat kelas C dengan kisaran Produksi 4.000 – 5.000 liter, sedangkan kelas A dan B masing-masing lebih dari 6.000 liter dan berkisar 5.001 – 6.000 liter. Pada usaha sapi potong, kegiatan inseminasi buatan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan populasi ternak masih belum banyak memberikan hasil yang diharapkan, khususnya untuk daerah sentra-sentra produksi peternakan luar Jawa. Sementara itu di Jawa dan beberapa daerah luar Jawa yang kegiatan usaha penggemukan sapi sudah maju dengan orientasi menggunakan sapi-sapi persilangan keturunan *Bos taurus* (Sapi Eropa), seperti *Simental*, *Limosin*, dan *Angus*, peternak mengalami kesulitan mendapatkan sapi bakalan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kegiatan usaha pembibitan karena kurang memberikan insentif bagi peternak dan keterbatasan produksi semen beku untuk bangsa sapi tersebut sehingga distribusinya tidak sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini dapat diindikasikan dengan semakin mahalnya harga ternak sapi potong bakalan di daerah sentra penggemukan. Pada usaha ternak kecil khususnya kambing/domba hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bibit adalah perlunya menjaga kelestarian bibit lokal yang dapat digunakan untuk kegiatan pemulia agar dapat menghasilkan ternak dengan produktivitas tinggi. Adanya kesempatan yang diberikan kepada Indonesia (kawasan IMT-GT) untuk memasok kebutuhan ternak bagi negara di kawasan Timur Tengah hingga kini belum dapat dipenuhi diantaranya disebabkan tidak mampunya kita menghasilkan domba potong dengan berat hidup yang disyaratkan. Untuk mengatasi hal tersebut selain yang telah dilakukan pihak swasta, hendaknya pemerintah lebih meningkatkan perhatiannya dalam kegiatan perbibitan ternak, baik melalui penelitian pemulia, seleksi ternak dan penemuan *cross breed* yang mempunyai penampilan produksi yang tinggi yang tentunya harus didukung dengan produksi semen yang berkualitas dan disenangi pasar. Disamping itu untuk mendukung usaha pembibitan, hendaknya pihak swasta dilibatkan dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan berusaha. Sementara itu pada sisi peternakan rakyat, pengembangan usaha pembibitan yang dilakukan pemerintah hendaknya selalu dikaitkan dengan program penggemukannya. Artinya peternak yang mendapat paket program penggemukan diwajibkan juga melakukan kegiatan pembibitan secara bersama dan sebaliknya, sehingga peternak akan mendapatkan insentif dalam berusaha.

6. **Produksi.** Pada subsistem produksi skala usaha peternak sangat menentukan efisiensi usaha. Oleh karena itu perlu peningkatan skala usaha hingga pada skala yang optimal. Untuk itu diperlukan modal. Hal ini dapat dilakukan melalui program kredit, karena hasil pengamatan menunjukkan sebagian besar usaha ternak selalu berhasil dalam melaksanakan program kredit asalkan sasaran penerima kredit diseleksi dengan baik dan tidak terburu-buru. Untuk mengatasi keterbatasan lahan untuk kandang dan kebun rumput akibat peningkatan skala usaha dapat dilakukan pengembangan Kawasan Usaha Peternakan khususnya dalam bentuk lahan penggembalaan. Selama ini secara fisik kawasan tersebut sudah ada tapi diperebutkan antar beberapa kepentingan (perkebunan, kehutanan, tanaman pangan dan lainnya).
7. **Pengolahan.** Kualitas produk peternakan sangat sensitif terhadap perlakuan yang diberikan sejak berupa bentuk daging dan susu sampai ke tangan konsumen. Kualitas merupakan salah satu syarat daya saing suatu produk. Untuk meningkatkan kualitas akhir produk peternakan berupa daging dan susu diperlukan fasilitas pengolahan yang memenuhi standar dan *higienis*. Untuk itu diperlukan fasilitas rumah potong ternak yang standar dan dengan ukuran sesuai dengan kapasitas pelayanan pasarnya. Khusus untuk susu segar yang selama ini pasarnya masih terbatas perlu diupayakan untuk melakukan diversifikasi produk menjadi produk olahan antara lain berupa susu pasteurisasi yang dikemas dengan baik sehingga dapat dipasarkan lebih luas. Demikian pula halnya dengan yoghurt, keju, dan produk lainnya. Selama ini upaya tersebut sudah mulai dilakukan namun perlu ditingkatkan sehingga nilai tambah yang diperoleh peternak dan koperasinya semakin meningkat.
8. **Pemasaran.** Sarana transportasi ternak potong antar pulau selama ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan sarana kapal, sehingga pedagang harus menunggu beberapa hari agar ternaknya dapat diantarpulaukan. Ditambah lagi dengan adanya penyusutan berat badan ternak selama dalam perjalanan. Disisi lain pedagang yang biasanya mengumpulkan ternak dari peternak yang menjual satu dua ekor membutuhkan pedagang-pedagang perantara sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama juga agar ternak tersebut dapat diantarpulaukan. Hal ini antara lain disebabkan oleh pemilikan ternak yang relatif kecil dan tidak semua daerah sentra produksi mempunyai pasar hewan. Kondisi seperti ini menyebabkan adanya margin ganda dan pengeluaran yang tidak perlu. Untuk mengatasi hal tersebut selain diperlukan infrastruktur berupa kapal, kereta api dan pasar hewan, ada pemikiran untuk menggantikan perdagangan ternak hidup dengan daging segar dan beku. Namun hal tersebut membutuhkan waktu dan upaya, karena hingga saat ini konsumen masih lebih menyukai daging segar dari pada daging beku. Selain itu diperlukan sarana rumah potong hewan dan transportasi daging yang memenuhi standar. Untuk menjamin agar kualitas produk ternak sampai ke konsumen maka selain fasilitas rumah potong ternak, diperlukan pula fasilitas pasar berupa toko daging (*meat shop*), los daging di pasar becek dan pasar swalayan yang memenuhi standar. Demikian pula dengan keberadaan depo atau distributor susu segar dan susu pasteurisasi beserta pengecer dengan fasilitas yang layak perlu lebih ditingkatkan untuk mendekatkan produk ini ke konsumen.
9. **Sistem Agribisnis.** Untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan menghilangkan margin ganda dalam usaha suatu komoditas peternakan diperlukan pengelolaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Upaya tersebut akan lebih mudah dilakukan oleh perusahaan yang bermodal besar. Permasalahannya adalah sebagian besar pelaku agribisnis peternakan adalah peternak kelas menengah ke bawah. Agar pengembangan usaha agribisnis tersebut dapat mengakomodasi tujuan untuk meningkatkan daya saing produk dan sekaligus melibatkan peternak skala menengah kebawah, ada tiga alternatif integrasi yang mungkin dilakukan, yaitu : (1) integrasi vertikal yang dikelola secara profesional oleh suatu perusahaan swasta; (2) integrasi vertikal yang dilakukan peternak secara bersama-sama yang tergabung dalam wadah koperasi atau organisasi lainnya; dan (3) kombinasi diantaranya yang sering dikenal dengan usaha kemitraan. Pengelompokan diatas sesuai dengan pendapat Yusdja *et al.* (2000), yang mengatakan suatu agribisnis akan dapat berkembang bila memenuhi azas keterpaduan di antara subsistem yang ada dalam sistem agribisnis. Pembangunan peternakan melalui pendekatan agribisnis adalah pembangunan peternakan secara keseluruhan yang melibatkan *on farm* dan *off farm*, baik untuk skala besar maupun usaha rakyat. Dengan demikian peternak skala menengah didorong untuk mandiri dengan bantuan *public investment* untuk pengadaan fasilitas agribisnis yang menuntut biaya tinggi. Bagi usaha rakyat yang tidak memenuhi kegiatan agribisnis harus bermitra dengan peternak skala besar.

Berdasarkan uraian di atas, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, kegiatan usaha ternak kambing-domba dituntut untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Kerangka Pemikiran dalam penilaian kelayakan suatu kegiatan usaha ternak perlu dilakukan pada aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen dan aspek keuangan. Analisis aspek pasar dilakukan dengan melihat potensi pasar, pangsa pasar dan bauran pemasaran serta orientasi pengembangannya. Analisis aspek teknis dilakukan dengan melihat kondisi usaha atau kelembagaan usaha yang terkait dengan lokasi, kondisi, proses produksi/budidaya dan teknologi yang digunakan serta layout yang digunakan. Analisis aspek manajemen dilakukan dengan melihat bentuk usaha, struktur pengorganisasian kegiatan usaha dan standar prosedur kerjanya. Sedangkan untuk analisis finansial dilakukan dengan melihat aliran kas masuk, aliran kas keluar, kriteria kelayakan investasi dan tingkat sensitivitasnya.

4.2. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Peternakan (Analisis SWOT)

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dapat diukur dengan meningkatkan pendapatan per-kapita dan pemenuhan kebutuhan dasar (*kebutuhan primer*) penduduknya seperti kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan telah terpenuhinya kebutuhan dasar secara alami masyarakat akan mencari lagi kebutuhan sekunder yaitu pangan, kekayaan dan kepuasan pribadi. Perkembangan ekonomi masyarakat berkembang dari ekonomi yang bertumpu pada industri primer (*ekstraktif*), berkembang ke industri sekunder (industri pengolahan) dan kemudian ke industri tersier (*jasa*). Semakin maju suatu perekonomian masyarakat akan ditandai oleh makin besarnya share sektor industri dan jasa dalam ekonomi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat diuraikan beberapa hal terkait dengan Kekuatan-kelemahan-Ancaman dan Peluang, (Analisis SWOT) sebagai berikut :

Strengths

1. Ketersediaan lahan yang luas,
2. Potensi sumber hijauan alami masih melimpah dan bervariasi, yang berasal dari rumput alam dan tanaman kacang-kacangan. Tidak pernah terjadi kekurangan hijauan seperti yang dialami di daerah lain pada saat musim kemarau;
3. Potensi perkebunan yang dapat mendukung pengembangan pertanian terpadu dengan komponen usaha ternak.
4. Lahan penggembalaan masih tersedia cukup luas disamping lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dapat menjadi pendukung yang potensial;
5. Kondisi tanah dan agroekosistem wilayah sesuai untuk pengembangan ternak Ketersediaan unsur hara tanah S, K, dan Mg di wilayah potensial untuk pengembangan umumnya mencukupi. Tingkat kesesuaian wilayah di beberapa wilayah pengembangan umumnya tinggi.
6. Ketersediaan dana pemerintah yang besar dalam pengembangan berbagai sektor termasuk peternakan;
7. Dukungan sumberdaya manusia dalam jangka panjang dengan telah dikembangkannya Fakultas Peternakan Perguruan Tinggi di Nanggroe Aceh Darussalam, yang lebih memfokuskan menghasilkan sarjana peternakan dalam rangka pengelolaan sumberdaya di Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Posisi wilayah yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional maupun internasional (Malaysia dan Singapura).
9. Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak termasuk wilayah endemi penyakit Anthrax sebagaimana daerah pesaingnya seperti Jambi dan Sumatera Barat.
10. Kawasan-kawasan yang telah dibentuk yang merupakan potensi dalam penyediaan bibit maupun ternak konsumsi.
11. Potensi sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian,

Weakness

1. Kondisi tanah umumnya berlebihan untuk unsur hara Fe dan Mn sebaliknya defisiensi atau marjinal untuk unsur hara Ca, P, Cu, Zn, dan Na.
2. Harga pakan konsentrat umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi sekitarnya.
3. Potensi pengembangan menyebar di berbagai wilayah sehingga disamping memerlukan manajemen fasilitas yang lebih baik juga biaya produksi lebih tinggi.
4. Motivasi dan keterampilan penduduk asli masih lemah sehingga pengembangan usaha peternakan baru terjadi pada wilayah wilayah penduduk pendatang (transmigran, urban). Hal ini akan menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal melalui usaha peternakan
5. Ketersediaan bibit rendah khususnya sapi potong, masih sangat tergantung dari pasokan luar seperti Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi. Populasi sapi potong di Nanggroe Aceh Darussalam
6. Topografi di wilayah potensial, terutama di Indragiri Hulu pada musim hujan sering terendam sehingga mempersulit penyediaan hijauan.
7. Ketersediaan dan kecukupan fasilitas layanan masih sangat rendah. Pengembangan fasilitas layanan baru intensif untuk fasilitas pos kesehatan hewan yang menyebar. Keterbatasan fasilitas tersebut akan menjadi kendala dalam kegiatan pengadaan bibit, budidaya, jaminan mutu produk dan distribusi, terutama apabila upaya ekspor produk peternakan akan dikembangkan;
8. Keterbatasan tenaga teknis di lapangan antara lain penyuluh, inseminator, dan pemeriksa kebuntingan.

Opportunity

1. Komitmen Pemerintah dalam mewujudkan peternakan tangguh di Asia Tenggara. Pengembangan pengembangan kawasan dan investasi yang cukup tinggi merupakan indikasi komitmen tersebut.
2. Kebijakan pemerintah Malaysia yang membatasi pengembangan peternakan dalam negeri dan membuka import secara lebih luas dalam mencukupi kebutuhan produk peternakan
3. Peningkatan tingkat konsumsi produk peternakan penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Permintaan produk ternak khususnya daging relatif stabil dengan adanya perubahan harga. Hasil perhitungan supply demand produk peternakan umumnya menunjukkan masih belum tercukupinya kebutuhan konsumsi.
4. Peningkatan permintaan produk peternakan organik, yang hal ini kemungkinan dapat dipenuhi dari sistem budidaya ternak di Nanggroe Aceh Darussalam yang cenderung alami khususnya pada ternak ruminansia.
5. Ekspor ke negara-negara muslim seperti Arab Saudi dan Malaysia yang mengharuskan adanya label halal, dan hal ini sangat dimungkinkan dilakukan oleh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan mayoritas penduduk muslim.

Threats

1. Persaingan kualitas dan harga dengan wilayah pesaing seperti Lampung dan Jambi serta produk import dari Australia dan New Zealand
2. Dumping harga dari negara-negara besar oleh karena penerapan kebijakan tidak adil antara negara maju dan berkembang. Sejak diterapkannya liberalisasi pertanian yang diputuskan dalam Putaran Uruguay, negara-negara maju justru meningkatkan proteksi produsen pertaniannya melalui subsidi besar-besaran
3. Kebijakan tarif import rendah bagi negara yang terikat dengan IMF dan Bank Dunia menyebabkan daya saing produksi lokal melemah;
4. Penyebaran wabah antraks dari wilayah Sumatera Barat dan Jambi oleh karena sistem distribusi dari dua wilayah tersebut cenderung sangat terbuka dan lemah pengendaliannya. Fasilitas perlindungan seperti karantina hewan dan holding ground belum tersedia secara

memadai. Pemasukan ternak sapi, kerbau, dan kambing ke wilayah Nanggroe Aceh Darussalam cukup tinggi setiap tahun, dapat menyebarkan penyakit tersebut.

5. Pengembangan usaha pembibitan sapi potong di Malaysia dengan menggunakan bibit sapi Bali, yang dikelola oleh perkebunan kelapa sawit Felda Pahang Sdri Tbk. Rencana import perusahaan tersebut dari Lombok sebanyak 2000 ekor, dan hal ini dalam jangka panjang dapat menjadi pesaing baik di tingkat lokal maupun regional.

Dengan berbagi perspektif pembangunan seperti hal tersebut diatas, kita akan melihat pembangunan ekonomi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Propinsi ini pada konstelasi regional di kawasan Asia Tenggara:

1. Berada pada poros regional yang menghubungkan wilayah Asia Tenggara dengan negara-negara lainnya.
2. Sebagai daerah penyangga Kota Batam dan negara-negara jiran yang merupakan pasar potensial bagi berbagai produk agribisnis.
3. Sebagai pintu kawasan perdagangan bebas dan daerah pengembangan produk peternakan yang potensial.

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah belakang dari kota-kota negara industri baru di Asia, seperti Singapura, Malaysia, Taiwan dan lainnya. Akses transportasi bagi hasil produksi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan produksi dari luar yang dibutuhkan penduduk dilakukan melalui jalan darat, laut dan udara. Ekonomi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditandai oleh industri besar seperti industri minyak, pengolahan kayu, elektronika, industri setor perkebunan dan pertanian tanaman pangan.

Bila dilihat dari cukup tingginya kontribusi pertanian, yang masih didominasi oleh sub sektor perkebunan, sementara sub sektor peternakan masih memiliki potensi dan prospek yang sangat besar, hal ini menunjukkan bahwa sektor industri peternakan sangat potensial untuk dikembangkan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah yang berarti bagi penunjang pembangunan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Demikian juga kalau ditinjau dari sektor tenaga kerja yang bekerja di masing-masing sektor menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja di sub sektor perkebunan. Disektor pertanian sendiri, pendapatan daerah masih didominasi sub sektor perkebunan. Dalam rangka mengembangkan pembangunan peternakan tersebut aspek-aspek yang menentukan adalah:

1. Infrastruktur. Hal-hal seperti infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, bangunan-bangunan untuk umum diperlukan untuk menghubungkan daerah produksi dengan kota-kota yang akan mendistribusikan lebih lanjut hasil tersebut kepada konsumen. Jalan dan jembatan ini juga akan memperlancar penyaluran input yang dibutuhkan ke lokasi. Dengan lancarnya transportasi dari kota ke daerah produsen selain akan memperlancar pengiriman barang juga akan mengurangi biaya transport sehingga daya saing produk yang dihasilkan akan lebih tinggi.
2. Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaku pembangunan peternakan seperti pemerintah, pengusaha/investor, petani dan buruh merupakan kunci bagi berhasilnya pengembangan pembangunan peternakan. Pelaku-pelaku ini perlu dikembangkan di bidang penguasaan teknologi, kemampuan manajemen dan perilaku bisnisnya. Agribisnis yang maju memerlukan sikap pelaku responsif terhadap perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi sekitarnya sehingga produktivitas akan selalu meningkat dan hasil produksinya mempunyai daya saing di pasar. Selain kualitas SDM pengusaha dan petani ternak yang juga perlu ditingkatkan adalah SDM aparat seperti petugas penyuluh dan aparat pemerintah lainnya yang berkaitan erat dengan pengembangan pembangunan peternakan.
3. Kelembagaan (Institusi). Peternak secara individu, karena skala usahanya yang kecil dan kemampuannya yang terbatas, seringkali tidak mempunyai akses terhadap lembaga ekonomi seperti bank, lembaga riset dan pasar. Oleh karenanya diperlukan lembaga ekonomi petani ternak seperti kelompok tani ternak dan koperasi untuk menjembatani petani dengan lembaga-lembaga tersebut. Selain itu lembaga ini juga diperlukan untuk meningkatkan daya tawar menawar (*bargaining power*) peternak.

4. Informasi dan Teknologi. Kemajuan pembangunan peternakan sangat ditentukan oleh penemuan teknologi baik di bidang budidaya, pengolahan, maupun pemasaran serta kondisi permintaan dan penawaran serta harga-harga input dan output. Informasi mengenai teknologi dan pasar harus bisa diakses oleh pelaku usaha sehingga usaha mereka selalu berkembang. Dalam bidang teknologi juga diperlukan percobaan-percobaan lokal untuk menemukan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerahnya.
5. Jasa Penunjang .Perkembangan pembangunan peternakan memerlukan modal, pasarana, teknologi dan sebagainya. Unsur-unsur tersebut memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga yang menspesialisasikan dirinya dalam pelayanan bidang-bidang tersebut, seperti bank, asuransi, pedagang, lembaga penelitian dan sebagainya. Dalam rangka membangun peternakan lembaga-lembaga tersebut perlu didorong untuk dapat berperan didalamnya.
6. Kebijkasanaan Pemerintah. Dalam membangun peternakan, tujuan yang hendak dicapai bukan sekedar pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan pendapatan, Agribisnis dan agroindustri peternakan yang hendak dibangun diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Oleh karen itu, pemerintah sebagi regulator kegiatan ekonomi dan juga sebagai pemilik sebagian besar asset, sarana dan prasarana yang akan dikembangkan perlu menetapkan kebijaksanaan yang menguntungkan masyarakat, disamping tetap memberikan insentif yang cukup besar pada swasta untuk investasi. Masyarakat perlu diberi hak terhadap tanah dan dibimbing agar mempunyai akses terhadap jasa institusi ekonomi seperti perbankan dan pasar, sedangkan swasta perlu diberikan kesempatan investasi dengan bekerjasama dengan petani secara sejajar. Suatu rencana pengembangan kawasan peternakan dengan penataan lahan dan pola-pola investasi perlu dirumuskan untuk tujuan tersebut.
7. Didalam lingkup nasional, kebijaksanaan pemerintah juga diperlukan agar peternakan yang dibangun bisa mempunyai daya saing tinggi seperti perlindungan terhadap praktek dumping, perlindungan dari ternak impor dengan penetapan pajak, penetapan kurs yang tidak *undervalue* (kurs rupiah lebih tinggi dibanding dengan kurs pasar) dan sebagainya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Berdasarkan matriks analisis SWOT dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kualitas SDM peternakan
2. Optimalnya pengembangan budidaya ternak
3. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan
4. Berkembangnya sistem dan usaha agribisnis peternakan
5. Adanya dukungan sarana dan prasarana perbibitan ternak
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang peternakan
7. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai
8. Terlaksananya pengawasan secara obyektif dan proporsional
9. Adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan pelayanan prima
10. Adanya integrasi dan sinergitas dalam pengelolaan sumber daya peternakan dengan seluruh pelaku usaha terkait

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Adanya stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan yang makin baik dan mantap serta komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparaturn Dinas Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Berkembangnya kelompok usaha dibidang Agribisnis dan Agroindustri Peternakan
3. Adanya kontrol yang efektif dan konstruktif dalam mendukung pembangunan peternakan

4. Tersedianya alokasi dana yang memadai
5. Terciptanya akses informasi dan teknologi yang lebih luas dan berkesinambungan.

Upaya mendorong peternakan agar berusaha hingga pada taraf di luar budidaya peternakan (*off-farm*) adalah karena pendapatan terbesar usaha peternakan sebenarnya ada pada taraf di luar budidaya peternakannya dibandingkan dengan di dalam budidaya peternakannya (bandingkan pendapatan pabrik rokok vs petani cengkeh, pabrik ban vs petani *crumb rubber*, peternak sapi perah vs pabrik pengolahan susu, peternakan sapi daging vs pabrik sosis, ataupun peternak ayam vs pengolah produknya). Konkritnya, pendapatan usaha peternakan terbesar akan diperoleh dari kegiatan usaha di luar budidaya.

Nilai tambah pada tingkat budidaya peternakan yang lebih rendah dibandingkan tingkat di luar budidaya peternakan (*off-farm*) ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja tetapi juga di Amerika Serikat. Pendapatan petani pada taraf usaha tani hanya 30% sementara di luar usaha taninya mencapai 70%-nya.

Dengan memahami berbagai tantangan tersebut di atas, maka pertama-tama perlu ada semacam reorientasi wawasan peternakan. Wawasan peternakan yang semula hanya dititikberatkan pada budidaya ternak harus diubah dan diperluas. Cara pandang peternakan yang semata-mata hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi juga harus diperluas.

Pada masa yang akan datang cara pandang peternakan sebagai budidaya ternak perlu diperluas menjadi industri biologis peternakan yang mencakup empat aspek, yaitu: (1) peternak sebagai subyek yang harus ditingkatkan pendapatan dan kesejahterannya, (2) ternak sebagai obyek yang harus ditingkatkan produksi dan produktivitasnya, (3) lahan sebagai basis ekologi budidaya yang harus dilestarikan, serta (4) teknologi dan pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi perlu selalu diperbaharui serta disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan wawasan tersebut maka cara pandang peternakan sebagai kegiatan budidaya (*on-farm activities*) perlu diperlebar. Unsur budidaya dalam upaya untuk meningkatkan produksi ternak perlu dikebelakangkan, sementara pandangan peternakan yang membatasi pada level budidaya peternakan juga diperluas menjadi sistem agribisnis.

Dengan memandang peternakan menjadi sistem agribisnis maka secara lengkap lingkup kegiatannya mencakup subsistem: (1). budidaya/*production*, (2). pengadaan sapronak/*input factors*, (3). industri pengolahan/*processing*, (4). pemasaran/*marketing*, dan (5). jasa-jasa kelembagaan/*supporting institution*. Kelima subsistem harus dipandang sebagai satu kesatuan pandangan yang harus ditangani serta dibina secara simultan dan komprehensif.

Dengan memandang peternakan sebagai sistem agribisnis yang utuh dan tidak terpisah-pisah, maka persoalan peternakan menjadi lebih luas lagi dan cara penanganannya pun perlu lebih terintegrasi, terkoordinasi dan komprehensif. Dalam sistem agribisnis berbasis peternakan, masalah budidaya (*production*), praktis tidak menjadi kendala yang berarti. Pada tahap awal pengembangan peternakan masalah budidaya praktis sudah dapat diatasi. Kini, yang perlu lebih diperhatikan adalah pengembangan agribisnis berbasis peternakan di tingkat luar budidaya peternakan. Hal ini mencakup penanganan subsistem pemasaran, industri (pemotongan, penyimpanan, pengepakan, standarisasi, pengolahan) dan pengembangan subsistem jasa-jasa kelembagaan penunjang.

Dengan dipenuhinya tujuan pembangunan peternakan di atas, maka subsektor peternakan sudah dapat dikatakan siap untuk industrialisasi. Dalam pelaksanaannya, industrialisasi peternakan memerlukan piranti dasar Trilogi Peternakan: Bibit, Pakan, Manajemen (*Breeding, Feeding dan Management*) yang seiring. Dalam pengertian yang lebih tegas, masalah bibit, pakan, dan sistem pengelolaan harus selalu memenuhi tuntutan pasar (tersedia sesuai dengan kebutuhan, dalam jumlah, kualitas dan waktu yang diperlukan). Dengan kata lain, perlu beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh peternakan menuju industrialisasi. Prasyarat tersebut secara garis besar mengacu pada Trilogi Peternakan sebagai landasan bagi industrialisasi peternakan yang meliputi semua kondisi dari hulu sampai hilir.

BAB 5. RUMUSAN POKOK MASTER PLAN

5.1. Visi, Misi dan Strategi

Visi pembangunan agribisnis peternakan Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian dari visi pembangunan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam secara keseluruhan yang termuat dalam program Pembangunan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk menyumbang semaksimal mungkin terwujudnya visi pembangunan daerah Nanggroe Aceh Darussalam, visi pembangunan sistem agribisnis peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Daerah Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Peternakan Terkemuka di Kawasan Barat Indonesia Berbasis Kearifan dan Sumber Daya Lokal”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan sistem agribisnis peternakan Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:

“Menumbuh-kembangkan sistem dan usaha-usaha agribisnis peternakan berbasis Sumber Daya Lokal, untuk mentransformasi system tradisional menjadi agribisnis peternakan berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan”.

Sistem agribisnis peternakan yang dimaksud mencakup:

1. sub-sistem agribisnis peternakan Hulu (up-stream agribusiness) seperti industri perbibitan, Industri obat ternak, Industri pakan ternak,
2. sub-sistem usahatani/onfarm
3. sub-sistem agribisnis peternakan hilir (down-stream agribusiness);
4. sub-sistem penyedia jasa (service for agribusiness) seperti perkreditan, infrastruktur, pendidikan dan pelatihan SDM, penelitian teknologi, asuransi, transportasi, dan kebijakan serta peraturan daerah.

Usaha-usaha agribisnis peternakan yang dimaksud adalah usaha tani keluarga, usaha kelompok, usaha koperasi, usaha kecil-menengah, usaha besar baik swasta maupun perusahaan daerah, yang bergerak pada sub-sistem agribisnis peternakan hulu, sub-sistem agribisnis peternakan hilir, sub-sistem usaha tani, maupun pada sub-sistem penyedia jasa.

Sistem dan usaha agribisnis peternakan yang berdaya saing yang dimaksud adalah sistem dan usaha agribisnis peternakan yang mampu menghasilkan produk-produk agribisnis peternakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar (konsumen) baik untuk pasar lokal, regional, maupun internasional.

Sistem dan usaha agribisnis peternakan yang berkerakyatan yang dimaksud adalah sistem dan usaha agribisnis peternakan yang melibatkan masyarakat lokal baik secara individu, secara kelompok/koperasi, maupun dalam bentuk pola sharing dan networking dengan perusahaan swasta dan perusahaan daerah.

Sistem dan usaha agribisnis peternakan yang berkelanjutan yang dimaksud adalah sistem dan usaha agribisnis peternakan yang ramah lingkungan, menjaga dan memperbaiki kelestarian kualitas sumberdaya keaneka ragaman hayati, polusi minimal dan zero waste.

Tujuan pembangunan agribisnis peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam

2. Mengembangkan sektor ekonomi baru sebagai sumber pertumbuhan baru pasca migas-tambang bagi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
3. Meningkatkan kapasitas agribisnis peternakan dalam menghasilkan manfaat sosial ekonomi untuk mengantisipasi tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil temuan lapang dan kajian yang mendalam tentang aspek-aspek pengembangan usaha peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam, beberapa hal pokok yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Master Plan Pengembangan Peternakan antara lain meliputi :

1. Tantangan dan Arah Pembangunan :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia
 - b. Memperkuat manajemen dan kelembagaan daerah
 - c. Meningkatkan pelayanan prasarana dasar
 - d. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat
 - e. Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumberdaya alam
 - f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas
 - g. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Arah Pembangunan :
 - a. Peningkatan kualitas SDM yang bertakwa
 - b. Perbaikan kualitas angkatan kerja
 - c. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha
 - e. Penganekaragaman kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah
 - f. Peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
 - g. Penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah
 - h. Pengembangan sumberdaya alam potensial
 - i. Pengembangan kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan antar wilayah
3. Strategi Dasar:
 - a. Memanfaatkan seluruh sumberdaya daerah secara efektif, efisien dan ekonomis
 - b. Menyelenggarakan pendidikan yang didasarkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja
 - c. Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki integritas, profesionalisme dan percaya diri yang besar
 - d. Melengkapi struktur dan kelengkapan kelembagaan desentralisasi/otonomi daerah
 - e. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka isolasi wilayah yang terbelakang dan terpencil
 - f. Memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang didukung masyarakat kecil (terutama petani, peternak dan buruh)
 - g. Menyelenggarakan pembangunan daerah yang merata dengan pendekatan wilayah
 - h. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi dari masyarakat dan swasta.

Untuk mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan tersebut di atas, maka kebijakan dan strategi master plan secara operasional dapat dilakukan secara holistik dan berkesinambungan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

Tabel 5.1. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Swasembada Bibit

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Swasembada Bibit	• Membangun lumbung bibit di wilayah potensial • Negatif Net Eksport dalam jangka waktu tertentu • Pemanfaatan dana pembangunan untuk investasi pembibitan	• Pengembangan model kawasan bibit • Pengembangan manajemen dalam menjaga keamanan stok bibit sebagai buffer • Inventarisasi lokasi potensial untuk kawasan bibit • Penyusunan model kawasan • Pembangunan fasilitas kawasan • Pembinaan SDM dan pendampingan • Perumusan sistem manajemen pengelolaan kawasan bibit • Pengadaan bibit dan sarana produksi • Budidaya ternak bibit

Tabel 5.2. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Swasebada Pakan

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Swasembada Pakan	• Optimalisasi pemanfaatan sumber hijauan alami • Membangun industri pakan di pusat-pusat budidaya	• Pengembangan potensi sumber hijauan alami • Peningkatan teknologi pemanfaatan sumberdaya alami • Inventarisasi sumber-sumber hijauan • Pelatihan teknologi budidaya, sistem penyediaan dan pengelolaan pakan • Penentuan lokasi strategis untuk industri pakan • Penyusunan rancang bangun industri pakan • Penyusunan sistem manajemen industri pakan masing-masing daerah • Implentasi pembangunan industri pakan

Tabel 5.3. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Optimalisasi Pelayanan Publik

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Optimalisasi Pelayanan Publik	• Investasi dan subsidi fasilitas pelayanan publik • Manajemen Pelayanan terpadu • Pemerataan pelayanan fasilitas sesuai kebutuhan	• Pengembangan fasilitas layanan (jenis, jumlah, lokasi, kelembagaan, dll) • Peningkatan sumberdaya manusia pengelola fasilitas • Identifikasi kebutuhan fasilitas layanan • Penentuan lokasi masing-masing fasilitas layanan • Penyusunan Rencana Tata Ruang Fasilitas Pelayanan • Penyusunan sistem manajemen fasilitas layanan • Pembangunan fasilitas layanan (karantina, holding ground, pusat pelatihan, pusat pembibitan, pasar ternak, dll)

Tabel 5.4. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Pengembangan Ternak sebagai Cabang Usaha atau Usaha Pokok

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Pengembangan Ternak Sebagai Cabang Usaha Atau Usaha Pokok	• Penyediaan paket untuk peningkatan skala usaha • Penentuan jenis ternak potensial sebagai komponen pada masing-masing pola usahatani • Peningkatan peran swasta dalam kemitraan	• Pengembangan Model Usahatani Terpadu Dengan Ternak Sebagai Komponen Utama • Pengembangan Sistem Penyediaan Bibit Ternak • Pengembangan Sistem Kemitraan Budidaya Ternak • Inventarisasi Pola-Pola Usahatani Ternak • Penentuan Skala Ekonomis • Penentuan Sistem Kemitraan • Pengadaan Bibit Dan Sarana Produksi • Pelaksanaan Budidaya

Tabel 5.5. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Pengelolaan Plasma Nutfah Berkelanjutan

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Pengelolaan Plasma Nutfah Berkelanjutan	• Pengelolaan sumberdaya ternak lokal • Pengelolaan sumberdaya berkelanjutan	• Pengembangan sumberdaya plasma nutfah lokal • Pengembangan sistem manajemen sumberdaya • Peningkatan SDM dalam pengelolaan sumberdaya • Inventarisasi dan pemetaan sumberdaya plasma nutfah potensial • Penyusunan pedoman pengelolaan plasma nutfah

Tabel 5.6. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Profesionalisme Kelembagaan

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Profesionalisme Kelembagaan	• Pengembangan sumberdaya manusia dinas terkait • Kerjasama instansi dinas terkait dengan Perguruan Tinggi dan LSM	• Capacity building • Pengembangan kerjasama kelembagaan • Identifikasi kebutuhan pembinaan sdm personil dinas-dinas terkait • Inventarisasi pihak mitra dalam pengembangan peternakan • Perumusan model kemitraan

Tabel 5.7. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Iklim Investasi Kondusif

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Iklim Investasi Kondusif	- Regulasi yang kondusif bagi penanaman modal investor - Promosi profil investasi wilayah	- Pengembangan UU dan peraturan investasi yang kondusif - Pengembangan sistem informasi profil investasi - Penyusunan ketentuan-ketentuan yang dapat meningkatkan minat investasi - Penyusunan dan publikasi profil investasi peternakan masing-masing daerah Kabupaten

Tabel 5.7. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Standarisasi Mutu Terpadu

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Standarisasi Mutu Terpadu	- Penggunaan bibit berkualitas - Manajemen budidaya yang sehat - Standardisasi penanganan pasca panen - Standardisasi sistem transportasi	- Pengembangan teknologi budidaya - Pengembangan teknologi pasca panen - Pengembangan sistem transportasi produk peternakan - Penetapan standar mutu produk - Pelatihan teknologi dan jaminan mutu terpadu - Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi produk ternak - Pengadaan sarana dan prasarana transportasi produk ternak

5.2. Rancangan Pokok Progran

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengembangan usaha peternakan, perlu ditingkatkan upaya sinkronisasi dan koordinasi antara pelaku pengembangan usaha peternakan yaitu masyarakat peternak baik di tingkat pusat maupun daerah. Model dasar pengembangan usaha peternakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dapat diorientasikan secara terpadu dengan basis pengembangan kawasan sebagai *cluster* usaha peternakan dengan jenis dan spesifikasi ternak yang spesifik.

Pengembangan kawasan agribisnis ternak secara terpadu yang makin maju akan membawa pada kemandirian (*self sufficiency*) wilayah yang secara nyata akan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri (*self reliance*) untuk menumbuhkan prakarsa dan sikap mandiri masyarakat luas. Orientasi pokok pengembangan usaha peternakan yang diuraikan berikut ini merupakan upaya yang dapat diarahkan untuk berkembangnya usaha peternakan, adalah melalui Pengembangan Kawasan Agribisnis Ternak Terpadu. Kawasan yang dimaksudkan adalah suatu kawasan yang ditetapkan untuk pengembangan ternak lokal rakyat sesuai agroklimat dan agroekosistem setempat yang cocok dan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh sesuai dengan konsep sistem dan usaha agribisnis. Selain kesesuaian agroklimat dan agroekosistem, pengembangan kawasan terpadu juga akan mempermudah pemasaran, pelayanan serta akses ke lembaga keuangan. Pengembangan kawasan terpadu usaha peternakan yang dibangun secara partisipatif akan tumbuh dengan lebih cepat jika prinsip dasarnya dipahami oleh stakeholder dan masyarakat kawasan tersebut. Prinsip-prinsip dasar merupakan pedoman bagi pengembangan kawasan agribisnis sekaligus juga sebagai indikator evaluasinya. Model pengembangan kawasan terpadu tersebut harus memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Integrasi: Integrasi yang terjadi adalah *inward integration* dan *outward integration*. Integrasi didalam adalah keterkaitan antara kegiatan-kegiatan ekonomi dalam kawasan dan antara sub-sub kawasan atau antar sentra pengembangan dengan kawasan penyanggahnya (*barrier area*). Sedangkan integrasi keluar adalah terjalinnya hubungan yang lebih luas antara daerah atau antar kawasan yang akan saling mendukung dalam pengembangannya lebih lanjut, hal ini terutama sekali diorientasikan pada aspek pengembangan pasar.
2. Inovasi: Model pengembangan kawasan terpadu harus menempatkan teknologi yang bersumber dari hasil kajian perguruan tinggi/lembaga penelitian dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal sebagai penggerak pengembangan kawasan.
3. Kas Harian: Adanya kas harian dari rumah tangga peternak merupakan fokus model kawasan terpadu, karena berdasarkan hasil kajian lapang, belum seluruh peternak menjadikan usaha ternak sebagai pekerjaan utama tetapi masih merupakan usaha sampingan dimana kepemilikan ternak merupakan tabungan keluarga. Dengan kata lain, pendapatan harian rumah tangga peternak berasal bukan dari kegiatan usaha ternak. Pola pendapatan ini tidak bisa dirubah dengan adanya introduksi komoditas ternak tertentu, karena selama ini yang terjadi pada jangka panjang peternak akhirnya mengalami kesulitan membiayai rumah tangganya.
4. Moralitas: Penempatan sumberdaya manusia yang tepat merupakan kunci awal keberhasilan model kawasan terpadu usaha ternak. Kualitas sumberdaya manusia, baik peternak, peneliti, pengusaha, pembuat kebijakan maupun pelaku lain dalam model pengembangan kawasan terpadu usaha ternak, harus berada pada standar minimal kepatutan.
5. Lingkungan: Pemanfaatan lingkungan secara efisien dan efektif dilakukan melalui perencanaan dan perhitungan yang memperhatikan dampak maupun keseimbangannya. Daya dukung lingkungan, baik fisik maupun sosial, menjadi dasar penentuan kapasitas ternak yang akan dikembangkan. Model pengembangan kawasan ini harus didasarkan atas interaksi lingkungan, sehingga merupakan satu kesatuan dalam ekosistem yang lebih luas dengan meminimalkan produk lingkungan yang tidak termanfaatkan.

Grand Strategy Master Plan yang dapat ditempuh antara lain adalah :

1. Pengembangan Kelembagaan Peternakan. Upaya yang perlu dikembangkan dalam membina dan memantapkan kelembagaan peternak adalah memperkuat kelembagaan ekonomi petani peternak di pedesaan. Untuk itu diperlukan pendekatan yang efektif agar petani/peternak dapat memanfaatkan program pembangunan yang ada, secara berkelanjutan, melalui penumbuhan rasa memiliki, partisipasi dan pengembangan kreatifitas, disertai dukungan masyarakat lainnya sehingga dapat berkembang dan dikembangkan oleh seluruh masyarakat tani ternak di pedesaan.
2. Pengembangan Kelembagaan Penyuluh. Kelembagaan penyuluh perlu diberdayakan karena berperan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan merubah perilaku peternak baik secara individu maupun kelompok. Pada masa yang akan datang penyuluhan tidak sekedar untuk mengubah perilaku peternak dalam menerima inovasi teknologi namun perlu dipertimbangkan agar para peternak berperilaku sebagai SDM agribisnis. Begitu juga kelompok peternak harus diarahkan sebagai kelompok usaha agribisnis peternakan. Dengan demikian para penyuluh peternakan perlu diarahkan dan dilatih baik metode maupun materi penyuluhan untuk dapat memberikan motivasi kepada para peternak sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku agribisnis peternakan.
3. Pengembangan Jasa Pelayanan Teknis dan Konsultasi Peternakan. Dalam upaya untuk optimalisasi pengembangan kawasan usaha peternakan agar berkembang dan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan jasa pelayanan teknis peternakan yang meliputi pelayanan inseminasi buatan (IB), pembinaan pakan ternak, pelayanan kesehatan hewan, pembinaan perbibitan dan bimbingan usaha. Jasa pelayanan teknis peternakan diarahkan secara swadaya masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peternak dan atau kelompoknya. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan diperlukan suatu wadah dan tenaga yang profesional di bidang teknis peternakan.
4. Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Pada umumnya usaha ternak rakyat masih bersifat sampingan dan masih menerapkan cara ternak tradisional, belum memanfaatkan teknologi secara optimal serta lemahnya orientasi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan

keinginan pasar. Sementara efisiensi, memerlukan penggunaan teknologi yang tepat. Atas dasar itu, maka pengembangan teknologi peternakan diarahkan pada teknologi budidaya, pakan dan pasca panen, untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas produksi, keuntungan, keamanan produk pangan, nilai tambah kandungan nutrisi dan daya saing di pasar internasional.

5. Program Optimalisasi Sumberdaya Alam Lokal. Sumberdaya domestik yang ada pada suatu wilayah, daerah atau kawasan haruslah dimanfaatkan dan digali seoptimal mungkin untuk keperluan mendukung pengembangan kegiatan-kegiatan yang ada, secara terpadu dan terkait khususnya dalam upaya pengembangan peternakan. Sumberdaya alam perlu dipertahankan kelestariannya, termasuk didalamnya memperluas "*resource based*" dari sumberdaya alam tersebut dan pemanfaatannya secara optimal, yang didasarkan atas daya dukung pakan, kemampuan wilayah, teknologi tepat guna dan ketersediaan sarana dan prasarana.
6. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk komoditas ternak terutama sekali diorientasikan pada basis kekhasan setiap daerah dalam bentuk Custer-cluster komoditas ternak unggulan. Hal ini bukan berarti bahwa kawasan-kawasan lain yang tidak menonjol pada salah satu komoditas ternak tidak boleh mengembangkan komoditas ternak tertentu, hanya saja yang utama dikembangkan adalah komoditas unggulannya. Hal ini juga berlaku untuk sumber daya lokal lainnya yang mendukung secara langsung pengembangan usaha peternakan.
7. Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan. Keberadaan kelembagaan keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pembiayaan usaha peternakan seperti Lembaga Keuangan Modal Ventura yang telah dirintis oleh departemen Lembaga Keuangan yang telah didirikan di setiap propinsi atau kawasan usaha ternak terpadu di seluruh Indonesia. Fenomena pembiayaan usaha ternak sebenarnya hampir sama dengan pembiayaan bagi usaha-usaha agribisnis lainnya. Untuk usaha peternakan dengan kapasitas produksi dan skala usaha yang besar, pemberian pembiayaan dan investasi mungkin tidak begitu bermasalah karena regulasi investasi dan kinerja perusahaan tersebut sudah teratur dengan baik. Namun demikian, fenomena pembiayaan bagi usaha ternak dalam skala usaha kecil dan menengah, setidaknya masih dipengaruhi oleh isu-isu pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Sifat pembiayaannya *retail* dan minimnya ketersediaan informasi tentang usaha. sehingga dibutuhkan sumberdaya yang banyak.
 - b. Minimnya perangkat monitoring untuk memastikan bahwa tujuan pembiayaan tercapai (mengantisipasi kecenderungan pindah usaha karena *barier to entry* relatif rendah, atau mengantisipasi kecenderungan pembiayaan konsumtif.
 - c. *Feasible*, namun tidak *bankable*. Fenomena inilah yang menjadi penyebab kurang tumbuhnya kredit perbankan bagi sub sektor peternakan. Padahal sesungguhnya dengan sifatnya yang *retail*, investasi yang cukup besar dapat ditanamkan dengan juga memberikan jaminan pembinaan (*technical assistance*) melalui layanan pengembangan bisnis (*Business Development Services*) dan pola kemitraan pembiayaan yang efektif dan tepat sasaran. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi pihak pembiayaan/perbankan untuk menerapkan strategi pembiayaan yang khusus dan tidak disamaratakan, karena kecenderungan bahwa usaha kecil menengah akan memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan sifatnya yang demikian, sebenarnya perbankan dapat mengarahkan sifat *retail* tersebut menjadi terkonsentrasi sehingga akan lebih memberikan jaminan dengan kondisi yang *bankable*.
8. Pembinaan peternak lokal yang mencakup empat dimensi utama, yaitu :
 - a. Aspek mikro; pembinaan peternakan lokal bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani melalui peningkatan produksi peternakan. Sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah pendapatan rata-rata persatuan tenaga pria diatas upah minimum regional. Seiring dengan upaya peningkatan efisiensi dilakukan juga peningkatan produktivitasnya melalui penerapan teknologi tepat guna, sedangkan upaya peningkatan daya saing dilakukan melalui manajemen mutu terpadu dengan menerapkan good farming practices, good breeding practices, good processing practices dan good marketing practices. Dengan demikian dari aspek mikro pembinaan tersebut pada prinsipnya adalah

pemberdayaan usaha peternak kecil dan menengah melalui pengembangan kapasitas yang berintikan pengembangan sumber daya melalui pendekatan kelompok tani.

- b. Aspek makro; Dalam aspek makro, upaya yang dapat ditempuh dalam pembinaan peternakan lokal rakyat menuju usaha yang berwawasan agribisnis adalah pengembangan sumberdaya manusia. Untuk ini perlu ditempuh melalui pembentukan dan pembinaan kelompok sebagai wadah belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berusaha.
- c. Agar aspek makro ini mencapai sasarannya, maka strateginya adalah mendesentralisasikan tanggung jawab dengan menerapkan perencanaan yang partisipatif. Dalam hal ini pemerintah daerah harus berprinsip bahwa pengembangan usah peternakan lokal rakyat adalah urusan masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan demikian selain desentralisasi, maka Program lainnya yang perlu dikembangkan dalam aspek makro adalah privatisasi, kemitraan dan deregulasi/debirokratisasi.
- d. Aspek global; dari aspek global , maka peternakan lokal harus dikaitkan dengan tujuan substitusi impor atau dalam jangka panjang untuk meningkatkan ekspor, sehingga menghemat devisa negara. Dalam kerangka global ini maka upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah peningkatan mutu dan kamanan pangan. Program yang ditempuh adalah pengembangan manajemen mutu dari aspek budidaya sampai ke konsumen (food safety program).

Pola pembinaan yang dapat dilakukan antara lain adalah :

- a. Pola pembinaan kelompok (tingkat usaha tani); operasionalisasi pola pembinaan di tekankan kepada pembentukan dan pengembangan kelompok tani, sehingga kelompok tani tersebut berfungsi sebagai sarana belajar mengajar, unit produksi, wahana kerja sama dan sebagai kelompok usaha.
 - b. Pola pembinaan yang dilaksanakan secara bertahap sejak dari pembentukan kelompok baru, pengembangan kelompok binaan dan akhirnya kelompok mandiri. Kelompok mandiri tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kelompok tani ternak yang mampu melakukan kerjasama dengan kelompok tani lainnya, membentuk kelompok usaha bersama atau bagian dari unit usaha mandiri dalam wadah koperasi peternak.
 - c. Pola bergulir; dalam rangka pembinaan peternakan lokal rakyat menuju usaha yang berwawasan agribisnis, maka bantuan pemerintah merupakan bantuan langsung yang harus di kelola dengan pola bergulir. Pola bantuan bergulir untuk ternak lokal rakyat ditentukan dalam bentuk uang yang digunakan sesuai proposal yang disusun bersama oleh kelompok itu sendiri.
9. Pengembangan kemitraan. dalam rangka mendukung keberhasilan pembinaan ternak lokal, seyogyanya sejak awal sudah dihadirkan pengusaha yang dapat berperan sebagai perusahaan pengelola, penghela atau sebagai inti. Melalui pola kemitraan ini dapat dirancang sejak awal mutu produk, harga dan pasokan dari kawasan yang telah ditentukan sesuai dengan permintaan pasar. Pada sistem ini kelompok tani melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang bergerak dalam sub sitem hulu (saponak) dan sub sistem hilir (pemotongan, pengolahan) serta sub sistem jasa (alat, dan mesin, modal). Pengusaha skala besar perlu dikembangkan dalam konsep kemitraan agribisnis dengan skala menengah dan kecil serta skala rumah tangga sehingga terbentuk "*win-win partnership*". Oleh karena itu usaha agribisnis *on farm* yang umumnya masih lemah diperlukan pembinaan penyertaan kelompok agar mampu bekerja sejajar dengan usaha skala besar melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan mulai dari tingkat petani/peternak, kelompok tani, koperasi sampai perusahaan besar melalui kemitraan usaha.
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana/Infrastruktur. Dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana/infrastruktur tidak lepas keterkaitannya dengan sektor-sektor lain baik sektor keuangan maupun lainnya yang mempunyai hubungan kuat. Terlebih lagi dalam pengembangan sebuah kawasan terpadu, keberadaan insfrastruktur dan sarana/prasarana penunjang lainnya menjadi sangat urgent. Untuk menjalin hubungan ini perlu ditingkatkan koordinasi secara periodik yang meliputi :

- a. Kinerja investasi (sarana jalan, pabrik pengolahan, dermaga.bandara).
 - b. Kinerja peternak, usaha, pengangkutan dan tataniaga.
 - c. Pemantapan kelembagaan usaha bersama yang menguntungkan.
11. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Peternakan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha peternakan. Hal ini disebabkan karena dalam pengembangan usaha peternakan, SDM tidak hanya sekedar faktor produksi melainkan yang lebih penting lagi adalah pelaku langsung usaha peternakan.

Pengembangan SDM peternakan yang berbasis kepada masyarakat lokal di sebuah kawasan dapat dilakukan dengan membentuk dan mengembangkan Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan (P2BP). Prinsip dasar dari P2BP ini adalah dimana sarana dan prasarana yang dirancang sama, di mana ketersediaan sumber air dan adanya pendapatan harian (baik dari peternakan maupun non-peternakan) rumah tangga peternak merupakan dasar pengembangannya. Khusus keberadaan pendapatan harian tersebut juga merupakan pembeda model ini dibandingkan model pengembangan kawasan yang ada. Untuk mengembangkan usaha peternakan yang sejalan dengan pembangunan sistem agribisnis, paling sedikit terdapat 3 (tiga) sasaran penting pengembangan SDM, yaitu :

- a. Mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan sehingga searah dengan pengembangan teknologi pada sistem dan usaha agribisnis.
- b. Mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang handal/tangguh.
- c. Mengembangkan kemampuan *team work* sumberdaya manusia dalam hal ini mencakup SDM pelaku langsung pengembangan kawasan peternakan sehingga bisa mengakses ke kelembagaan yang ada di sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem usahatani (*on farm*), sub-sistem agribisnis hilir dan agribisnis pendukung

Tabel 5.9. Matriks Program Subsistem Agribisnis Hulu

Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Pelestarian dan Pengembangan Plasma Nutfah	- Plasma nutfah Sapi Aceh - Plasma nutfah kerbau aceh	Plasma Nutfah Khas Aceh	2006-2010	BALAI PEMBIBITAN, BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN
Pembangunan Pastura	- Pastura Rumput - Pastura Leguminosa	Ketahanan Pakan Hijauan	2007-2010	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI
Pembangunan Pabrik Pakan	- Pabrik pakan unggas - Pabrik pakan ruminansia	Ketahanan Pakan Konsentrat	2007-2010	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI, SWASTA
Pembangunan Balai Bibit Ternak	- Bangunan dan laboratorium - Pengadaan bibit ternak	Stabilitas stok dan kualitas bibit	2006, 2008, 2010	DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI, SWASTA
Pembangunan Pos Pelayanan Ternak	- Bangunan dan pengadaan peralatan - Pelatihan dan pengembangan SDM	Percepatan dan peningkatan populasi	2006, 2008	DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI, SWASTA
Pembibitan Sapi Potong	- Sistem Padang Penggembalaan/Ranch - Sistem Pemeliharaan Intensif/Terintegrasi	Pelestarian Plasma Nutfah dan Penyediaan Bibit Sapi potong Lokal Secara Kontinu	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, BALAI PEMBIBITAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK
Pembibitan Sapi Perah	Sistem Pemeliharaan Intensif/terintegrasi	Pelestarian Plasma Nutfah dan Penyediaan Bibit Sapi Perah Lokal Secara Kontinu	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, BALAI PEMBIBITAN, KELOMPOK TERNAK
Pembibitan Kerbau	Sistem Penggembalaan/Ranch	Stabilisasi Populasi Kerbau	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, BALAI PEMBIBITAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK
Pengembangan Pakan Berbasis Lokal	- Inventarisasi Potensi Bahan Baku Pakan Lokal - Pengembangan pabrik pakan mini	Penyediaan Pakan secara Kontinu	2006-2008	DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI, KELOMPOK TERNAK

Tabel 5.10. Matriks Program Subsistem Agribisnis Budidaya

Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Penggemukan Sapi Potong	- Sistem Kandang Koloni Sapi Lokal Skala Rakyat - Compesatory Growth Sapi Aceh Kurus - Sistem Feedlot	Stabilisasi Populasi dan Pemenuhan Kebutuhan Pasar Lokal dan Target Ekspor	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK
Produksi Susu Sapi	- Sistem Pemeliharaan Intensif/Terintegrasi - Bengkel Sapi Perah Produksi/Bunting	Stabilisasi Produksi Susu dan Indukan Sapi Perah	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK
Pengembangan Kambing	Sistem Penggembalaan /Ranch	Stabilisasi Populasi Kambing	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK
Pengembangan Ayam Ras	Pola Usaha Kemitraan berbasis Kearifan Lokal/Syariah	Pengembangan Industri Ayam Ras	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK

Tabel 5.11. Matriks Program Subsistem Agribisnis Hilir

Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Teknologi Hasil Peternakan	- Industri Pengolahan Susu Pasteurisasi - Industri Pengawetan Daging - Industri Kerajinan kulit dan bulu	Optimalisasi Produk dan Nilai Tambah Hasil Ternak	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KOPERASI UKM, DINAS PERINDUSTRIAN, DINAS PERDAGANGAN, PERBANKAN, SWASTA
Pemasaran dan Promosi	- Pengembangan Konsep Trading House Peternakan - Pengembangan Meat Shop - Ekspo Peternakan	Optimalisasi Produk, Nilai Tambah Hasil Ternak dan Peningkatan Investasi	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KOPERASI UKM, SWASTA
Distribusi dan transportasi ternak	- Analisis distribusi produk-produk peternakan - Pengembangan alat angkut produk-produk peternakan	Efisiensi distribusi dan transportasi	2009	DINAS PETERNAKAN, DINAS PU, SWASTA
Pengembangan industri olahan hasil ternak	- Pengembangan pabrik pengolahan dan pengemasan daging dan susu. - Pengembangan industri rumah tangga berbasis daging, telur, dan susu	Kecukupan konsumsi protein hewani	2008-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KOPERASI UKM, DINAS PERINDUSTRIAN, SWASTA
Jaringan Distribusi dan Sistem Informasi Pasar	- Pengembangan pasar ternak dan jaringan pemasaran - Pengembangan "e-market" produk peternakan	Stabilitas harga dan ketersediaan	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS PERDAGANGAN, PERBANKAN, SWASTA
Kampanye Gizi Protein Hewani	- Program Gizi Balita - Protein hewani untuk kecerdasan anak usia sekolah	Kecukupan Gizi	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PENDIDIKAN, SWASTA
Pengembangan Rumah Potong Ternak	- Pembangunan Rumah Potong Hewan - Pengembangan rumah pemotongan ayam	Keamanan dan kehalalan produk peternakan	2007	DINAS PETERNAKAN, DINAS KESEHATAN, SWASTA

Tabel 5.12. Matriks Program Subsistem Agribisnis Penunjang

SUMBER DAYA MANUSIA				
Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Penguatan SDM Peternakan	• Penumbuhan Wirausaha Baru bidang peternakan • Pelatihan dan pengembangan peternak	Pengembangan Usaha Peternakan dan Etos Kerja yang Prima	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI, KELOMPOK TANI
Diseminasi Teknologi Usahaternak	• Introduksi teknologi budidaya	Sertifikasi Peternak	2006-2010	BAPPEDA, BPS, DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI
Study Visit Peternak	• Studi banding pengembangan peternakan	Adopsi Inovasi	2007,2009	
Up Grading SDM Dinas Peternakan	• Peningkatan pendidikan formal SDM dinas peternakan	Inovatif dan Pengambil Keputusan	2006, 2008, 2010	DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI
Fasilitasi Dan Pertukaran Ilmuwan	• Pengembangan keahlian peternakan antar perguruan tinggi	Pengembangan Kepakaran	2007, 2009	

KELEMBAGAAN				
Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Penguatan Kelembagaan Peternakan	• Penguatan Kelembagaan/Dinas Teknis Peternakan	Eksistensi Dinas Peternakan Propinsi dan Kabupaten	2006-2010	GUBERNUR, BAPPEDA
Penguatan Kelompok Usaha Ternak	• Manajemen usaha peternakan	Efisiensi usaha	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KOPERASI UKM, PERBANKAN
Balai penanggulangan penyakit dan karantina hewan	• Laboratorium penyakit hewan • Karantina hewan			

KEBIJAKAN				
Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Sensus Ternak	• Pendataan populasi ternak	Kepemilikan Ternak Per Rumah Tangga, kesadaran nilai ekonomi ternak	2006, 2010	BAPPEDA, BPS, DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI
Pewilayahan Ternak Unggulan	• Wilayah potensi ternak	Kawasan Pengembangan Ternak	2006,2007	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN, DINAS PU, DINAS KIMPRASWIL

Penetapan Tata Ruang Peternakan	• Penataan wilayah untuk peternakan	Peraturan Daerah	2006	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN, DINAS PU, DINAS KIMPRASWIL
Rekonstruksi Bangunan Dan Rekondisi Mesin	• Bangunan Dinas Peternakan • Alat transportasi • Gudang penyimpanan hasil peternakan	Kualitas Pelayanan	2007	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN, PU, KIMPRASWIL

PERMODALAN				
Penyediaan Modal Peternakan	• Pengembangan Lembaga Penjamin Modal/Sistem Bagi Hasil	Holding Enterprise Usaha Peternakan secara Terpadu	2006-2010	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN
Pembentukan Lembaga Penjamin Modal	• Lembaga keuangan syariah	Percepatan investasi	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KOPERASI UKM, PERBANKAN
Pendirian Badan Usaha Milik Daerah	• Perusahaan daerah bidang peternakan	Usaha terintegrasi	2007, 2009	

5.3. Model Implementasi Program

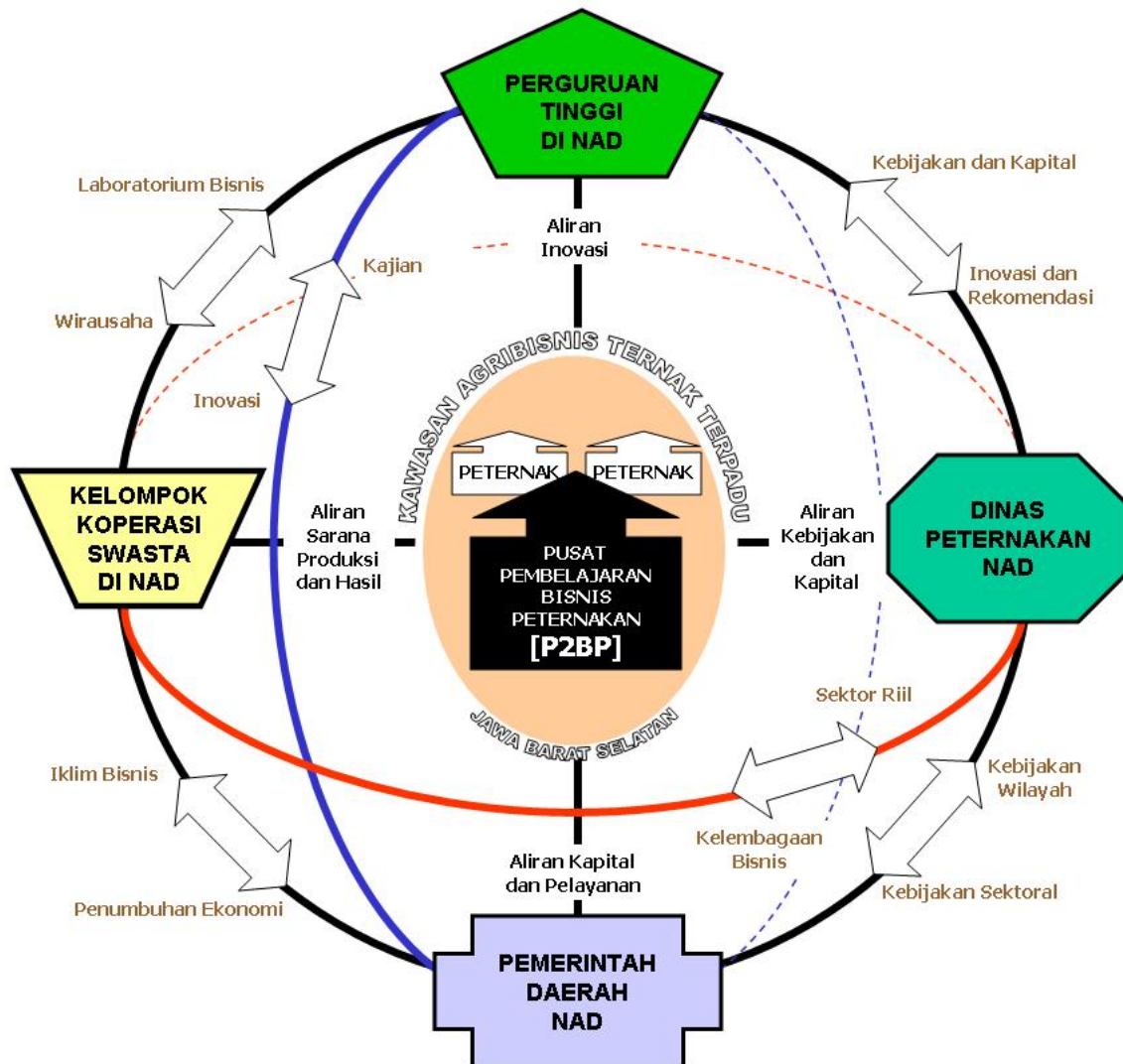
Pembangunan agribisnis peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan produk ternak untuk Nanggroe Aceh Darussalam, memanfaatkan kesempatan ekspor ke negara tetangga dan membuka kesempatan usaha baru di Nanggroe Aceh Darussalam. Dari ternak yang ada, yang potensial untuk dikembangkan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah ayam kampung, sapi potong, itik dan ayam ras. Pengembangan berbagai ternak tersebut harus berlangsung efisien dan memberikan nilai tambah baik bagi peternak maupun dunia usaha yang bergerak di hulu dan hilir. Untuk itu para peternak dan dunia usaha harus dapat melakukan kegiatannya masing-masing secara efisien serta melakukan sinergisme hingga mengarah pada terbentuknya sistem agribisnis peternakan yang utuh.



Gambar 5.1. Model Dasar Pengembangan Peternakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

5.3.1. Model Kawasan Pengembangan Ternak

Model pengembangan kawasan agribisnis ternak terpadu di NAD ini dirumuskan dari partisipasi semua stakeholder pembangunan kawasan agribisnis peternakan NAD. Pelibatan stakeholder tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses pencapaian tujuan kemandirian kawasan agribisnis ternak terpadu ini. Stakeholder yang dilibatkan adalah Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah (BAPPEDA), Dinas Peternakan, Masyarakat (petani, peternak, KTNA, pedagang, wiraswasta), dan Swasta atau Koperasi bidang peternakan.



Gambar 5.2. Model Pengembangan Kawasan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam model terdapat Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan (P2BP) yang menjadi pusat pengembangan kawasan sekaligus menjadi simpul jaringan kerjasama (*networking*) dari stakeholder pembangunan kawasan agribisnis tersebut. Selain itu, ada empat aliran utama ke P2BP yaitu aliran inovasi dari Perguruan Tinggi, aliran kebijakan dan kapital dari Dinas Peternakan, aliran kapital dan pelayanan dari Pemerintah Daerah, dan aliran sarana produksi dan hasil dari dan ke Swasta/Koperasi. Selanjutnya, terjadi banyak keterhubungan antara satu stakeholder dengan stakeholder lainnya, sehingga model ini terlihat seperti “bumi” yang dalam hal ini P2BP yang dikelilingi oleh beberapa “satelit” (*penjelasan mengenai aliran dan keterhubungan lebih detail dapat dilihat pada bagian fungsi kelembagaan*).

Adanya P2BP dalam model ini, selain merupakan pembeda dengan model lain yang ada juga menunjukkan adanya kesinambungan pemanfaatan kinerja dari pengembangan kawasan agribisnis, sekaligus menjadi pendorong utama pertumbuhan. P2BP ini dirancang sebagai usaha peternakan seperti yang dilakukan oleh peternak, yang dikelola oleh peternak yang memiliki pendapatan harian diluar hasil ternak. Namun, khusus P2BP dikelola oleh peternak maju, sedangkan di peternak adalah dikelola oleh peternak yang telah mendapat sertifikat dari P2BP.

Sarana dan prasarana di P2BP maupun di peternak dirancang sama, dimana ketersediaan sumber air dan adanya pendapatan harian (non-peternakan) rumah tangga peternak merupakan dasar pengembangannya. Khusus keberadaan pendapatan harian tersebut juga merupakan pembeda model ini dibandingkan model pengembangan kawasan yang ada.

Definisi:

Model ini didefinisikan sebagai model pengembangan kawasan agribisnis ternak terpadu yang digerakkan oleh kegiatan ekonomi harian rumah tangga peternak dengan fokus pada pengembangan inovasi terus menerus dan moral sumberdaya manusia serta efisiensi menuju pada kawasan yang berwawasan lingkungan, lestari, dan mandiri.

Manfaat:

Pengembangan model ini, bagi peternak diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan keluarga peternak. Bagi daerah diharapkan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto daerah, mengembangkan perekonomian wilayah, meningkatkan populasi ternak, dan bagi swasta atau koperasi mampu membuka peluang bisnis dan pasar.

Keunikan:

Model ini merupakan kawasan berbasis pada keilmuan dan kompetensi yang dituangkan dalam skala bisnis dengan penentuan peternak berdasarkan pada adanya pendapatan harian dan sertifikat yang dikeluarkan P2BP. Perbedaan model ini dibandingkan dengan model pengembangan kawasan lainnya adalah:

1. Orientasinya yang lokal, namun bisa menjadi general jika dilakukan beberapa modifikasi koefisien, tanpa merubah model dasarnya.
2. Digerakkan oleh kegiatan ekonomi harian yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga peternak. Identifikasi dan keberadaan kegiatan ini merupakan prasyarat bagi model.
3. Pengembangan inovasi dan moral sumberdaya manusia secara terus menerus. Inovasi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sedangkan moral sumberdaya manusia dijadikan indikator utama penggunaan sumberdaya alam.
4. Adanya P2BP sebagai sentra pengembangan inovasi, sumberdaya manusia dan kawasan.
5. Ternak dipelihara secara intensif dalam satu kawasan dan diberi pakan hijauan dan konsentrat hasil produksi lokal.

Tujuan:

Tujuan dari model pengembangan kawasan agribisnis ini adalah untuk:

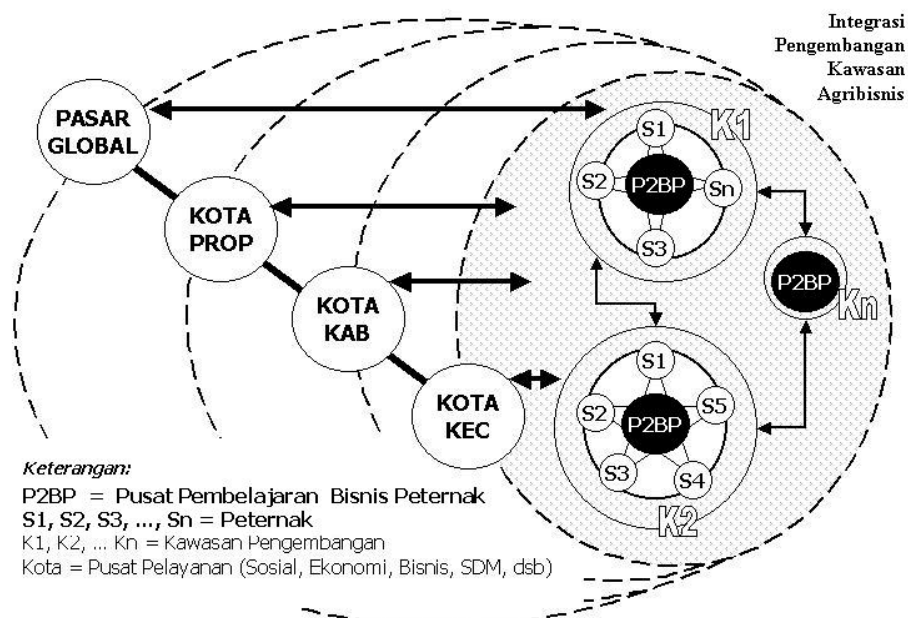
1. menjalankan bisnis peternakan sebagai ekonomi andalan kawasan berlandaskan ilmu dan teknologi.
2. meningkatkan pendapatan peternak dan mempercepat pertumbuhan ekonomi NAD.
3. meningkatkan populasi ternak NAD dan menjadikan kantong ternak untuk mensuplai daging ke luar kawasan.
4. mandiri dalam memenuhi kebutuhan daging dan meningkatkan konsumsi per kapita nasional.

Prinsip Model

Pengembangan kawasan agribisnis yang dibangun secara partisipatif akan tumbuh dengan lebih cepat jika prinsip dasarnya dipahami oleh stakeholder kawasan tersebut. Prinsip-prinsip dasar merupakan pedoman bagi pengembangan kawasan agribisnis sekaligus juga sebagai indikator evaluasinya. Model ini pun memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu:

Integrasi:

Integrasi yang terjadi adalah *inward integration* dan *outward integration*. Integrasi didalam adalah keterkaitan antara kegiatan-kegiatan ekonomi dalam kawasan dan antara sub-sub kawasan atau antar sentra pengembangan (P2BP) dengan kawasan penyangganya (*barrier area*). Integrasi keluar adalah keterkaitan antar kawasan, misalnya dengan kawasan pertanian dan perkebunan. Kawasan ini bukan entitas yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan pembangunan yang terintegrasi secara harmonis dalam kerangka besar pembangunan ekonomi berbasis agribisnis peternakan di NAD. Oleh karena itu, keterkaitan antar kawasan merupakan prasyarat utama dalam aliran barang dan jasa yang menjadi penopang utama kegiatan ekonomi NAD.



Gambar 5.3. Model Integrasi Pengembangan Kawasan Agribisnis Peternakan

Inovasi:

Model pengembangan ini menempatkan teknologi yang bersumber dari hasil kajian perguruan tinggi dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal sebagai penggerak pengembangan kawasan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi secara terus menerus dilakukan sesuai dengan perubahan lingkungan lokal. Teknologi yang dibawa dari perguruan tinggi harus diuji terlebih dahulu di lapangan untuk menemukan koefisien-koefisien teknis dan ekonomi dari teknologi tersebut yang sesuai dengan kondisi lokal. Lingkungan lokal yang dimaksud bukan hanya sumberdaya alam saja, tetapi juga sumberdaya manusia dan modal. Dua sumberdaya terakhir ini sangat penting untuk dikembangkan, karena indikasi selama ini teknologi tidak dapat dikembangkan karena memiliki kelemahan pada kedua sumberdaya tersebut.

Kas Harian:

Adanya kas harian dari rumah tangga peternak merupakan fokus model ini, karena berdasarkan hasil kajian lapang, belum banyak peternak yang menjadikan ternak sebagai pekerjaan utama. Dengan kata lain, pendapatan harian rumah tangga peternak berasal bukan dari kegiatan

peternakan. Pola pendapatan ini tidak bisa dirubah dengan adanya introduksi ternak, karena selama ini yang terjadi pada jangka panjang peternak akhirnya mengalami kesulitan membiayai rumah tangganya. Oleh karena itu, peternak yang dikembangkan haruslah peternak yang telah memiliki pendapatan harian rumah tangga rutin dari kegiatan usaha lain. Jika demikian, maka setiap peningkatan hasil kegiatan usaha ternak, akan memperbesar nilai ekonomi rumah tangga peternak, sebaliknya jika terjadi kerugian, tidak akan mempengaruhi ekonomi rumah tangga peternak tersebut.

Selain itu, kontribusi kegiatan usaha ternak memberikan kesempatan dan peluang bagi peternak untuk mengembangkan usaha hariannya, sehingga tingkat efisiensi diperoleh dan nilai tambah yang diperoleh maksimal. Hal ini berbeda jika kemudian peternak tidak memiliki pendapatan harian, maka introduksi ternak akan membebani peternak dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga bukan kawasan yang terbentuk, tetapi yang terjadi adalah pemborosan pembangunan.

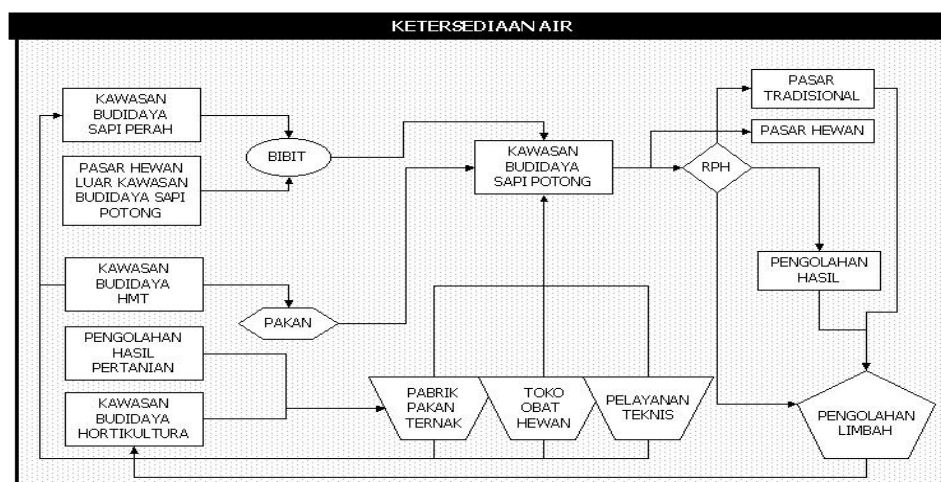
Moralitas:

Penempatan sumberdaya manusia yang tepat merupakan kunci awal keberhasilan model ini. Kualitas sumberdaya manusia, baik peternak, peneliti, pengusaha, pembuat kebijakan maupun pelaku lain dalam model pengembangan kawasan agribisnis berbasis ternak ini, harus berada pada standar minimal kepatutan. Artinya, berdasarkan profesinya harus memiliki persepsi, sikap dan perilaku yang saling mendukung terhadap percepatan pengembangan kawasan. Moralitas lebih ditekankan pada kebiasaan positif berdasarkan keahlian dan profesi masing-masing.

Ini berarti yang melakukan pengawasan terhadap kinerja model adalah masyarakat luas. Jika demikian, maka apapun hasilnya masyarakat secara terbuka dapat memahami dampak dari pengembangan kawasan itu sendiri. Hal ini untuk mencegah adanya silang sengketa di kemudian hari.

Lingkungan:

Pemanfaatan lingkungan secara efisien dan efektif dilakukan melalui perencanaan dan perhitungan yang memperhatikan dampak maupun keseimbangannya. Daya dukung lingkungan, baik fisik maupun sosial, menjadi dasar penentuan kapasitas ternak yang akan dikembangkan. Justru model ini didasarkan atas interaksi lingkungan, sehingga merupakan satu kesatuan dalam ekosistem yang lebih luas dengan meminimalkan produk lingkungan yang tidak termanfaatkan. Sumber kehidupan dari ekosistem adalah air, sehingga interaksi lingkungan berbasis pada ketersediaan air, bahkan ketersediaan air merupakan prasyarat utama (contoh gambar ternak sapi potong).



Gambar 5.4. Daya Dukung Lingkungan dan Keterkaitan antar Asoek Pengembangan Usaha Peternakan

Lestari :

Keberlanjutan model bisa terjadi antara lain karena tidak ada kerusakan lingkungan atau tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif ini bisa dihilangkan jika dari awal model ini dikembangkan berdasarkan kondisi nyata dan potensi yang sebenarnya, baik kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, maupun potensi sumberdaya alam dan manusianya. Oleh karena itu, kelestarian akan tercipta dalam model ini, karena sebisa mungkin tidak mengganggu proses dan aktivitas ekonomi yang telah berkembang di kawasan, bahkan melalui proses belajar terus menerus atau *learning by doing*, berbagai persoalan dapat secara bersama-sama diselesaikan. Selain itu, penekanan terhadap “tidak ada yang dibuang” dalam konteks terpadu membuat model ini efisien, sehingga secara otomatis terus berlanjut.

Mandiri:

Prinsip ini sekaligus merupakan tujuan akhir dari model pengembangan ini. Kemandirian peternak secara nyata akan mendorong rasa percaya diri untuk menjadikan ternak sebagai pekerjaan pokok, sehingga akan menumbuhkan prakarsa-prakarsa dan sikap mandiri masyarakat kawasan. Pada akhirnya, kemandirian kawasan akan terbentuk yang mendorong pada kemandirian ekonomi kawasan.

5.4. Koefisien Teknis dan Tahapan Implementasi Model

Komponen merupakan piranti penciri status perkembangan model ini. Komponen ini pada hakekatnya juga merupakan proses pelengkapan dan penguatan terhadap sistem dan usaha agribisnis berbasis peternakan. Oleh karena itu, komponen-komponen model ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan satu sama lain dengan basis pada pendapatan harian keluarga peternak dalam siklus tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa model sangat memperhatikan keseimbangan ekosistem kawasan secara keseluruhan.

Sumber Air:

Ketersediaan air merupakan ciri adanya kehidupan, sehingga ketersediaan dan kecukupannya menjadi komponen paling esensial dalam model ini. ketersediaan air di NAD menunjukkan tersedia sepanjang tahun.

Lahan:

Pada hakekatnya budidaya ternak dapat dilakukan di semua lahan yang termasuk kedalam zona agroekologi. Secara operasional di setiap wilayah yang perlu diperhatikan dalam penyediaan lahan bagi ternak adalah status lahan dalam RUTR/RDTR. Khusus bagi ternak ruminansia, lahan tidak saja berfungsi menyediakan ruang jelajah, tetapi pada waktu yang bersamaan juga merupakan sumber ketersediaan pakan (hijauan, hasil sisa pertanian, hasil ikutan industri pertanian/perkebunan), dan air baik yang bersumber dari air presipitasi, air permukaan maupun air tanah.

Lahan yang lebih erat hubungannya dengan status kawasan adalah otorisasi atau penguasaan lahan dan tingkat pemanfaatannya, dalam arti penerapan teknologi, bagi budidaya ternak. Dengan demikian lahan ini lebih memungkinkan untuk dijadikan sebagai variabel penciri atau setidaknya tidaknya sebagai peneguh tingkatan status suatu kawasan.

Kawasan peternakan rakyat (*small holder*) pada umumnya masih terintegrasi pada lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak lain secara yuridis formil merupakan otorisasi non-peternakan. Otorisasi lahan dapat berupa hak milik, hak sewa, maupun HGU, dan telah dimanfaatkan secara khusus untuk menghasilkan sarana produksi ternak misalnya pakan hijauan dan biji-bijian.

Hijauan Makanan Ternak:

Rumput merupakan jenis hijauan yang paling terjamin ketersediaannya, yang diperoleh baik dari kebun sendiri, lahan penggembalaan umum, maupun kebun/ladang orang lain. Jenis rumput yang paling dominan di NAD adalah rumput gajah (*Penisetum purpureum*). Selain produksinya cukup tinggi, yaitu sekitar 80 ton/tn/ha, rumput ini juga mempunyai komposisi nutrisi yang cukup baik. Walaupun rumput sampai saat ini ketersediaannya terjamin, sampai saat ini belum ada pengaturan dalam pemanfaatan lahan penanaman rumput, sehingga dikhawatirkan ketersediaannya semakin menurun, terutama dalam penyediaan rumput di musim kemarau. Kebutuhan ternak yang jumlahnya sekitar 10% dari bobot badan, menyebabkan keberadaannya harus direncanakan dengan baik.

Pabrik Pakan:

Peternak secara umum belum menerapkan teknologi, baik untuk teknologi pengawetan maupun teknologi pengolahan pakan. Teknologi pengawetan pakan seperti pembuatan *hay* dan *silase* untuk ruminansia belum banyak dikenal. Peternak juga belum mengetahui nilai gizi dari bahan makanan yang diberikan, sehingga belum mengerti penggunaan pakan alternatif dan pembuatan ransum komplit.

Oleh karena itu, keberadaan pabrik pakan mini yang mampu meramu bahan baku lokal menjadi ransum komplit dengan nilai gizi yang lebih seimbang sangat dibutuhkan. Hal ini lebih dipacu karena minat peternak terhadap peningkatan keterampilan beternak khususnya dalam pelatihan pengelolaan pakan cukup tinggi, terutama untuk bisa membuat campuran pakan dan penggunaan pakan alternatif.

Selain itu, pakan merupakan salah satu sarana produksi peternakan yang sangat strategis. Tidak saja karena kecukupan dan mutunya yang secara langsung berkorelasi dengan performansi ternak, tetapi juga karena hampir 70 – 80% biaya produksi berasal dari komponen pakan.

Bibit:

Untuk jangka pendek, ketersediaan bibit dapat dipenuhi dari sentra-sentra ternak di luar NAD, tetapi jangka panjang harus bisa menyediakan bibit ternak sendiri, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan yang akan menghambat perkembangan peternakan di NAD. Bibit ternak merupakan cetak biru peternakan, sehingga arah pengembangan peternakan NAD tergantung pada kualitas dan kuantitas bibit.

Budidaya Pertanian:

Selain rumput, sumber bahan baku pakan yang paling banyak jumlahnya adalah hasil pertanian. Limbah sayuran dan jerami jagung merupakan jenis hijauan yang tersedia di NAD.

Pengolahan Hasil Pertanian:

Beberapa hasil pertanian primer tidak bisa langsung diberikan kepada ternak, karena secara ekonomis terlalu mahal, misalnya kacang kedele. Kacang kedele oleh petani diolah menjadi tahu atau kecap dan limbah dari tahu itu kemudian dijadikan bahan baku untuk pakan ternak. Ini berarti bahwa pengolahan hasil pertanian menghasilkan limbah yang dapat dijadikan pakan ternak sebagai pakan pelengkap hijauan makan ternak (konsentrat).

Perkembangan pengolahan hasil pertanian merupakan turunan dari perkembangan budidaya pertanian. Oleh karena itu, dalam konteks kawasan, perkembangan pengolahan hasil pertanian dapat dijadikan indikator ketersediaan bahan baku pakan.

Toko Obat dan Sapronek:

Peternak belum mempunyai tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap obat (umumnya ruminansia). Padahal, persepsi yang baik terhadap obat ini merupakan faktor pendorong keberhasilan beternak, sehingga jika ketersediaannya mudah diperoleh, peternak akan melakukan pencegahan daripada pengobatan.

Budidaya Ternak:

Peternak masih membudidayakan ternak ruminansianya secara ekstensif. Ternak ini umumnya memiliki ukuran kerangka tubuh lebih kecil, pertumbuhan lebih lambat namun mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan NAD.

Sapi-sapi yang ditemui di NAS adalah bangsa sapi lokal, seperti sapi Bali, sapi Madura, dan sapi Peranakan Ongole (PO). Bangsa sapi lain yang bisa dibudidayakan di NAD yang sangat responsif terhadap pakan bermutu baik sehingga sangat cocok untuk dipelihara pada sistem pemeliharaan intensif dengan pemberian pakan konsentrat dan biji-bijian adalah bangsa sapi Simental, Limousin, Hereford, Angus, Charolais. Juga, sapi Fries Holand (FH) jantan merupakan jenis sapi perah dengan kerangka tubuh lebih besar yang dapat digunakan sebagai sapi pedaging.

Teknologi yang diterapkan adalah teknologi budidaya tepat guna yang sesuai dengan agroekosistem dan kebutuhan peternak. Mulai dari seleksi sapi bakalan dan penggemukannya, sistem pemeliharaan (padang penggembalaan dan intensif), sistem pemberian pakan dengan pakan utama hijauan dan konsentrat, metoda pengendalian penyakit, dan penanganan limbah.

Pengolahan Hasil dan Limbah:

Pada saat ini diversifikasi pengolahan pangan asal daging teknologi lokal sudah ada di NAD, namun belum ada yang melakukan pengolahan hasil ternak dengan teknologi modern, begitu juga dengan teknologi pemotongan ternak. Oleh karena itu, usaha pemotongan ternak (RPH) dan hasil ternak modern perlu dikembangkan.

Limbah ternak bila diolah merupakan sumberdaya yang sangat potensial terutama sebagai pupuk organik yang dapat menunjang usaha pertanian. Selama ini penanganan limbah masih belum dilakukan secara baik dan optimal. Limbah yang dikeluarkan dari kandang berupa limbah padat dan cair. Limbah padat yang dikeluarkan dari kandang pada umumnya berupa sisa hijauan pakan dan kotoran ternak. Limbah cair yang keluar umumnya tidak ditangani, karena peternak tidak memiliki kolam penampungan limbah. Oleh karena itu, pengolahan limbah merupakan komponen penting, karena sebagai asupan terhadap usaha pertanian yang hasilnya merupakan asupan bagi ternak sapi sebagai bahan baku pakan. Alternatif yang bisa dikembangkan adalah sistem pengomposan untuk limbah padat dan pupuk organik cair dengan cara fermentasi untuk limbah cair untuk dipakai di kawasan dalam menghasilkan produk-produk organik.

Pasar Ternak:

Pasar hewan berfungsi sebagai penampung dan distribusi ternak hidup. Juga, diperlukan untuk memperlancar distribusi, pemasaran dan informasi serta transportasi. Semakin dekatnya pasar ternak dengan konsumen, efisiensi ekonomis akan tercipta yang akan mendorong percepatan perkembangan peternakan.

Pelayanan Teknis:

Petugas yang diperlukan dalam pengembangan peternakan meliputi tenaga pendamping, khususnya yang terampil dalam pengamanan budidaya (kesehatan dan pakan) dan pemberdayaan petani peternak. Kebutuhan tenaga pendamping bersifat kebutuhan aksesibilitas, yaitu tingkat aksesibilitas yang baik dari kawasan untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga pendamping.

Kelembagaan Model

Dalam kerangka kelembagaan, komponen-komponen yang menjadi tolok ukur meliputi: (1) sifat kepemilikan (*property right*) sumberdaya kawasan; (2) batas-batas kewenangan (*jurisdictional boundry*) para pemilik dalam memanfaatkan sumberdaya kawasan; dan (3) aturan-aturan perwakilan (*rules of representation*) apabila sumberdaya tersebut bukan milik individu melainkan oleh kelompok. Kontribusi utama kelembagaan dalam proses pembangunan kawasan adalah kemampuannya dalam mengkoordinasi para pemilik input produksi (lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi) dalam proses transformasi dari input menjadi output. Disamping itu juga berperan dalam koordinasi distribusi output kepada pemilik input baik individu, kelompok masyarakat, organisasi, pemerintah, maupun perusahaan swasta.

Pemerintah Daerah:

Pemerintah Daerah merupakan pengguna utama dari model ini. Sebagai penguasa wilayah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban secara aktif berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan dari model ini. Hal ini karena kemandirian dari kawasan ini nantinya ditunjukkan oleh kemampuan kawasan itu mengelola dirinya. Oleh karena itu, fungsi dan kontribusi Pemerintah Daerah adalah:

1. **Penyedia lahan untuk P2BP:** Pemerintah Daerah sudah seharusnya menumbuhkan perekonomian wilayah dengan melakukan penguatan dan pelengkapan fasilitas serta pembangunan fisik dengan meningkatkan efektifitas dan produktivitas lahan yang dimiliki.
2. **Pembangunan fasilitas dan infrastruktur P2BP dan Kawasan:** Ketersediaan fasilitas dan kualitas infrastruktur merupakan faktor penentu dan prasyarat mutlak pembangunan peternakan.
3. **Pelayanan Teknis:** Melalui tenaga profesional yang dimiliki, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan teknis, baik dalam pengembangan usaha ternak maupun pengembangan Kawasannya.
4. **Penyedia dana pendampingan:** Dana pendamping diperlukan untuk memberikan insentif bagi pendamping model ini.
5. **Memfasilitasi penyediaan bibit:** Bibit yang berasal dari balai bibit atau usaha pembibitan yang berada di dalam atau di luar wilayah Pemerintah Daerah harus difasilitasi sehingga nilai tambah bisa diperoleh oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, yakni bekerjasama dengan swasta atau koperasi.
6. **Membuat kebijakan:** Kebijakan yang memberikan iklim yang kondusif terhadap pengembangan kawasan dan sektoral.

Perguruan Tinggi:

Perguruan Tinggi dalam model ini lebih berperan sebagai konduktor. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus mampu menjadi mitra inovatif bagi lembaga lain, sehingga fungsi dan kontribusinya sebagai berikut:

1. **Menyediakan tenaga ahli:** Perguruan Tinggi memberikan konsultasi keahlian dan memberikan rekomendasi berdasarkan kajian lapangan, baik terhadap Pemerintah Daerah maupun Dinas Peternakan.
2. **Alih teknologi:** Teknologi baru yang bersifat lokal dan ekonomis harus ditransfer ke peternak melalui P2BP.
3. **Penyiapan tenaga pendamping P2BP:** Kualifikasi dan rekrutmen pendamping dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk memberikan kinerja yang maksimal.
4. **Desain program pengembangan kawasan:** Program pengembangan yang merupakan implementasi dari model didesain secara lokal dan bertahap mengacu pada model itu sendiri.

5. **Sosialisasi program:** Program harus dipahami dan diketahui oleh semua stakeholder kawasan untuk mempercepat proses pengembangan. Berbagai jalur dan bentuk sosialisasi dapat dilakukan melalui koordinasi aktif dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Peternakan.
6. **Monitoring dan evaluasi program dan pelaporan:** Pemantauan perkembangan dan penyempurnaan terus-menerus dilakukan untuk mengurangi tingkat kegagalan.
7. **Desain pelatihan dan penyuluhan:** Kegiatan pelatihan dan penyuluhan dirancang secara khusus sesuai dengan kondisi lokal.
8. **Pengembangan jaringan:** Pengembangan jaringan kawasan dan jaringan usaha merupakan prasyarat menuju kawasan modern yang terbuka dan terus tumbuh berkembang.
9. **Penelitian dan pengembangan:** Secara terus menerus, pengembangan kawasan berbasis pada kajian-kajian lapangan yang diolah secara ilmiah.
10. **Desain P2BP:** Sebagai sentra pengembangan kawasan harus mampu menggerakkan dan mengakomodasi berbagai sumberdaya lokal.

Dinas Peternakan:

Dinas Peternakan dalam hal ini berperan sebagai inisiator sekaligus sebagai regulator. Oleh karena itu, fungsi dan kontribusinya adalah:

1. **Pengembangan kebijakan sektoral:** Pembangunan sistem dan usaha agribisnis berbasis pertanian dan peternakan merupakan mandat utama yang harus mampu menumbuhkan perekonomian regional dan nasional.
2. **Penyediaan dana pengembangan:** Anggaran biaya mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan dalam setiap program pembangunan.
3. **Alih teknologi:** Teknologi baru yang bersifat lokal dan ekonomis harus ditransfer ke peternak dan ke P2BP.

Swasta/Koperasi:

Pada tahap awal pengembangan model ini, peran Swasta/Koperasi tidak begitu nampak. Hal ini karena pada tahap ini, masih pada pelengkapan dan penguatan serta pembangunan kawasan, belum pada bisnisnya yang sebagian besar merupakan kegiatan utama dari Swasta/Koperasi. Namun pada tahap selanjutnya, peran lembaga ini akan semakin besar, antara lain adalah:

1. **Penyediaan modal:** Lembaga keuangan secara aktif mengelola perputaran uang dalam kawasan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan peternakan.
2. **Penyediaan sarana produksi:** Sarana produksi seperti bibit, pakan, dan obat lebih ekonomis jika dikelola oleh Swasta/koperasi dibandingkan oleh peternak itu sendiri.
3. **Pembinaan pemasaran:** Kemampuan menyerap hasil produksi peternak mempercepat pertumbuhan kawasan.
4. **Pengolahan hasil:** Nilai tambah yang besar dari kegiatan ini akan menciptakan peluang bisnis baru bagi Swasta/Koperasi.

Program Model

Program model meliputi program bidang Sumberdaya Manusia, Kesejahteraan, Pelayanan dan Kelembagaan. Program dari masing-masing bidang tersebut adalah:

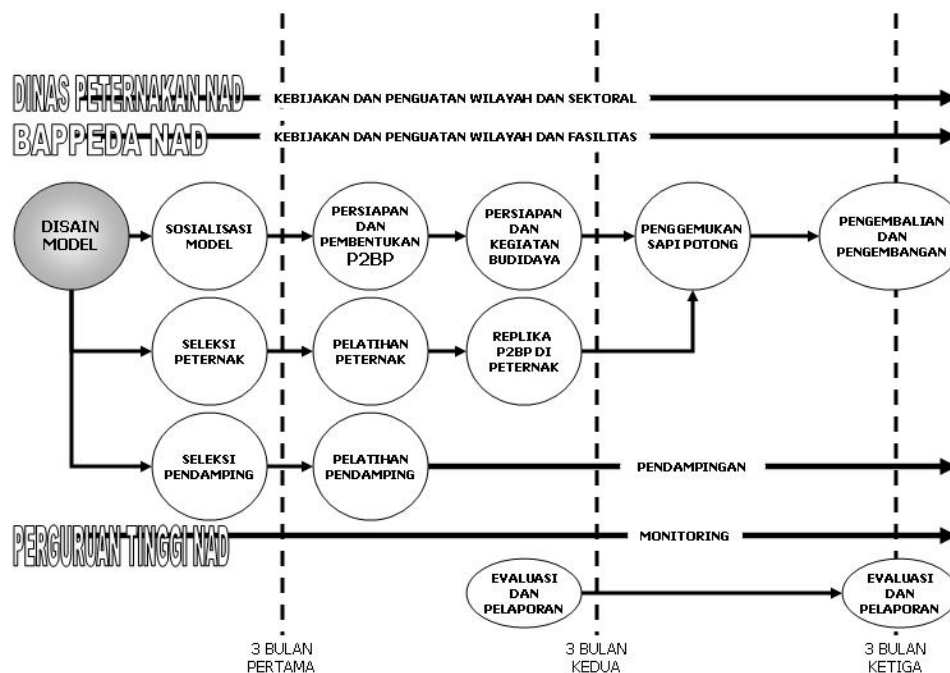
1. Program bidang sumberdaya manusia:

- Pelatihan dan pengembangan peternak untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan
 - Penumbuhan Wirausaha Baru bidang peternakan
 - Studi banding pengembangan peternakan
2. Program bidang kesejahteraan:
- Pengembangan dan diversifikasi usaha
 - Peningkatan produktivitas dan pendapatan, efisiensi.
3. Program bidang pelayanan:
- Penyediaan fasilitas dan peningkatan kualitas
 - Pendampingan
 - Introduksi teknologi budidaya, alih teknologi, penyedia teknologi
4. Program bidang kelembagaan:
- Penyusunan kebijakan
 - Peningkatan keterpaduan dan koordinasi

Tahapan:

Pada tahap awal, konsentrasi kegiatan adalah pada pelengkapan perangkat utama dari model, yaitu pembentukan P2BP, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga (PT, PEMDA-BAPPEDA, DISNAK) harus dilakukan dengan intensitas yang tinggi, sekaligus sebagai proses sosialisasi.

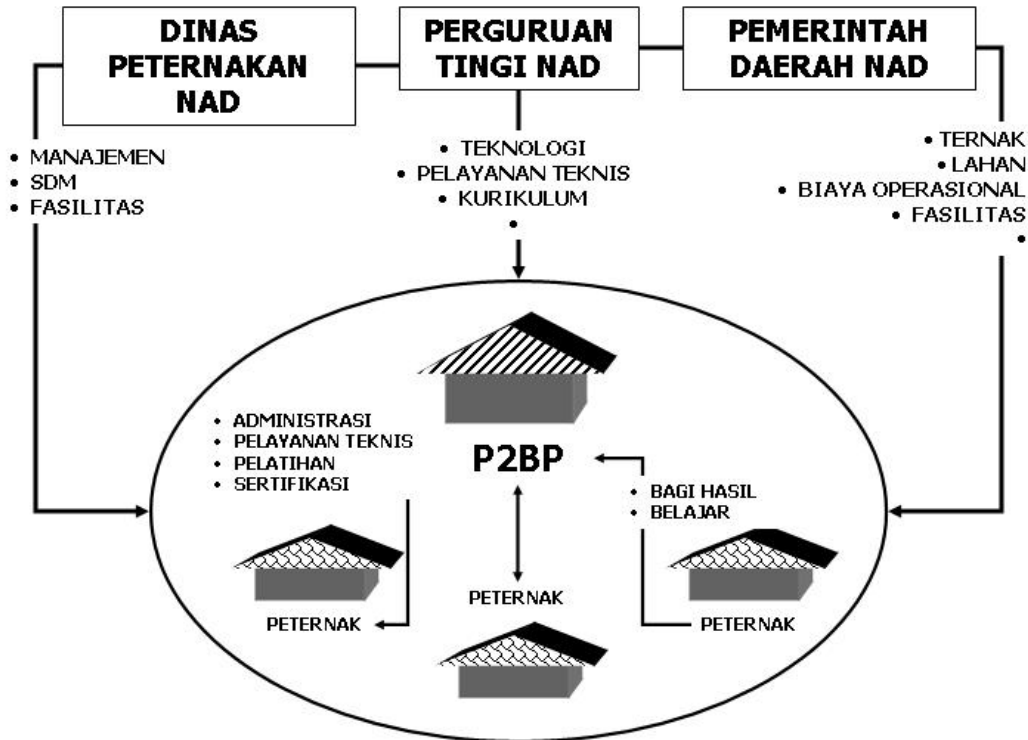
Secara paralel, seleksi peternak dan pendamping serta pelengkapan struktur organisasi P2BP dilakukan bersamaan dengan sosialisasi. Berdasarkan persetujuan PEMDA, pembangunan fisik P2BP dimulai, baru kemudian kegiatan produksi dan pelatihan dilaksanakan. Kemudian, replika P2BP di peternak bisa dibuat berdasarkan rekomendasi dari P2BP. Akhirnya, kegiatan usaha ternak dilakukan oleh peternak yang telah mendapat sertifikasi dari P2BP.



Gambar 5.5. Tahapan Implementasi Model Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan

Mekanisme Pengembangan Ternak:

Mekanisme pengembangan ternak dilakukan oleh peternak dan P2BP. Peternak yang disertakan dalam model ini merupakan peternak yang telah memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh P2BP.



Gambar 5.6. Mekanisme Pengembangan Ternak

Konsep P2BP

Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan (P₂PB) adalah suatu model pembinaan bisnis peternakan yang berada dalam model untuk calon peternak andalan. P2BP selain sebagai pusat pembelajaran yang memiliki kurikulum baku, juga menjadi pusat konsultasi peternak pasca mengikuti program pembelajaran.

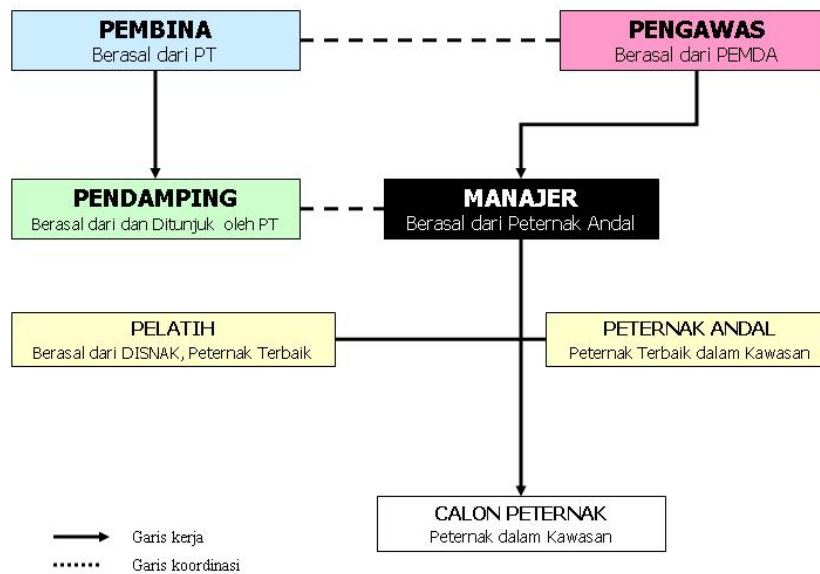
Fungsi utama dari P₂PB adalah melakukan perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan perilaku peternak dalam berusahaternak. Fungsi lainnya adalah dalam hal, Pelatihan, Pemagangan, Kegiatan budidaya, Pengumpulan data dan informasi, *Quality control*, dan Pelaksanaan pengembangan usaha.

Tujuan dari P₂PB adalah untuk mendidik calon peternak menjadi peternak terstandarisasi dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku kewirausahaan, sebagai pusat percontohan pembinaan dan pengembangan peternakan, dan dalam jangka panjang dapat menjadi cikal bakal pendirian Sekolah Bisnis Peternakan (SBP).

Keunikan dari P₂PB adalah P₂PB merupakan pusat pembinaan yang berada di kawasan peternak, sehingga tercipta suasana kondusif bagi peternak dalam mengadopsi ilmu dan pengetahuan secara efektif dan efisien. Juga, tatalaksana pemeliharaan ternak yang terstandar, dan pengelolaan P₂PB berasal dari, oleh dan untuk peternak..

Manajemen:

Pengelolaan P₂PB berbasis pada kemampuan peternak lokal dalam adopsi teknologi baru yang bisa dikembangkan.



Gambar 5.7. Struktur Kelembagaan Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan

Deskripsi Tugas:

1. **Pembina:** Jabatan Pembina ini berasal dari Perguruan Tinggi dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi dan masukan teknologi dalam pengembangan model
 - b. Membuat kurikulum pendidikan dan pelatihan di P₂BP
 - c. Melakukan kajian-kajian dan uji coba teknis lapangan spesifik dan lokal
2. **Pengawas:** Jabatan pengawas ini berasal dari PEMDA-BAPPEDA dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan P₂BP
 - b. Memberikan masukan kepada Pembina mengenai jalannya pelaksanaan P₂BP
3. **Pendamping:** Berasal dan ditunjuk oleh Perguruan Tinggi dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Sebagai mitra kerja manajer dalam pelaksanaan P₂BP
 - b. Mendampingi dan memberi masukan atas jalannya pelaksanaan P₂BP
4. **Manajer:** Jabatan manajer ini berasal dari peternak andal yang berada dalam kawasan yang berfungsi sebagai berikut:
 - a. Mengelola pelaksanaan P₂BP
 - b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan P₂BP
 - c. Memberikan laporan kepada Pembina dan pengawas
5. **Pelatih:** Jabatan pelatih ini berasal dari PT, PEMDA-DISNAK, atau peternak terbaik dalam kawasan dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menjalankan P₂BP sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan
 - b. Mentransfer pengetahuan, sikap, dan perilaku kepada peternak.
6. **Peternak Andal:** Berasal dari peternak terbaik dalam kawasan dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Membantu manajer dalam bidang administrasi P₂BP

- b. Membantu calon peternak dalam hal-hal teknis
- 7. **Calon Peternak:** Berasal dari peternak dalam kawasan yang berfungsi sebagai berikut:
 - a. Mengikuti proses pendidikan dan pelatihan di P₂BP
 - b. Menerapkan hasil pendidikan dan pelatihan di lokal kandangnya

Penyelenggaraan Pembelajaran dan Pengajaran dalam P2BP:

Kurikulum: Kurikulum yang digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran dan pengajaran di P2BP ini berbasis pada potensi sumberdaya lokal kawasan. Dalam kurikulum ini materi pembelajaran terdiri dari 20% teori dan 80% praktek.

Materi Pembelajaran: Materi yang diberikan dalam teori meliputi : tatalaksana pemeliharaan ternak (perkandangan, kebersihan, pencegahan penyakit dan pengobatan, mengawinkan), tatalaksana penanganan pakan dan pemberiannya, tatalaksana produksi hijauan pakan, tatalaksana penanganan pasca panen, tatalaksana penanganan limbah dan perencanaan usaha ternak. Materi dalam bentuk praktek sudah merupakan penggabungan seluruh teori yang diberikan yang diaplikasikan dalam kegiatan nyata.

Pengajar/Tutor: Pengajar/tutor terdiri dari dosen, penyuluh dan petani andal yang berasal dari sekitar kawasan.

Waktu Pembelajaran: Secara kurikuler peternak didik belajar di P2BP selama 25 hari, yaitu 6 hari teori dan 19 hari praktek. Jumlah jam tatap muka untuk setiap hari tidak lebih dari 4 jam pembelajaran (4 x 50 menit). Tetapi peternak bila masih merasa perlu dapat mengikuti pembelajaran pasca program untuk kegiatan praktek hingga 3 bulan.

Metode Pembelajaran: Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pengajaran adalah metode andragogik partisipatori, yaitu suatu metode pengajaran yang menempatkan peternak didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran (student centered) dan pengajar memposisikan diri sebagai fasilitator/tutor. Metode ini menempatkan peternak sebagai manusia dewasa yang berpengalaman. Peternak didik akan dirangsang dan difasilitasi untuk mengembangkan potensi dan pengalaman yang dimilikinya dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap cara-cara dan inovasi baru. Bentuk pembelajaran dengan metode ini lebih didominasi oleh kegiatan diskusi, simulasi dan dinamika kelompok dibandingkan kegiatan pembelajaran satu arah (linear teaching method).

Evaluasi Pembelajaran: Evaluasi adalah suatu kegiatan penilaian secara sistematis terhadap pembelajaran dan pengajaran dalam mencapai tujuan P2BP dan tujuan kurikuler (mata ajaran) serta instruksionalnya. Evaluasi pembelajaran diarahkan bagi keberhasilan peternak didik dalam menguasai materi dan proses pembelajarannya. Evaluasi pembelajaran juga diarahkan untuk mengetahui status pemahaman peternak terhadap materi yang diajarkan.

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan melalui tes lisan maupun tulisan, yang diorientasikan untuk mengetahui perubahan kemampuan peternak didik yang meliputi: (1) hafalan terhadap istilah-istilah praktis, (2) pemahaman terhadap tatalaksana yang diajarkan, (3) aplikasi inovasi yang disampaikan, (4) analisis dan sintesis terhadap masalah-masalah yang terjadi pada saat pemeliharaan ternak dan (5) menformulasikan tindakan apa yang harus dilakukan jika ada masalah.

Evaluasi pengajaran diarahkan pada keberhasilan pengajar/tutor dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki kurikulum dan proses serta manajemen pengajaran.

Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar kesiapan peternak didik dalam menerima bantuan ternak dari pemerintah.

Tracer Study: Untuk memantau keberhasilan program pembelajaran dan pengajaran di P2BP, akan dilakukan pencatatan (data base) alumni P2BP dan diadakan pertemuan-pertemuan dengan alumni. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan prestasi alumni serta mendapatkan umpan balik dari alumni untuk memperbaiki penyelenggaraan program pembelajaran dan pengajaran di P2BP.

Aplikasi: P2BP ini dapat diaplikasikan untuk mengembangkan ternak ruminansia (sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba) dan unggas (ayam kampung, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik) serta ternak eksotik atau ternak harapan (misalnya: rusa, kuda, burung, dan lainnya).

5.3.2. Model Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan

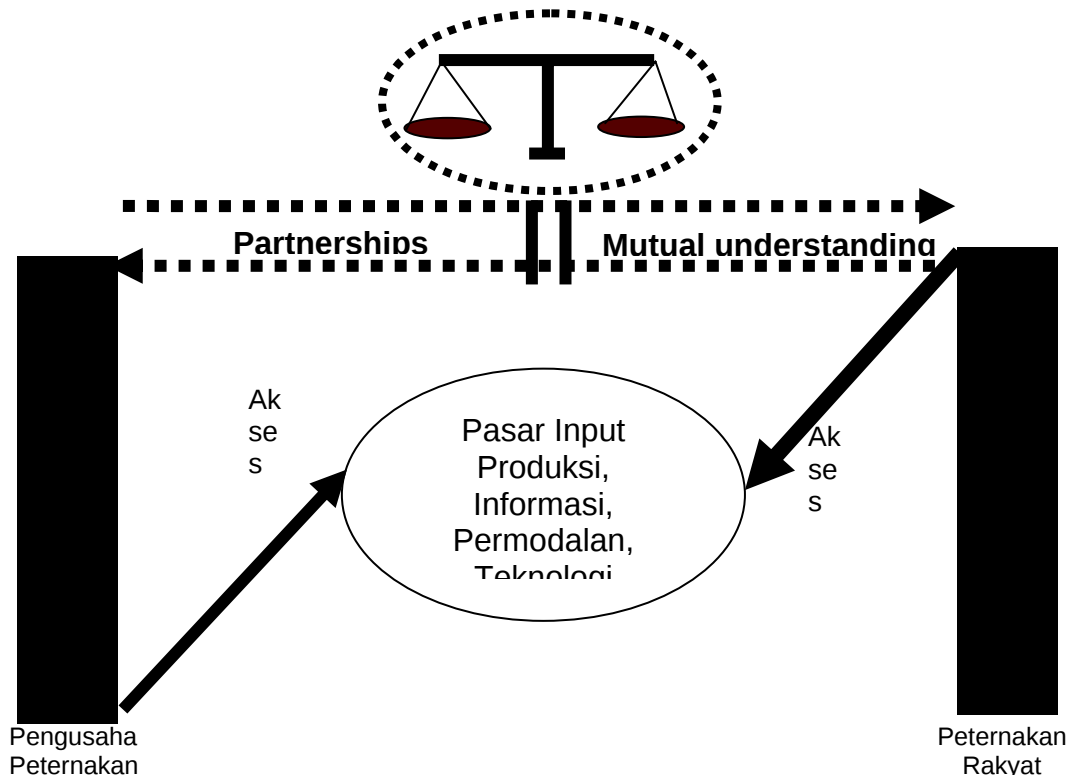
Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar yang disertai dengan pembinaan oleh usaha menengah atau usaha besar tersebut. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Secara ekonomi kemitraan hendaknya harus dapat dijelaskan dengan pemahaman berikut bahwa esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*proverty*) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian didistribusikan diantara pihak yang bermitra. Kemitraan usaha ditujukan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemampuan dan peranan usaha kecil dalam perekonomian nasional khususnya dalam mewujudkan usaha kecil sebagai usaha yang tangguh dan mandiri yang mampu menjadi tulang punggung dan mampu memperkokoh struktur perekonomian daerah yang berbasis pada komoditi peternakan.

Untuk memperoleh bentuk kemitraan yang ideal, dengan adanya nilai-nilai keseimbangan, keserasian dan keterpaduan antara pihak-pihak yang bermitra, maka diperlukan iklim yang kondusif berupa kebijakan pemerintah yang mendukung, kerjasama mutualisme yang saling menguntungkan antara peternak/kelompok peternak dengan pengusaha peternakan, adanya dukungan dan akses yang mudah dari perbankan untuk pemberian kredit kepada peternak. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan hasil kajian dan temuan lapang, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Model yang tepat dari bentuk kemitraan yang dapat dikembangkan adalah bentuk kemitraan yang komponen-komponennya secara terintegrasi terdiri dari tiga unsur, yaitu (a) Petani/Kelompok Tani atau usaha kecil, (b) Pengusaha Besar atau eksportir, dan (c) Bank pemberi Kredit permodalan atau lembaga keuangan lainnya. Masing-masing pihak memiliki peranan di dalam Pola Kemitraan yang sesuai dengan bidang usahanya. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/usaha kecil dengan Pengusaha Pengolahan atau eksportir dalam Pola Kemitraan, dibuat seperti halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Petani/usaha kecil merupakan plasma dan Perusahaan Pengelolaan/Eksportir sebagai Inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikutsertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma.
2. Strategi dasar kemitraan usaha agribisnis peternakan hendaknya dijabarkan dalam bentuk kebijakan pengembangan dari pemerintah pusat dan daerah yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, efisiensi usaha dan berbasis pada pembangunan keunggulan wilayah. Pendekatan yang tepat yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama dalam wawasan koperasi. Hal ini terbukti bahwa dengan dasar kebersamaan maka kegiatan sosial ekonomi yang dijalankan akan mendorong kemandirian dan berkembang secara berkelanjutan. Usaha pembinaan yang perlu dilakukan adalah pembinaan secara bertahap, terus menerus dan terpadu antara lembaga-lembaga terkait (pemerintah, swasta dan koperasi) yang juga diarahkan untuk mencapai kemandirian.
3. Secara operasional dan teknis dilapangan, langkah-langkah untuk mengembangkan kegiatan usaha kemitraan ternak adalah harus diawali dengan pengidentifikasian dan pendekatan secara mitra dan kelompok kepada pelaku usaha untuk selanjutnya dibentuk wadah organisasi ekonomi. Dalam forum wadah tersebut dapat dilakukan analisis kebutuhan pelaku usaha secara tepat dan proporsional. Dengan dasar tersebut maka perumusan bentuk kemitraan dan kepastian kesanggupan menjalin kemitraan dari setiap komponen yang terkait dapat dipastikan. Apabila hal tersebut sudah dilakukan sepenuhnya, maka kesepakatan kemitraan yang dibuat hendaknya diikat dalam bentuk kontrak atau perjanjian kemitraan secara formal.

Filosofi Dasar Model Kemitraan Usaha Peternakan

Model Kemitraan Usaha Ternak Unggas Ras dan Ruminansia harus melibatkan usaha besar (inti), usaha kecil (plasma) dengan melibatkan bank sebagai pemberi kredit dalam suatu ikatan kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepakatan. Hal ini bertujuan antara lain adalah untuk meningkatkan kelayakan plasma, meningkatkan keterkaitan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara inti dan plasma, serta membantu bank dalam meningkatkan kredit usaha kecil secara lebih aman dan efisien. Dalam melakukan kemitraan hubungan kemitraan, perusahaan inti (Industri Pengolahan atau Eksportir) dan petani plasma/usaha kecil mempunyai kedudukan hukum yang setara. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan oleh perusahaan inti, dimulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis dan pemasaran hasil produksi.



Gambar 5.8. Filosofi Dasar Kemitraan Usaha Peternakan

Kemitraan Usaha Ternak Unggas dan Ruminansia harus diarahkan sebagai kerjasama kemitraan dalam bidang usaha melibatkan tiga unsur, yaitu (a) Petani/Kelompok Tani atau usaha kecil, (b) Pengusaha Besar atau eksportir, dan (c) Bank pemberi Kredit permodalan atau lembaga keuangan lainnya. Masing-masing pihak memiliki peranan di dalam Pola Kemitraan yang sesuai dengan bidang usahanya. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/usaha kecil dengan Pengusaha Pengolahan atau eksportir dalam Pola Kemitraan, dibuat seperti halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Petani/usaha kecil merupakan plasma dan Perusahaan Pengelolaan/Eksportir sebagai Inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikutsertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma.

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa profil kemitraan usaha peternakan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka Model kemitraan yang diharapkan dapat dikembangkan sebaiknya dapat diperankan oleh komponen-komponen dalam Pola Kemitraan dimaksud seperti diuraikan sebagai berikut :

1. Petani peternak plasma. Sesuai keperluan, petani yang dapat ikut dalam kegiatan kemitraan ini bisa terdiri atas :

- Petani yang akan menggunakan lahan usaha pertaniannya untuk penanaman dan perkebunan atau usaha kecil lain, dengan demikian untuk kelompok ini dapat dimulai dari penyiapan lahan dan penanaman atau penyiapan usaha,
- Petani /usaha kecil yang telah memiliki usaha tetapi dalam keadaan yang perlu ditingkatkan dalam untuk itu memerlukan bantuan modal. Kegiatan dimulai dari telah adanya kebun atau usaha yang berjalan, dalam batas masih bisa ditingkatkan produktivitasnya dengan perbaikan pada aspek usaha.

Luas lahan atau skala usaha bisa bervariasi sesuai luasan atau skala yang dimiliki oleh masing-masing petani/usaha kecil. Pada setiap kelompok tani/kelompok usaha, ditunjuk seorang Ketua dan Sekretaris merangkap Bendahara. Tugas Ketua dan Sekretaris Kelompok adalah mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan oleh para petani anggotanya, didalam mengadakan hubungan dengan pihak Koperasi dan instansi lainnya yang perlu, sesuai hasil kesepakatan anggota. Ketua kelompok wajib menyelenggarakan pertemuan kelompok secara rutin yang waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok.

2. Koperasi. Para petani/usaha kecil plasma sebagai peserta suatu bentuk kemitraan sebaiknya menjadi anggota suatu koperasi primer di tempatnya. Koperasi bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu plasma di dalam pembangunan usaha sesuai keperluannya. Fasilitas Kredit hanya bisa diperoleh melalui keanggotaan koperasi. Koperasi yang mengusahakan kredit harus sudah berbadan hukum dan memiliki kemampuan serta fasilitas yang cukup baik untuk keperluan pengelolaan administrasi pinjaman kredit para anggotanya.
3. Perusahaan Besar dan Pengelola/Eksportir. Suatu Perusahaan dan Pengelola/Eksportir yang bersedia menjalin kerjasama sebagai inti dalam pola usaha kemitraan ini harus memiliki kemampuan dan fasilitas pengolahan untuk bisa melakukan ekspor, serta bersedia membeli seluruh produksi dari plasma untuk selanjutnya diolah di pabrik dan atau diekspor. Disamping ini, perusahaan inti perlu memberikan bimbingan teknis usaha dan membantu dalam pengadaan sarana produksi untuk keperluan petani plasma/usaha kecil.

Apabila Perusahaan Mitra tidak memiliki kemampuan cukup untuk mengadakan pembinaan teknis usaha, kegiatan usaha kemitraan tetap akan bisa dikembangkan dengan sekurang-kurangnya pihak Inti memiliki fasilitas pengolahan untuk pemasaran produk, hal ini penting untuk memastikan adanya pemasaran bagi produksi petani atau plasma. Meskipun demikian petani plasma/usaha kecil dimungkinkan untuk mengolah hasil panennya, yang kemudian harus dijual kepada Perusahaan Inti. Dalam hal perusahaan inti tidak bisa melakukan pembinaan teknis, kegiatan pembimbingan harus dapat diadakan oleh Koperasi dengan memanfaatkan bantuan tenaga pihak Dinas terkait atau lainnya yang dikoordinasikan oleh Koperasi. Apabila koperasi menggunakan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), perlu mendapatkan persetujuan Dinas terkait setempat dan koperasi memberikan bantuan biaya yang diperlukan.

Koperasi juga bisa memperkerjakan langsung tenaga-tenaga teknis yang memiliki keterampilan dibidang usaha ternak untuk membimbing petani/usaha kecil dengan dibiayai sendiri oleh Koperasi. Tenaga-tenaga ini bisa diberi honorarium oleh Koperasi yang bisa kemudian dibebankan kepada petani, dari hasil penjualan secara proposional menurut besarnya produksi. Sehingga makin tinggi produksi petani/usaha kecil, akan semakin besar pula honor yang diterimanya.

4. Bank. Bank berdasarkan adanya kelayakan usaha dalam kemitraan antara pihak Petani Plasma dengan Perusahaan Inti dan atau Pengolahan/Eksportir, dapat kemudian melibatkan diri untuk biaya investasi dan modal kerja pembangunan atau perbaikan kebun. Disamping mengadakan pengamatan terhadap kelayakan aspek-aspek budidaya/produksi yang diperlukan, termasuk kelayakan keuangan. Pihak bank di dalam mengadakan evaluasi, juga harus memastikan bagaimana pengelolaan kredit dan persyaratan lainnya yang diperlukan sehingga dapat menunjang keberhasilan proyek. Skim kredit yang akan digunakan untuk pembiayaan ini, bisa dipilih berdasarkan besarnya tingkat bunga yang sesuai dengan bentuk usaha tani ini, sehingga mengarah pada perolehannya pendapatan bersih petani yang paling besar.

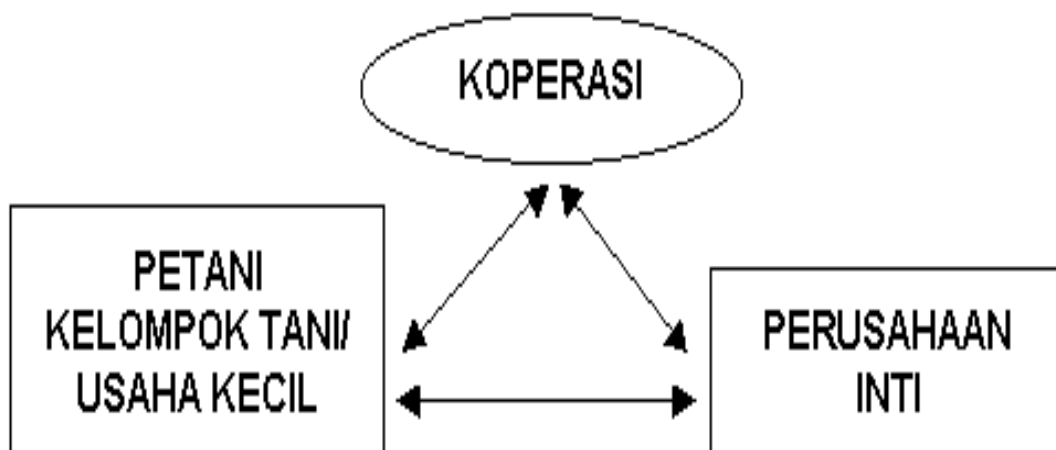
Dalam pelaksanaannya, Bank harus dapat mengatur cara petani plasma akan mencairkan kredit dan mempergunakannya untuk keperluan operasional lapangan, dan bagaimana petani akan

membayar angsuran pengembalian pokok pinjaman beserta bunganya. Untuk ini, bank agar membuat perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan inti, berdasarkan kesepakatan pihak petani/kelompok tani/koperasi. Perusahaan inti akan memotong uang hasil penjualan petani plasma/usaha kecil sejumlah yang disepakati bersama untuk dibayarkan langsung kepada bank. Besarnya potongan disesuaikan dengan rencana angsuran yang telah dibuat pada waktu perjanjian kredit dibuat oleh pihak petani/Kelompok tani/koperasi. Perusahaan inti akan memotong uang hasil penjualan petani plasma/usaha kecil sejumlah yang disepakati bersama untuk dibayarkan langsung kepada Bank. Besarnya potongan disesuaikan dengan rencana angsuran yang telah dibuat pada waktu perjanjian kredit dibuat oleh pihak petani plasma dengan bank.

Bentuk/Pola Kerjasama Kemitraan

Kemitraan usaha ternak antara petani/kelompok tani/koperasi dengan perusahaan mitra, dapat dibuat dan dikembangkan menurut dua pola yaitu :

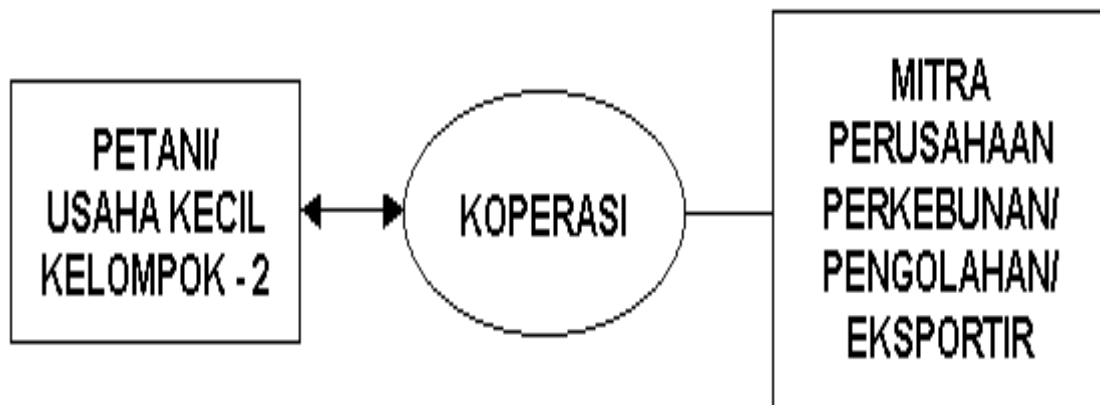
- a. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani mengadakan perjanjian kerjasama langsung kepada Perusahaan Inti/Pengolahan/ Eksportir.



Gambar 5.9. Pola Kerjasama Langsung antara petani peternak dalam koperasi yang tergabung dengan Perusahaan Inti

Dengan bentuk kerja sama seperti ini, pemberian kredit kepada petani peternak plasma dilakukan dengan kedudukan Koperasi sebagai Channeling Agent, dan pengelolaannya langsung ditangani oleh Kelompok tani. Sedangkan masalah pembinaan harus bisa diberikan oleh Perusahaan Mitra.

- b. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani, melalui koperasinya mengadakan perjanjian yang dibuat antara Koperasi (mewakili anggotanya) dengan perusahaan pengolahan /eksportir.



Gambar 5.10. Pola Kerjasama antara petani peternak dalam koperasi yang tergabung dengan Perusahaan Inti

Dalam bentuk kerjasama seperti ini, pemberian kredit kepada petani plasma dilakukan dengan kedudukan koperasi sebagai Executing Agent. Masalah pembinaan teknis budidaya tanaman/pengelolaan usaha, apabila tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Perusahaan Mitra, akan menjadi tanggung jawab koperasi.

Prasyarat Pelaksanaan Pola Kemitraan

Untuk melihat bahwa pola kemitraan ini dikembangkan dengan sebaiknya dan dalam proses kegiatannya nanti memperoleh kelancaran dan keberhasilan, minimal dapat dilihat dari bagaimana pola kemitraan ini disiapkan. Kalau pola kemitraan ini mempergunakan kredit untuk modal usaha plasma, perintisannya dimulai dari :

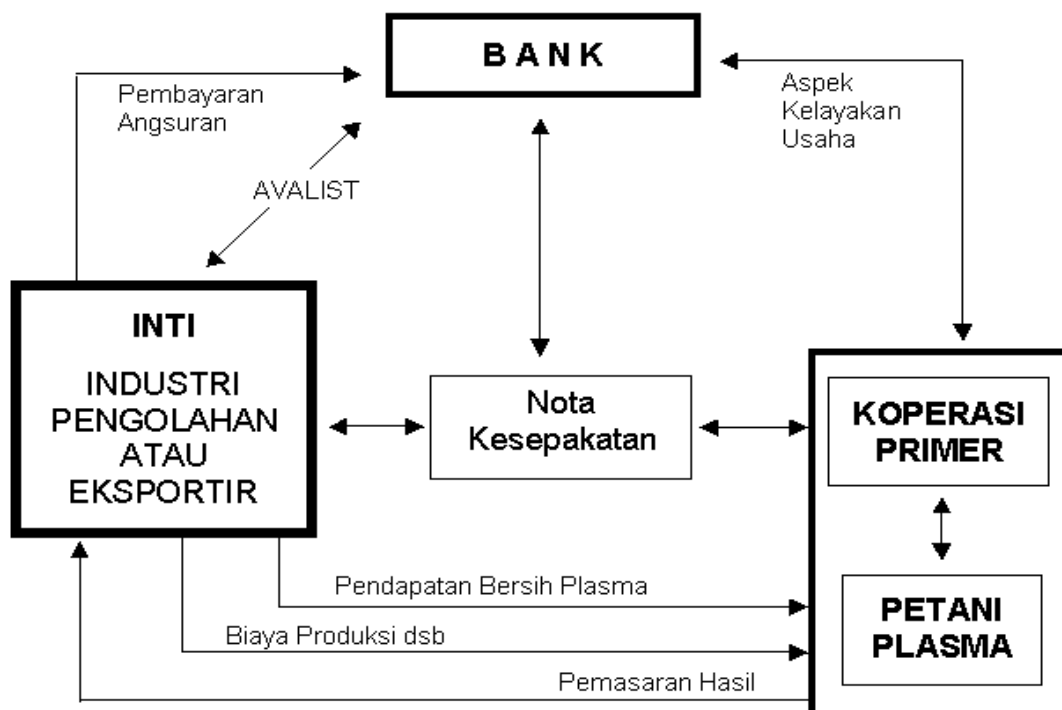
- a. Adanya petani/pengusaha kecil yang telah menjadi anggota koperasi dan lahan pemilikannya akan dijadikan kebun/tempat usaha atau lahan kebun/usahanya sudah ada tetapi akan ditingkatkan produktivitasnya. Petani/usaha kecil tersebut harus menghimpun diri dalam kelompok dengan anggota sekitar 25 petani/kelompok usaha. Berdasarkan persetujuan bersama, yang didapatkan melalui pertemuan anggota kelompok, mereka bersedia atau berkeinginan untuk bekerja sama dengan perusahaan perkebunan/pengolahan/eksportir dan bersedia mengajukan permohonan kredit untuk keperluan peningkatan usaha;
- b. Adanya perusahaan perkebunan/pengolahan dan eksportir, yang bersedia menjadi mitra petani/usaha kecil, dan dapat membantu memberikan pembinaan teknik budidaya/produksi serta proses pemasarannya;
- c. Dipertemukannya kelompok tani/usaha kecil dan pengusaha /pengolahan dan eksportir tersebut, untuk memperoleh kesepakatan di antara keduanya untuk bermitra. Prakarsa bisa dimulai dari salah satu pihak untuk mengadakan pendekatan, atau ada pihak yang akan membantu sebagai mediator, peran konsultan bisa dimanfaatkan untuk mengadakan identifikasi dan menghubungkan pihak kelompok tani/usaha kecil yang potensial dengan perusahaan yang dipilih memiliki kemampuan tinggi memberikan fasilitas yang diperlukan oleh pihak petani/usaha kecil;
- d. Diperoleh dukungan untuk kemitraan yang melibatkan para anggotanya oleh pihak koperasi. Koperasi harus memiliki kemampuan di dalam mengorganisasikan dan mengelola administrasi yang berkaitan dengan pola kemitraan ini. Apabila keterampilan koperasi kurang, untuk peningkatannya dapat diharapkan nantinya mendapat pembinaan dari perusahaan mitra. Koperasi kemudian mengadakan langkah-langkah yang berkaitan dengan formalitas pola kemitraan sesuai fungsinya. Dalam kaitannya dengan penggunaan kredit, Koperasi harus mendapatkan

persetujuan dari para anggotanya, apakah akan bertindak sebagai badan pelaksana (executing agent) atau badan penyalur (channeling agent);

- e. Diperolehnya rekomendasi tentang pengembangan pola kemitraan ini oleh pihak instansi pemerintah setempat yang berkaitan (Dinas Pertanian/Peternakan, Dinas Koperasi, Kantor Badan Pertanahan, dan Pemda);
- f. Lahan yang akan digunakan untuk usaha dalam pola kemitraan, harus jelas statusnya kepemilikannya bahwa sudah/atau akan bisa diberikan sertifikat dan bukan merupakan lahan yang masih belum jelas statusnya yang benar ditanami/tempat usaha. Untuk itu perlu adanya kejelasan dari pihak Kantor Badan Pertanahan dan pihak instansi terkait lainnya.

Mekanisme Pelaksanaan Pola Kemitraan

Mekanisme Pola Kemitraan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian diarahkan dengan kerangka dasar sebagai berikut :



Gambar 5.11. Mekanisme Pola Kemitraan yang ideal dengan keterlibatan antara komponen petani, perbankan, perusahaan mitra yang jelas.

Bank pelaksana akan menilai kelayakan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip bank teknis. Jika proyek layak untuk dikembangkan, perlu dibuat suatu nota kesepakatan (Memorandum of Understanding = MoU) yang mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra (inti, Plasma/Koperasi dan Bank). Sesuai dengan nota kesepakatan, atas kuasa koperasi atau plasma, kredit perbankan dapat dialihkan dari rekening koperasi/plasma ke rekening inti untuk selanjutnya disalurkan ke plasma dalam bentuk sarana produksi, dana pekerjaan fisik, dan lain-lain. Dengan demikian plasma tidak akan menerima uang tunai dari perbankan, tetapi yang diterima adalah sarana produksi pertanian yang penyalurannya dapat melalui inti atau koperasi. Petani plasma melaksanakan proses produksi. Hasil tanaman plasma dijual ke inti dengan harga yang telah disepakati dalam MoU. Perusahaan inti akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk diserahkan kepada bank sebagai angsuran pinjaman dan sisanya dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Peternakan

Untuk melegalisasikan kerja sama kemitraan ini, perlu dikukuhkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama berdasarkan kesepakatan mereka. Dalam perjanjian kerjasama itu dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang menjalin kerja sama kemitraan itu. Perjanjian tersebut memuat ketentuan yang menyangkut kewajiban pihak Mitra Perusahaan (Inti) dan petani/usaha kecil (plasma) antara lain sebagai berikut :

a. Kewajiban Perusahaan Pengolahan/Eksportir sebagai mitra (inti) :

- Memberikan bantuan pembinaan budidaya/produksi dan penanganan hasil;
- Membantu petani di dalam menyiapkan lahan, pengadaan sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan), dan bimbingan teknis lainnya;
- Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca panen untuk mencapai mutu yang tinggi;
- Melakukan pembelian produksi petani plasma;
- Membantu petani plasma dan bank di dalam masalah pelunasan kredit bank (kredit) dan bunganya, serta bertindak sebagai avalis dalam rangka pemberian kredit bank untuk petani plasma.

b. Hak Perusahaan Mitra adalah :

- Mendapatkan seluruh hasil panen dan menjamin pemasaran dengan cara membeli untuk kepentingan sendiri dan menjual hasil panen ke pihak lain.
- Menentukan jadwal masuknya bibit, antara satu dengan yang lainnya untuk mengatur kontinuitas produksi, mengatur panen dan berat panen yang sesuai dengan selera pasar.
- Menentukan umur dan berat badan ternak pada saat panen yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasar.

c. Kewajiban petani peserta sebagai plasma :

- Menyediakan lahan pemilikannya untuk budidaya;
- Menghimpun diri secara berkelompok dengan petani tetangganya yang lahan usahanya berdekatan dan sama-sama ditanami;
- Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca-panen untuk mencapai mutu hasil yang diharapkan;
- Menggunakan sarana produksi dengan sepenuhnya seperti yang disediakan dalam rencana pada waktu mengajukan permintaan kredit;
- Menyediakan sarana produksi lainnya, sesuai rekomendasi budidaya oleh pihak Dinas pertanian/peternakan/instansi terkait setempat yang tidak termasuk di dalam rencana waktu mengajukan permintaan kredit;
- Melaksanakan pemungutan hasil (panen) dan mengadakan perawatan sesuai petunjuk Perusahaan Mitra untuk kemudian seluruh hasil panen dijual kepada Perusahaan Mitra ; dan
- Pada saat penjualan hasil petani akan menerima pembayaran harga produk sesuai kesepakatan dalam perjanjian dengan terlebih dahulu dipotong sejumlah kewajiban petani melunasi angsuran kredit bank dan pembayaran bunganya.

b. Hak petani peserta sebagai plasma :

- Memperoleh sarana produksi ternak secara kredit yang akan dibayar pada saat panen.
- Memperoleh bimbingan teknis dan alih teknologi serta pengembangan dari perusahaan mitra untuk usaha budidaya peternakan dan bekerjasama dengan perusahaan mitra.

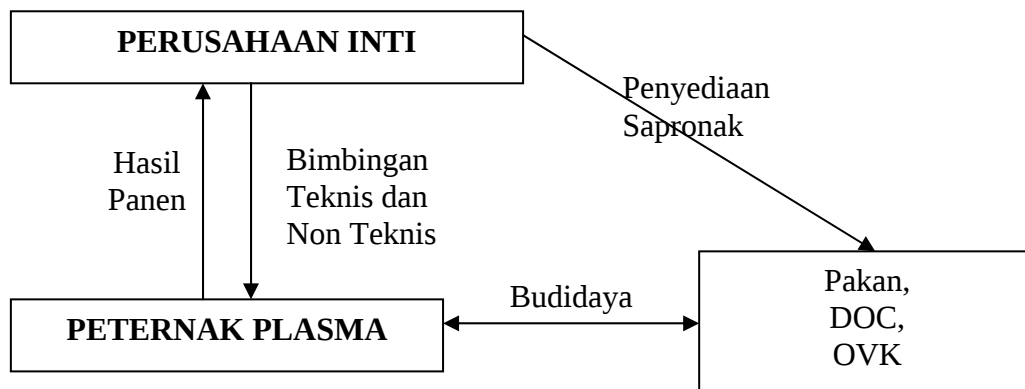
- Menolak sarana produksi peternakan yang diserahkan oleh perusahaan mitra apabila kualitas sarana produksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan standar mutu yang disepakati.
- Menerima pembayaran dari perusahaan mitra terhadap penyerahan hasil produksi yang dilakukan secara tepat waktu.
- Memperoleh bonus apabila berprestasi dalam menjalankan usaha.
- Membatalkan kerjasama apabila perusahaan mitra melakukan ingkar janji terhadap prestasi yang telah diperjanjikan.

Yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara adil yang mencerminkan hubungan kerja yang saling menguntungkan dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerja. Namun demikian, hal lainnya yang juga tidak kalah penting adalah adanya parameter keberhasilan usaha yang diindikasikan melalui harga dari sarana produksi ternak seperti bibit, pakan, obat-obatan, hasil panen dan tenaga kerja, serta parameter teknis yang meliputi angka kematian, angka konversi pakan, berat panen, lama pemeliharaan dan lain-lain. Apabila parameter teknis tersebut mampu dilakukan dengan baik oleh peternak, maka sangat wajar jika ada penghargaan dalam bentuk bonus/insentif sebagai imbalan jasa yang diterima baik oleh perusahaan mitra maupun peternak/kelompok peternak.

Model Kemitraan Usaha Peternakan

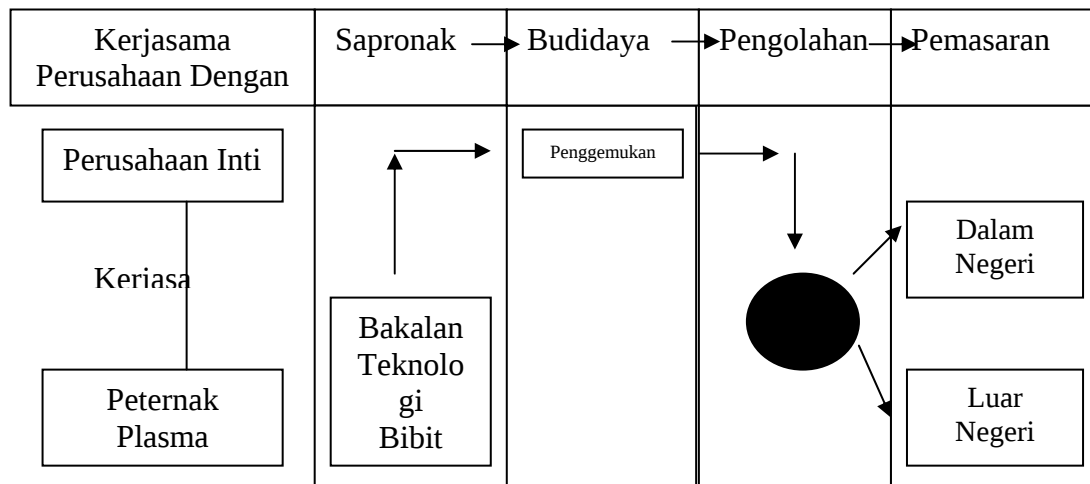
Dari Uraian di atas, untuk komoditas ruminansia dan unggas, secara spesifik rumusan model kemitraan usahanya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Rumusan Model kemitraan pada komoditi ternak unggas ras diindikasikan bahwa kerangka dasar pola kemitraannya terdiri dari komponen inti dan plasma, dimana perusahaan inti bertindak sebagai penyedia sarana produksi ternak, pemasaran hasil panen, membantu permodalan dan memberikan bimbingan teknis pada plasma dalam melakukan budidaya. Sarana produksi ternak yang dipasok inti berupa pakan, DOC dan obat-obatan (OVK/obat, vaksin dan bahan kimia).



Gambar 5.12. Rumusan Model Kemitraan Usaha Ternak Unggas

- Rumusan Model kemitraan pada komoditi ternak ruminansia diindikasikan bahwa kerangka dasar pola kemitraannya terdiri dari inti dan plasma, dimana perusahaan inti bertindak sebagai penyedia sarana produksi sapi bakalan, teknologi dan pakan untuk selanjutnya menampung hasil penggemukan yang dilakukan oleh peternak plasma serta melakukan pengolahan dan pemasaran. Sedangkan plasma berkewajiban memelihara sapi yang digemukan.



Gambar 5.13. Rumusan Model Kemitraan Usaha Ternak Ruminansia

5.4. Tahapan Operasional Master Plan

Pembangunan agribisnis peternakan tidak mungkin dilakukan sekaligus, karena berbagai keterbatasan. Karena itu perlu dilakukan secara bertahap dengan tahapan seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.13. Tahapan Operasional Master Plan

PROGRAM		TAHUN					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Program Pengembangan Usaha Peternakan							
1.	Pengembangan usaha ternak sapi potong	√	√	√			√
2.	Pengembangan usaha ternak itik		√	√	√		
3.	Pengembangan usaha ternak ayam	√	√	√			
4.	Peningkatan produktivitas usaha ternak		√	√	√	√	√
5.	Pemberantasan penyakit ternak	√	√	√	√	√	√
Program Pengembangan Agribisnis Hulu Peternakan							
1.	Pengembangan usaha pembibitan ayam ras			√		√	
2.	Pengembangan usaha pembibitan ayam kampung	√	√	√			√
3.	Pengembangan usaha pembibitan sapi potong		√	√	√		√
4.	Pengembangan usaha pembibitan itik	√		√		√	
5.	Pengembangan usaha pakan ternak mini		√		√		√
6.	Penyediaan obat/vaksin ternak	√	√	√	√	√	√
Program Pengembangan Agribisnis Hilir Peternakan							
1.	Pengembangan pengolahan daging			√	√	√	
2.	Pengembangan pengolahan telur		√		√		√
3.	Pengembangan pengolahan kulit			√	√	√	
4.	Pengembangan jaringan pemasaran hasil ternak.	√	√	√	√	√	√
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan							
1.	Peningkatan kemampuan manajerial peternak	√	√	√		√	√
2.	Peningkatan keterampilan inseminasi bagi inseminator	√	√		√	√	√
3.	Peningkatan keterampilan, keterampilan vaksinasi bagi vaksinator	√	√		√	√	√
4.	Peningkatan kemampuan penyuluh peternakan	√	√	√			
5.	Peningkatan kemampuan promosi dan fasilitator bagi aparat pengelola pengembangan agribisnis peternakan	√	√	√	√	√	√
Program Pengembangan Infrastruktur Agribisnis Peternakan							
1.	Pembangunan pos kesehatan ternak dan inseminasi buatan		√		√		√
2.	Pembangunan pasar ternak		√	√		√	√
3.	Pembangunan rumah potong ternak dan rumah/tempat pemotongan ayam		√		√		√
4.	Pembangunan fasilitas karantina ternak		√		√		√
5.	Pembangunan fasilitas pelabuhan ternak		√		√		√

BAB 6. PENGUKURAN KINERJA

6.1. Pengukuran Kinerja Kebijakan

Evaluasi yang baik atas pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian penting dalam kegiatan pembangunan, baik evaluasi formatif (on-going evaluation) maupun evaluasi sumatif (ex-post evaluation). Evaluasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan atau program atau kebijakan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Kegiatan evaluasi melibatkan berbagai tugas, mulai dari pengambilan keputusan, organisasi dan tipe metodologi yang paling efisien dan paling efektif. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana pembangunan, dan kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Jika tujuan pembangunan dapat dipahami sebagai akibat akhir dari seluruh upaya pembangunan, strategi pembangunan pada dasarnya adalah pilihan sebab akibat secara sistematis dilakukan dan asumsi-asumsi yang diharapkan tersedia, agar tujuan pembangunan tercapai. Asumsi adalah keadaan-keadaan diluar kendali Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau keadaan-keadaan yang lebih baik atau lebih tepat disediakan oleh pihak-pihak lain dalam seluruh upaya pembangunan. Strategi merupakan pilihan, karena setiap pilihan memiliki konsekuensi biaya, dan resiko pembangunan yang berbeda-beda. Semakin banyak asumsi dalam rencana pembangunan, biaya pembangunan dapat diharapkan akan mengecil, namun akan diikuti oleh resiko kegagalan pembangunan yang semakin besar.

Evaluasi dilakukan dengan merujuk pada lintasan sebab akibat tersebut. Evaluasi dilakukan dengan cara menetapkan indikator-indikator kinerja yang menggambarkan secara tepat keadaan-keadaan sebab dan akibat dalam strategi pembangunan. Indikator kinerja seharusnya merupakan besaran-besaran yang dapat diukur dengan relatif mudah dan murah, yang mencerminkan keadaan-keadaan sebab akibat pembangunan.

Strategi pembangunan sebagai sebab akibat pembangunan serta indikator-indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1.Strategi Pembangunan dan Indikator Kinerja

Strategi	Indikator Kinerja
Tujuan (Sebab Akibat)	Dampak (Impact)
Sasaran dan Asumsi	Manfaat (benefit)
Hasil pembangunan dan asumsi	Hasil (outcome)
Program dan asumsi	Keluaran (output)
Kegiatan (sebab awal) dan asumsi	Masukan (input)

Masukan (input) adalah jumlah sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (output) suatu kegiatan atau program atau kebijakan keluaran (output) adalah hasil langsung dari kegiatan atau program atau kebijakan berdasarkan masukan yang telah ditentukan. Hasil (outcomes) adalah pencapaian kinerja berdasarkan hasil yang dicapai dari suatu kegiatan atau program atau kebijakan. Manfaat (benefit) adalah tingkat manfaat yang dirasakan berupa nilai tambah yang diperoleh oleh masyarakat atau pemerintah. Dampak (impact) adalah akibat atau pengaruh kegiatan atau program atau kebijakan terhadap keadaan makro yang diinginkan berdasarkan manfaat yang diperoleh.

Selanjutnya dapat disusun Matriks Master Plan (MMP) yang memberikan gambaran struktur pembangunan secara menyeluruh dalam bentuk yang ringkas. MMP dapat memberi gambaran secara menyeluruh kondisi pembangunan pada tataran strategis. Di dalam MMP terdapat arah kebijakan, program, proyek/kegiatan, satuan, sasaran secara keseluruhan, sasaran tahunan, kinerja (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak)

6.2. Indikator dan Standar Kinerja

Dalam rangka memilih indikator, perlu diupayakan pengukuran yang dapat dilakukan secara mudah dan murah. Untuk itu pengukuran kinerja tersebut sedapat mungkin merupakan kegiatan yang melekat pada proses penyelenggaraan pembangunan, sehingga tidak menimbulkan biaya yang berlebihan.

Perlu diperhatikan bahwa indikator kinerja tersebut memiliki hirarki yang berbeda ditingkat Kabupaten/Kota dengan tingkat instansi dibawahnya. Ditingkat Dinas Badan dan Kantor atau Instansi Pemerintah Kota lainnya, besaran-besaran rencana strategi hanya bersifat taktis bagi Gubernur. Karena penyelenggaraan pembangunan memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengukuran kinerja itu. Perlu dikembangkan dokumen-dokumen yang dipakai untuk mencatat pencapaian kinerja yang disepakati dalam Matriks Master Plan (MMP).

Dalam MMP sebagai dash board Gubernur, indikator-indikator kinerja yang perlu dipilih adalah indikator-indikator kinerja pencapaian tujuan, sasaran, dan hasil-hasil pembangunan. Ketiga sasaran itu adalah komponen strategi dalam rencana strategis. Insatansi pemerintah propinsi kemudian perlu menyusun Matriks Master Plan instansinya, yang menempatkan program serta kegiatan sebagai besaran Matriks Master Plan.

Standar kinerja adalah besaran-besaran target yang harus dicapai untuk setiap indikator kinerja yang dipilih. Standar Kinerja tersebut dapat dinyatakan sebagai batas bawah (lower bound target) yang masih dapat diterima, atau batas (upper bound target) yang masih dapat diterima

6.3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam Master Plan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam penting artinya untuk dilaksanakan minimal satu kali setahun (formatif), untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya evaluasi dengan umpan balik hasil pelaksanaan bermanfaat dalam perumusan langkah-langkah perbaikan.

Evaluasi pembangunan dapat dilaksanakan dengan cara terlebih dahulu menetapkan indikator-indikator kinerja. Oleh sebab itu, indikator kinerja sebaliknya merupakan besaran-besaran yang dapat diukur dengan relatif mudah dan murah. Pengukuran tingkat kinerja dalam evaluasi meliputi; pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran kinerja program, dan pengukuran kinerja kebijakan.

Dalam pengukuran kinerja, terdapat langkah-langkah pengukuran sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja meliputi; masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts).

B. Penetapan Pencapaian Kinerja

Penetapan pencapaian kinerja, dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang ada dalam Master Plan.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada unit kinerja lingkup Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di dalam menjabarkan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan dalam bentuk kegiatan pada masing-masing instansi yang bersangkutan. Selanjutnya untuk memudahkan dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan masing-masing instansi, maka dapat digunakan formulir pengukuran kinerja dengan formulasi (rumusan) sebagai berikut :

Instansi tahun		Pengukuran Kinerja			Formulir PK					
Kebijakan	Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan capaian Indikator Kinerja					
			Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja (%)	Bobot Indikator Kinerja (%)	Hasil Capaian Indikator Kinerja (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Inputs		Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja (inputs)					
			Outputs		Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja keluaran (outputs)					
			Outcomes		Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja (outcomes)					
			Benefits		Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja manfaat (benefits)					
			Impacts		Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja dampak (impacts)					

Untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis (RENSTRA), ada beberapa rumus yang digunakan dalam penghitungan capaian indikator kinerja, yaitu ;

- a. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk penghitungan capaian indikator kinerja digunakan rumus sebagai berikut ;

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, digunakan rumus sebagai berikut ;

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

c. Nilai capaian indikator kinerja :

$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Capaian indikator kinerja} \times \text{bobot indikator kinerja}}{100 \%} \times 100\%$

C. Bobot dan Penilaian Kinerja

Setiap kegiatan dalam program pembangunan mempunyai bobot kumulatif yang sama yaitu 100 % untuk pelaksanaan kegiatan. Proyeksi penentuan bobot setiap tahun bersifat proporsional dengan batas maksimal 5 tahun. Sebagai contoh, untuk kegiatan yang hanya dilaksanakan 2 tahun, maka bobot setiap tahun adalah 50 %. Pada kegiatan yang memerlukan waktu 5 tahun, maka bobot setiap tahunnya adalah 20 %.

Penilaian kinerja kegiatan terdiri dari masukan, keluaran, hasil, manfaat, dampak, yang masing-masing bernilai 1 sampai 20. Penilaian kinerja kegiatan kumulatif berjumlah 100.

D. Bobot dan Penilaian Kinerja

Untuk membantu pelaksanaan evaluasi kinerja, digunakan formulir evaluasi kinerja yang terdiri dari formulir EK-1 yaitu untuk penilaian kinerja kegiatan. Formulir EK-2 untuk penilaian kinerja program dan formulir EK-3 untuk penilaian kinerja kebijakan. Bentuk-bentuk formulir yang dimaksud adalah :

1. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (formulir EK-1)

Instansi Tahun						
No	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja (%)	Bobot Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
			Inputs			
			Outputs			
			Outcomes			
			Benefits			
			Impacts			
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan			

2. Evaluasi Kinerja Program

Formulir Evaluasi Kinerja Program (Formulir EK – 2)

Instansi Tahun						
No	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja (%)	Bobot Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan			

3. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Formulir Evaluasi Kinerja kegiatan (Formulir EK-3)

Instansi Tahun						
No	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja (%)	Bobot Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan			

E. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja

Kesimpulan hasil evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja institusi pemerintah. Kinerja dapat dinilai dengan skala pengukuran ordinal, sebagai berikut :

- a. > 90 - 100 = Terpuji
- b. > 80 - 90 = Sangat Baik
- c. > 65 - 80 = Baik
- d. > 55 - 65 = Sedang
- e. < 55 = Kurang Baik

F. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja

Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil indikator-indikator kinerja sebagai mana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi harus menyajikan data dan informasi yang relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Oleh karena itu, dari hasil kesimpulan hasil evaluasi perlu dibuat analisis pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan, secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan rinci. Disamping itu, perlu dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain mencakup analisis inputs, outputs, analisis realisasi outcomes dan benefits, analisis impacts baik positif maupun negatif, dan analisis proses pencapaian indikator-indikator kinerja analisis keuangan, dan analisis kebijakan.

Analisis tersebut antara lain dilakukan dengan cara membandingkan indikator kinerja dengan realisasi sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan
- b. Perbandingan antara kinerja nyata dan tahun-tahun sebelumnya
- c. Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi dengan instansi lain yang unggul di bidangnya atau sektor swasta
- d. Perbandingan kinerja nyata antara kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional

Bagi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu ditetapkan standar yang berkaitan dengan penggunaan jasa layanan pemerintah dengan memperlihatkan standar internasional dan kendala-kendala atau tingkat kepuasan yang diinginkan oleh masyarakat pelanggan.

Selanjutnya, untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu instansi, terutama yang sifatnya lintas sektoral, digunakan indikator-indikator ekonomi sosial, atau indikator lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional, seperti indeks pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan Perkapita, tingkat inflasi, ekspor, impor, dan Balita, tingkat kesehatan ibu dan anak, tingkat kesehatan gizi masyarakat, tingkat usia harapan hidup rata-rata penduduk, dan sebagainya.

Indikator pengukuran kinerja dikenakan pada setiap program dan kegiatan yang terdiri dari atas lima tolok ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil dampak dan manfaat, sesuai dengan :

- a. Laporan Perhitungan APBD
- b. Nota Perhitungann APBD
- c. Laporan Aliran Kas
- d. Neraca Daerah
- e. Laporan Pertanggungjawaban Gubernur
- f. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BAB 7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Kegiatan ekonomi yang berbasis peternakan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki prospek kedepan. Karakteristik produk peternakan (daging, telur, susu, dan produk olahannya) yang merupakan salah satu bahan pangan dan permintaannya bersifat *income elastic demand* yang relatif tinggi, akan memiliki peningkatan permintaan produk peternakan yang lebih besar dari laju peningkatan pendapatan. Karakteristik permintaan yang demikian dan potensi pengembangan yang masih cukup besar di Indonesia, menjadi alasan pokok untuk menjadikan peternakan sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru bagi sektor pertanian serta merupakan komoditas pokok dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Perubahan struktur ekonomi wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang kurang menggembirakan tersebut, menunjukkan paling tidak dua fenomena. Pertama, pertumbuhan ekonomi wilayah Nanggroe Aceh Darussalam seakan-akan mengalami pelepasan kaitan (decoupling) antar sektor, terutama antara pertumbuhan sektor industri dengan sektor pertanian primer. Kedua, pelepasan kaitan tampaknya juga sedang terjadi antara pertumbuhan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dengan pertumbuhan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan perkataan lain, proses pembangunan yang berlangsung di Nanggroe Aceh Darussalam belum mampu mengintegrasikan antar sektor maupun antar wilayah. Akibatnya adalah wilayah Nanggroe Aceh Darussalam relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam lainnya.

Bila fenomena yang demikian terus berlangsung, maka beberapa wilayah Nanggroe Aceh Darussalam akan menjadi sasaran arus migrasi sumberdaya manusia terus-menerus dan dikhawatirkan akan mengalami tekanan penduduk yang berlebihan, sehingga menimbulkan masalah ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Sementara itu, beberapa daerah lainnya di Nanggroe Aceh Darussalam akan menderita akibat pelarian sumberdaya manusia (brain drain) dan sumberdaya modal (capital flight) sedemikian rupa sehingga akan menjadikan Nanggroe Aceh Darussalam tetap tertinggal bahkan menjadi kantong-kantong kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalam. Secara keseluruhan, kecenderungan yang demikian akan menimbulkan persoalan sosial dan politik (seperti kecemburuan sosial) beserta segala konsekuensinya; dan akan memperlemah kedudukan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wilayah penyangga (buffer zone) Medan/Sumatera Utara.

Untuk menghindari kecenderungan demikian, diperlukan strategi pembangunan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang bersifat integratif. Artinya, strategi pembangunan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang diperlukan adalah strategi yang mampu mengintegrasikan pembangunan antar sektor (sektor pertanian dengan sektor lainnya) dan antar wilayah (wilayah Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan dengan Bagian Utara dan Tengah) sedemikian rupa sehingga pertumbuhan ekonomi yang pesat dan merata di setiap bagian wilayah dapat menarik pertumbuhan ekonomi di bagian Selatan.

Salah satu strategi pembangunan wilayah yang potensial mengintegrasikan antar sektor dan antar wilayah adalah pengembangan agribisnis. Pengembangan agribisnis bukan sekedar pengembangan bisnis komoditas pertanian yang kita kenal selama ini. Lebih dari itu, pendekatan agribisnis merupakan paradigma baru pembangunan ekonomi (wilayah, nasional) yang berbasis pertanian (as a new way to seeing agriculture), yang di dalamnya termasuk peternakan.

Pengertian agribisnis berbasis peternakan yang dimaksud adalah agribisnis sebagai suatu sistem. Dengan demikian, paradigma baru pembangunan ekonomi yang berbasis peternakan adalah membangun keseluruhan subsistem agribisnis tersebut secara simultan dan terintegrasi vertikal

mulai dari hulu hingga ke hilir. Paradigma baru ini berbeda dengan paradigma lama pembangunan ekonomi berbasis peternakan yang hanya terbatas pada pengembangan subsistem usahaternak/budidaya peternakan saja.

Dalam hubungannya dengan pembangunan Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam Selatan, pengembangan agribisnis berbasis peternakan secara potensial akan dapat mengintegrasikan perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan dengan perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam bahkan ke perekonomian yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena agribisnis berbasis peternakan memiliki beberapa keunggulan seperti diuraikan berikut ini.

Pertama, kegiatan peternakan, khususnya subsistem budidaya, relatif bersifat tidak tergantung pada ketersediaan lahan dan tidak terlalu menuntut kualitas tenaga kerja yang tinggi. Hal ini sesuai dengan kondisi Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan yang topografinya membutuhkan pengelolaan yang bijaksana dan masyarakatnya yang berpendidikan relatif rendah dan budaya agraris.

Kedua, kegiatan budidaya peternakan memiliki kelenturan bisnis dan teknologi yang luas dan luwes. Kelenturan bisnis yang luas yang dimaksud adalah bahwa ternak yang dipelihara dapat dijual pada umur berapa saja dan pasarnya telah tersedia. Hal ini sesuai bagi keluarga yang membutuhkan likuiditas setiap saat. Kemudian, kelenturan teknologi yang dimaksud adalah kegiatan peternakan dapat diintegrasikan secara sinergis dengan kegiatan tanaman pangan, kegiatan perkebunan (sistem karet-sapi/rubber-beef system, sistem kelapa-sapi/coco-beef system, dan lain-lain), kegiatan perhutanan (silvi pakan, silvi pastura) dan diintegrasikan dengan kegiatan konservasi tanah dan air, dengan menyesuaikan teknologi dan jenis ternak yang dipelihara. Kelenturan teknologi yang demikian, sangat sesuai dengan kondisi Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan yang pembangunannya membutuhkan pendekatan terpadu (lintas sektoral). Selain itu, kelenturan teknologi yang demikian akan mendorong terjadinya integrasi antar sektor di Nanggroe Aceh Darussalam Selatan.

Ketiga, produk yang dihasilkan oleh agribisnis berbasis peternakan merupakan produk yang memiliki nilai elastisitas permintaan terhadap perubahan pendapatan yang tinggi, artinya konsumsi akan meningkat bila pendapatan meningkat. Hal ini berarti, peningkatan pendapatan penduduk yang relatif cepat di Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Utara dan Tengah, akan meningkatkan permintaan produk-produk peternakan yang dihasilkan di Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan. Hal ini juga berarti, pertumbuhan ekonomi yang cepat di Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Utara dan Tengah akan menarik pertumbuhan ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan. Dengan demikian, integrasi pembangunan wilayah antara Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Utara dan Tengah dengan Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan, antara desa dan kota, secara bertahap akan terwujud.

Keempat, sifat permintaan produk peternakan yang memiliki nilai elastisitas permintaan terhadap perubahan pendapatan yang tinggi dan kegiatan peternakan yang dilihat sebagai suatu sistem agribisnis, akan mampu menciptakan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan, mulai pada agribisnis hulu, budidaya, agribisnis hilir dan kegiatan jasa terkait seperti transportasi, perbankan, dan lain-lain. Hal yang demikian sangat dibutuhkan oleh Nanggroe Aceh Darussalam mengingat angkatan kerja masih tetap bertumbuh di masa depan.

Kelima, karena produk agribisnis berbasis peternakan yang dihasilkan dari Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan juga dibutuhkan di wilayah Medan/Sumatera Utara, nasional, dan berbagai kawasan internasional (ASEAN, Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, dan kawasan lain), maka pengembangan agribisnis berbasis peternakan secara potensial dapat mengintegrasikan perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan ke perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam, ke perekonomian Medan/Sumatera Utara, ke perekonomian nasional, dan bahkan ke perekonomian internasional. Dengan demikian, manfaat integrasi perekonomian dunia yang sedang berlangsung (pelaksanaan AFTA, APEC) akan dapat dinikmati oleh masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam termasuk Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan. Peningkatan pendapatan yang diakibatkan oleh integrasi ekonomi AFTA dan APEC pada setiap negara yang terlibat, akan meningkatkan permintaan hasil ternak dan bila permintaan hasil ternak ini dapat

dipenuhi oleh Nanggroe Aceh Darussalam maka akan dapat menarik perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam.

Secara umum, Program pengembangan agribisnis peternakan di daerah dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap 1, pembangunan agribisnis peternakan daerah digerakan oleh kelimpahan sumber daya (*faktor driven*) sebagai sumber pertumbuhan yakni sumber daya alam dan tenaga kerja tak terampil. Pada tahap 1 ini antara lain dicirikan oleh belum berkembangnya sub-sistem agribisnis hulu dan hilir peternakan, sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif kecil, produk utama didominasi oleh komoditas primer, sehingga segmen pasar yang dimasuki terbatas atau daya saing masih rendah.
2. Tahap 2, pembangunan agribisnis peternakan daerah digerakan oleh penggunaan barang-barang modal (*capital driven*) atau pertumbuhan yang digerakan oleh modal dan sumber daya manusia terampil (*capital and semi-skill labor based*). Pada tahap ini antara lain dicirikan oleh berkembangnya sub-sistem agribisnis hulu dan hilir peternakan, meningkatnya penggunaan barang-barang modal, sehingga peningkatan produksi (nilai tambah) tidak lagi bersumber dari peningkatan populasi, melainkan dari produktivitas.
3. Tahap 3, pembangunan agribisnis peternakan yang digerakan oleh inovasi teknologi (*innovation driven*) atau mengandalkan ilmu pengetahuan dan tenaga kerja terampil. Pada tahap 3 ini dicirikan oleh peranan kemajuan teknologi pada ke-tiga sub-sistem agribisnis peternakan, seperti bioteknologi, teknologi produk peternakan, dan lain-lain, sehingga produksi agribisnis peternakan bersumber dari kemajuan genetik ternak dan diversifikasi produk olahan.

Masing-masing tahapan pembagian agribisnis peternakan tersebut memiliki karakteristik berbeda-beda, karena itu pengelolaan pembangunannya pun berbeda. Selain dengan tahap-tahap pembangunan agribisnis peternakan tersebut, perlu disertai dengan pengembangan organisasi ekonomi peternak, seperti koperasi agribisnis peternakan. Pengembangan koperasi agribisnis peternakan rakyat perlu diarahkan untuk bergerak pada subsistem agribisnis hulu dan hilir peternakan seperti ikut menguasai pembibitan, industri pakan, industri pengolahan hasil peternakan, bersama-sama dengan pelaku agribisnis peternakan yang lain.

Berbagai Program Pembangunan agribisnis peternakan yang diuraikan berikut ini merupakan upaya yang dapat diarahkan untuk berkembangnya usaha peternakan dan terbentuknya sistem agribisnis peternakan.

1. Program Pengembangan Usaha Peternakan. Program ini ditujukan untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha budidaya ternak. Program yang dimaksud adalah pengembangan usaha ternak sapi potong, ternak ayam, ternak itik, peningkatan produktivitas usaha ternak dan pemberantasan penyakit ternak.
2. Program Pengembangan Agribisnis Hulu Peternakan. Program ini dimaksudkan untuk mendukung perkembangan usaha peternakan yang sudah ada serta menumbuhkembangkan usaha baru yang bergerak di hulu dari agribisnis peternakan. Program yang dimaksudkan adalah pengembangan usaha pembibitan ayam ras, ayam kampung, sapi potong, dan itik, pengembangan usaha pakan ternak mini dan penyediaan obat/vaksin ternak.
3. Program Pengembangan Agribisnis Hilir Peternakan. Program ini dimaksudkan untuk mengolah hasil peternakan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen sekaligus membuka kesempatan berusaha dan bekerja pada agribisnis hilir peternakan. Program yang dimaksud mencakup, pengolahan daging, pengolahan telur, pengolahan kulit, dan pengembangan jaringan pemasaran hasil ternak.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM agribisnis peternakan seperti peternak, vaksinator, inseminator, penyuluh dan aparat pengelola pembangunan peternakan. Program yang dimaksud adalah;

peningkatan kemampuan manajerial peternak, keterampilan inseminasi bagi inseminator, keterampilan vaksinasi bagi vaksinator, kemampuan penyuluh peternakan, kemampuan promosi dan fasilitator bagi aparat pengelola pengembangan agribisnis peternakan.

5. Program Pengembangan Infrastruktur Agribisnis Peternakan. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha-usaha agribisnis peternakan, baik di hulu, budidaya maupun di hilir. Program yang dimaksud adalah; pembangunan pos kesehatan ternak dan inseminasi buatan, pembangunan pasar ternak, pembangunan rumah potong ternak dan rumah/tempat pemotongan ayam, pembangunan fasilitas karantina ternak, dan pembangunan fasilitas pelabuhan ternak.
6. Program Pembinaan Peternakan Lokal dan Pola Pelaksanaannya. Pada dasarnya upaya pembinaan peternakan lokal memiliki tiga dimensi penting yaitu :
 - a. Aspek mikro ; pembinaan peternakan lokal bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani melalui peningkatan produksi peternakan. Sehingga sasaran yang ingin di capai adalah pendapatan rata-rata persatuan tenaga pria diatas upah minimum regional. Seiring dengan upaya peningkatan efisiensi dilakukan juga peningkatan produktivitasnya melalui penerapan teknologi tepat guna, sedangkan upaya peningkatan daya saing dilakukan melalui manajemen mutu terpadu dengan menerapkan *good farming practices, good breeding practices, good processing practices* dan *good marketing practices*. Dengan demikian dari aspek mikro pembinaan tersebut pada prinsipnya adalah pemberdayaan usaha peternak kecil dan menengah melalui pengembangan kapasitas yang berintikan pengembangan sumber daya melalui pendekatan kelompok tani.
 - b. Aspek makro ; Dalam aspek makro, upaya yang dapat ditempuh dalam pembinaan peternakan lokal rakyat menuju usaha yang berwawasan agribisnis adalah pengembangan sumberdaya manusia. Untuk ini perlu ditempuh melalui pembentukan dan pembinaan kelompok sebagai wadah belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berusaha.
 - c. Agar aspek makro ini mencapai sasarannya, maka Programnya adalah mendesentralisasikan tanggung jawab dengan menerapkan perencanaan yang partisipatif. Dalam hal ini pemerintah daerah harus berprinsip bahwa pengembangan usah peternakan lokal rakyat adalah urusan masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan demikian selain desentralisasi, maka Program lainnya yang perlu dikembangkan dalam aspek makro adalah privatisasi, kemitraan dan deregulasi/debirokratisasi.
 - d. Aspek global ; dari aspek global , maka peternakan lokal harus dikaitkan dengan tujuan substitusi impor atau dalam jangka panjang untuk meningkatkan ekspor, sehingga menghemat devisa negara. Dalam kerangka global ini maka upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah peningkatan mutu dan kamanan pangan. Program yang ditempuh adalah pengembangan manajemen mutu dari aspek budidaya sampai ke konsumen (*food safety program*).

Banyak cara untuk melakukan pola pembinaan dalam rangka mengimplementasikan Program pembinaan peternakan lokal. Pola pelaksanaan pembinaan dapat ditempuh dengan cara :

1. Pola pembinaan kelompok (tingkat usaha tani); operasionalisasi pola pembinaan di tekankan kepada pembentukan dan pengembangan kelompok tani, sehingga kelompok tani tersebut berfungsi sebagai sarana belajar mengajar, unit produksi, wahana kerja sama dan sebagai kelompok usaha.
2. Pola pembinaan yang dilaksanakan secara bertahap sejak dari pembentukan kelompok baru, pengembangan kelompok binaan dan akhirnya kelompok mandiri. Kelompok mandiri tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kelompok tani ternak yang mampu melakukan

kerjasama dengan kelompok tani lainnya, membentuk kelompok usaha bersama atau bagian dari unit usaha mandiri dalam wadah koperasi peternak.

3. Pola kawasan; pola pembinaan ditempuh juga dengan pola kawasan. Pola kawasan dimaksudkan adalah suatu kawasan yang ditetapkan untuk pengembangan ternak lokal rakyat sesuai agroklimat dan agroekosistem setempat yang cocok. Selain kesesuaian agroklimat dan agroekosistem, maka melalui pola kawasan tersebut akan mempermudah pemasaran, pelayanan serta akses ke lembaga keuangan. Melalui pola kawasan, pemerintah akan sangat mudah apabila berniat membantu untuk memperkuat kelembagaanya.
4. Pola bergulir ; dalam rangka pembinaan peternakan lokal rakyat menuju usaha yang berwawasan agribisnis, maka bantuan pemerintah merupakan bantuan langsung yang harus di kelola dengan pola bergulir. Pola bantuan bergulir untuk ternak lokal rakyat ditentukan dalam bentuk uang yang digunakan sesuai proposal yang disusun bersama oleh kelompok itu sendiri.
5. Pola kemitraan ; dalam rangka mendukung keberhasilan pembinaan ternak lokal, seyogyanya sejak awal sudah dihadirkan pengusaha yang dapat berperan sebagai perusahaan pengelola, penghela atau sebagai inti. Melalui pola kemitraan ini dapat dirancang sejak awal mutu produk, harga dan pasokan dari kawasan yang telah ditentukan sesuai dengan permintaan pasar.

7.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam pengembangan agribisnis peternakan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut :

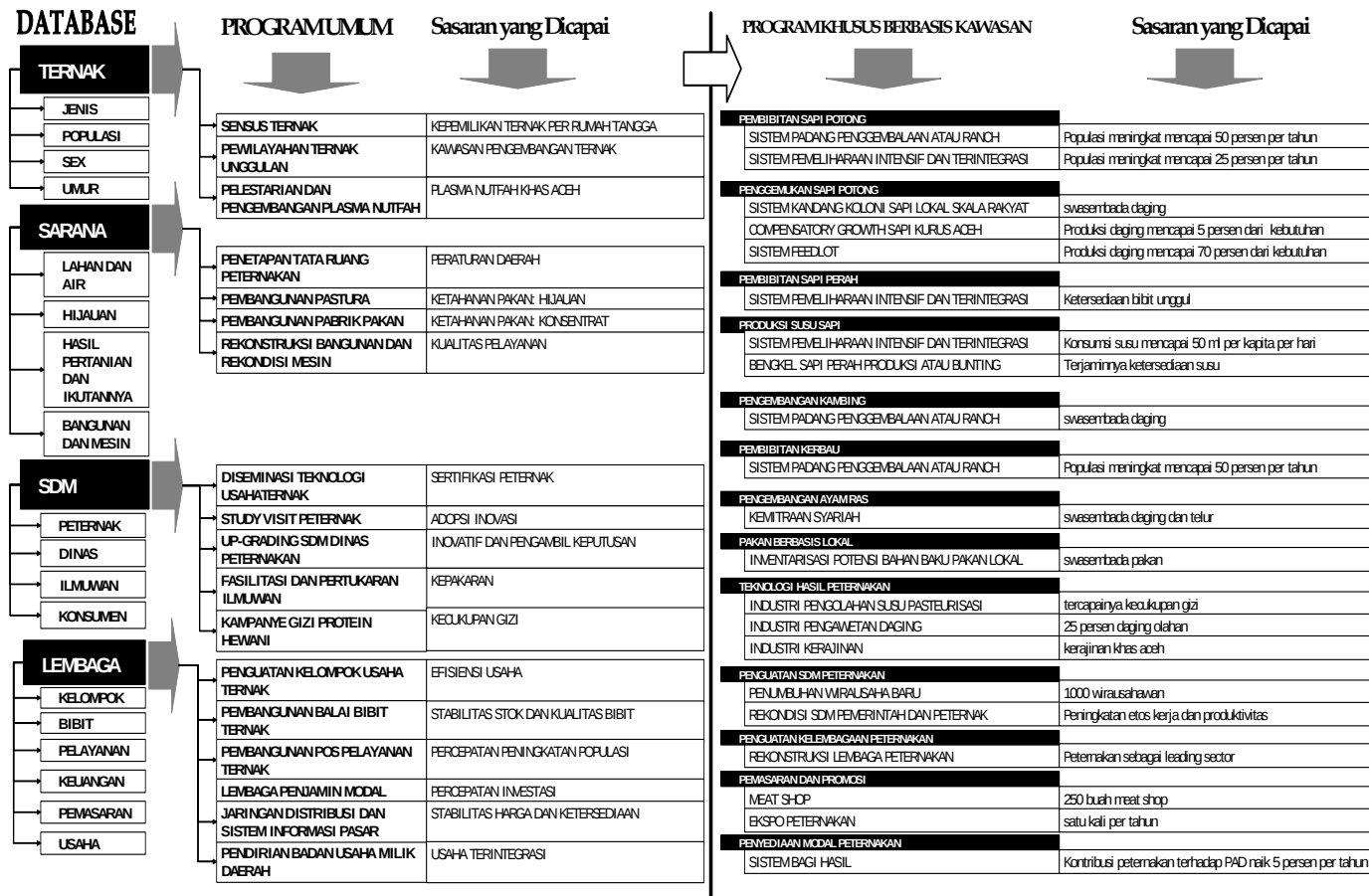
1. Agar manfaat pengembangan agribisnis berbasis peternakan tersebut dapat dinikmati oleh para petani/peternak di Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan, maka para peternak rakyat perlu didorong dan difasilitasi untuk mengembangkan koperasi agribisnis peternakan. Melalui pengembangan koperasi agribisnis peternakan, para peternak dapat secara bertahap memperluas kegiatan ekonominya ke agribisnis hulu dan hilir peternakan. Dengan demikian, nilai tambah yang justru terbesar pada agribisnis peternakan di luar usahatani/budidaya, dapat dinikmati oleh peternakan rakyat.
2. Pengembangan agribisnis berbasis peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam secara potensial dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam. Persoalannya adalah bagaimana menarik investasi peternakan ke Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Dengan hanya mengandalkan mekanisme pasar, maka investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam sulit tercapai. Hal ini antara lain disebabkan karena dalam mekanisme pasar, investasi cenderung mengalir ke wilayah yang sudah mapan seperti Nanggroe Aceh Darussalam Bagian kota/pusat pemerintahan. Oleh sebab itu, cara yang terbaik untuk menarik investasi ke Nanggroe Aceh Darussalam adalah mempromosikan peluang-peluang investasi peternakan secara aktif, terutama oleh Pemda Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Promosi investasi perlu dilakukan secepat mungkin. Disamping itu, Pemda Nanggroe Aceh Darussalam perlu mempertimbangkan pemberian bentuk-bentuk insentif kepada investor yang bersedia menanamkan modalnya di Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan. Pemberian insentif ini perlu, mengingat Nanggroe Aceh Darussalam Selatan harus bersaing dengan wilayah lain dalam menarik investor baru.

BAB 8. PUSTAKA

- Anonimous. 2005. Aceh Dalam Angka. Badan Pusat Statistika Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2004.
- Anonimous. 2005. Kajian Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Triwulan IV-2005. Bank Indonesia Banda Aceh
- Anonimous. 2003. Ringkasan Eksekutif; Perkembangan Statistik Padi dan Palawija Tahun 1998-2002 Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Badan Pusat Statistika Propinsi NAD
- Anonimous. 2005. Neraca Bahan Makanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2003-2004. Badan Ketahanan Pangan Propinsi NAD
- Anonimous. 2005. Produk Domestik Bruto Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Badan Pusat Statistika Propinsi NAD
- Anonimous. 2003. Statistika Perdagangan Luar Negeri Ekspor-Impor Propinsi NAD tahun 2002. Badan Pusat Statistika Propinsi NAD
- Anonimous. 2003. Aceh Jaya dalam Angka. Bappeda dan BPS Kabupaten Aceh Jaya Propinsi NAD
- Anonimous. 2004. Bireun dalam Angka. Bappeda dan BPS Kabupaten Bireun Propinsi NAD
- Anonimous. 2003. Aceh Besar dalam Angka. Bappeda dan BPS kabupaten Aceh Besar Propinsi NAD
- Anonimous. 2004. Aceh Utara dalam Angka. Bappeda dan BPS kabupaten Aceh Utara Propinsi NAD
- Adnyana, M.O.; K. Kariyasa; N. Ilham; Saktyanu K.D.; dan Ikin Sadikin. 1997. Prospek dan Kendala Agribisnis Sapi Potong di Indonesia Memasuki Era Globalisasi Ekonomi. Dalam : Prosiding Industrialisasi, Rekayasa Sosial dan Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Raden. 2000. Sekilas Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Raden. BPT-HMT Batu Raden Direktorat Jenderal Peternakan. Baturraden.
- Budiarsana, I.G.M. dan B. Haryanto. 1997. Analisis Ekonomi Penggemukan Sapi PO dengan Pemberian Pakan Mengandung By-Pass Protein. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Jilid II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor
- Hadi, P.U. dan N. Ilham. 2000. Peluang Pengembangan Usaha Pembibitan Ternak Sapi Potong di Indonesia Dalam Rangka Swasembada Daging 2005. Makalah, disampaikan pada "Pertemuan Teknis Penyediaan Bibit Nasional dan Revitalisasi UPT TA 2000", Direktorat Perbibitan Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Jakarta : 11 – 12 Juli 2000.

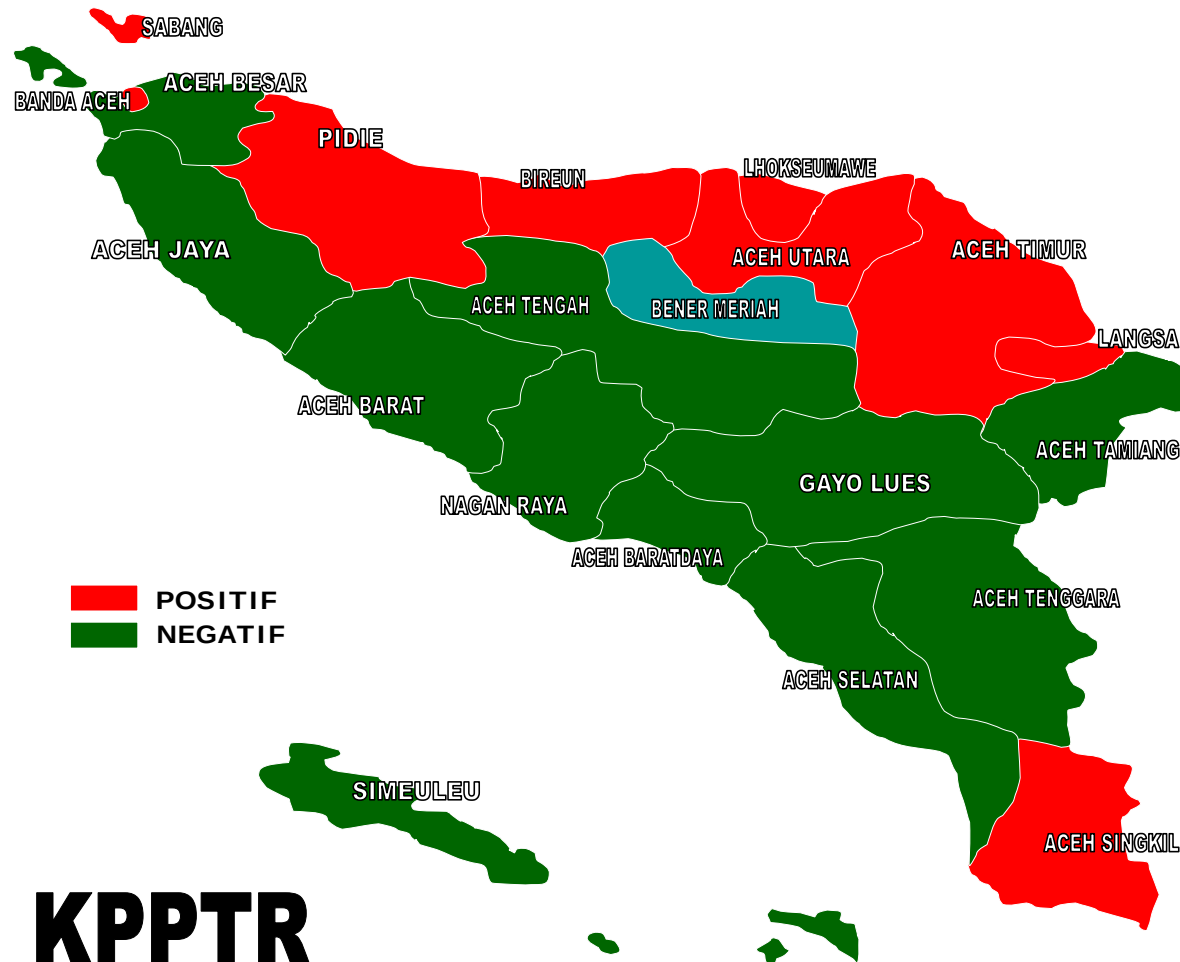
-
- Hutabarat, B. dan B. Winarso. 1994. Analisis Biaya Sumberdaya Dalam Negeri dan Kepekaannya pada Usaha Ternak Babi di Sumatera Utara. Jurnal Agro Ekonomi. Volume 13, No. 1 : 61 – 75. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
- Ilham, N. dan D.K.S. Swastika. 2001. Analisis Daya Saing Susu Segar Dalam Negeri Pasca Krisis Ekonomi dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha Peternakan Sapi Perah di Indonesia. Makalah Bahan terbitan JAE (belum dipublikasi).
- Ilham, Nyak 2000. Peluang Peningkatan Produksi Susu pada Usaha Peternakan Sapi Perah di Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan”. Bogor, 8–9 Nopember 2000.
- Ilham, N. dan Saktyanu K. D. 1995. Analisis Usahatani Penggemukan Sapi Potong Berskala Kecil dan Potensi Pengembangannya. Prosiding Seminar Nasional Peternakan. Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto.
- Monke, E.A. and S.K. Pearson. 1989. The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development. Cornell University. Ithaca and London.
- Saragih, Bungaran. 1998. Agribisnis Berbasis Peternakan : Kumpulan Pemikiran. Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Saptana dan I Wayan Rusastra. 2001. Dampak Krisis Moneter dan Kebijaksanaan Pemerintah terhadap Daya Saing Agribisnis Ayam Ras Pedaging di Jawa Barat. Makalah disampaikan pada Seminar Rutin intern Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 26 Januari 20001. Bogor.
- Siregar, S. B. 1992. Sistem Pemberian Pakan dalam Upaya Meningkatkan Produksi Susu Sapi Perah. Wartazoa, Vol. 2 No. 3 – 43 : 23 – 27.
- Soekartawi; A. Soeharjo; John L. Dillon; dan J. Brian Hardaker. 1986. Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil. UI–Press. Jakarta.
- Subiharta *et al.* 2000. Pengkajian Sistem Usaha Pertanian Sapi Potong di Daerah Lahan Kering. Balai pengkajian Teknologi Pertanian Ungaran, Jawa Tengah. Ungaran.
- Swastika, D.K.S.; N. Ilham; Tri B. Purwantini; dan Ikin Sadikin. 2000. Dampak Krisis Ekonomi terhadap Prospek Pengembangan Peternakan Sapi Perah. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
- Yusdja, Y.; N. Ilham; W. K. Sejati; dan Valeriana Darwis. 2000. Review dan Outlook: Pengembangan Agribisnis Peternakan. Makalah (belum dipublikasi). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Yusdja, Y. dan M. Iqbal. 1999. Analisis Kebijakan Industri Persusuan Dalam Negeri. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Bogor.

Lampiran 1. Rumusan Master Plan Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006-2010

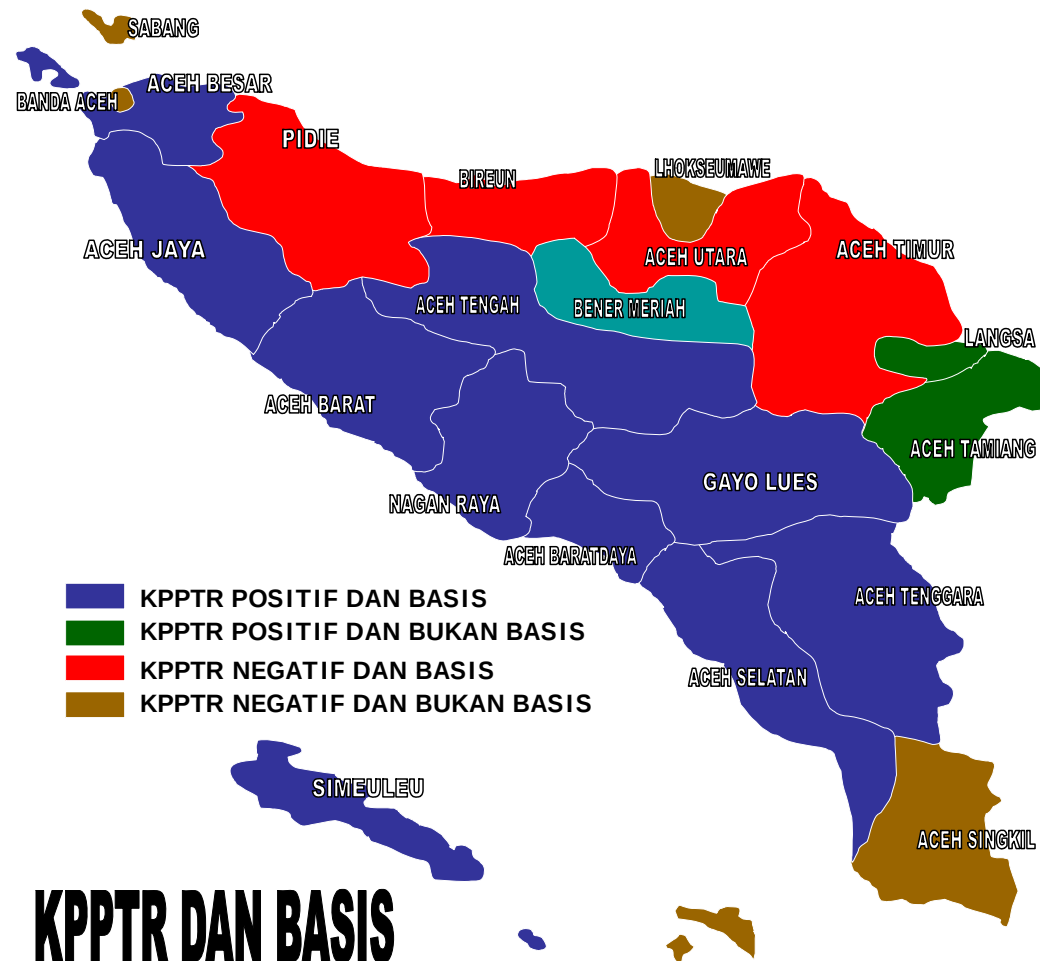
MASTERPLAN PETERNAKAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM 2006 - 2010**2010**

"Terwujudnya Daerah Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Peternakan Terkemuka di Kawasan Barat Indonesia Berbasis Kearifan dan Sumber Daya Lokal"

Lampiran 2. Pewilayahan Kapasitas Tampung Penambahan Populasi Ternak Ruminansia



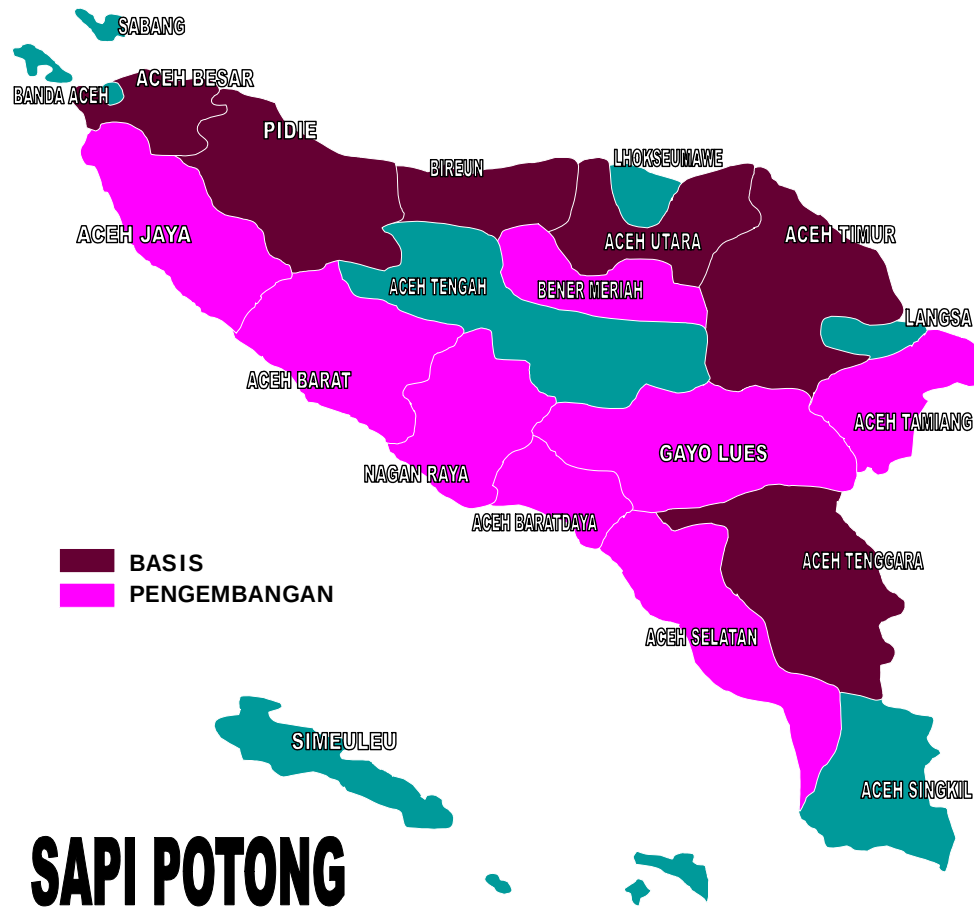
Lampiran 3. Pewilayahan Wilayah Basis dan Kapasitas Tampung Penambahan Populasi Ternak Ruminansia



Lampiran 3. Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Sapi Perah



Lampiran 4. Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Sapi Potong



Lampiran 5. Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Kerbau



Lampiran 6. Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Kambing



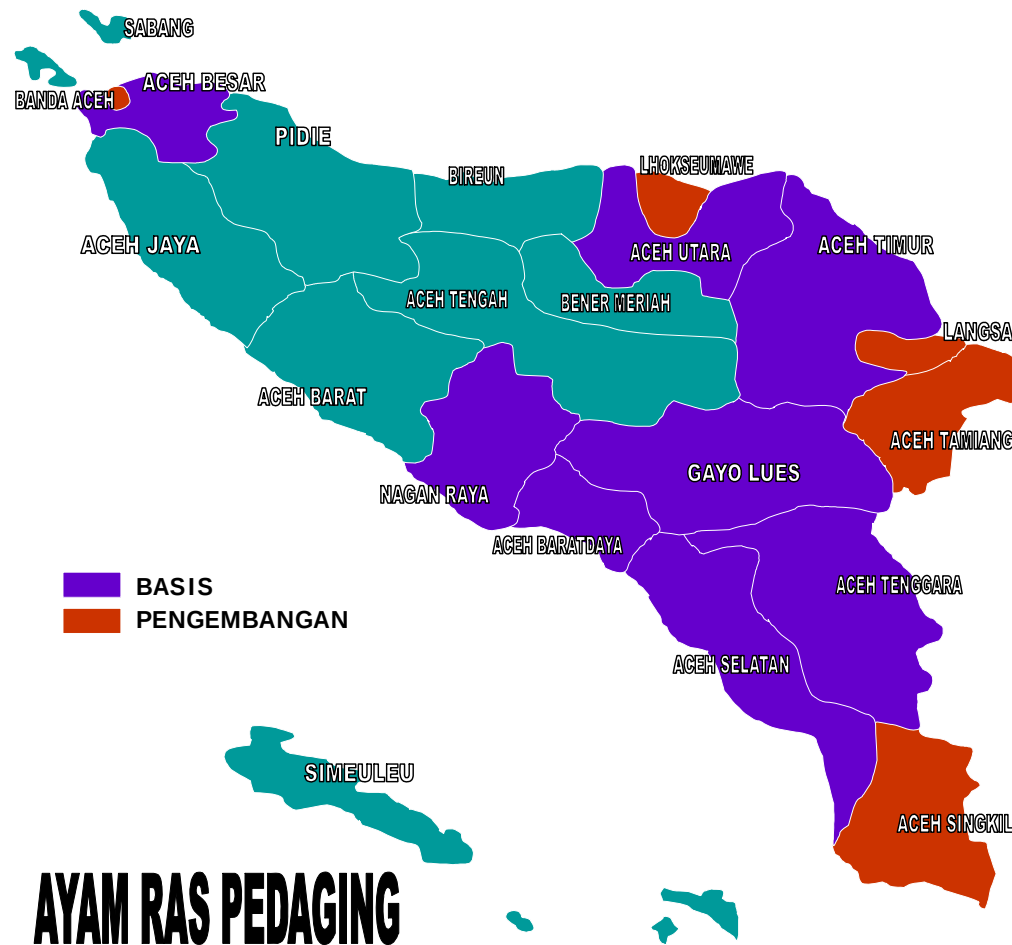
Lampiran 7. Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Domba



Lampiran 8. Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Ayam Buras



Lampiran 9. Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Ayam Pedaging



Lampiran 10. Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Ayam Ras Petelur



Lampiran 11. Pewilayahan Basis dan Sasaran Daerah Pengembangan Komoditas Ternak Itik



Lampiran 12. Matrisk Analisis SWOT

<u>Strengths</u>	<u>Weakness</u>
1. Ketersediaan lahan yang luas, 2. Potensi sumber hijauan alami masih melimpah dan bervariasi, yang berasal dari rumput alam dan tanaman kacang-kacangan. Tidak pernah terjadi kekurangan hijauan seperti yang dialami di daerah lain pada saat musim kemarau; 3. Potensi perkebunan yang dapat mendukung pengembangan pertanian terpadu dengan komponen usaha ternak. 4. Lahan penggembalaan masih tersedia cukup luas disamping lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dapat menjadi pendukung yang potensial; 5. Kondisi tanah dan agroekosistem wilayah sesuai untuk pengembangan ternak Ketersediaan unsur hara tanah S, K, dan Mg di wilayah potensial untuk pengembangan umumnya mencukupi. Tingkat kesesuaian wilayah di beberapa wilayah pengembangan umumnya tinggi. 6. Ketersediaan dana pemerintah yang besar dalam pengembangan berbagai sektor termasuk peternakan; 7. Dukungan sumberdaya manusia dalam jangka panjang dengan telah dikembangkannya Fakultas Peternakan Perguruan Tinggi di Nanggroe Aceh Darussalam, yang lebih memfokuskan menghasilkan sarjana peternakan dalam rangka pengelolaan sumberdaya di Nanggroe Aceh Darussalam. 8. Posisi wilayah yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional maupun internasional (Malaysia dan Singapura). 9. Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak termasuk wilayah endemi penyakit Anthrax sebagaimana daerah pesaingnya seperti Jambi dan Sumatera Barat. 10. Kawasan-kawasan yang telah dibentuk yang merupakan potensi dalam penyediaan bibit maupun ternak konsumsi. 11. Potensi sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian,	1. Kondisi tanah umumnya berlebihan untuk unsur hara Fe dan Mn sebaliknya defisiensi atau marjinal untuk unsur hara Ca, P, Cu, Zn, dan Na. 2. Harga pakan konsentrat umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi sekitarnya. 3. Potensi pengembangan menyebar di berbagai wilayah sehingga disamping memerlukan manajemen fasilitas yang lebih baik juga biaya produksi lebih tinggi. 4. Motivasi dan keterampilan penduduk asli masih lemah sehingga pengembangan usaha peternakan baru terjadi pada wilayah wilayah penduduk pendatang (transmigran, urban). Hal ini akan menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal melalui usaha peternakan 5. Ketersediaan bibit rendah khususnya sapi potong, masih sangat tergantung dari pasokan luar seperti Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi. Populasi sapi potong di Nanggroe Aceh Darussalam 6. Topografi di wilayah potensial, terutama di Indragiri Hulu pada musim hujan sering terendam sehingga mempersulit penyediaan hijauan. 7. Ketersediaan dan kecukupan fasilitas layanan masih sangat rendah. Pengembangan fasilitas layanan baru intensif untuk fasilitas pos kesehatan hewan yang menyebar. Keterbatasan fasilitas tersebut akan menjadi kendala dalam kegiatan pengadaan bibit, budidaya, jaminan mutu produk dan distribusi, terutama apabila upaya ekspor produk peternakan akan dikembangkan; 8. Keterbatasan tenaga teknis di lapangan antara lain penyuluh, inseminator, dan pemeriksa kebuntingan.

.....bersambung

<u>Opportunity</u>	<u>Threats</u>
1. Komitmen Pemerintah dalam mewujudkan peternakan tangguh di Asia Tenggara. Pengembangan pengembangan kawasan dan investasi yang cukup tinggi merupakan indikasi komitmen tersebut. 2. Kebijakan pemerintah Malaysia yang membatasi pengembangan peternakan dalam negeri dan membuka import secara lebih luas dalam mencukupi kebutuhan produk peternakan 3. Peningkatan tingkat konsumsi produk peternakan penduduk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Permintaan produk ternak khususnya daging relatif stabil dengan adanya perubahan harga. Hasil perhitungan supply demand produk peternakan umumnya menunjukkan masih belum tercukupinya kebutuhan konsumsi. 4. Peningkatan permintaan produk peternakan organik, yang hal ini kemungkinan dapat dipenuhi dari sistem budidaya ternak di Nanggroe Aceh Darussalam yang cenderung alami khususnya pada ternak ruminansia. 5. Eksport ke negara-negara muslim seperti Arab Saudi dan Malaysia yang mengharuskan adanya label halal, dan hal ini sangat dimungkinkan dilakukan oleh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan mayoritas penduduk muslim.	1. Persaingan kualitas dan harga dengan wilayah pesaing seperti Lampung dan Jambi serta produk import dari Australia dan New Zealand 2. Dumping harga dari negara-negara besar oleh karena penerapan kebijakan tidak adil antara negara maju dan berkembang. Sejak diterapkannya liberalisasi pertanian yang diputuskan dalam Putaran Uruguay, negara-negara maju justru meningkatkan proteksi produsen pertaniannya melalui subsidi besar-besaran 3. Kebijakan tarif import rendah bagi negara yang terikat dengan IMF dan Bank Dunia menyebabkan daya saing produksi lokal melemah; 4. Penyebaran wabah antraks dari wilayah Sumatera Barat dan Jambi oleh karena sistem distribusi dari dua wilayah tersebut cenderung sangat terbuka dan lemah pengendaliannya. Fasilitas perlindungan seperti karantina hewan dan holding ground belum tersedia secara memadai. Pemasukan ternak sapi, kerbau, dan kambing ke wilayah Nanggroe Aceh Darussalam cukup tinggi setiap tahun, dapat menyebarkan penyakit tersebut. 5. Pengembangan usaha pembibitan sapi potong di Malaysia dengan menggunakan bibit sapi Bali, yang dikelola oleh perkebunan kelapa sawit Felcra Pahang Sdn Bhd. Rencana import perusahaan tersebut dari Lombok sebanyak 2000 ekor, dan hal ini dalam jangka panjang dapat menjadi pesaing baik di tingkat lokal maupun regional.
STRATEGI a. Memanfaatkan seluruh sumberdaya daerah secara efektif, efisien dan ekonomis b. Menyelenggarakan pendidikan yang didasarkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja c. Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki integritas, profesionalisme dan percaya diri yang besar d. Melengkapi struktur dan kelengkapan kelembagaan desentralisasi/otonomi daerah e. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka isolasi wilayah yang terbelakang dan terpencil f. Memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang didukung masyarakat kecil (terutama petani, peternak dan buruh) g. Menyelenggarakan pembangunan daerah yang merata dengan pendekatan wilayah h. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi dari masyarakat dan swasta.	

I. PENDAHULUAN

Pembangunan agribisnis peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan produk ternak untuk Nanggroe Aceh Darussalam, memanfaatkan kesempatan ekspor ke negara tetangga dan membuka kesempatan usaha baru di Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari ternak yang ada, yang potensial untuk dikembangkan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah sapi potong, kerbau, kamobing-domba untuk ternak ruminansia dan ayam kampung, itik serta ayam ras pada kelompok ternak non ruminansia. Pengembangan berbagai ternak tersebut harus berlangsung efisien dan memberikan nilai tambah baik bagi peternak maupun dunia usaha yang bergerak di hulu dan hilir. Untuk itu para peternak dan dunia usaha harus dapat melakukan kegiatannya masing-masing secara efisien serta melakukan sinergisme hingga mengarah pada terbentuknya sistem agribisnis peternakan yang utuh.

Sistem agribisnis peternakan yang dimaksud mencakup (1) sub-sistem agribisnis peternakan Hulu (up-stream agribusiness) seperti industri perbibitan, Industri obat ternak, Industri pakan ternak, (2) sub-sistem usahatani/onfarm (3) sub-sistem agribisnis peternakan hilir (down-stream agribusiness); dan (4) sub-sistem penyedia jasa (service for agribusiness) seperti perkreditan, infrastruktur, pendidikan dan pelatihan SDM, penelitian teknologi, asuransi, transportasi, dan kebijakan serta peraturan daerah.

Usaha-usaha agribisnis peternakan yang dimaksud adalah usaha tani keluarga, usaha kelompok, usaha koperasi, usaha kecil-menengah, usaha besar baik swasta maupun perusahaan daerah, yang bergerak pada sub-sistem agribisnis peternakan hulu, sub-sistem agribisnis peternakan hilir, sub-sistem usaha tani, maupun pada sub-sistem penyedia jasa.

Sistem dan usaha agribisnis peternakan yang berdaya saing yang dimaksud adalah sistem dan usaha agribisnis peternakan yang mampu menghasilkan produk-produk agribisnis peternakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar (konsumen) baik untuk pasar lokal, regional, maupun internasional.

Sistem dan usaha agribisnis peternakan yang berkerakyatan yang dimaksud adalah sistem dan usaha agribisnis peternakan yang melibatkan masyarakat lokal baik secara individu, secara kelompok/koperasi, maupun dalam bentuk pola sharing dan networking dengan perusahaan swasta dan perusahaan daerah.

Sistem dan usaha agribisnis peternakan yang berkelanjutan yang dimaksud adalah sistem dan usaha agribisnis peternakan yang ramah lingkungan, menjaga dan memperbaiki kelestarian kualitas sumberdaya keaneka ragaman hayati, polusi minimal dan zero waste.

Tujuan pembangunan agribisnis peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam
2. Mengembangkan sektor ekonomi baru sebagai sumber pertumbuhan baru pasca migas-tambang bagi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
3. Meningkatkan kapasitas agribisnis peternakan dalam menghasilkan manfaat sosial ekonomi untuk mengantisipasi tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Master Plan pengembangan peternakan yang disusun berikut didasarkan pada pertimbangan pewilayahan komoditas peternakan (wilayah basis) dan kemampuan daya tampung penambahan populasinya. Selain itu, master plan yang disusun juga dipertimbangkan pada aspek kecenderungan supply-demand komoditi peternakan, kekuatan-kelemahan-peluang dan ancaman, sehingga diperoleh strategi dan rancangan program serta model implementasinya. Berbagai program agribisnis peternakan yang akan diuraikan berikut ini merupakan upaya yang diarahkan untuk berkembangnya usaha peternakan dan terbentuknya sistem agribisnis peternakan.

II. PEWILAYAHAN KOMODITI PETERNAKAN

Landasan utama penyusunan pewilayahan pembangunan peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengacu kepada kebijakan pewilayahan pembangunan peternakan yang tertuang dalam Pewilayahan Pembangunan Pertanian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh Kantor Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2000. Selain itu penyusunan pewilayahan peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menggunakan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap wilayah basis, analisis SWOT, serta mengacu kepada potensi wilayah dan daya dukung lahan (berdasarkan nilai KPPTR).

Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun propinsi antara lain memuat arahan sentra-sentra produksi komoditas ternak di wilayah Kabupaten yang memiliki prospek pengembangan peternakan pada tahun 2010. Arahan sentra produksi ditetapkan untuk memperjelas penggunaan tata ruang antara sub sektor peternakan dengan sektor dalam pertanian, maupun tata ruang antara sub sektor peternakan dengan sektor lain diluar pertanian (kehutanan, perkebunan, pertambangan dan industri).

Berdasarkan hasil pengolahan data populasi ternak dengan analisis KPPTR diperoleh nilai-nilai yang menunjukkan kecenderungan yang berbeda bagi setiap wilayah. Nilai KPPTR positif menunjukkan kecenderungan bahwa wilayah kabupaten terkait masih memungkinkan penambahan populasi ternak ruminansia sejumlah satuan ternak yang ada, sedangkan nilai KPPTR negative menunjukkan kecenderungan bahwa wilayah yang bersangkutan perlu diarahkan untuk pengembangan areal lahan yang menjadi daya dukung pokok usaha peternakan, seperti padang rumput, areal pertanian, dll.

Tabel 1. Kapasitas Penambahan populasi Ternak Ruminansia per Kabupaten (ST)

KABUPATEN	POPULASI TERNAK (ST)	DAYA TAMPUNG	KPPTR
Simeulue	23,408.8	39,099.40	15,690.59
Aceh Singkil	5,161.1	3,900.97	(1,260.10)
Aceh Selatan	24,237.7	30,158.87	5,921.19
Aceh Tenggara	51,515.3	156,208.06	104,692.75
Aceh Timur	118,241.5	117,035.46	(1,206.08)
Aceh Tengah	46,356.4	148,714.00	102,357.58
Aceh Barat	56,427.1	89,995.51	33,568.38
Aceh Besar	103,855.6	130,316.51	26,460.86
Pidie	124,706.8	117,801.60	(6,905.24)
Bireuen	99,503.0	43,699.55	(55,803.49)
Aceh Utara	99,947.0	83,728.46	(16,218.58)
Aceh Barat Daya	9,830.9	26,765.46	16,934.59
Gayo Lues	25,300.8	142,484.82	117,183.98
Aceh Tamiang	6,713.8	51,601.53	44,887.68
Nagan Raya	11,022.0	154,676.72	143,654.71
Aceh Jaya	10,867.7	49,843.87	38,976.17
Bener Meriah	-	-	-
Banda Aceh	3,210.5	1,343.67	(1,866.85)
Sabang	1,271.7	1,260.63	(11.07)
Langsa	2,532.6	2,929.46	396.89
Lhokseumawe	1,350.9	1,146.94	(203.93)
Propinsi NAD	825,461.5	1,392,711.51	567,250.01

Sumber : Data Diolah, 2006

Secara keseluruhan, dalam skala propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kapasitas tampung ternak Ruminansia menunjukkan angka yang positif sebesar 567.250,01 ST. Hal ini berarti bahwa dalam kacamata propinsi masih dimungkinkan penambahan populasi ternak ruminansia sebesar itu yang antara lain dapat disebar di beberapa wilayah kabupaten dengan KPPTR bernilai positif (Simeuleu, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Langsa). Sementara daerah-daerah lainnya selai

yang disebutkan tersebut adalah daerah dengan nilai KPPTTR negative, yang berarti bahwa daerah-daerah dengan nilai KPPTTR tersebut tidak disarankan untuk dijadikan lokasi penambahan populasi ternak ruminansia, tetapi lebih tepat apabila di atahkan untuk optimalisasi dan perluasan kembali daya dukung lahannya.

Penjabaran lebih lanjut dari Kapasitas Tampung atau KPPTTR adalah wilayah Basis untuk komoditas peternakan, terutama ternak ruminansia. Indikasi suatu wilayah dikategorikan sebagai basis komoditas ternak adalah berdasarkan analisis Location Quotion, dimana apabila nilai LQ lebih besar dari 1 maka wilayah tersebut merupakan wilayah basis.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penyebaran basis-basis wilayah untuk ternak ruminansia hamper merata di setiap kabupaten. Untuk komoditas sapi perah, wilayah basis terdapat di 2 kabupaten, yaitu kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Utara, dengan nilai LQ masing-masing sebesar 3,65 dan 6,10. wilayah basis untuk ternak sapi potong terdapat hamper merata di wilayah aceh bagian utara dan selatan dengan wilayah basis tertinggi pada daerah Bireun. Wilayah basis untuk ternak kerbau terdapat di 3 daerah utama, yaitu daerah Simeuleu, Aceh Barat dan daerah Gayo lues, meski di daerah lain pun terdapat ternak kerbau, tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantaranya. Wilayah basis untuk ternak kambing hampir merata terdapat di beberapa daerah, namun demikian daerah dengan nilai basis tertinggi terdapat di daerah Aceh Barat. Wilayah basis ternak domba terdapat di wilayah Aceh Tenggara dengan nilai LQ 2,78, meski keberadaan ternak domba juga terdapat di daerah-daerah lainnya yang juga dapat dikatakan sebagai basis.

Berdasarkan nilai LQ, komoditas-komoditas ternak yang menjadi basis di wilayah-wilayah tertentu dapat dijadikan sebagai ternak unggulan. Hal ini dikaitkan dengan jumlah populasi dan kecenderungan kebiasaan masyarakat dalam memelihara jenis ternak yang menjadi basis tersebut. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, Master Plan yang disusun sebaiknya mempertimbangkan orientasi kawasan ternak, yang tersebar dan bervariasi di setiap wilayah dengan pertimbangan kondisi Kapasitas Tampung Populasi Ternak Ruminansia (KPPTTR)-nya. Hal ini dapat dilakukan, dengan asumsi bahwa pada wilayah basis KPPTTR akan mendukung kebijakan penambahan populasi dan sesuai dengan daya tampungnya.

Tabel 2. Wilayah Basis Komoditas Ternak Ruminansia

KABUPATEN	SAPI PERAH	SAPI POTONG	KERBAU	KAMBING	DOMBA
Simeulue		0.58	4.06	0.39	-
Aceh Singkil		0.11	0.13	0.56	1.34
Aceh Selatan		0.14	1.20	1.96	1.64
Aceh Tenggara		1.01	1.86	1.72	2.78
Aceh Timur		1.99	1.58	1.24	0.61
Aceh Tengah		1.00	0.99	0.10	0.09
Aceh Barat		0.91	2.86	2.31	1.69
Aceh Besar	3.65	1.84	1.39	1.40	1.92
Pidie		1.29	1.51	0.95	0.34
Bireuen		1.98	0.45	1.27	1.57
Aceh Utara	6.10	1.43	0.22	1.17	1.15
Aceh Barat Daya		0.22	0.79	1.16	1.39
Gayo Lues		0.29	4.97	2.37	4.07
Aceh Tamiang		0.18	0.05	0.19	0.22
Nagan Raya		0.13	1.00	1.51	1.18
Aceh Jaya		1.00	0.52	0.54	0.01
Bener Meriah		-	-	-	-
Banda Aceh		0.07	0.02	0.15	0.28
Sabang		0.23	0.02	0.85	0.01
Langsa		0.09	0.05	0.19	0.69
Lhokseumawe		0.05	0.01	0.11	0.03

Sumber : Data Diolah, 2006

Wilayah-wilayah basis untuk komoditas ternak non ruminansia/unggas terdapat hampir merata di setiap kabupaten/kota, terutama sekali untuk komoditas ternak ayam buras dan ayam pedaging. Untuk itu, penentuan wilayah basis dan pengembangan untuk komoditi ternak unggas cenderung relative dapat dilakukan di setiap kabupaten.

Tabel 3. Wilayah Basis Komoditas Ternak Non Ruminansia /Unggas

KABUPATEN	AYAM BURAS	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	ITIK
Simeulue	0.37	-	0.18	0.13
Aceh Singkil	1.34	-	0.29	0.25
Aceh Selatan	2.52	0.27	1.15	1.00
Aceh Tenggara	1.33	-	1.60	1.35
Aceh Timur	1.51	-	3.06	2.60
Aceh Tengah	0.37	-	0.15	0.13
Aceh Barat	1.18	0.31	0.58	0.42
Aceh Besar	0.38	5.97	1.96	1.31
Pidie	0.26	2.39	0.10	1.70
Bireuen	0.35	1.29	0.49	0.69
Aceh Utara	1.24	0.51	1.76	1.53
Aceh Barat Daya	3.11	-	1.47	1.28
Gayo Lues	2.07	-	2.81	2.45
Aceh Tamiang	0.72	-	0.03	0.03
Nagan Raya	1.53	2.02	1.51	0.67
Aceh Jaya	1.63	-	0.82	0.53
Bener Meriah	-	-	-	-
Banda Aceh	0.88	0.54	0.16	0.04
Sabang	0.68	-	0.10	0.06
Langsa	1.38	-	0.21	0.18
Lhokseumawe	0.49	-	0.85	0.39

Sumber : Data Diolah, 2006

Tabel 4. Nilai KPPTR Positif dan Wilayah Basis

KABUPATEN	KPPTR	BASIS
Simeulue	15,690.59	4.91
Aceh Selatan	5,921.19	1.96
Aceh Tenggara	104,692.75	4.60
Aceh Tengah	102,357.58	2.44
Aceh Barat	33,568.38	5.28
Aceh Besar	26,460.86	5.17
Aceh Barat Daya	16,934.59	1.33
Gayo Lues	117,183.98	5.56
Nagan Raya	143,654.71	1.50
Aceh Jaya	38,976.17	2.06

Sumber : Data Diolah, 2006

Penentuan wilayah utama pengembangan dan sentra yang masih dapat diorientasikan untuk penambahan populasi ternak ruminansia (seperti diuraikan pada table 4) adalah daerah-daerah basis dengan kapasitas tampung yang relative besar. Namun demikian bukan berarti daerah-daerah yang tidak masuk dalam ketogori ini tidak dapat dijadikan sentra/basis pengembangan, tetapi dapat diarahkan sebagai wilayah buffer/penyangga.

Sementara itu, untuk wilayah-wilayah basis dengan nilai KPPTR negative (seperti diuraikan pada Tabel 5.), yang berarti bahwa wilayah yang bersangkutan sudah mengalami kekurangan daya

dukung wilayah. Maka orientasi pengembangan peternakan diarahkan pada penyediaan dan perluasan areal daya dukung lahan untuk usaha peternakan.

Tabel 5. Nilai KPPTR Negatif pada Wilayah Basis

KABUPATEN	KPPTR	BASIS
Aceh Timur	(1,206.08)	5.69
Pidie	(6,905.24)	3.98
Bireuen	(55,803.49)	4.29
Aceh Utara	(16,218.58)	3.08

Sumber : Data Diolah, 2006

Untuk daerah-daerah dengan KPPTR positif namun bukan merupakan wilayah basis dan KPPTR negative dan juga bukan merupakan wilayah basis (seperti diuraikan pada Tabel 6. dan 7.) dapat diarahkan sebagai wilayah penyangga bagi penyediaan komoditi ternak dan daya dukung lahan, misalnya kegiatan perdagangan, pembibitan dan atau bahkan penyediaan pakan.

Tabel 6. Nilai KPPTR Positif pada Wilayah Non-Basis

KABUPATEN	KPPTR	BASIS
Aceh Tamiang	44,887.68	0.44
Langsa	396.89	0.28

Sumber : Data Diolah, 2006

Tabel 7. Nilai KPPTR Negatif pada Wilayah Non-Basis

KABUPATEN	KPPTR	BASIS
Aceh Singkil	(1,260.10)	0.54
Banda Aceh	(1,866.85)	0.20
Sabang	(11.07)	0.67
Lhokseumawe	(203.93)	0.15

Sumber : Data Diolah, 2006

III. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dapat diukur dengan meningkatkan pendapatan per-kapita dan pemenuhan kebutuhan dasar (*kebutuhan primer*) penduduknya seperti kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan telah terpenuhinya kebutuhan dasar secara alami masyarakat akan mencari lagi kebutuhan sekunder yaitu pangan, kekayaan dan kepuasan pribadi. Perkembangan ekonomi masyarakat berkembang dari ekonomi yang bertumpu pada industri primer (*ekstraktif*), berkembang ke industri sekunder (industri pengolahan) dan kemudian ke industri tersier (*jasa*). Semakin maju suatu perekonomian masyarakat akan ditandai oleh makin besarnya share sektor industri dan jasa dalam ekonomi.

Dengan berbagi perspektif pembangunan seperti hal tersebut diatas, kita akan melihat pembangunan ekonomi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Propinsi ini pada konstelasi regional di kawasan Asia Tenggara:

1. Berada pada poros regional yang menghubungkan wilayah Asia Tenggara dengan negara-negara lainnya.
2. Sebagai daerah penyangga Kota Batam dan negara-negara jiran yang merupakan pasar potensial bagi berbagai produk agribisnis.
3. Sebagai pintu kawasan perdagangan bebas dan daerah pengembangan produk peternakan yang potensial.

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah belakang dari kota-kota negara industri baru di Asia, seperti Singapura, Malaysia, Taiwan dan lainnya. Akses transportasi bagi hasil produksi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan produksi dari luar yang dibutuhkan penduduk dilakukan melalui jalan darat, laut dan udara. Ekonomi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditandai oleh industri besar seperti industri minyak, pengolahan kayu, elektronika, industri setor perkebunan dan pertanian tanaman pangan.

Bila dilihat dari cukup tingginya kontribusi pertanian, yang masih didominasi oleh sub sektor perkebunan, sementara sub sektor peternakan masih memiliki potensi dan prospek yang sangat besar, hal ini menunjukkan bahwa sektor industri peternakan sangat potensial untuk dikembangkan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah yang berarti bagi penunjang pembangunan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Demikian juga kalau ditinjau dari sektor tenaga kerja yang bekerja di masing-masing sektor menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja di sub sektor perkebunan. Disektor pertanian sendiri, pendapatan daerah masih didominasi sub sektor perkebunan. Dalam rangka mengembangkan pembangunan peternakan tersebut aspek-aspek yang menentukan adalah:

1. **Infrastruktur.** Hal-hal seperti infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, bangunan-bangunan untuk umum diperlukan untuk menghubungkan daerah produksi dengan kota-kota yang akan mendistribusikan lebih lanjut hasil tersebut kepada konsumen. Jalan dan jembatan ini juga akan memperlancar penyaluran input yang dibutuhkan ke lokasi. Dengan lancarnya transportasi dari kota ke daerah produsen selain akan memperlancar pengiriman barang juga akan mengurangi biaya transport sehingga daya saing produk yang dihasilkan akan lebih tinggi.
2. **Sumber Daya Manusia (SDM).** Pelaku pembangunan peternakan seperti pemerintah, pengusaha/investor, petani dan buruh merupakan kunci bagi berhasilnya pengembangan pembangunan peternakan. Pelaku-pelaku ini perlu dikembangkan di bidang penguasaan teknologi, kemampuan manajemen dan perilaku bisnisnya. Agribisnis yang maju memerlukan sikap pelaku responsif terhadap perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi sekitarnya sehingga produktivitas akan selalu meningkat dan hasil produksinya mempunyai daya saing di pasar. Selain kualitas SDM pengusaha dan petani ternak yang juga perlu ditingkatkan adalah SDM aparat seperti petugas penyuluh dan aparat pemerintah lainnya yang berkaitan erat dengan pengembangan pembangunan peternakan.
3. **Kelembagaan (Institusi).** Peternak secara individu, karena skala usahanya yang kecil dan kemampuannya yang terbatas, seringkali tidak mempunyai akses terhadap lembaga ekonomi seperti bank, lembaga riset dan pasar. Oleh karenanya diperlukan lembaga ekonomi petani ternak seperti kelompok tani ternak dan koperasi untuk menjembatani petani dengan lembaga-lembaga tersebut. Selain itu lembaga ini juga diperlukan untuk meningkatkan daya tawar menawar (*bargaining power*) peternak.
4. **Informasi dan Teknologi.** Kemajuan pembangunan peternakan sangat ditentukan oleh penemuan teknologi baik di bidang budidaya, pengolahan, maupun pemasaran serta kondisi permintaan dan penawaran serta harga-harga input dan output. Informasi mengenai teknologi dan pasar harus bisa diakses oleh pelaku usaha sehingga usaha mereka selalu berkembang. Dalam bidang teknologi juga diperlukan percobaan-percobaan lokal untuk menemukan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerahnya.
5. **Jasa Penunjang.** Perkembangan pembangunan peternakan memerlukan modal, pasarana, teknologi dan sebagainya. Unsur-unsur tersebut memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga yang menspesialisasikan dirinya dalam pelayanan bidang-bidang tersebut, seperti bank, asuransi, pedagang, lembaga penelitian dan sebagainya. Dalam rangka membangun peternakan lembaga-lembaga tersebut perlu didorong untuk dapat berperan didalamnya.
6. **Kebijkasanaan Pemerintah.** Dalam membangun peternakan, tujuan yang hendak dicapai bukan sekedar pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan pendapatan, Agribisnis dan agroindustri peternakan yang hendak dibangun diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator kegiatan ekonomi dan juga sebagai pemilik sebagian besar asset, sarana dan prasarana yang akan dikembangkan perlu menetapkan kebijaksanaan yang menguntungkan masyarakat, disamping tetap memberikan insentif yang cukup besar pada swasta untuk investasi. Masyarakat perlu

diberi hak terhadap tanah dan dibimbing agar mempunyai akses terhadap jasa institusi ekonomi seperti perbankan dan pasar, sedangkan swasta perlu diberikan kesempatan investasi dengan bekerjasama dengan petani secara sejajar. Suatu rencana pengembangan kawasan peternakan dengan penataan lahan dan pola-pola investasi perlu dirumuskan untuk tujuan tersebut.

7. Didalam lingkup nasional, kebijaksanaan pemerintah juga diperlukan agar peternakan yang dibangun bisa mempunyai daya saing tinggi seperti perlindungan terhadap praktek dumping, perlindungan dari ternak impor dengan penetapan pajak, penetapan kurs yang tidak *undervalue* (kurs rupiah lebih tinggi dibanding dengan kurs pasar) dan sebagainya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Berdasarkan matriks analisis SWOT dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kualitas SDM peternakan
2. Optimalnya pengembangan budidaya ternak
3. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan
4. Berkembangnya sistem dan usaha agribisnis peternakan
5. Adanya dukungan sarana dan prasarana perbibitan ternak
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang peternakan
7. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai
8. Terlaksananya pengawasan secara obyektif dan proporsional
9. Adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan pelayanan prima
10. Adanya integrasi dan sinergitas dalam pengelolaan sumber daya peternakan dengan seluruh pelaku usaha terkait

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Adanya stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan yang makin baik dan mantap
2. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparaturnya Dinas Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Berkembangnya kelompok usaha dibidang Agribisnis dan Agroindustri Peternakan
4. Adanya kontrol yang efektif dan konstruktif dalam mendukung pembangunan peternakan
5. Tersedianya alokasi dana yang memadai
6. Terciptanya akses informasi dan teknologi yang lebih luas dan berkesinambungan.

IV. VISI, MISI, STRATEGY DAN KEBIJAKAN

Visi pembangunan agribisnis peternakan Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian dari visi pembangunan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam secara keseluruhan yang termuat dalam program Pembangunan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk menyumbang semaksimal mungkin terwujudnya visi pembangunan daerah Nanggroe Aceh Darussalam, visi pembangunan sistem agribisnis peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Daerah Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Peternakan Terkemuka di Kawasan Barat Indonesia Berbasis Kearifan dan Sumber Daya Lokal”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan sistem agribisnis peternakan Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:

“Menumbuh-kembangkan sistem dan usaha-usaha agribisnis peternakan berbasis Sumber Daya Lokal, untuk mentransformasi system tradisional menjadi agribisnis peternakan berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan”.

Sistem agribisnis peternakan yang dimaksud mencakup:

1. sub-sistem agribisnis peternakan Hulu (up-stream agribusiness) seperti industri perbibitan, Industri obat ternak, Industri pakan ternak,
2. sub-sistem usahatani/onfarm
3. sub-sistem agribisnis peternakan hilir (down-stream agribusiness);
4. sub-sistem penyedia jasa (service for agribusiness) seperti perkreditan, infrastruktur, pendidikan dan pelatihan SDM, penelitian teknologi, asuransi, transportasi, dan kebijakan serta peraturan daerah.

Usaha-usaha agribisnis peternakan yang dimaksud adalah usaha tani keluarga, usaha kelompok, usaha koperasi, usaha kecil-menengah, usaha besar baik swasta maupun perusahaan daerah, yang bergerak pada sub-sistem agribisnis peternakan hulu, sub-sistem agribisnis peternakan hilir, sub-sistem usaha tani, maupun pada sub-sistem penyedia jasa.

Sistem dan usaha agribisnis peternakan yang berdaya saing yang dimaksud adalah sistem dan usaha agribisnis peternakan yang mampu menghasilkan produk-produk agribisnis peternakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar (konsumen) baik untuk pasar lokal, regional, maupun internasional.

Sistem dan usaha agribisnis peternakan yang berkerakyatan yang dimaksud adalah sistem dan usaha agribisnis peternakan yang melibatkan masyarakat lokal baik secara individu, secara kelompok/koperasi, maupun dalam bentuk pola sharing dan networking dengan perusahaan swasta dan perusahaan daerah.

Sistem dan usaha agribisnis peternakan yang berkelanjutan yang dimaksud adalah sistem dan usaha agribisnis peternakan yang ramah lingkungan, menjaga dan memperbaiki kelestarian kualitas sumberdaya keaneka ragaman hayati, polusi minimal dan zero waste.

Tujuan pembangunan agribisnis peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam
2. Mengembangkan sektor ekonomi baru sebagai sumber pertumbuhan baru pasca migas-tambang bagi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
3. Meningkatkan kapasitas agribisnis peternakan dalam menghasilkan manfaat sosial ekonomi untuk mengantisipasi tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil temuan lapang dan kajian yang mendalam tentang aspek-aspek pengembangan usaha peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam, beberapa hal pokok yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Master Plan Pengembangan Peternakan antara lain meliputi :

1. Tantangan dan Arah Pembangunan :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia
 - b. Memperkuat manajemen dan kelembagaan daerah
 - c. Meningkatkan pelayanan prasarana dasar
 - d. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat
 - e. Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumberdaya alam
 - f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas
 - g. Meningkatkan pendapatan masyarakat

2. Arah Pembangunan :

- a. Peningkatan kualitas SDM yang bertakwa
- b. Perbaikan kualitas angkatan kerja
- c. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha
- e. Penganekaragaman kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah
- f. Peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- g. Penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah
- h. Pengembangan sumberdaya alam potensial
- i. Pengembangan kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan antar wilayah

3. Strategi Dasar:

- a. Memanfaatkan seluruh sumberdaya daerah secara efektif, efisien dan ekonomis
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang didasarkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki integritas, profesionalisme dan percaya diri yang besar
- d. Melengkapi struktur dan kelengkapan kelembagaan desentralisasi/otonomi daerah
- e. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka isolasi wilayah yang terbelakang dan terpencil
- f. Memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang didukung masyarakat kecil (terutama petani, peternak dan buruh)
- g. Menyelenggarakan pembangunan daerah yang merata dengan pendekatan wilayah
- h. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi dari masyarakat dan swasta.

Untuk mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan tersebut di atas, maka kebijakan dan strategi master plan secara operasional dapat dilakukan secara holistik dan berkesinambungan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

Tabel 8. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Swasembada Bibit

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Swasembada Bibit	• Membangun lumbung bibit di wilayah potensial • Negatif Net Eksport dalam jangka waktu tertentu • Pemanfaatan dana pembangunan untuk investasi pembibitan	• Pengembangan model kawasan bibit • Pengembangan manajemen dalam menjaga keamanan stok bibit sebagai buffer • Inventarisasi lokasi potensial untuk kawasan bibit • Penyusunan model kawasan • Pembangunan fasilitas kawasan • Pembinaan SDM dan pendampingan • Perumusan sistem manajemen pengelolaan kawasan bibit • Pengadaan bibit dan sarana produksi • Budidaya ternak bibit

Tabel 9. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Swasebada Pakan

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Swasembada Pakan	• Optimalisasi pemanfaatan sumber hijauan alami • Membangun industri pakan di pusat-pusat budidaya	• Pengembangan potensi sumber hijauan alami • Peningkatan teknologi pemanfaatan sumberdaya alami • Inventarisasi sumber-sumber hijauan • Pelatihan teknologi budidaya, sistem penyediaan dan pengelolaan pakan • Penentuan lokasi strategis untuk industri pakan • Penyusunan rancang bangun industri pakan • Penyusunan sistem manajemen industri pakan masing-masing daerah • Implementasi pembangunan industri pakan

Tabel 10. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Optimalisasi Pelayanan Publik

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Optimalisasi Pelayanan Publik	• Investasi dan subsidi fasilitas pelayanan publik • Manajemen Pelayanan terpadu • Pemerataan pelayanan fasilitas sesuai kebutuhan	• Pengembangan fasilitas layanan (jenis, jumlah, lokasi, kelembagaan, dll) • Peningkatan sumberdaya manusia pengelola fasilitas • Identifikasi kebutuhan fasilitas layanan • Penentuan lokasi masing-masing fasilitas layanan • Penyusunan Rencana Tata Ruang Fasilitas Pelayanan • Penyusunan sistem manajemen fasilitas layanan • Pembangunan fasilitas layanan (karantina, holding ground, pusat pelatihan, pusat pembibitan, pasar ternak, dll)

Tabel 11. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Pengembangan Ternak sebagai Cabang Usaha atau Usaha Pokok

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Pengembangan Ternak Sebagai Cabang Usaha Atau Usaha Pokok	• Penyediaan paket untuk peningkatan skala usaha • Penentuan jenis ternak potensial sebagai komponen pada masing-masing pola usahatani • Peningkatan peran swasta dalam kemitraan	• Pengembangan Model Usahatani Terpadu Dengan Ternak Sebagai Komponen Utama • Pengembangan Sistem Penyediaan Bibit Ternak • Pengembangan Sistem Kemitraan Budidaya Ternak • Inventarisasi Pola-Pola Usahatani Ternak • Penentuan Skala Ekonomis • Penentuan Sistem Kemitraan • Pengadaan Bibit Dan Sarana Produksi • Pelaksanaan Budidaya

Tabel 12. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Pengelolaan Plasma Nutfah Berkelanjutan

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Pengelolaan Plasma Nutfah Berkelanjutan	• Pengelolaan sumberdaya ternak lokal • Pengelolaan sumberdaya berkelanjutan	• Pengembangan sumberdaya plasma nutfah lokal • Pengembangan sistem manajemen sumberdaya • Peningkatan SDM dalam pengelolaan sumberdaya • Inventarisasi dan pemetaan sumberdaya plasma nutfah potensial • Penyusunan pedoman pengelolaan plasma nutfah

Tabel 13. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Profesionalisme Kelembagaan

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Profesionalisme Kelembagaan	• Pengembangan sumberdaya manusia dinas terkait • Kerjasama instansi dinas terkait dengan Perguruan Tinggi dan LSM	• Capacity building • Pengembangan kerjasama kelembagaan • Identifikasi kebutuhan pembinaan sdm personil dinas-dinas terkait • Inventarisasi pihak mitra dalam pengembangan peternakan • Perumusan model kemitraan

Tabel 14. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Iklim Investasi Kondusif

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Iklim Investasi Kondusif	• Regulasi yang kondusif bagi penanaman modal investor • Promosi profil investasi wilayah	• Pengembangan UU dan peraturan investasi yang kondusif • Pengembangan sistem informasi profil investasi • Penyusunan ketentuan-ketentuan yang dapat meningkatkan minat investasi • Penyusunan dan publikasi profil investasi peternakan masing-masing daerah Kabupaten

Tabel 15. Kebijakan, Strategy dan Master Plan Standarisasi Mutu Terpadu

Kebijakan	Strategi	Master Plan
Standarisasi Mutu Terpadu	• Penggunaan bibit berkualitas • Manajemen budidaya yang sehat • Standardisasi penanganan pasca panen • Standardisasi sistem transportasi	• Pengembangan teknologi budidaya • Pengembangan teknologi pasca panen • Pengembangan sistem transportasi produk peternakan • Penetapan standar mutu produk • Pelatihan teknologi dan jaminan mutu terpadu • Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi produk ternak • Pengadaan sarana dan prasarana transportasi produk ternak

V. RANCANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN

Pengembangan kawasan agribisnis ternak secara terpadu yang makin maju akan membawa pada kemandirian (*self sufficiency*) wilayah yang secara nyata akan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri (*self reliance*) untuk menumbuhkan prakarsa dan sikap mandiri masyarakat luas. Orientasi pokok pengembangan usaha peternakan yang diuraikan berikut ini merupakan upaya yang dapat diarahkan untuk berkembangnya usaha peternakan, adalah melalui Pengembangan Kawasan Agribisnis Ternak Terpadu. Kawasan yang dimaksudkan adalah suatu kawasan yang ditetapkan untuk pengembangan ternak lokal rakyat sesuai agroklimat dan agroekosistem setempat yang cocok dan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh sesuai dengan konsep sistem dan usaha agribisnis. Selain kesesuaian agroklimat dan agroekosistem, pengembangan kawasan terpadu juga akan mempermudah pemasaran, pelayanan serta akses ke lembaga keuangan. Pengembangan kawasan terpadu usaha peternakan yang dibangun secara partisipatif akan tumbuh dengan lebih cepat jika prinsip dasarnya dipahami oleh stakeholder dan masyarakat kawasan tersebut. Prinsip-prinsip dasar merupakan pedoman bagi pengembangan kawasan agribisnis sekaligus juga sebagai indikator evaluasinya. Model pengembangan kawasan terpadu tersebut harus memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Integrasi: Integrasi yang terjadi adalah *inward integration* dan *outward integration*. Integrasi didalam adalah keterkaitan antara kegiatan-kegiatan ekonomi dalam kawasan dan antara sub-sub kawasan atau antar sentra pengembangan dengan kawasan penyanggahnya (*barrier area*). Sedangkan integrasi keluar adalah terjalinnya hubungan yang lebih luas antara daerah atau antar kawasan yang akan saling mendukung dalam pengembangannya lebih lanjut, hal ini terutama sekali diorientasikan pada aspek pengembangan pasar.
2. Inovasi: Model pengembangan kawasan terpadu harus menempatkan teknologi yang bersumber dari hasil kajian perguruan tinggi/lembaga penelitian dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal sebagai penggerak pengembangan kawasan.
3. Kas Harian: Adanya kas harian dari rumah tangga peternak merupakan fokus model kawasan terpadu, karena berdasarkan hasil kajian lapang, belum seluruh peternak menjadikan usaha ternak sebagai pekerjaan utama tetapi masih merupakan usaha sampingan dimana kepemilikan ternak merupakan tabungan keluarga. Dengan kata lain, pendapatan harian rumah tangga peternak berasal bukan dari kegiatan usaha ternak. Pola pendapatan ini tidak bisa dirubah dengan adanya introduksi komoditas ternak tertentu, karena selama ini yang terjadi pada jangka panjang peternak akhirnya mengalami kesulitan membiayai rumah tangganya.
4. Moralitas: Penempatan sumberdaya manusia yang tepat merupakan kunci awal keberhasilan model kawasan terpadu usaha ternak. Kualitas sumberdaya manusia, baik peternak, peneliti, pengusaha, pembuat kebijakan maupun pelaku lain dalam model pengembangan kawasan terpadu usaha ternak, harus berada pada standar minimal kepatutan.
5. Lingkungan: Pemanfaatan lingkungan secara efisien dan efektif dilakukan melalui perencanaan dan perhitungan yang memperhatikan dampak maupun keseimbangannya. Daya dukung lingkungan, baik fisik maupun sosial, menjadi dasar penentuan kapasitas ternak yang akan dikembangkan. Model pengembangan kawasan ini harus didasarkan atas interaksi lingkungan, sehingga merupakan satu kesatuan dalam ekosistem yang lebih luas dengan meminimalkan produk lingkungan yang tidak termanfaatkan.

Grand Strategy Master Plan yang dapat ditempuh antara lain adalah :

1. Pengembangan Kelembagaan Peternakan. Upaya yang perlu dikembangkan dalam membina dan memantapkan kelembagaan peternak adalah memperkuat kelembagaan ekonomi petani peternak di pedesaan. Untuk itu diperlukan pendekatan yang efektif agar petani/peternak dapat memanfaatkan program pembangunan yang ada, secara berkelanjutan, melalui penumbuhan rasa memiliki, partisipasi dan pengembangan kreatifitas, disertai dukungan masyarakat lainnya sehingga dapat berkembang dan dikembangkan oleh seluruh masyarakat tani ternak di pedesaan.
2. Pengembangan Kelembagaan Penyuluh. Kelembagaan penyuluh perlu diberdayakan karena berperan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan merubah perilaku peternak baik secara individu maupun kelompok. Pada masa yang akan datang penyuluhan tidak sekedar untuk mengubah perilaku peternak dalam menerima inovasi teknologi namun perlu

dipertimbangkan agar para peternak berperilaku sebagai SDM agribisnis. Begitu juga kelompok peternak harus diarahkan sebagai kelompok usaha agribisnis peternakan. Dengan demikian para penyuluh peternakan perlu diarahkan dan dilatih baik metode maupun materi penyuluhan untuk dapat memberikan motivasi kepada para peternak sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku agribisnis peternakan.

3. Pengembangan Jasa Pelayanan Teknis dan Konsultasi Peternakan. Dalam upaya untuk optimalisasi pengembangan kawasan usaha peternakan agar berkembang dan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan jasa pelayanan teknis peternakan yang meliputi pelayanan inseminasi buatan (IB), pembinaan pakan ternak, pelayanan kesehatan hewan, pembinaan perbibitan dan bimbingan usaha. Jasa pelayanan teknis peternakan diarahkan secara swadaya masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peternak dan atau kelompoknya. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan diperlukan suatu wadah dan tenaga yang profesional di bidang teknis peternakan.
4. Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Pada umumnya usaha ternak rakyat masih bersifat sambilan dan masih menerapkan cara ternak tradisional, belum memanfaatkan teknologi secara optimal serta lemahnya orientasi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Sementara efisiensi, memerlukan penggunaan teknologi yang tepat. Atas dasar itu, maka pengembangan teknologi peternakan diarahkan pada teknologi budidaya, pakan dan pasca panen, untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas produksi, keuntungan, keamanan produk pangan, nilai tambah kandungan nutrisi dan berdaya saing di pasar internasional.
5. Program Optimalisasi Sumberdaya Alam Lokal. Sumberdaya domestik yang ada pada suatu wilayah, daerah atau kawasan haruslah dimanfaatkan dan digali seoptimal mungkin untuk keperluan mendukung pengembangan kegiatan-kegiatan yang ada, secara terpadu dan terkait khususnya dalam upaya pengembangan peternakan. Sumberdaya alam perlu dipertahankan kelestariannya, termasuk didalamnya memperluas "*resource based*" dari sumberdaya alam tersebut dan pemanfaatannya secara optimal, yang didasarkan atas daya dukung pakan, kemampuan wilayah, teknologi tepat guna dan ketersediaan sarana dan prasarana.
6. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk komoditas ternak terutama sekali diorientasikan pada basis kekhasan setiap daerah dalam bentuk Custer-cluster komoditas ternak unggulan. Hal ini bukan berarti bahwa kawasan-kawasan lain yang tidak menonjol pada salah satu komoditas ternak tidak boleh mengembangkan komoditas ternak tertentu, hanya saja yang utama dikembangkan adalah komoditas unggulannya. Hal ini juga berlaku untuk sumber daya lokal lainnya yang mendukung secara langsung pengembangan usaha peternakan.
7. Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan. Keberadaan kelembagaan keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pembiayaan usaha peternakan seperti Lembaga Keuangan Modal Ventura yang telah dirintis oleh departemen Lembaga Keuangan yang telah didirikan di setiap provinsi atau kawasan usaha ternak terpadu di seluruh Indonesia. Fenomena pembiayaan usaha ternak sebenarnya hampir sama dengan pembiayaan bagi usaha-usaha agribisnis lainnya. Untuk usaha peternakan dengan kapasitas produksi dan skala usaha yang besar, pemberian pembiayaan dan investasi mungkin tidak begitu bermasalah karena regulasi investasi dan kinerja perusahaan tersebut sudah teratur dengan baik. Namun demikian, fenomena pembiayaan bagi usaha ternak dalam skala usaha kecil dan menengah, setidaknya masih dipengaruhi oleh isu-isu pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Sifat pembiayaannya *retail* dan minimnya ketersediaan informasi tentang usaha. sehingga dibutuhkan sumberdaya yang banyak.
 - b. Minimnya perangkat monitoring untuk memastikan bahwa tujuan pembiayaan tercapai (mengantisipasi kecenderungan pindah usaha karena *barier to entry* relatif rendah, atau mengantisipasi kecenderungan pembiayaan konsumtif.
 - c. *Feasible*, namun tidak *bankable*. Fenomena inilah yang menjadi penyebab kurang tumbuhnya kredit perbankan bagi sub sektor peternakan. Padahal sesungguhnya dengan sifatnya yang *retail*, investasi yang cukup besar dapat ditanamkan dengan juga memberikan jaminan pembinaan (*technical assistance*) melalui layanan pengembangan bisnis (*Business Development Services*) dan pola kemitraan pembiayaan yang efektif dan

tepat sasaran. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi pihak pembiayaan/perbankan untuk menerapkan strategi pembiayaan yang khusus dan tidak disamaratakan, karena kecenderungan bahwa usaha kecil menengah akan memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan sifatnya yang demikian, sebenarnya perbankan dapat mengarahkan sifat *retail* tersebut menjadi terkonsentrasi sehingga akan lebih memberikan jaminan dengan kondisi yang *bankable*.

8. Pembinaan peternak lokal yang mencakup empat dimensi utama, yaitu :

- a. Aspek mikro; pembinaan peternakan lokal bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani melalui peningkatan produksi peternakan. Sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah pendapatan rata-rata persatuan tenaga pria diatas upah minimum regional. Seiring dengan upaya peningkatan efisiensi dilakukan juga peningkatan produktivitasnya melalui penerapan teknologi tepat guna, sedangkan upaya peningkatan daya saing dilakukan melalui manajemen mutu terpadu dengan menerapkan good farming practices, good breeding practices, good processing practices dan good marketing practices. Dengan demikian dari aspek mikro pembinaan tersebut pada prinsipnya adalah pemberdayaan usaha peternak kecil dan menengah melalui pengembangan kapasitas yang berintikan pengembangan sumber daya melalui pendekatan kelompok tani.
- b. Aspek makro; Dalam aspek makro, upaya yang dapat ditempuh dalam pembinaan peternakan lokal rakyat menuju usaha yang berwawasan agribisnis adalah pengembangan sumberdaya manusia. Untuk ini perlu ditempuh melalui pembentukan dan pembinaan kelompok sebagai wadah belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berusaha.
- c. Agar aspek makro ini mencapai sasarnya, maka strateginya adalah mendesentralisasikan tanggung jawab dengan menerapkan perencanaan yang partisipatif. Dalam hal ini pemerintah daerah harus berprinsip bahwa pengembangan usah peternakan lokal rakyat adalah urusan masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan demikian selain desentralisasi, maka Program lainnya yang perlu dikembangkan dalam aspek makro adalah privatisasi, kemitraan dan deregulasi/debirokratisasi.
- d. Aspek global; dari aspek global , maka peternakan lokal harus dikaitkan dengan tujuan substitusi impor atau dalam jangka panjang untuk meningkatkan ekspor, sehingga menghemat devisa negara. Dalam kerangka global ini maka upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah peningkatan mutu dan kamanan pangan. Program yang ditempuh adalah pengembangan manajemen mutu dari aspek budidaya sampai ke konsumen (food safety program).

Pola pembinaan yang dapat dilakukan antara lain adalah :

- a. Pola pembinaan kelompok (tingkat usaha tani); operasionalisasi pola pembinaan di tekankan kepada pembentukan dan pengembangan kelompok tani, sehingga kelompok tani tersebut berfungsi sebagai sarana belajar mengajar, unit produksi, wahana kerja sama dan sebagai kelompok usaha.
 - b. Pola pembinaan yang dilaksanakan secara bertahap sejak dari pembentukan kelompok baru, pengembangan kelompok binaan dan akhirnya kelompok mandiri. Kelompok mandiri tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kelompok tani ternak yang mampu melakukan kerjasama dengan kelompok tani lainnya, membentuk kelompok usaha bersama atau bagian dari unit usaha mandiri dalam wadah koperasi peternak.
 - c. Pola bergulir; dalam rangka pembinaan peternakan lokal rakyat menuju usaha yang berwawasan agribisnis, maka bantuan pemerintah merupakan bantuan langsung yang harus di kelola dengan pola bergulir. Pola bantuan bergulir untuk ternak lokal rakyat ditentukan dalam bentuk uang yang digunakan sesuai proposal yang disusun bersama oleh kelompok itu sendiri.
9. Pengembangan kemitraan. dalam rangka mendukung keberhasilan pembinaan ternak lokal, seyogyanya sejak awal sudah dihadirkan pengusaha yang dapat berperan sebagai perusahaan pengelola, penghela atau sebagai inti. Melalui pola kemitraan ini dapat dirancang sejak awal mutu produk, harga dan pasokan dari kawasan yang telah ditentukan sesuai

dengan permintaan pasar. Pada sistem ini kelompok tani melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang bergerak dalam sub sistem hulu (sapronek) dan sub sistem hilir (pemotongan, pengolahan) serta sub sistem jasa (alat, dan mesin, modal). Pengusaha skala besar perlu dikembangkan dalam konsep kemitraan agribisnis dengan skala menengah dan kecil serta skala rumah tangga sehingga terbentuk "*win-win partnership*". Oleh karena itu usaha agribisnis *on farm* yang umumnya masih lemah diperlukan pembinaan penyertaan kelompok agar mampu bekerja sejajar dengan usaha skala besar melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan mulai dari tingkat petani/peternak, kelompok tani, koperasi sampai perusahaan besar melalui kemitraan usaha.

10. Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana/Infrastruktur. Dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana/infrastruktur tidak lepas keterkaitannya dengan sektor-sektor lain baik sektor keuangan maupun lainnya yang mempunyai hubungan kuat. Terlebih lagi dalam pengembangan sebuah kawasan terpadu, keberadaan infrastruktur dan sarana/prasarana penunjang lainnya menjadi sangat urgent. Untuk menjalin hubungan ini perlu ditingkatkan koordinasi secara periodik yang meliputi :

- a. Kinerja investasi (sarana jalan, pabrik pengolahan, dermaga.bandara).
- b. Kinerja peternak, usaha, pengangkutan dan tataniaga.
- c. Pemantapan kelembagaan usaha bersama yang menguntungkan.

11. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Peternakan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha peternakan. Hal ini disebabkan karena dalam pengembangan usaha peternakan, SDM tidak hanya sekedar faktor produksi melainkan yang lebih penting lagi adalah pelaku langsung usaha peternakan.

Pengembangan SDM peternakan yang berbasis kepada masyarakat lokal di sebuah kawasan dapat dilakukan dengan membentuk dan mengembangkan Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan (P2BP). Prinsip dasar dari P2BP ini adalah dimana sarana dan prasarana yang dirancang sama, di mana ketersediaan sumber air dan adanya pendapatan harian (baik dari peternakan maupun non-peternakan) rumah tangga peternak merupakan dasar pengembangannya. Khusus keberadaan pendapatan harian tersebut juga merupakan pembeda model ini dibandingkan model pengembangan kawasan yang ada. Untuk mengembangkan usaha peternakan yang sejalan dengan pembangunan sistem agribisnis, paling sedikit terdapat 3 (tiga) sasaran penting pengembangan SDM, yaitu :

- a. Mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan sehingga searah dengan pengembangan teknologi pada sistem dan usaha agribisnis.
- b. Mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang handal/tangguh.
- c. Mengembangkan kemampuan *team work* sumberdaya manusia dalam hal ini mencakup SDM pelaku langsung pengembangan kawasan peternakan sehingga bisa mengakses ke kelembagaan yang ada di sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem usahatani (*on farm*), sub-sistem agribisnis hilir dan agribisnis pendukung

Tabel 16. Matriks Program Subsistem Agribisnis Hulu

Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Pelestarian dan Pengembangan Plasma Nutfah	- Plasma nutfah Sapi Aceh - Plasma nutfah kerbau aceh	Plasma Nutfah Khas Aceh	2006-2010	BALAI PEMBIBITAN, BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN
Pembangunan Pastura	- Pastura Rumput - Pastura Leguminosa	Ketahanan Pakan Hijauan	2007-2010	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI
Pembangunan Pabrik Pakan	- Pabrik pakan unggas - Pabrik pakan ruminansia	Ketahanan Pakan Konsentrat	2007-2010	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI, SWASTA
Pembangunan Balai Bibit Ternak	- Bangunan dan laboratorium - Pengadaan bibit ternak	Stabilitas stok dan kualitas bibit	2006, 2008, 2010	DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI, SWASTA
Pembangunan Pos Pelayanan Ternak	- Bangunan dan pengadaan peralatan - Pelatihan dan pengembangan SDM	Percepatan dan peningkatan populasi	2006, 2008	DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI, SWASTA
Pembibitan Sapi Potong	- Sistem Padang Penggembalaan/Ranch - Sistem Pemeliharaan Intensif/Terintegrasi	Pelestarian Plasma Nutfah dan Penyediaan Bibit Sapi potong Lokal Secara Kontinu	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, BALAI PEMBIBITAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK
Pembibitan Sapi Perah	Sistem Pemeliharaan Intensif/terintegrasi	Pelestarian Plasma Nutfah dan Penyediaan Bibit Sapi Perah Lokal Secara Kontinu	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, BALAI PEMBIBITAN, KELOMPOK TERNAK
Pembibitan Kerbau	Sistem Penggembalaan/Ranch	Stabilisasi Populasi Kerbau	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, BALAI PEMBIBITAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK
Pengembangan Pakan Berbasis Lokal	- Inventarisasi Potensi Bahan Baku Pakan Lokal - Pengembangan pabrik pakan mini	Penyediaan Pakan secara Kontinu	2006-2008	DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI, KELOMPOK TERNAK

Tabel 17. Matriks Program Subsistem Agribisnis Budidaya

Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Penggemukan Sapi Potong	- Sistem Kandang Koloni Sapi Lokal Skala Rakyat - Compesatory Growth Sapi Aceh Kurus - Sistem Feedlot	Stabilisasi Populasi dan Pemenuhan Kebutuhan Pasar Lokal dan Target Ekspor	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK
Produksi Susu Sapi	- Sistem Pemeliharaan Intensif/Terintegrasi - Bengkel Sapi Perah Produksi/Bunting	Stabilisasi Produksi Susu dan Indukan Sapi Perah	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK
Pengembangan Kambing	Sistem Penggembalaan /Ranch	Stabilisasi Populasi Kambing	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK
Pengembangan Ayam Ras	Pola Usaha Kemitraan berbasis Kearifan Lokal/Syariah	Pengembangan Industri Ayam Ras	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, SWASTA, KELOMPOK TERNAK

Tabel 18. Matriks Program Subsistem Agribisnis Hilir

Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Teknologi Hasil Peternakan	- Industri Pengolahan Susu Pasteurisasi - Industri Pengawetan Daging - Industri Kerajinan kulit dan bulu	Optimalisasi Produk dan Nilai Tambah Hasil Ternak	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KOPERASI UKM, DINAS PERINDUSTRIAN, DINAS PERDAGANGAN, PERBANKAN, SWASTA
Pemasaran dan Promosi	- Pengembangan Konsep Trading House Peternakan - Pengembangan Meat Shop - Ekspo Peternakan	Optimalisasi Produk, Nilai Tambah Hasil Ternak dan Peningkatan Investasi	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KOPERASI UKM, SWASTA
Distribusi dan transportasi ternak	- Analisis distribusi produk-produk peternakan - Pengembangan alat angkut produk-produk peternakan	Efisiensi distribusi dan transportasi	2009	DINAS PETERNAKAN, DINAS PU, SWASTA
Pengembangan industri olahan hasil ternak	- Pengembangan pabrik pengolahan dan pengemasan daging dan susu. - Pengembangan industri rumah tangga berbasis daging, telur, dan susu	Kecukupan konsumsi protein hewani	2008-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KOPERASI UKM, DINAS PERINDUSTRIAN, SWASTA
Jaringan Distribusi dan Sistem Informasi Pasar	- Pengembangan pasar ternak dan jaringan pemasaran - Pengembangan "e-market" produk peternakan	Stabilitas harga dan ketersediaan	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS PERDAGANGAN, PERBANKAN, SWASTA
Kampanye Gizi Protein Hewani	- Program Gizi Balita - Protein hewani untuk kecerdasan anak usia sekolah	Kecukupan Gizi	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PENDIDIKAN, SWASTA
Pengembangan Rumah Potong Ternak	- Pembangunan Rumah Potong Hewan - Pengembangan rumah pemotongan ayam	Keamanan dan kehalalan produk peternakan	2007	DINAS PETERNAKAN, DINAS KESEHATAN, SWASTA

Tabel 19. Matriks Program Subsistem Agribisnis Penunjang

SUMBER DAYA MANUSIA				
Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Penguatan SDM Peternakan	• Penumbuhan Wirausaha Baru bidang peternakan • Pelatihan dan pengembangan peternak	Pengembangan Usaha Peternakan dan Etos Kerja yang Prima	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI, KELOMPOK TANI
Diseminasi Teknologi Usahaternak	• Introduksi teknologi budidaya	Sertifikasi Peternak	2006-2010	BAPPEDA, BPS, DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI
Study Visit Peternak	• Studi banding pengembangan peternakan	Adopsi Inovasi	2007,2009	
Up Grading SDM Dinas Peternakan	• Peningkatan pendidikan formal SDM dinas peternakan	Inovatif dan Pengambil Keputusan	2006, 2008, 2010	DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI
Fasilitasi Dan Pertukaran Ilmuwan	• Pengembangan keahlian peternakan antar perguruan tinggi	Pengembangan Kepakaran	2007, 2009	

KELEMBAGAAN				
Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Penguatan Kelembagaan Peternakan	• Penguatan Kelembagaan/Dinas Teknis Peternakan	Eksistensi Dinas Peternakan Propinsi dan Kabupaten	2006-2010	GUBERNUR, BAPPEDA
Penguatan Kelompok Usaha Ternak	• Manajemen usaha peternakan	Efisiensi usaha	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KOPERASI UKM, PERBANKAN
Balai penanggulangan penyakit dan karantina hewan	• Laboratorium penyakit hewan • Karantina hewan			

KEBIJAKAN				
Program	Sub Program	Sasaran	Tahun Pelaksanaan	Lembaga Yang Terlibat
Sensus Ternak	• Pendataan populasi ternak	Kepemilikan Ternak Per Rumah Tangga, kesadaran nilai ekonomi ternak	2006, 2010	BAPPEDA, BPS, DINAS PETERNAKAN, PERGURUAN TINGGI
Pewilayahan Ternak Unggulan	• Wilayah potensi ternak	Kawasan Pengembangan Ternak	2006,2007	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN, DINAS PU, DINAS KIMPRASWIL

Penetapan Tata Ruang Peternakan	• Penataan wilayah untuk peternakan	Peraturan Daerah	2006	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN, DINAS PU, DINAS KIMPRASWIL
Rekontruksi Bangunan Dan Rekondisi Mesin	• Bangunan Dinas Peternakan • Alat transportasi • Gudang penyimpanan hasil peternakan	Kualitas Pelayanan	2007	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN, PU, KIMPRASWIL

PERMODALAN				
Penyediaan Modal Peternakan	• Pengembangan Lembaga Penjamin Modal/Sistem Bagi Hasil	Holding Enterprise Usaha Peternakan secara Terpadu	2006-2010	BAPPEDA, DINAS PETERNAKAN
Pembentukan Lembaga Penjamin Modal	• Lembaga keuangan syariah	Percepatan investasi	2006-2010	DINAS PETERNAKAN, DINAS KOPERASI UKM, PERBANKAN
Pendirian Badan Usaha Milik Daerah	• Perusahaan daerah bidang peternakan	Usaha terintegrasi	2007, 2009	

VI. MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM

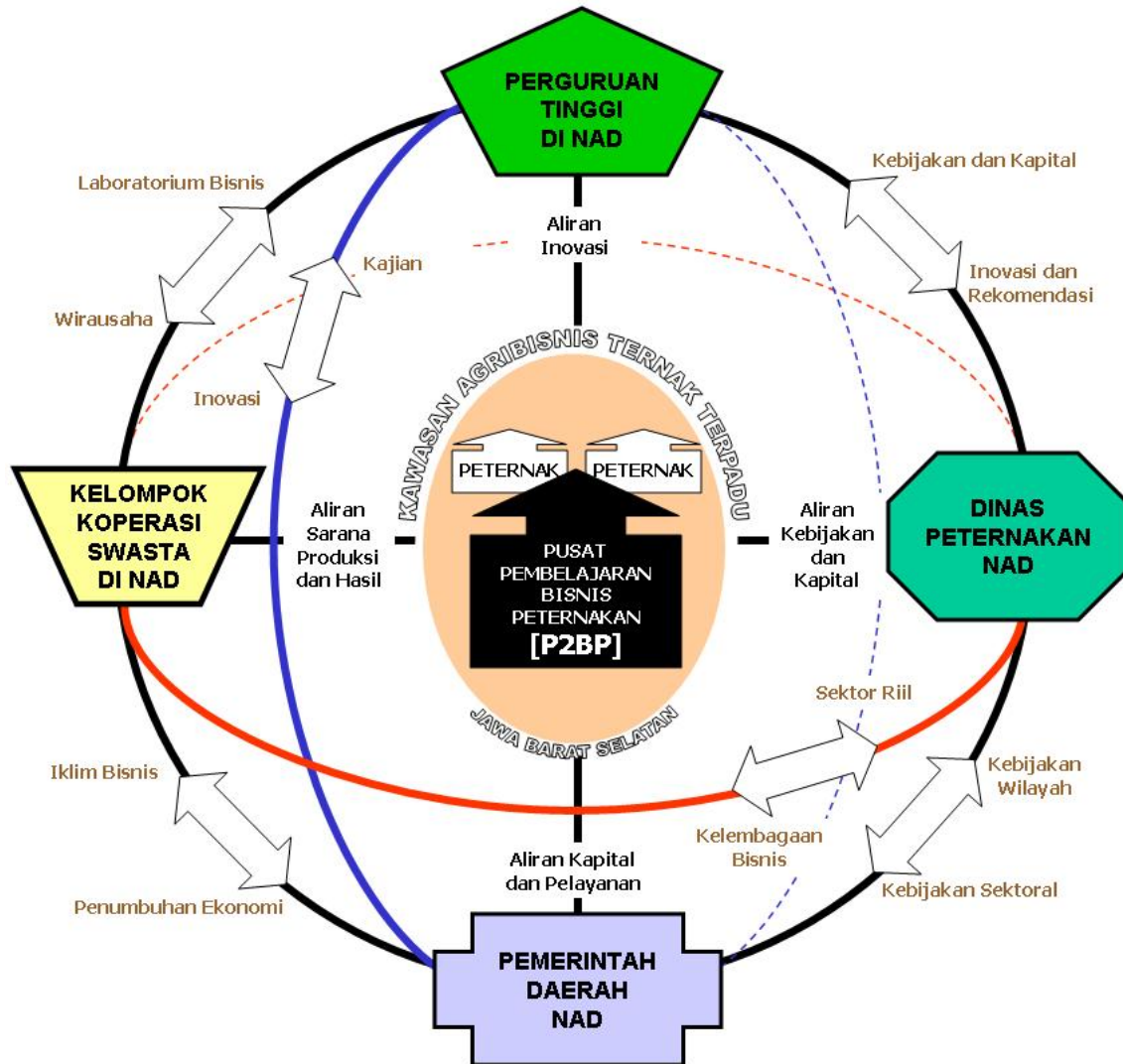
Pembangunan agribisnis peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan produk ternak untuk Nanggroe Aceh Darussalam, memanfaatkan kesempatan ekspor ke negara tetangga dan membuka kesempatan usaha baru di Nanggroe Aceh Darussalam. Dari ternak yang ada, yang potensial untuk dikembangkan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah ayam kampung, sapi potong, itik dan ayam ras. Pengembangan berbagai ternak tersebut harus berlangsung efisien dan memberikan nilai tambah baik bagi peternak maupun dunia usaha yang bergerak di hulu dan hilir. Untuk itu para peternak dan dunia usaha harus dapat melakukan kegiatannya masing-masing secara efisien serta melakukan sinergisme hingga mengarah pada terbentuknya sistem agribisnis peternakan yang utuh.



Gambar 1. Model Dasar Pengembangan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Model Kawasan Pengembangan Ternak

Model pengembangan kawasan agribisnis ternak terpadu di NAD ini dirumuskan dari partisipasi semua stakeholder pembangunan kawasan agribisnis peternakan NAD. Pelibatan stakeholder tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses pencapaian tujuan kemandirian kawasan agribisnis ternak terpadu ini. Stakeholder yang dilibatkan adalah Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah (BAPPEDA), Dinas Peternakan, Masyarakat (petani, peternak, KTNA, pedagang, wiraswasta), dan Swasta atau Koperasi bidang peternakan.



Gambar 2. Model Pengembangan Kawasan Peternakan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam model terdapat Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan (P2BP) yang menjadi pusat pengembangan kawasan sekaligus menjadi simpul jaringan kerjasama (*networking*) dari stakeholder pembangunan kawasan agribisnis tersebut. Selain itu, ada empat aliran utama ke P2BP yaitu aliran inovasi dari Perguruan Tinggi, aliran kebijakan dan kapital dari Dinas Peternakan, aliran kapital dan pelayanan dari Pemerintah Daerah, dan aliran sarana produksi dan hasil dari dan ke Swasta/Koperasi. Selanjutnya, terjadi banyak keterhubungan antara satu stakeholder dengan stakeholder lainnya, sehingga model ini terlihat seperti “bumi” yang dalam hal ini P2BP yang dikelilingi oleh beberapa “satelit” (*penjelasan mengenai aliran dan keterhubungan lebih detail dapat dilihat pada bagian fungsi kelembagaan*).

Adanya P2BP dalam model ini, selain merupakan pembeda dengan model lain yang ada juga menunjukkan adanya kesinambungan pemanfaatan kinerja dari pengembangan kawasan agribisnis, sekaligus menjadi pendorong utama pertumbuhan. P2BP ini dirancang sebagai usaha peternakan seperti yang dilakukan oleh peternak, yang dikelola oleh peternak yang memiliki pendapatan harian diluar hasil ternak. Namun, khusus P2BP dikelola oleh peternak maju, sedangkan di peternak adalah dikelola oleh peternak yang telah mendapat sertifikat dari P2BP.

Sarana dan prasarana di P2BP maupun di peternak dirancang sama, dimana ketersediaan sumber air dan adanya pendapatan harian (non-peternakan) rumah tangga peternak merupakan dasar pengembangannya. Khusus keberadaan pendapatan harian tersebut juga merupakan pembeda model ini dibandingkan model pengembangan kawasan yang ada.

Definisi:

Model ini didefinisikan sebagai model pengembangan kawasan agribisnis ternak terpadu yang digerakkan oleh kegiatan ekonomi harian rumah tangga peternak dengan fokus pada pengembangan inovasi terus menerus dan moral sumberdaya manusia serta efisiensi menuju pada kawasan yang berwawasan lingkungan, lestari, dan mandiri.

Manfaat:

Pengembangan model ini, bagi peternak diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan keluarga peternak. Bagi daerah diharapkan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto daerah, mengembangkan perekonomian wilayah, meningkatkan populasi ternak, dan bagi swasta atau koperasi mampu membuka peluang bisnis dan pasar.

Keunikan:

Model ini merupakan kawasan berbasis pada keilmuan dan kompetensi yang dituangkan dalam skala bisnis dengan penentuan peternak berdasarkan pada adanya pendapatan harian dan sertifikat yang dikeluarkan P2BP. Perbedaan model ini dibandingkan dengan model pengembangan kawasan lainnya adalah:

1. Orientasinya yang lokal, namun bisa menjadi general jika dilakukan beberapa modifikasi koefisien, tanpa merubah model dasarnya.
2. Digerakkan oleh kegiatan ekonomi harian yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga peternak. Identifikasi dan keberadaan kegiatan ini merupakan prasyarat bagi model.
3. Pengembangan inovasi dan moral sumberdaya manusia secara terus menerus. Inovasi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sedangkan moral sumberdaya manusia dijadikan indikator utama penggunaan sumberdaya alam.
4. Adanya P2BP sebagai sentra pengembangan inovasi, sumberdaya manusia dan kawasan.
5. Ternak dipelihara secara intensif dalam satu kawasan dan diberi pakan hijauan dan konsentrat hasil produksi lokal.

Tujuan:

Tujuan dari model pengembangan kawasan agribisnis ini adalah untuk:

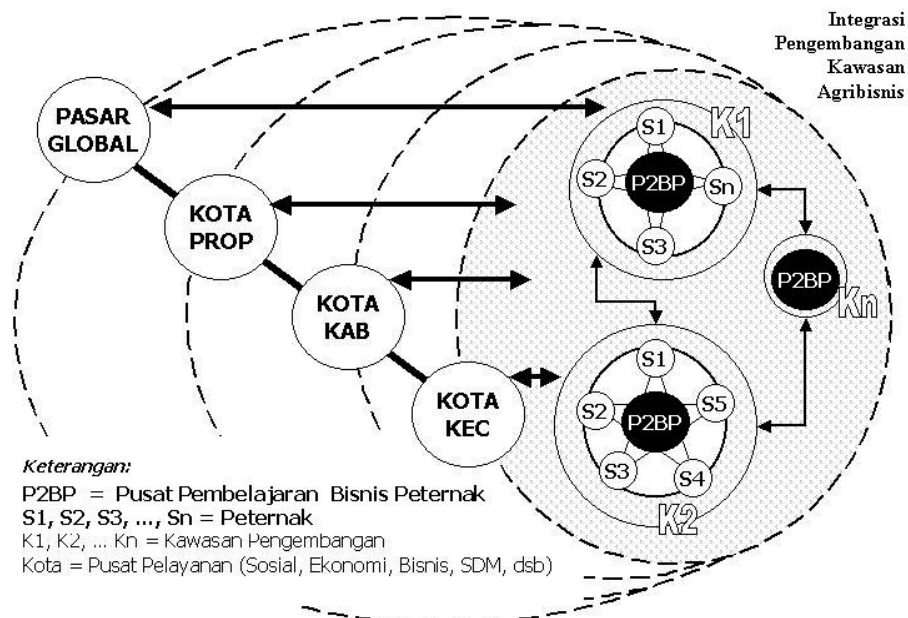
1. menjalankan bisnis peternakan sebagai ekonomi andalan kawasan berlandaskan ilmu dan teknologi.
2. meningkatkan pendapatan peternak dan mempercepat pertumbuhan ekonomi NAD.
3. meningkatkan populasi ternak NAD dan menjadikan kantong ternak untuk mensuplai daging ke luar kawasan.
4. mandiri dalam memenuhi kebutuhan daging dan meningkatkan konsumsi per kapita nasional.

Prinsip Model :

Pengembangan kawasan agribisnis yang dibangun secara partisipatif akan tumbuh dengan lebih cepat jika prinsip dasarnya dipahami oleh stakeholder kawasan tersebut. Prinsip-prinsip dasar merupakan pedoman bagi pengembangan kawasan agribisnis sekaligus juga sebagai indikator evaluasinya. Model ini pun memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu:

Integrasi:

Integrasi yang terjadi adalah *inward integration* dan *outward integration*. Integrasi didalam adalah keterkaitan antara kegiatan-kegiatan ekonomi dalam kawasan dan antara sub-sub kawasan atau antar sentra pengembangan (P2BP) dengan kawasan penyangganya (*barrier area*). Integrasi keluar adalah keterkaitan antar kawasan, misalnya dengan kawasan pertanian dan perkebunan. Kawasan ini bukan entitas yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan pembangunan yang terintegrasi secara harmonis dalam kerangka besar pembangunan ekonomi berbasis agribisnis peternakan di NAD. Oleh karena itu, keterkaitan antar kawasan merupakan prasyarat utama dalam aliran barang dan jasa yang menjadi penopang utama kegiatan ekonomi NAD.



Gambar 3. Model Integrasi Pengembangan Kawasan Agribisnis Peternakan

Inovasi:

Model pengembangan ini menempatkan teknologi yang bersumber dari hasil kajian perguruan tinggi dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal sebagai penggerak pengembangan kawasan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi secara terus menerus dilakukan sesuai dengan perubahan lingkungan lokal. Teknologi yang dibawa dari perguruan tinggi harus diuji terlebih dahulu di lapangan untuk menemukan koefisien-koefisien teknis dan ekonomi dari teknologi tersebut yang sesuai dengan kondisi lokal. Lingkungan lokal yang dimaksud bukan hanya sumberdaya alam saja, tetapi juga sumberdaya manusia dan modal. Dua sumberdaya terakhir ini sangat penting untuk dikembangkan, karena indikasi selama ini teknologi tidak dapat dikembangkan karena memiliki kelemahan pada kedua sumberdaya tersebut.

Kas Harian:

Adanya kas harian dari rumah tangga peternak merupakan fokus model ini, karena berdasarkan hasil kajian lapang, belum banyak peternak yang menjadikan ternak sebagai pekerjaan utama.

Dengan kata lain, pendapatan harian rumah tangga peternak berasal bukan dari kegiatan peternakan. Pola pendapatan ini tidak bisa dirubah dengan adanya introduksi ternak, karena selama ini yang terjadi pada jangka panjang peternak akhirnya mengalami kesulitan membiayai rumah tangganya. Oleh karena itu, peternak yang dikembangkan haruslah peternak yang telah memiliki pendapatan harian rumah tangga rutin dari kegiatan usaha lain. Jika demikian, maka setiap peningkatan hasil kegiatan usaha ternak, akan memperbesar nilai ekonomi rumah tangga peternak, sebaliknya jika terjadi kerugian, tidak akan mempengaruhi ekonomi rumah tangga peternak tersebut.

Selain itu, kontribusi kegiatan usaha ternak memberikan kesempatan dan peluang bagi peternak untuk mengembangkan usaha hariannya, sehingga tingkat efisiensi diperoleh dan nilai tambah yang diperoleh maksimal. Hal ini berbeda jika kemudian peternak tidak memiliki pendapatan harian, maka introduksi ternak akan membebani peternak dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga bukan kawasan yang terbentuk, tetapi yang terjadi adalah pemborosan pembangunan.

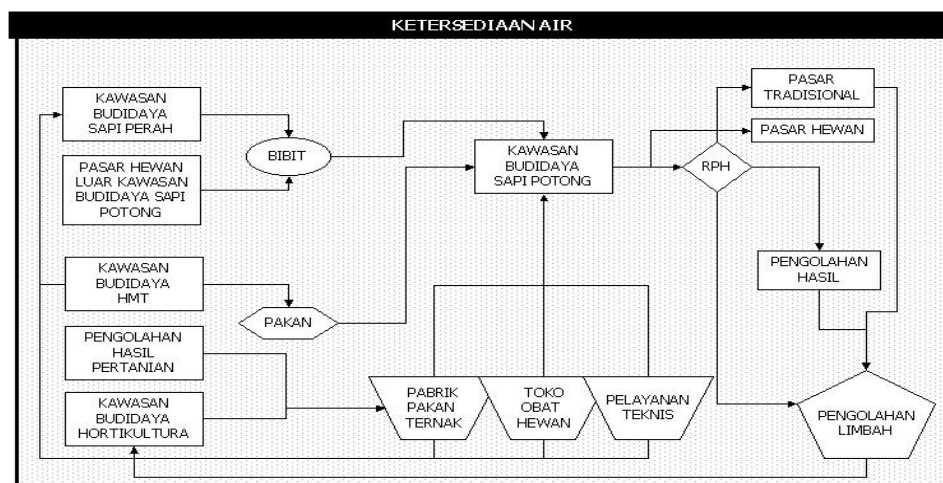
Moralitas:

Penempatan sumberdaya manusia yang tepat merupakan kunci awal keberhasilan model ini. Kualitas sumberdaya manusia, baik peternak, peneliti, pengusaha, pembuat kebijakan maupun pelaku lain dalam model pengembangan kawasan agribisnis berbasis ternak ini, harus berada pada standar minimal kepatutan. Artinya, berdasarkan profesinya harus memiliki persepsi, sikap dan perilaku yang saling mendukung terhadap percepatan pengembangan kawasan. Moralitas lebih ditekankan pada kebiasaan positif berdasarkan keahlian dan profesi masing-masing.

Ini berarti yang melakukan pengawasan terhadap kinerja model adalah masyarakat luas. Jika demikian, maka apapun hasilnya masyarakat secara terbuka dapat memahami dampak dari pengembangan kawasan itu sendiri. Hal ini untuk mencegah adanya silang sengketa di kemudian hari.

Lingkungan:

Pemanfaatan lingkungan secara efisien dan efektif dilakukan melalui perencanaan dan perhitungan yang memperhatikan dampak maupun keseimbangannya. Daya dukung lingkungan, baik fisik maupun sosial, menjadi dasar penentuan kapasitas ternak yang akan dikembangkan. Justru model ini didasarkan atas interaksi lingkungan, sehingga merupakan satu kesatuan dalam ekosistem yang lebih luas dengan meminimalkan produk lingkungan yang tidak termanfaatkan. Sumber kehidupan dari ekosistem adalah air, sehingga interaksi lingkungan berbasis pada ketersediaan air, bahkan ketersediaan air merupakan prasyarat utama (contoh gambar ternak sapi potong).



Gambar 4. Daya Dukung Lingkungan dan Keterkaitan antar Asoek Pengembangan Usaha Peternakan

Lestari :

Keberlanjutan model bisa terjadi antara lain karena tidak ada kerusakan lingkungan atau tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif ini bisa dihilangkan jika dari awal model ini dikembangkan berdasarkan kondisi nyata dan potensi yang sebenarnya, baik kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, maupun potensi sumberdaya alam dan manusianya. Oleh karena itu, kelestarian akan tercipta dalam model ini, karena sebisa mungkin tidak mengganggu proses dan aktivitas ekonomi yang telah berkembang di kawasan, bahkan melalui proses belajar terus menerus atau *learning by doing*, berbagai persoalan dapat secara bersama-sama diselesaikan. Selain itu, penekanan terhadap “tidak ada yang dibuang” dalam konteks terpadu membuat model ini efisien, sehingga secara otomatis terus berlanjut.

Mandiri:

Prinsip ini sekaligus merupakan tujuan akhir dari model pengembangan ini. Kemandirian peternak secara nyata akan mendorong rasa percaya diri untuk menjadikan ternak sebagai pekerjaan pokok, sehingga akan menumbuhkan prakarsa-prakarsa dan sikap mandiri masyarakat kawasan. Pada akhirnya, kemandirian kawasan akan terbentuk yang mendorong pada kemandirian ekonomi kawasan.

Koefisien Teknis dan Tahapan Implementasi Model

Komponen merupakan piranti penciri status perkembangan model ini. Komponen ini pada hakekatnya juga merupakan proses pelengkapan dan penguatan terhadap sistem dan usaha agribisnis berbasis peternakan. Oleh karena itu, komponen-komponen model ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan satu sama lain dengan basis pada pendapatan harian keluarga peternak dalam siklus tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa model sangat memperhatikan keseimbangan ekosistem kawasan secara keseluruhan.

Sumber Air:

Ketersediaan air merupakan ciri adanya kehidupan, sehingga ketersediaan dan kecukupannya menjadi komponen paling esensial dalam model ini. ketersediaan air di NAD menunjukkan tersedia sepanjang tahun.

Lahan:

Pada hakekatnya budidaya ternak dapat dilakukan di semua lahan yang termasuk kedalam zona agroekologi. Secara operasional di setiap wilayah yang perlu diperhatikan dalam penyediaan lahan bagi ternak adalah status lahan dalam RUTR/RDTR. Khusus bagi ternak ruminansia, lahan tidak saja berfungsi menyediakan ruang jelajah, tetapi pada waktu yang bersamaan juga merupakan sumber ketersediaan pakan (hijauan, hasil sisa pertanian, hasil ikutan industri pertanian/perkebunan), dan air baik yang bersumber dari air presipitasi, air permukaan maupun air tanah.

Lahan yang lebih erat hubungannya dengan status kawasan adalah otorisasi atau penguasaan lahan dan tingkat pemanfaatannya, dalam arti penerapan teknologi, bagi budidaya ternak. Dengan demikian lahan ini lebih memungkinkan untuk dijadikan sebagai variabel penciri atau setidaknya tidaknya sebagai peneguh tingkatan status suatu kawasan.

Kawasan peternakan rakyat (*small holder*) pada umumnya masih terintegrasi pada lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak lain secara yuridis formil merupakan otorisasi non-peternakan. Otorisasi lahan dapat berupa hak milik, hak sewa, maupun HGU, dan telah dimanfaatkan secara khusus untuk menghasilkan sarana produksi ternak misalnya pakan hijauan dan biji-bijian.

Hijauan Makanan Ternak:

Rumput merupakan jenis hijauan yang paling terjamin ketersediaannya, yang diperoleh baik dari kebun sendiri, lahan penggembalaan umum, maupun kebun/ladang orang lain. Jenis rumput yang paling dominan di NAD adalah rumput gajah (*Penisetum purpureum*). Selain produksinya cukup tinggi, yaitu sekitar 80 ton/thn/ha, rumput ini juga mempunyai komposisi nutrisi yang cukup baik. Walaupun rumput sampai saat ini ketersediaannya terjamin, sampai saat ini belum ada pengaturan dalam pemanfaatan lahan penanaman rumput, sehingga dikhawatirkan ketersediaannya semakin menurun, terutama dalam penyediaan rumput di musim kemarau. Kebutuhan ternak yang jumlahnya sekitar 10% dari bobot badan, menyebabkan keberadaannya harus direncanakan dengan baik.

Pabrik Pakan:

Peternak secara umum belum menerapkan teknologi, baik untuk teknologi pengawetan maupun teknologi pengolahan pakan. Teknologi pengawetan pakan seperti pembuatan *hay* dan *silase* untuk ruminansia belum banyak dikenal. Peternak juga belum mengetahui nilai gizi dari bahan makanan yang diberikan, sehingga belum mengerti penggunaan pakan alternatif dan pembuatan ransum komplit.

Oleh karena itu, keberadaan pabrik pakan mini yang mampu meramu bahan baku lokal menjadi ransum komplit dengan nilai gizi yang lebih seimbang sangat dibutuhkan. Hal ini lebih dipacu karena minat peternak terhadap peningkatan keterampilan beternak khususnya dalam pelatihan pengelolaan pakan cukup tinggi, terutama untuk bisa membuat campuran pakan dan penggunaan pakan alternatif.

Selain itu, pakan merupakan salah satu sarana produksi peternakan yang sangat strategis. Tidak saja karena kecukupan dan mutunya yang secara langsung berkorelasi dengan performansi ternak, tetapi juga karena hampir 70 – 80% biaya produksi berasal dari komponen pakan.

Bibit:

Untuk jangka pendek, ketersediaan bibit dapat dipenuhi dari sentra-sentra ternak di luar NAD, tetapi jangka panjang harus bisa menyediakan bibit ternak sendiri, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan yang akan menghambat perkembangan peternakan di NAD. Bibit ternak merupakan cetak biru peternakan, sehingga arah pengembangan peternakan NAD tergantung pada kualitas dan kuantitas bibit.

Budidaya Pertanian:

Selain rumput, sumber bahan baku pakan yang paling banyak jumlahnya adalah hasil pertanian. Limbah sayuran dan jerami jagung merupakan jenis hijauan yang tersedia di NAD.

Pengolahan Hasil Pertanian:

Beberapa hasil pertanian primer tidak bisa langsung diberikan kepada ternak, karena secara ekonomis terlalu mahal, misalnya kacang kedele. Kacang kedele oleh petani diolah menjadi tahu atau kecap dan limbah dari tahu itu kemudian dijadikan bahan baku untuk pakan ternak. Ini berarti bahwa pengolahan hasil pertanian menghasilkan limbah yang dapat dijadikan pakan ternak sebagai pakan pelengkap hijauan makan ternak (konsentrat).

Perkembangan pengolahan hasil pertanian merupakan turunan dari perkembangan budidaya pertanian. Oleh karena itu, dalam konteks kawasan, perkembangan pengolahan hasil pertanian dapat dijadikan indikator ketersediaan bahan baku pakan.

Toko Obat dan Sapronek:

Peternak belum mempunyai tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap obat (umumnya ruminansia). Padahal, persepsi yang baik terhadap obat ini merupakan faktor pendorong keberhasilan beternak, sehingga jika ketersediaannya mudah diperoleh, peternak akan melakukan pencegahan daripada pengobatan.

Budidaya Ternak:

Peternak masih membudidayakan ternak ruminansianya secara ekstensif. Ternak ini umumnya memiliki ukuran kerangka tubuh lebih kecil, pertumbuhan lebih lambat namun mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan NAD.

Sapi-sapi yang ditemui di NAS adalah bangsa sapi lokal, seperti sapi Bali, sapi Madura, dan sapi Peranakan Ongole (PO). Bangsa sapi lain yang bisa dibudidayakan di NAD yang sangat responsif terhadap pakan bermutu baik sehingga sangat cocok untuk dipelihara pada sistem pemeliharaan intensif dengan pemberian pakan konsentrat dan biji-bijian adalah bangsa sapi Simental, Limousin, Hereford, Angus, Charolais. Juga, sapi Fries Holand (FH) jantan merupakan jenis sapi perah dengan kerangka tubuh lebih besar yang dapat digunakan sebagai sapi pedaging.

Teknologi yang diterapkan adalah teknologi budidaya tepat guna yang sesuai dengan agroekosistem dan kebutuhan peternak. Mulai dari seleksi sapi bakalan dan penggemukannya, sistem pemeliharaan (padang penggembalaan dan intensif), sistem pemberian pakan dengan pakan utama hijauan dan konsentrat, metoda pengendalian penyakit, dan penanganan limbah.

Pengolahan Hasil dan Limbah:

Pada saat ini diversifikasi pengolahan pangan asal daging teknologi lokal sudah ada di NAD, namun belum ada yang melakukan pengolahan hasil ternak dengan teknologi modern, begitu juga dengan teknologi pemotongan ternak. Oleh karena itu, usaha pemotongan ternak (RPH) dan hasil ternak modern perlu dikembangkan.

Limbah ternak bila diolah merupakan sumberdaya yang sangat potensial terutama sebagai pupuk organik yang dapat menunjang usaha pertanian. Selama ini penanganan limbah masih belum dilakukan secara baik dan optimal. Limbah yang dikeluarkan dari kandang berupa limbah padat dan cair. Limbah padat yang dikeluarkan dari kandang pada umumnya berupa sisa hijauan pakan dan kotoran ternak. Limbah cair yang keluar umumnya tidak ditangani, karena peternak tidak memiliki kolam penampungan limbah. Oleh karena itu, pengolahan limbah merupakan komponen penting, karena sebagai asupan terhadap usaha pertanian yang hasilnya merupakan asupan bagi ternak sapi sebagai bahan baku pakan. Alternatif yang bisa dikembangkan adalah sistem pengomposan untuk limbah padat dan pupuk organik cair dengan cara fermentasi untuk limbah cair untuk dipakai di kawasan dalam menghasilkan produk-produk organik.

Pasar Ternak:

Pasar hewan berfungsi sebagai penampung dan distribusi ternak hidup. Juga, diperlukan untuk memperlancar distribusi, pemasaran dan informasi serta transportasi. Semakin dekatnya pasar ternak dengan konsumen, efisiensi ekonomis akan tercipta yang akan mendorong percepatan perkembangan peternakan.

Pelayanan Teknis:

Petugas yang diperlukan dalam pengembangan peternakan meliputi tenaga pendamping, khususnya yang terampil dalam pengamanan budidaya (kesehatan dan pakan) dan pemberdayaan petani peternak. Kebutuhan tenaga pendamping bersifat kebutuhan aksesibilitas, yaitu tingkat aksesibilitas yang baik dari kawasan untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga pendamping.

Kelembagaan Model :

Dalam kerangka kelembagaan, komponen-komponen yang menjadi tolok ukur meliputi: (1) sifat kepemilikan (*property right*) sumberdaya kawasan; (2) batas-batas kewenangan (*jurisdictional boundry*) para pemilik dalam memanfaatkan sumberdaya kawasan; dan (3) aturan-aturan perwakilan (*rules of representation*) apabila sumberdaya tersebut bukan milik individu melainkan oleh kelompok. Kontribusi utama kelembagaan dalam proses pembangunan kawasan adalah kemampuannya dalam mengkoordinasi para pemilik input produksi (lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi) dalam proses transformasi dari input menjadi output. Disamping itu juga berperan dalam koordinasi distribusi output kepada pemilik input baik individu, kelompok masyarakat, organisasi, pemerintah, maupun perusahaan swasta.

Pemerintah Daerah:

Pemerintah Daerah merupakan pengguna utama dari model ini. Sebagai penguasa wilayah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban secara aktif berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan dari model ini. Hal ini karena kemandirian dari kawasan ini nantinya ditunjukkan oleh kemampuan kawasan itu mengelola dirinya. Oleh karena itu, fungsi dan kontribusi Pemerintah Daerah adalah:

1. **Penyedia lahan untuk P2BP:** Pemerintah Daerah sudah seharusnya menumbuhkan perekonomian wilayah dengan melakukan penguatan dan pelengkapan fasilitas serta pembangunan fisik dengan meningkatkan efektifitas dan produktivitas lahan yang dimiliki.
2. **Pembangunan fasilitas dan infrastruktur P2BP dan Kawasan:** Ketersediaan fasilitas dan kualitas infrastruktur merupakan faktor penentu dan prasyarat mutlak pembangunan peternakan.
3. **Pelayanan Teknis:** Melalui tenaga profesional yang dimiliki, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan teknis, baik dalam pengembangan usaha ternak maupun pengembangan Kawasannya.
4. **Penyedia dana pendampingan:** Dana pendamping diperlukan untuk memberikan insentif bagi pendamping model ini.
5. **Memfasilitasi penyediaan bibit:** Bibit yang berasal dari balai bibit atau usaha pembibitan yang berada di dalam atau di luar wilayah Pemerintah Daerah harus difasilitasi sehingga nilai tambah bisa diperoleh oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, yakni bekerjasama dengan swasta atau koperasi.
6. **Membuat kebijakan:** Kebijakan yang memberikan iklim yang kondusif terhadap pengembangan kawasan dan sektoral.

Perguruan Tinggi:

Perguruan Tinggi dalam model ini lebih berperan sebagai konduktor. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus mampu menjadi mitra inovatif bagi lembaga lain, sehingga fungsi dan kontribusinya sebagai berikut:

1. **Menyediakan tenaga ahli:** Perguruan Tinggi memberikan konsultasi keahlian dan memberikan rekomendasi berdasarkan kajian lapangan, baik terhadap Pemerintah Daerah maupun Dinas Peternakan.
2. **Alih teknologi:** Teknologi baru yang bersifat lokal dan ekonomis harus ditransfer ke peternak melalui P2BP.
3. **Penyiapan tenaga pendamping P2BP:** Kualifikasi dan rekrutmen pendamping dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk memberikan kinerja yang maksimal.
4. **Desain program pengembangan kawasan:** Program pengembangan yang merupakan implementasi dari model didesain secara lokal dan bertahap mengacu pada model itu sendiri.

5. **Sosialisasi program:** Program harus dipahami dan diketahui oleh semua stakeholder kawasan untuk mempercepat proses pengembangan. Berbagai jalur dan bentuk sosialisasi dapat dilakukan melalui koordinasi aktif dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Peternakan.
6. **Monitoring dan evaluasi program dan pelaporan:** Pemantauan perkembangan dan penyempurnaan terus-menerus dilakukan untuk mengurangi tingkat kegagalan.
7. **Desain pelatihan dan penyuluhan:** Kegiatan pelatihan dan penyuluhan dirancang secara khusus sesuai dengan kondisi lokal.
8. **Pengembangan jaringan:** Pengembangan jaringan kawasan dan jaringan usaha merupakan prasyarat menuju kawasan modern yang terbuka dan terus tumbuh berkembang.
9. **Penelitian dan pengembangan:** Secara terus menerus, pengembangan kawasan berbasis pada kajian-kajian lapangan yang diperoleh secara ilmiah.
10. **Desain P2BP:** Sebagai sentra pengembangan kawasan harus mampu menggerakkan dan mengakomodasi berbagai sumberdaya lokal.

Dinas Peternakan:

Dinas Peternakan dalam hal ini berperan sebagai inisiator sekaligus sebagai regulator. Oleh karena itu, fungsi dan kontribusinya adalah:

1. **Pengembangan kebijakan sektoral:** Pembangunan sistem dan usaha agribisnis berbasis pertanian dan peternakan merupakan mandat utama yang harus mampu menumbuhkan perekonomian regional dan nasional.
2. **Penyediaan dana pengembangan:** Anggaran biaya mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan dalam setiap program pembangunan.
3. **Alih teknologi:** Teknologi baru yang bersifat lokal dan ekonomis harus ditransfer ke peternak dan ke P2BP.

Swasta/Koperasi:

Pada tahap awal pengembangan model ini, peran Swasta/Koperasi tidak begitu nampak. Hal ini karena pada tahap ini, masih pada pelengkapan dan penguatan serta pembangunan kawasan, belum pada bisnisnya yang sebagian besar merupakan kegiatan utama dari Swasta/Koperasi. Namun pada tahap selanjutnya, peran lembaga ini akan semakin besar, antara lain adalah:

1. **Penyediaan modal:** Lembaga keuangan secara aktif mengelola perputaran uang dalam kawasan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan peternakan.
2. **Penyediaan sarana produksi:** Sarana produksi seperti bibit, pakan, dan obat lebih ekonomis jika dikelola oleh Swasta/koperasi dibandingkan oleh peternak itu sendiri.
3. **Pembinaan pemasaran:** Kemampuan menyerap hasil produksi peternak mempercepat pertumbuhan kawasan.
4. **Pengolahan hasil:** Nilai tambah yang besar dari kegiatan ini akan menciptakan peluang bisnis baru bagi Swasta/Koperasi.

Program Model

Program model meliputi program bidang Sumberdaya Manusia, Kesejahteraan, Pelayanan dan Kelembagaan. Program dari masing-masing bidang tersebut adalah:

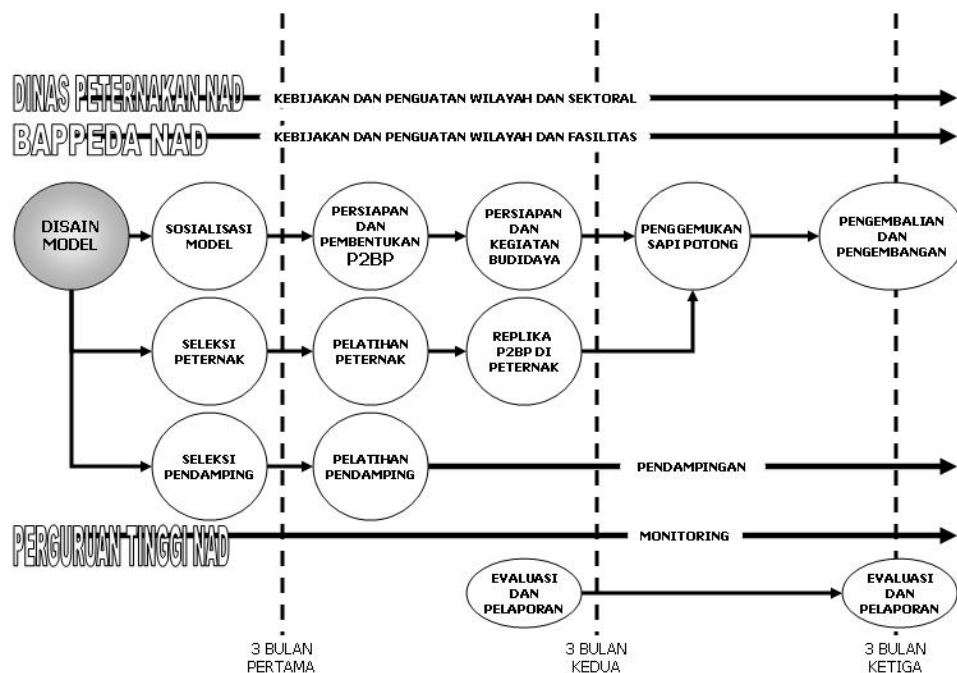
1. Program bidang sumberdaya manusia:

- Pelatihan dan pengembangan peternak untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan
 - Penumbuhan Wirausaha Baru bidang peternakan
 - Studi banding pengembangan peternakan
2. Program bidang kesejahteraan:
- Pengembangan dan diversifikasi usaha
 - Peningkatan produktivitas dan pendapatan, efisiensi.
3. Program bidang pelayanan:
- Penyediaan fasilitas dan peningkatan kualitas
 - Pendampingan
 - Introduksi teknologi budidaya, alih teknologi, penyedia teknologi
4. Program bidang kelembagaan:
- Penyusunan kebijakan
 - Peningkatan keterpaduan dan koordinasi

Tahapan:

Pada tahap awal, konsentrasi kegiatan adalah pada pelengkapan perangkat utama dari model, yaitu pembentukan P2BP, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga (PT, PEMDA-BAPPEDA, DISNAK) harus dilakukan dengan intensitas yang tinggi, sekaligus sebagai proses sosialisasi.

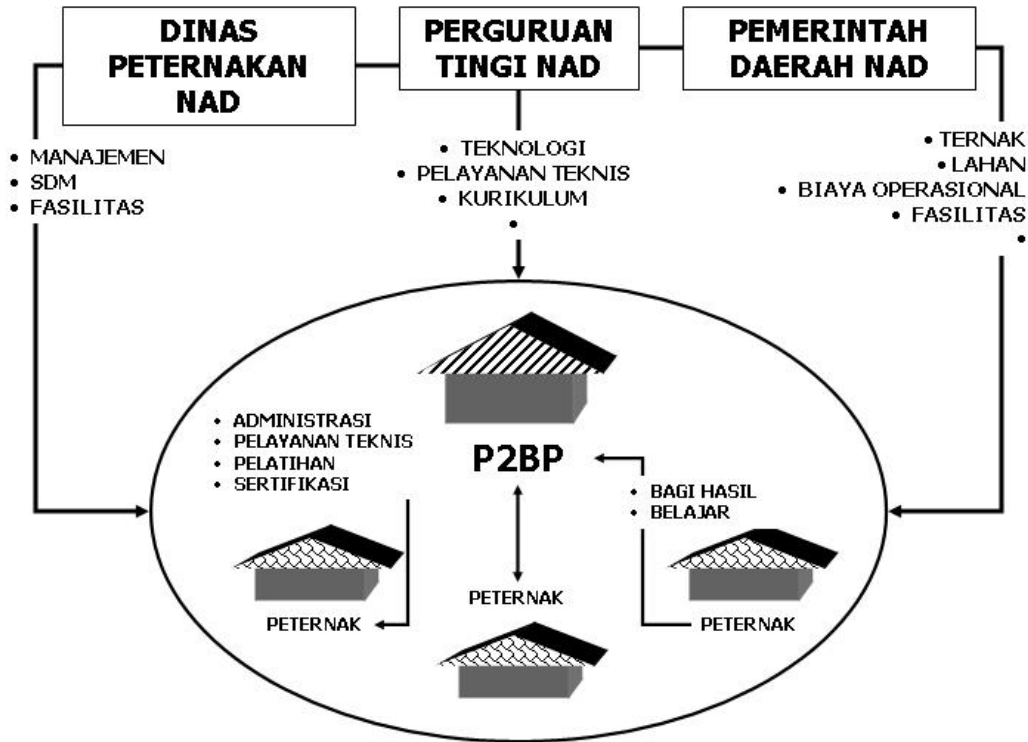
Secara paralel, seleksi peternak dan pendamping serta pelengkapan struktur organisasi P2BP dilakukan bersamaan dengan sosialisasi. Berdasarkan persetujuan PEMDA, pembangunan fisik P2BP dimulai, baru kemudian kegiatan produksi dan pelatihan dilaksanakan. Kemudian, replika P2BP di peternak bisa dibuat berdasarkan rekomendasi dari P2BP. Akhirnya, kegiatan usaha ternak dilakukan oleh peternak yang telah mendapat sertifikasi dari P2BP.



Gambar 5. Tahapan Implementasi Model Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan

Mekanisme Pengembangan Ternak:

Mekanisme pengembangan ternak dilakukan oleh peternak dan P2BP. Peternak yang disertakan dalam model ini merupakan peternak yang telah memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh P2BP.



Gambar 6. Mekanisme Pengembangan Ternak

Konsep P2BP

Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan (P₂PB) adalah suatu model pembinaan bisnis peternakan yang berada dalam model untuk calon peternak andalan. P2BP selain sebagai pusat pembelajaran yang memiliki kurikulum baku, juga menjadi pusat konsultasi peternak pasca mengikuti program pembelajaran.

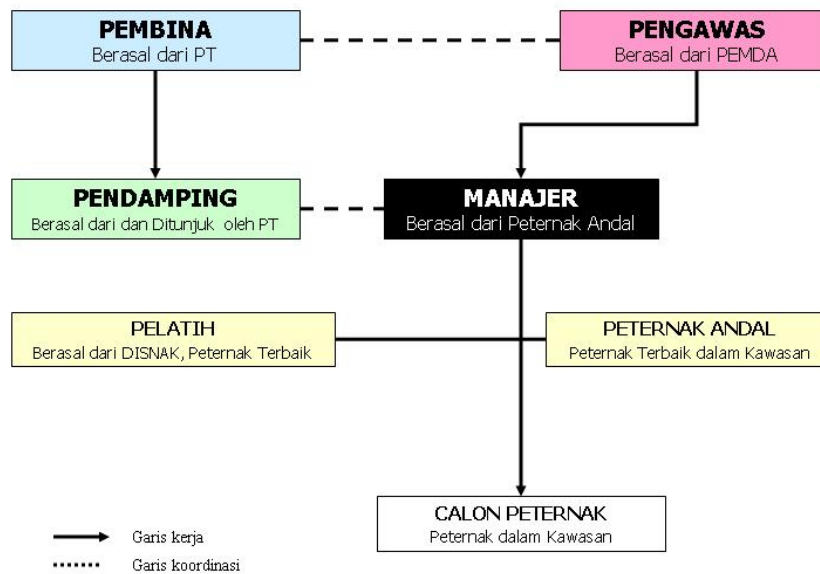
Fungsi utama dari P₂PB adalah melakukan perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan perilaku peternak dalam berusahaternak. Fungsi lainnya adalah dalam hal, Pelatihan, Pemagangan, Kegiatan budidaya, Pengumpulan data dan informasi, *Quality control*, dan Pelaksanaan pengembangan usaha.

Tujuan dari P₂PB adalah untuk mendidik calon peternak menjadi peternak terstandarisasi dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku kewirausahaan, sebagai pusat percontohan pembinaan dan pengembangan peternakan, dan dalam jangka panjang dapat menjadi cikal bakal pendirian Sekolah Bisnis Peternakan (SBP).

Keunikan dari P₂PB adalah P₂PB merupakan pusat pembinaan yang berada di kawasan peternak, sehingga tercipta suasana kondusif bagi peternak dalam mengadopsi ilmu dan pengetahuan secara efektif dan efisien. Juga, tatalaksana pemeliharaan ternak yang terstandar, dan pengelolaan P₂PB berasal dari, oleh dan untuk peternak..

Manajemen:

Pengelolaan P₂PB berbasis pada kemampuan peternak lokal dalam adopsi teknologi baru yang bisa dikembangkan.



Gambar 7. Struktur Kelembagaan Pusat Pembelajaran Bisnis Peternakan

Deskripsi Tugas:

1. **Pembina:** Jabatan Pembina ini berasal dari Perguruan Tinggi dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi dan masukan teknologi dalam pengembangan model
 - b. Membuat kurikulum pendidikan dan pelatihan di P₂BP
 - c. Melakukan kajian-kajian dan uji coba teknis lapangan spesifik dan lokal
2. **Pengawas:** Jabatan pengawas ini berasal dari PEMDA-BAPPEDA dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan P₂BP
 - b. Memberikan masukan kepada Pembina mengenai jalannya pelaksanaan P₂BP
3. **Pendamping:** Berasal dan ditunjuk oleh Perguruan Tinggi dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Sebagai mitra kerja manajer dalam pelaksanaan P₂BP
 - b. Mendampingi dan memberi masukan atas jalannya pelaksanaan P₂BP
4. **Manajer:** Jabatan manajer ini berasal dari peternak andal yang berada dalam kawasan yang berfungsi sebagai berikut:
 - a. Mengelola pelaksanaan P₂BP
 - b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan P₂BP
 - c. Memberikan laporan kepada Pembina dan pengawas
5. **Pelatih:** Jabatan pelatih ini berasal dari PT, PEMDA-DISNAK, atau peternak terbaik dalam kawasan dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menjalankan P₂BP sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan
 - b. Mentransfer pengetahuan, sikap, dan perilaku kepada peternak.
6. **Peternak Andal:** Berasal dari peternak terbaik dalam kawasan dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Membantu manajer dalam bidang administrasi P₂BP

- b. Membantu calon peternak dalam hal-hal teknis
7. **Calon Peternak:** Berasal dari peternak dalam kawasan yang berfungsi sebagai berikut:
- a. Mengikuti proses pendidikan dan pelatihan di P₂BP
 - b. Menerapkan hasil pendidikan dan pelatihan di lokal kandangnya

Penyelenggaraan Pembelajaran dan Pengajaran dalam P2BP:

Kurikulum: Kurikulum yang digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran dan pengajaran di P2BP ini berbasis pada potensi sumberdaya lokal kawasan. Dalam kurikulum ini materi pembelajaran terdiri dari 20% teori dan 80% praktek.

Materi Pembelajaran: Materi yang diberikan dalam teori meliputi : tatalaksana pemeliharaan ternak (perkandangan, kebersihan, pencegahan penyakit dan pengobatan, mengawinkan), tatalaksana penanganan pakan dan pemberiannya, tatalaksana produksi hijauan pakan, tatalaksana penanganan pasca panen, tatalaksana penanganan limbah dan perencanaan usaha ternak. Materi dalam bentuk praktek sudah merupakan penggabungan seluruh teori yang diberikan yang diaplikasikan dalam kegiatan nyata.

Pengajar/Tutor: Pengajar/tutor terdiri dari dosen, penyuluh dan petani andal yang berasal dari sekitar kawasan.

Waktu Pembelajaran: Secara kurikuler peternak didik belajar di P2BP selama 25 hari, yaitu 6 hari teori dan 19 hari praktek. Jumlah jam tatap muka untuk setiap hari tidak lebih dari 4 jam pembelajaran (4 x 50 menit). Tetapi peternak bila masih merasa perlu dapat mengikuti pembelajaran pasca program untuk kegiatan praktek hingga 3 bulan.

Metode Pembelajaran: Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pengajaran adalah metode andragogik partisipatori, yaitu suatu metode pengajaran yang menempatkan peternak didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran (student centered) dan pengajar memposisikan diri sebagai fasilitator/tutor. Metode ini menempatkan peternak sebagai manusia dewasa yang berpengalaman. Peternak didik akan dirangsang dan difasilitasi untuk mengembangkan potensi dan pengalaman yang dimilikinya dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap cara-cara dan inovasi baru. Bentuk pembelajaran dengan metode ini lebih didominasi oleh kegiatan diskusi, simulasi dan dinamika kelompok dibandingkan kegiatan pembelajaran satu arah (linear teaching method).

Evaluasi Pembelajaran: Evaluasi adalah suatu kegiatan penilaian secara sistematis terhadap pembelajaran dan pengajaran dalam mencapai tujuan P2BP dan tujuan kurikuler (mata ajaran) serta instruksionalnya. Evaluasi pembelajaran diarahkan bagi keberhasilan peternak didik dalam menguasai materi dan proses pembelajarannya. Evaluasi pembelajaran juga diarahkan untuk mengetahui status pemahaman peternak terhadap materi yang diajarkan.

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan melalui tes lisan maupun tulisan, yang diorientasikan untuk mengetahui perubahan kemampuan peternak didik yang meliputi: (1) hafalan terhadap istilah-istilah praktis, (2) pemahaman terhadap tatalaksana yang diajarkan, (3) aplikasi inovasi yang disampaikan, (4) analisis dan sintesis terhadap masalah-masalah yang terjadi pada saat pemeliharaan ternak dan (5) menformulasikan tindakan apa yang harus dilakukan jika ada masalah.

Evaluasi pengajaran diarahkan pada keberhasilan pengajar/tutor dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki kurikulum dan proses serta manajemen pengajaran.

Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar kesiapan peternak didik dalam menerima bantuan ternak dari pemerintah.

Tracer Study: Untuk memantau keberhasilan program pembelajaran dan pengajaran di P2BP, akan dilakukan pencatatan (data base) alumni P2BP dan diadakan pertemuan-pertemuan dengan alumni. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan prestasi alumni serta mendapatkan umpan balik dari alumni untuk memperbaiki penyelenggaraan program pembelajaran dan pengajaran di P2BP.

Aplikasi: P2BP ini dapat diaplikasikan untuk mengembangkan ternak ruminansia (sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba) dan unggas (ayam kampung, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik) serta ternak eksotik atau ternak harapan (misalnya: rusa, kuda, burung, dan lainnya).

Model Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan

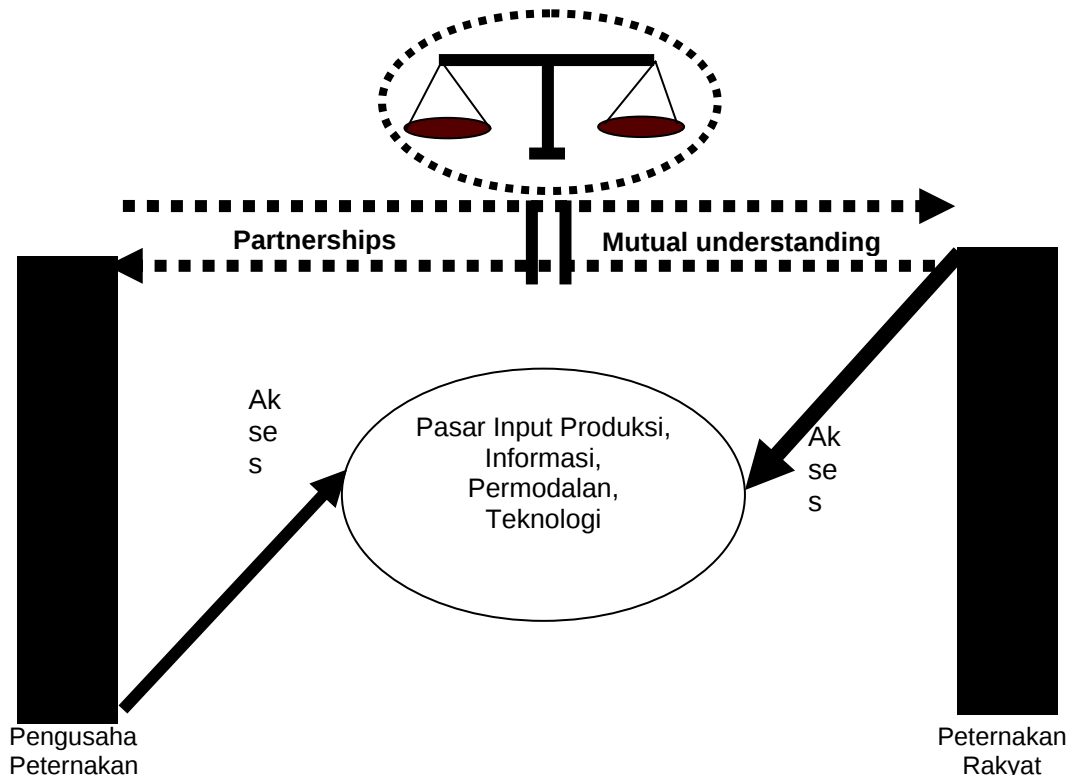
Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar yang disertai dengan pembinaan oleh usaha menengah atau usaha besar tersebut. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Secara ekonomi kemitraan hendaknya harus dapat dijelaskan dengan pemahaman berikut bahwa esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*proverty*) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian didistribusikan diantara pihak yang bermitra. Kemitraan usaha ditujukan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemampuan dan peranan usaha kecil dalam perekonomian nasional khususnya dalam mewujudkan usaha kecil sebagai usaha yang tangguh dan mandiri yang mampu menjadi tulang punggung dan mampu memperkokoh struktur perekonomian daerah yang berbasis pada komoditi peternakan.

Untuk memperoleh bentuk kemitraan yang ideal, dengan adanya nilai-nilai keseimbangan, keserasian dan keterpaduan antara pihak-pihak yang bermitra, maka diperlukan iklim yang kondusif berupa kebijakan pemerintah yang mendukung, kerjasama mutualisme yang saling menguntungkan antara peternak/kelompok peternak dengan pengusaha peternakan, adanya dukungan dan akses yang mudah dari perbankan untuk pemberian kredit kepada peternak. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan hasil kajian dan temuan lapangan, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Model yang tepat dari bentuk kemitraan yang dapat dikembangkan adalah bentuk kemitraan yang komponen-komponennya secara terintegrasi terdiri dari tiga unsur, yaitu (a) Petani/Kelompok Tani atau usaha kecil, (b) Pengusaha Besar atau eksportir, dan (c) Bank pemberi Kredit permodalan atau lembaga keuangan lainnya. Masing-masing pihak memiliki peranan di dalam Pola Kemitraan yang sesuai dengan bidang usahanya. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/usaha kecil dengan Pengusaha Pengolahan atau eksportir dalam Pola Kemitraan, dibuat seperti halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Petani/usaha kecil merupakan plasma dan Perusahaan Pengelolaan/Eksportir sebagai Inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikutsertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma.
2. Strategi dasar kemitraan usaha agribisnis peternakan hendaknya dijabarkan dalam bentuk kebijakan pengembangan dari pemerintah pusat dan daerah yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, efisiensi usaha dan berbasis pada pembangunan keunggulan wilayah. Pendekatan yang tepat yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama dalam wawasan koperasi. Hal ini terbukti bahwa dengan dasar kebersamaan maka kegiatan sosial ekonomi yang dijalankan akan mendorong kemandirian dan berkembang secara berkelanjutan. Usaha pembinaan yang perlu dilakukan adalah pembinaan secara bertahap, terus menerus dan terpadu antara lembaga-lembaga terkait (pemerintah, swasta dan koperasi) yang juga diarahkan untuk mencapai kemandirian.
3. Secara operasional dan teknis dilapangan, langkah-langkah untuk mengembangkan kegiatan usaha kemitraan ternak adalah harus diawali dengan pengidentifikasian dan pendekatan secara mitra dan kelompok kepada pelaku usaha untuk selanjutnya dibentuk wadah organisasi ekonomi. Dalam forum wadah tersebut dapat dilakukan analisis kebutuhan pelaku usaha secara tepat dan proporsional. Dengan dasar tersebut maka perumusan bentuk kemitraan dan kepastian kesanggupan menjalin kemitraan dari setiap komponen yang terkait dapat dipastikan. Apabila hal tersebut sudah dilakukan sepenuhnya, maka kesepakatan kemitraan yang dibuat hendaknya diikat dalam bentuk kontrak atau perjanjian kemitraan secara formal.

Filosofi Dasar Model Kemitraan Usaha Peternakan

Model Kemitraan Usaha Ternak Unggas Ras dan Ruminansia harus melibatkan usaha besar (inti), usaha kecil (plasma) dengan melibatkan bank sebagai pemberi kredit dalam suatu ikatan kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepakatan. Hal ini bertujuan antara lain adalah untuk meningkatkan kelayakan plasma, meningkatkan keterkaitan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara inti dan plasma, serta membantu bank dalam meningkatkan kredit usaha kecil secara lebih aman dan efisien. Dalam melakukan kemitraan hubungan kemitraan, perusahaan inti (Industri Pengolahan atau Eksportir) dan petani plasma/usaha kecil mempunyai kedudukan hukum yang setara. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan oleh perusahaan inti, dimulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis dan pemasaran hasil produksi.



Gambar 8. Filosofi Dasar Kemitraan Usaha Peternakan

Kemitraan Usaha Ternak Unggas dan Ruminansia harus diarahkan sebagai kerjasama kemitraan dalam bidang usaha melibatkan tiga unsur, yaitu (a) Petani/Kelompok Tani atau usaha kecil, (b) Pengusaha Besar atau eksportir, dan (c) Bank pemberi Kredit permodalan atau lembaga keuangan lainnya. Masing-masing pihak memiliki peranan di dalam Pola Kemitraan yang sesuai dengan bidang usahanya. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/usaha kecil dengan Pengusaha Pengolahan atau eksportir dalam Pola Kemitraan, dibuat seperti halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Petani/usaha kecil merupakan plasma dan Perusahaan Pengelolaan/Eksportir sebagai Inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikutsertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma.

Berdasarkan hasil kajian dari beberapa profil kemitraan usaha peternakan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka Model kemitraan yang diharapkan dapat dikembangkan sebaiknya dapat diperankan oleh komponen-komponen dalam Pola Kemitraan dimaksud seperti diuraikan sebagai berikut :

1. Petani peternak plasma. Sesuai keperluan, petani yang dapat ikut dalam kegiatan kemitraan ini bisa terdiri atas :

- Petani yang akan menggunakan lahan usaha pertaniannya untuk penanaman dan perkebunan atau usaha kecil lain, dengan demikian untuk kelompok ini dapat dimulai dari penyiapan lahan dan penanaman atau penyiapan usaha,
- Petani /usaha kecil yang telah memiliki usaha tetapi dalam keadaan yang perlu ditingkatkan dalam untuk itu memerlukan bantuan modal. Kegiatan dimulai dari telah adanya kebun atau usaha yang berjalan, dalam batas masih bisa ditingkatkan produktivitasnya dengan perbaikan pada aspek usaha.

Luas lahan atau skala usaha bisa bervariasi sesuai luasan atau skala yang dimiliki oleh masing-masing petani/usaha kecil. Pada setiap kelompok tani/kelompok usaha, ditunjuk seorang Ketua dan Sekretaris merangkap Bendahara. Tugas Ketua dan Sekretaris Kelompok adalah mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan oleh para petani anggotanya, didalam mengadakan hubungan dengan pihak Koperasi dan instansi lainnya yang perlu, sesuai hasil kesepakatan anggota. Ketua kelompok wajib menyelenggarakan pertemuan kelompok secara rutin yang waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok.

2. Koperasi. Para petani/usaha kecil plasma sebagai peserta suatu bentuk kemitraan sebaiknya menjadi anggota suatu koperasi primer di tempatnya. Koperasi bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu plasma di dalam pembangunan usaha sesuai keperluannya. Fasilitas Kredit hanya bisa diperoleh melalui keanggotaan koperasi. Koperasi yang mengusahakan kredit harus sudah berbadan hukum dan memiliki kemampuan serta fasilitas yang cukup baik untuk keperluan pengelolaan administrasi pinjaman kredit para anggotanya.
3. Perusahaan Besar dan Pengelola/Eksportir. Suatu Perusahaan dan Pengelola/Eksportir yang bersedia menjalin kerjasama sebagai inti dalam pola usaha kemitraan ini harus memiliki kemampuan dan fasilitas pengolahan untuk bisa melakukan ekspor, serta bersedia membeli seluruh produksi dari plasma untuk selanjutnya diolah di pabrik dan atau diekspor. Disamping ini, perusahaan inti perlu memberikan bimbingan teknis usaha dan membantu dalam pengadaan sarana produksi untuk keperluan petani plasma/usaha kecil.

Apabila Perusahaan Mitra tidak memiliki kemampuan cukup untuk mengadakan pembinaan teknis usaha, kegiatan usaha kemitraan tetap akan bisa dikembangkan dengan sekurang-kurangnya pihak Inti memiliki fasilitas pengolahan untuk pemasaran produk, hal ini penting untuk memastikan adanya pemasaran bagi produksi petani atau plasma. Meskipun demikian petani plasma/usaha kecil dimungkinkan untuk mengolah hasil panennya, yang kemudian harus dijual kepada Perusahaan Inti. Dalam hal perusahaan inti tidak bisa melakukan pembinaan teknis, kegiatan pembimbingan harus dapat diadakan oleh Koperasi dengan memanfaatkan bantuan tenaga pihak Dinas terkait atau lainnya yang dikoordinasikan oleh Koperasi. Apabila koperasi menggunakan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), perlu mendapatkan persetujuan Dinas terkait setempat dan koperasi memberikan bantuan biaya yang diperlukan.

Koperasi juga bisa memperkerjakan langsung tenaga-tenaga teknis yang memiliki keterampilan dibidang usaha ternak untuk membimbing petani/usaha kecil dengan dibiayai sendiri oleh Koperasi. Tenaga-tenaga ini bisa diberi honorarium oleh Koperasi yang bisa kemudian dibebankan kepada petani, dari hasil penjualan secara proposional menurut besarnya produksi. Sehingga makin tinggi produksi petani/usaha kecil, akan semakin besar pula honor yang diterimanya.

4. Bank. Bank berdasarkan adanya kelayakan usaha dalam kemitraan antara pihak Petani Plasma dengan Perusahaan Inti dan atau Pengolahan/Eksportir, dapat kemudian melibatkan diri untuk biaya investasi dan modal kerja pembangunan atau perbaikan kebun. Disamping mengadakan pengamatan terhadap kelayakan aspek-aspek budidaya/produksi yang diperlukan, termasuk kelayakan keuangan. Pihak bank di dalam mengadakan evaluasi, juga harus memastikan bagaimana pengelolaan kredit dan persyaratan lainnya yang diperlukan sehingga dapat menunjang keberhasilan proyek. Skim kredit yang akan digunakan untuk pembiayaan ini, bisa dipilih berdasarkan besarnya tingkat bunga yang sesuai dengan bentuk usaha tani ini, sehingga mengarah pada perolehannya pendapatan bersih petani yang paling besar.

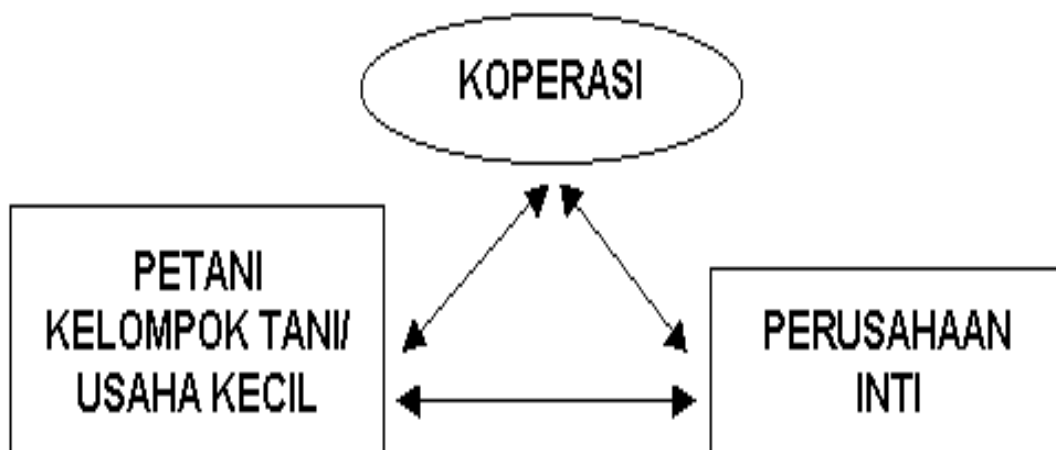
Dalam pelaksanaannya, Bank harus dapat mengatur cara petani plasma akan mencairkan kredit dan mempergunakannya untuk keperluan operasional lapangan, dan bagaimana petani akan

membayar angsuran pengembalian pokok pinjaman beserta bunganya. Untuk ini, bank agar membuat perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan inti, berdasarkan kesepakatan pihak petani/kelompok tani/koperasi. Perusahaan inti akan memotong uang hasil penjualan petani plasma/usaha kecil sejumlah yang disepakati bersama untuk dibayarkan langsung kepada bank. Besarnya potongan disesuaikan dengan rencana angsuran yang telah dibuat pada waktu perjanjian kredit dibuat oleh pihak petani/Kelompok tani/koperasi. Perusahaan inti akan memotong uang hasil penjualan petani plasma/usaha kecil sejumlah yang disepakati bersama untuk dibayarkan langsung kepada Bank. Besarnya potongan disesuaikan dengan rencana angsuran yang telah dibuat pada waktu perjanjian kredit dibuat oleh pihak petani plasma dengan bank.

Bentuk/Pola Kerjasama Kemitraan

Kemitraan usaha ternak antara petani/kelompok tani/koperasi dengan perusahaan mitra, dapat dibuat dan dikembangkan menurut dua pola yaitu :

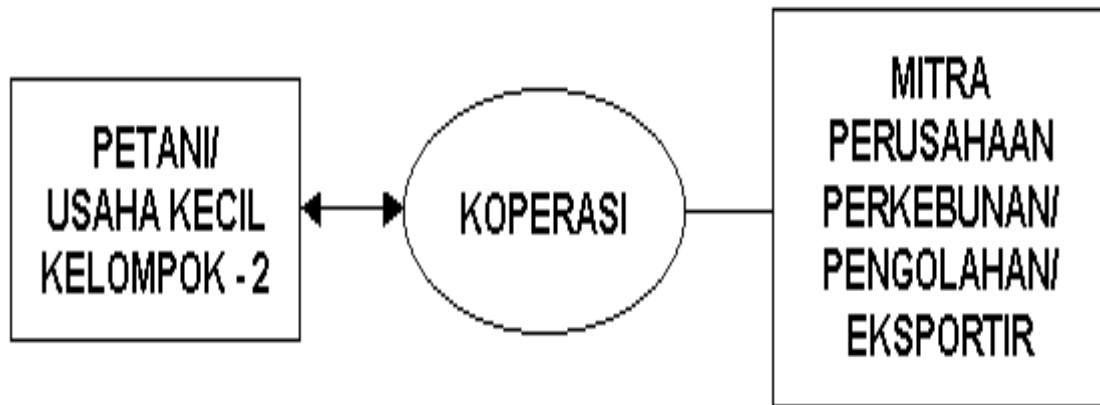
- a. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani mengadakan perjanjian kerjasama langsung kepada Perusahaan Inti/Pengolahan/ Eksportir.



Gambar 9. Pola Kerjasama Langsung antara petani peternak dalam koperasi yang tergabung dengan Perusahaan Inti

Dengan bentuk kerja sama seperti ini, pemberian kredit kepada petani peternak plasma dilakukan dengan kedudukan Koperasi sebagai Channeling Agent, dan pengelolaannya langsung ditangani oleh Kelompok tani. Sedangkan masalah pembinaan harus bisa diberikan oleh Perusahaan Mitra.

- b. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani, melalui koperasinya mengadakan perjanjian yang dibuat antara Koperasi (mewakili anggotanya) dengan perusahaan pengolahan /eksportir.



Gambar 10. Pola Kerjasama antara petani peternak dalam koperasi yang tergabung dengan Perusahaan Inti

Dalam bentuk kerjasama seperti ini, pemberian kredit kepada petani plasma dilakukan dengan kedudukan koperasi sebagai Executing Agent. Masalah pembinaan teknis budidaya tanaman/pengelolaan usaha, apabila tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Perusahaan Mitra, akan menjadi tanggung jawab koperasi.

Prasyarat Pelaksanaan Pola Kemitraan

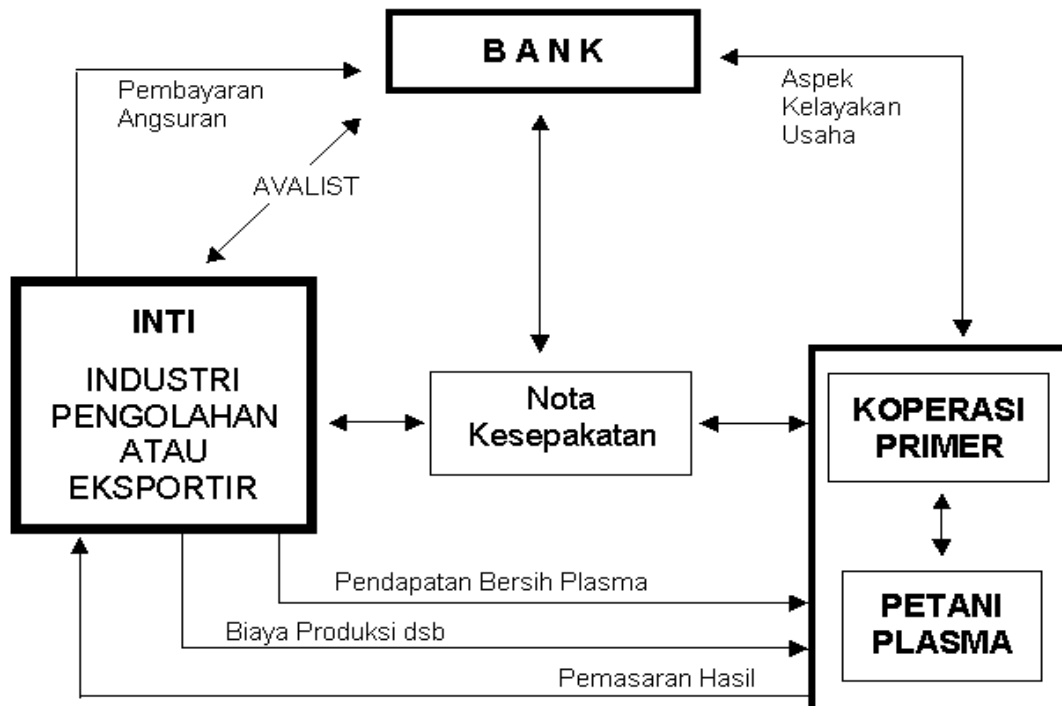
Untuk melihat bahwa pola kemitraan ini dikembangkan dengan sebaiknya dan dalam proses kegiatannya nanti memperoleh kelancaran dan keberhasilan, minimal dapat dilihat dari bagaimana pola kemitraan ini disiapkan. Kalau pola kemitraan ini mempergunakan kredit untuk modal usaha plasma, perintisannya dimulai dari :

- Adanya petani/pengusaha kecil yang telah menjadi anggota koperasi dan lahan pemilikannya akan dijadikan kebun/tempat usaha atau lahan kebun/usahanya sudah ada tetapi akan ditingkatkan produktivitasnya. Petani/usaha kecil tersebut harus menghimpun diri dalam kelompok dengan anggota sekitar 25 petani/kelompok usaha. Berdasarkan persetujuan bersama, yang didapatkan melalui pertemuan anggota kelompok, mereka bersedia atau berkeinginan untuk bekerja sama dengan perusahaan perkebunan/pengolahan/eksportir dan bersedia mengajukan permohonan kredit untuk keperluan peningkatan usaha;
- Adanya perusahaan perkebunan/pengolahan dan eksportir, yang bersedia menjadi mitra petani/usaha kecil, dan dapat membantu memberikan pembinaan teknik budidaya/produksi serta proses pemasarannya;
- Dipertemukannya kelompok tani/usaha kecil dan pengusaha /pengolahan dan eksportir tersebut, untuk memperoleh kesepakatan di antara keduanya untuk bermitra. Prakarsa bisa dimulai dari salah satu pihak untuk mengadakan pendekatan, atau ada pihak yang akan membantu sebagai mediator, peran konsultan bisa dimanfaatkan untuk mengadakan identifikasi dan menghubungkan pihak kelompok tani/usaha kecil yang potensial dengan perusahaan yang dipilih memiliki kemampuan tinggi memberikan fasilitas yang diperlukan oleh pihak petani/usaha kecil;
- Diperoleh dukungan untuk kemitraan yang melibatkan para anggotanya oleh pihak koperasi. Koperasi harus memiliki kemampuan di dalam mengorganisasikan dan mengelola administrasi yang berkaitan dengan pola kemitraan ini. Apabila keterampilan koperasi kurang, untuk peningkatannya dapat diharapkan nantinya mendapat pembinaan dari perusahaan mitra. Koperasi kemudian mengadakan langkah-langkah yang berkaitan dengan formalitas pola kemitraan sesuai fungsinya. Dalam kaitannya dengan penggunaan kredit, Koperasi harus mendapatkan persetujuan dari para anggotanya, apakah akan beritindak sebagai badan pelaksana (executing agent) atau badan penyalur (channeling agent);

- e. Diperolehnya rekomendasi tentang pengembangan pola kemitraan ini oleh pihak instansi pemerintah setempat yang berkaitan (Dinas Pertanian/Peternakan, Dinas Koperasi, Kantor Badan Pertanahan, dan Pemda);
- f. Lahan yang akan digunakan untuk usaha dalam pola kemitraan, harus jelas statusnya kepemilikannya bahwa sudah/atau akan bisa diberikan sertifikat dan buka merupakan lahan yang masih belum jelas statusnya yang benar ditanami/tempat usaha. Untuk itu perlu adanya kejelasan dari pihak Kantor Badan Pertanahan dan pihak instansi terkait lainnya.

Mekanisme Pelaksanaan Pola Kemitraan

Mekanisme Pola Kemitraan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian diarahkan dengan kerangka dasar sebagai berikut :



Gambar 11. Mekanisme Pola Kemitraan yang ideal dengan keterlibatan antara komponen petani, perbankan, perusahaan mitra yang jelas.

Bank pelaksana akan menilai kelayakan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip bank teknis. Jika proyek layak untuk dikembangkan, perlu dibuat suatu nota kesepakatan (Memorandum of Understanding = MoU) yang mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra (inti, Plasma/Koperasi dan Bank). Sesuai dengan nota kesepakatan, atas kuasa koperasi atau plasma, kredit perbankan dapat dialihkan dari rekening koperasi/plasma ke rekening inti untuk selanjutnya disalurkan ke plasma dalam bentuk sarana produksi, dana pekerjaan fisik, dan lain-lain. Dengan demikian plasma tidak akan menerima uang tunai dari perbankan, tetapi yang diterima adalah sarana produksi pertanian yang penyalurannya dapat melalui inti atau koperasi. Petani plasma melaksanakan proses produksi. Hasil tanaman plasma dijual ke inti dengan harga yang telah disepakati dalam MoU. Perusahaan inti akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk diserahkan kepada bank sebagai angsuran pinjaman dan sisanya dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Peternakan

Untuk melegalisasikan kerja sama kemitraan ini, perlu dikukuhkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama berdasarkan

kesepakatan mereka. Dalam perjanjian kerjasama itu dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang menjalin kerja sama kemitraan itu. Perjanjian tersebut memuat ketentuan yang menyangkut kewajiban pihak Mitra Perusahaan (Inti) dan petani/usaha kecil (plasma) antara lain sebagai berikut :

a. Kewajiban Perusahaan Pengolahan/Eksportir sebagai mitra (inti) :

- Memberikan bantuan pembinaan budidaya/produksi dan penanganan hasil;
- Membantu petani di dalam menyiapkan lahan, pengadaan sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan), dan bimbingan teknis lainnya;
- Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca panen untuk mencapai mutu yang tinggi;
- Melakukan pembelian produksi petani plasma;
- Membantu petani plasma dan bank di dalam masalah pelunasan kredit bank (kredit) dan bunganya, serta bertindak sebagai avalis dalam rangka pemberian kredit bank untuk petani plasma.

b. Hak Perusahaan Mitra adalah :

- Mendapatkan seluruh hasil panen dan menjamin pemasaran dengan cara membeli untuk kepentingan sendiri dan menjual hasil panen ke pihak lain.
- Menentukan jadwal masuknya bibit, antara satu dengan yang lainnya untuk mengatur kontinuitas produksi, mengatur panen dan berat panen yang sesuai dengan selera pasar.
- Menentukan umur dan berat badan ternak pada saat panen yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasar.

c. Kewajiban petani peserta sebagai plasma :

- Menyediakan lahan pemilikannya untuk budidaya;
- Menghimpun diri secara berkelompok dengan petani tetangganya yang lahan usahanya berdekatan dan sama-sama ditanami;
- Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca-panen untuk mencapai mutu hasil yang diharapkan;
- Menggunakan sarana produksi dengan sepenuhnya seperti yang disediakan dalam rencana pada waktu mengajukan permintaan kredit;
- Menyediakan sarana produksi lainnya, sesuai rekomendasi budidaya oleh pihak Dinas pertanian/peternakan/instansi terkait setempat yang tidak termasuk di dalam rencana waktu mengajukan permintaan kredit;
- Melaksanakan pemungutan hasil (panen) dan mengadakan perawatan sesuai petunjuk Perusahaan Mitra untuk kemudian seluruh hasil panen dijual kepada Perusahaan Mitra ; dan
- Pada saat penjualan hasil petani akan menerima pembayaran harga produk sesuai kesepakatan dalam perjanjian dengan terlebih dahulu dipotong sejumlah kewajiban petani melunasi angsuran kredit bank dan pembayaran bunganya.

b. Hak petani peserta sebagai plasma :

- Memperoleh sarana produksi ternak secara kredit yang akan dibayar pada saat panen.
- Memperoleh bimbingan teknis dan alih teknologi serta pengembangan dari perusahaan mitra untuk usaha budidaya peternakan dan bekerjasama dengan perusahaan mitra.
- Menolak sarana produksi peternakan yang diserahkan oleh perusahaan mitra apabila kualitas sarana produksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan standar mutu yang disepakati.

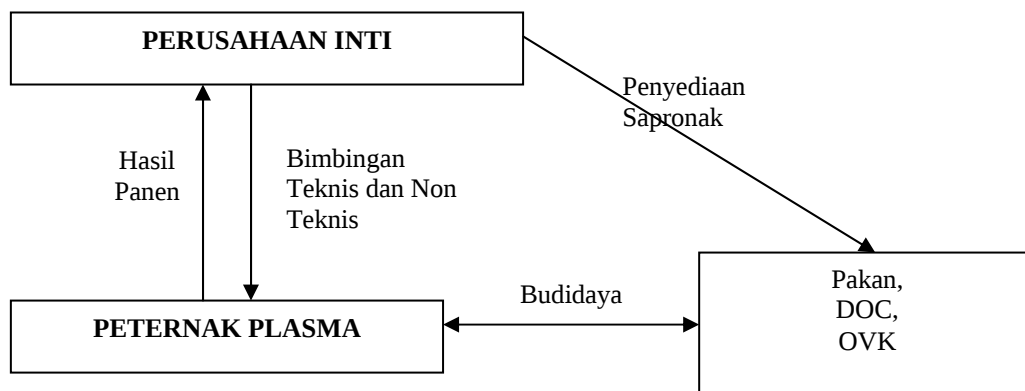
- Menerima pembayaran dari perusahaan mitra terhadap penyerahan hasil produksi yang dilakukan secara tepat waktu.
- Memperoleh bonus apabila berprestasi dalam menjalankan usaha.
- Membatalkan kerjasama apabila perusahaan mitra melakukan ingkar janji terhadap prestasi yang telah diperjanjikan.

Yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara adil yang mencerminkan hubungan kerja yang saling menguntungkan dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerja. Namun demikian, hal lainnya yang juga tidak kalah penting adalah adanya parameter keberhasilan usaha yang diindikasikan melalui harga dari sarana produksi ternak seperti bibit, pakan, obat-obatan, hasil panen dan tenaga kerja, serta parameter teknis yang meliputi angka kematian, angka konversi pakan, berat panen, lama pemeliharaan dan lain-lain. Apabila parameter teknis tersebut mampu dilakukan dengan baik oleh peternak, maka sangat wajar jika ada penghargaan dalam bentuk bonus/insentif sebagai imbalan jasa yang diterima baik oleh perusahaan mitra maupun peternak/kelompok peternak.

Model Kemitraan Usaha Peternakan

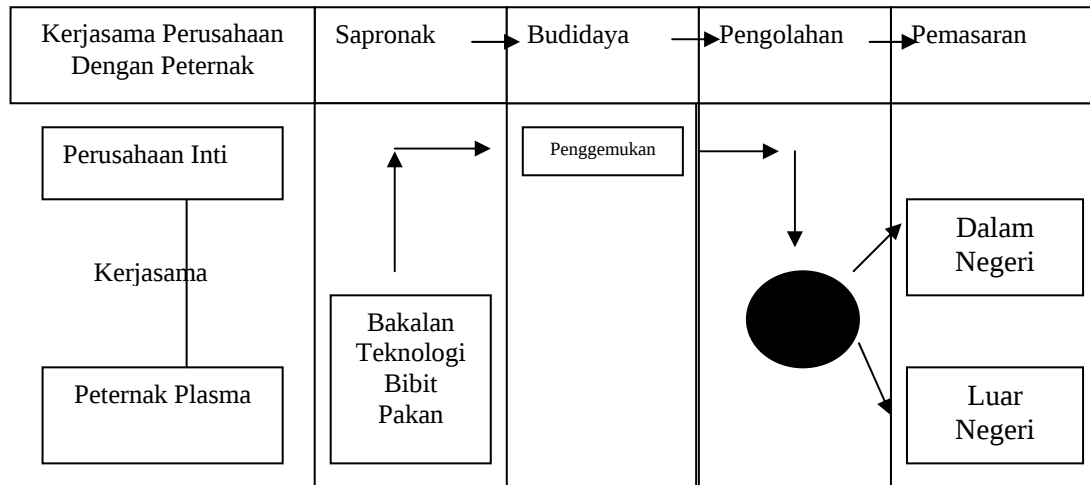
Dari Uraian di atas, untuk komoditas ruminansia dan unggas, secara spesifik rumusan model kemitraan usahanya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Rumusan Model kemitraan pada komoditi ternak unggas ras diindikasikan bahwa kerangka dasar pola kemitraannya terdiri dari komponen inti dan plasma, dimana perusahaan inti bertindak sebagai penyedia sarana produksi ternak, pemasaran hasil panen, membantu permodalan dan memberikan bimbingan teknis pada plasma dalam melakukan budidaya. Sarana produksi ternak yang dipasok inti berupa pakan, DOC dan obat-obatan (OVK/obat, vaksin dan bahan kimia).



Gambar 12. Rumusan Model Kemitraan Usaha Ternak Unggas

- Rumusan Model kemitraan pada komoditi ternak ruminansia diindikasikan bahwa kerangka dasar pola kemitraannya terdiri dari inti dan plasma, dimana perusahaan inti bertindak sebagai penyedia sarana produksi sapi bakalan, teknologi dan pakan untuk selanjutnya menampung hasil penggemukan yang dilakukan oleh peternak plasma serta melakukan pengolahan dan pemasaran. Sedangkan plasma berkewajiban memelihara sapi yang digemukan.



Gambar 13. Rumusan Model Kemitraan Usaha Ternak Ruminansia

VIII. TAHAPAN OPRASIONALISASI MASTER PLAN

Pembangunan agribisnis peternakan tidak mungkin dilakukan sekaligus, karena berbagai keterbatasan. Karena itu perlu dilakukan secara bertahap dengan tahapan seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 20. Tahapan Operasional Master Plan

PROGRAM		TAHUN					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Program Pengembangan Usaha Peternakan							
1.	Pengembangan usaha ternak sapi potong	√	√	√			√
2.	Pengembangan usaha ternak itik		√	√	√		
3.	Pengembangan usaha ternak ayam	√	√	√			
4.	Peningkatan produktivitas usaha ternak		√	√	√	√	√
5.	Pemberantasan penyakit ternak	√	√	√	√	√	√
Program Pengembangan Agribisnis Hulu Peternakan							
1.	Pengembangan usaha pembibitan ayam ras			√		√	
2.	Pengembangan usaha pembibitan ayam kampung	√	√	√			√
3.	Pengembangan usaha pembibitan sapi potong		√	√	√		√
4.	Pengembangan usaha pembibitan itik	√		√		√	
5.	Pengembangan usaha pakan ternak mini		√		√		√
6.	Penyediaan obat/vaksin ternak	√	√	√	√	√	√
Program Pengembangan Agribisnis Hilir Peternakan							
1.	Pengembangan pengolahan daging			√	√	√	
2.	Pengembangan pengolahan telur		√		√		√
3.	Pengembangan pengolahan kulit			√	√	√	
4.	Pengembangan jaringan pemasaran hasil ternak.	√	√	√	√	√	√
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan							
1.	Peningkatan kemampuan manajerial peternak	√	√	√		√	√
2.	Peningkatan keterampilan inseminasi bagi inseminator	√	√		√	√	√
3.	Peningkatan keterampilan, keterampilan vaksinasi bagi vaksinator	√	√		√	√	√
4.	Peningkatan kemampuan penyuluh peternakan	√	√	√			
5.	Peningkatan kemampuan promosi dan fasilitator bagi aparat pengelola pengembangan agribisnis peternakan	√	√	√	√	√	√
Program Pengembangan Infrastruktur Agribisnis Peternakan							
1.	Pembangunan pos kesehatan ternak dan inseminasi buatan		√		√		√
2.	Pembangunan pasar ternak		√	√		√	√
3.	Pembangunan rumah potong ternak dan rumah/tempat pemotongan ayam		√		√		√
4.	Pembangunan fasilitas karantina ternak		√		√		√
5.	Pembangunan fasilitas pelabuhan ternak		√		√		√

IX. PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengembangan usaha peternakan, perlu ditingkatkan upaya sinkronisasi dan koordinasi antara pelaku pengembangan usaha peternakan yaitu masyarakat peternak baik di tingkat pusat maupun daerah. Model dasar pengembangan usaha peternakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dapat diorientasikan secara terpadu dengan basis pengembangan kawasan sebagai *cluster* usaha peternakan dengan jenis dan spesifikasi ternak yang spesifik.

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam pengembangan agribisnis peternakan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut :

1. Agar manfaat pengembangan agribisnis berbasis peternakan tersebut dapat dinikmati oleh para petani/peternak di Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan, maka para peternak rakyat perlu didorong dan difasilitasi untuk mengembangkan koperasi agribisnis peternakan. Melalui pengembangan koperasi agribisnis peternakan, para peternak dapat secara bertahap memperluas kegiatan ekonominya ke agribisnis hulu dan hilir peternakan. Dengan demikian, nilai tambah yang justru terbesar pada agribisnis peternakan di luar usahatani/budidaya, dapat dinikmati oleh peternakan rakyat.
2. Uraian di atas menunjukkan bahwa pengembangan agribisnis berbasis peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam secara potensial dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan, sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dari wilayah bagian Utara dan Tengah. Persoalannya adalah bagaimana menarik investasi peternakan ke Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan.
3. Dengan hanya mengandalkan mekanisme pasar, maka investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan peternakan di Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan sulit tercapai. Hal ini antara lain disebabkan karena dalam mekanisme pasar, investasi cenderung mengalir ke wilayah yang sudah mapan seperti Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Utara dan Tengah. Oleh sebab itu, cara yang terbaik untuk menarik investasi ke Nanggroe Aceh Darussalam Selatan adalah mempromosikan peluang-peluang investasi peternakan secara aktif, terutama oleh Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Promosi investasi perlu dilakukan secepat mungkin melalui media massa nasional. Disamping itu, Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu mempertimbangkan pemberian bentuk-bentuk insentif kepada investor yang bersedia menanamkan modalnya di Nanggroe Aceh Darussalam Bagian Selatan. Pemberian insentif ini perlu, mengingat Nanggroe Aceh Darussalam Selatan harus bersaing dengan wilayah lain dalam menarik investor baru.
